



2025

RKPD

**KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2025**

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 28 TAHUN 2024
TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional jo. Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita

- Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025;
 13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
 14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 28 Tahun 2010 tentang Pengembangan Wilayah Jawa Barat Bagian Selatan Tahun 2010-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 28 Seri E);
 15. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026;
 16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 7);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 10);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 3);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 11);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Tasikmalaya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah Kabupaten yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Tasikmalaya untuk periode Tahun 2005-2025.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah

dokumen perencanaan daerah Kabupaten Tasikmalaya untuk periode Tahun 2021-2026.

8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Tasikmalaya untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah periode tahun 2024-2026 bagi Kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2023.
12. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
13. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
14. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
15. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
16. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
17. Sasaran (*target*) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
18. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
19. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan kegiatan dalam satu program.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana

keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

21. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun,
22. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah.

BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

Pasal 2

- (1) RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 dengan memperhatikan RPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026.
- (2) Jangka waktu pelaksanaan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Pasal 3

- (1) RKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I Pendahuluan
 - b. BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah
 - c. BAB III Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah
 - d. BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah
 - e. BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah
 - f. BAB VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
 - g. BAB VII Penutup
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan:

- a. Pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025.

- b. Pedoman penyusunan rancangan KUA serta rancangan PPAS Tahun Anggaran 2025.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 3 Juli 2024

BUPATI TASIKMALAYA,


ADE SUGIANTO

Diundangkan di Singaparna
Pada tanggal 3 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,


MOHAMAD ZEN

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2024 NOMOR 28

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas perkenan-Nya Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya dapat merampungkan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025.

Dokumen RKPD Tahun 2025 ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026, RPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Dengan demikian, pada penyusunan dokumen RKPD Tahun 2025 ini telah dilakukan penyesuaian sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta program perangkat daerah dengan sasaran, arah kebijakan, program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah sesuai yang tercantum dalam RPJMD. Selain itu, penyesuaian dilakukan juga dengan tema, agenda pembangunan dan sasaran pengembangan wilayah yang tertuang dalam RKP serta program strategis nasional lainnya.

Dalam proses penyusunannya, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Perangkat Daerah dan para pemangku kepentingan lainnya. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen RKPD ini. Semoga Allah SWT selalu meridhoi dan melindungi kita dalam membangun Kabupaten Tasikmalaya yang kita cintai bersama.

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

BUPATI TASIKMALAYA

H. ADE SUGIANTO

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel.....	iv
Daftar Gambar.....	x
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1.Latar Belakang	I-1
1.2.Dasar Hukum Penyusunan	I-4
1.3.Hubungan Antar Dokumen	I-9
1.4.Maksud dan Tujuan	I-11
1.5.Sistematika Dokumen RKPD	I-11
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II-1
2.1.Kondisi Umum Daerah	II-1
2.1.1. Aspek Geografis dan Demografi.....	II-1
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	II-49
2.1.3. Aspek Pelayanan Umum.....	II-78
2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah	II-115
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD	II-121
2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah.....	II-169
2.3.1. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah.....	II-169
2.4.Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	II-199
2.5.Capaian Inovasi Daerah	II-205
BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH	III-1
3.1.Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	III-1
3.1.1. Kondisi Pembangunan Ekonomi	III-2
3.1.2. Tantangan dan Prospek Pembangunan.....	III-17
3.2.Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III-23
3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	III-24
3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah.....	III-30
3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah.....	III-34
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	IV-1
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025	IV-2
4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025	IV-16
4.3. Sinkronisasi dan Keterkaitan Antara Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya dengan Prioritas Provinsi	

Jawa Barat dan Prioritas Nasional Tahun 2025 IV-130

4.4 Rencana Inovasi Daerah Tahun 2025..... IV-243

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH..... V-1

5.1. Rencana Program Prioritas Daerah..... V-1

5.2. Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah..... V-11

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH..... VI-1

BAB VII PENUTUP VII-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Wilayah Administrasi Kabupaten Tasikmalaya	II-3
Tabel 2.2	Sebaran Ketinggian Per Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya	II-4
Tabel 2.3	Daerah Aliran Sungai (DAS) di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya	II-10
Tabel 2.4	Nama Situ, Lokasi dan Luas Situ di Kabupaten Tasikmalaya	II-11
Tabel 2.5	Curah Hujan Per Kecamatan	II-13
Tabel 2.6	Tata Guna Lahan di Kabupaten Tasikmalaya	II-16
Tabel 2.7	Potensi Bencana di Kabupaten Tasikmalaya.....	II-22
Tabel 2.8	Resiko Bencana Banjir per Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya	II-22
Tabel 2.9	Luas Bahaya dan Kelas Bahaya Banjir Bandang per Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya.....	II-24
Tabel 2.10	Potensi Bahaya Cuaca Ekstrim Per Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya	II-25
Tabel 2.11	Potensi Bahaya Gelombang Ekstrim dan Abrasi Per Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya	II-26
Tabel 2.12	Potensi Bahaya Gempa Bumi Per Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya	II-26
Tabel 2.13	Potensi Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan Per Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya	II-28
Tabel 2.14	Potensi Bahaya Kekeringan Per Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya	II-29
Tabel 2.15	Potensi Bahaya Letusan Gunungapi Galunggung per Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya	II-30
Tabel 2.16	Potensi Bahaya Tanah Longsor Per Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya	II-31
Tabel 2.17	Potensi Bahaya Tsunami Per Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya	II-34
Tabel 2.18	Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2023.....	II-37
Tabel 2.19	Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023	II-38
Tabel 2.20	Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Per Kecamatan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023	II-42

Tabel 2.21	Jumlah Penduduk Menurut Pelayanan Dasar Kesehatan Per Kecamatan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023	II-45
Tabel 2.22	Target dan Capaian Indikator Makro Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022-2024.....	II-50
Tabel 2.23	Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Kabupaten/Kota Sekitar, dan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2023.....	II-52
Tabel 2.24	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah), 2019-2023 Kabupaten Tasikmalaya	II-55
Tabel 2.25	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah), 2019 – 2023 Kabupaten Tasikmalaya	II-57
Tabel 2.26	Perbandingan Tingkat Kemiskinan Nasional, Kabupaten/Kota Sekitar, dan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2023	II-64
Tabel 2.27	Perbandingan IPM Nasional, Kabupaten/Kota Sekitar, dan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2023	II-67
Tabel 2.28	Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional, Kabupaten/Kota Sekitar, dan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2023.....	II-74
Tabel 2.29	Perkembangan Urusan Seni Budaya Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 – 2023	II-75
Tabel 2.30	Tingkat Prestasi Olahraga Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 – 2023	II-78
Tabel 2.31	Capaian Indikator Kinerja Urusan Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 – 2023.....	II-78
Tabel 2.32	Capaian Indikator Kinerja Urusan Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2023	II-80
Tabel 2.33	Capaian Indikator Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 – 2023.....	II-83
Tabel 2.34	Capaian Indikator Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2023.....	II-84
Tabel 2.35	Capaian Indikator Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2023.....	II-84

Tabel 2.36	Capaian Indikator Kinerja Urusan Sosial Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2023.....	II-86
Tabel 2.37	Capaian Indikator Kinerja Urusan Tenaga Kerja Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2023	II-87
Tabel 2.38	Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2023.....	II-88
Tabel 2.39	Capaian Indikator Kinerja Urusan Pangan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2023	II-89
Tabel 2.40	Capaian Indikator Kinerja Urusan Pertanahan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2023	II-90
Tabel 2.41	Capaian Indikator Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2023	II-91
Tabel 2.42	Capaian Indikator Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2023.....	II-92
Tabel 2.43	Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2023.....	II-93
Tabel 2.44	Capaian Indikator Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2023.....	II-94
Tabel 2.45	Capaian Indikator Kinerja Urusan Perhubungan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2023	II-95
Tabel 2.46	Capaian Indikator Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2023	II-96
Tabel 2.47	Capaian Indikator Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2023	II-96
Tabel 2.48	Capaian Indikator Kinerja Urusan Penanaman Modal Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2023	II-97
Tabel 2.49	Capaian Indikator Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2023	II-98
Tabel 2.50	Capaian Indikator Kinerja Urusan Statistik Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2023	II-99
Tabel 2.51	Capaian Indikator Kinerja Urusan Persandian Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2023	II-100
Tabel 2.52	Capaian Indikator Kinerja Urusan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2023	II-100

Tabel 2.53	Capaian Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2023	II-101
Tabel 2.54	Capaian Indikator Kinerja Urusan Kearsipan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2023	II-102
Tabel 2.55	Capaian Indikator Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2023	II-103
Tabel 2.56	Capaian Indikator Kinerja Urusan Pariwisata Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2023	II-104
Tabel 2.57	Capaian Indikator Kinerja Urusan Pertanian Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2023	II-105
Tabel 2.58	Capaian Indikator Kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2023	II-106
Tabel 2.59	Capaian Indikator Kinerja Urusan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2023	II-106
Tabel 2.60	Capaian Indikator Kinerja Urusan Perindustrian Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2023	II-107
Tabel 2.61	Capaian Indikator Kinerja Urusan Transmigrasi Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2023	II-108
Tabel 2.62	Capaian Indikator Kinerja Urusan Kesekretariatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2023	II-109
Tabel 2.63	Capaian Indikator Kinerja Urusan Kesekretariatan DPRD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2023	II-110
Tabel 2.64	Capaian Indikator Kinerja Urusan Perencanaan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2023	II-111
Tabel 2.65	Capaian Indikator Kinerja Urusan Keuangan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2023	II-111
Tabel 2.66	Capaian Indikator Kinerja Urusan Kepegawaian Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2023	II-113
Tabel 2.67	Capaian Indikator Kinerja Urusan Urusan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2023..	II-114
Tabel 2.68	Capaian Indikator Kinerja Urusan Pengawasan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2023	II-115
Tabel 2.69	Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas (rupiah) di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022-2023.....	II-116
Tabel 2.70	Persentase Kontribusi Lapangan Usaha PDRB ADHK Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2023	II-117

Tabel 2.71	Prasarana Wilayah/Infrastruktur Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2023.....	II-118
Tabel 2.72	Ketersediaan Penginapan, Hotel dan Restoran di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023	II-119
Tabel 2.73	Hasil Kinerja Penanaman Modal (Investasi) di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2023	II-119
Tabel 2.74	Rasio Ketergantungan Kabupaten Tasikmalaya	II-120
Tabel 2.75	Perbandingan Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023.....	II-124
Tabel 2.76	Realisasi Keuangan dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023.....	II-136
Tabel 2.77	Skala Nilai Peringkat Kinerja	II-142
Tabel 2.78	Realisasi Keuangan dan Capain Kinerja Sesuai Urusan Tahun 2023.....	II-144
Tabel 2.79	Perbandingan Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024	II-147
Tabel 2.80	Realisasi Keuangan dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan I Tahun Anggaran 2024	II-150
Tabel 2.81	Realisasi Keuangan dan Capaian Kinerja Kecamatan Triwulan I Tahun Anggaran 2024	II-153
Tabel 2.82	Capaian Sasaran RPJMD Kabupaten Tasikmlaya Tahun 2021-2023 dan Target Kinerja Tahun 2024	II-157
Tabel 2.83	8 Aksi Pelaksanaan Intervensi Penurunan Stunting Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023	II-165
Tabel 2.84	Permasalahan dan Isu Strategis Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025.....	II-196
Tabel 2.85	Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023	II-199
Tabel 2.86	Perbandingan Skor Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023 dengan Kabupaten/Kota lain di Provinsi Jawa Barat.....	II-207
Tabel 3.1	Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2023-2025 (%YoY).....	III-3
Tabel 3.2	Laju PDRB Jawa Barat Berdasarkan Kabupaten Kota (ADHK) Tahun 2020-2023.....	III-8
Tabel 3.3	Target dan Capaian Indikator Makro Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022-2025.....	III-9
Tabel 3.4	PDRB Kabupaten Tasikmalaya 2018– 2023 (Milyar Rupiah)	III-10

Tabel 3.5	Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Tasikmalaya (ADHB %) Berdasarkan Lapangan Usaha 2013-2023.....	III-12
Tabel 3.6	Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026	III-26
Tabel 3.7	Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah kabupaten Tasikmalaya tahun 2021-2026	III-34
Tabel 3.8	Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 - 2026	III-36
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025	IV-14
Tabel 4.2	Perumusan Isu Strategis Kabupten tasikmalaya Tahun 2025	IV-25
Tabel 4.3	Strategi dan arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025	IV-46
Tabel 4.4	Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Permasalahan Pembangunan, Isu Strategis dan Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2021-2026.....	IV-61
Tabel 4.5	Keterkaitan Pokok-Pokok Pikiran DPRD dengan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025	IV-71
Tabel 4.6	Program Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah, Program Prioritas, Pagu Anggaran dan Perangkat Daerah Penanggungjawab.....	IV-76
Tabel 4.7	Program Dukungan terhadap Pencapaian SDG's Tahun 2025.....	IV-114
Tabel 4.8	Program Dukungan terhadap Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2025	IV-127
Tabel 4.9	Keterkaitan Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2025 dengan Indikator Sasaran Prioritas Nasional pada RKPD Tahun 2025.....	IV-131
Tabel 4.10	Keterkaitan Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2025 dengan Indikator Sasaran Prioritas Nasional pada RKPD Tahun 2025.....	IV-139
Tabel 4.11	Dukungan Program Prioritas Daerah terhadap Prioritas Nasional Tahun 2025.....	IV-144
Tabel 4.12	Rencana Inovasi Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025.....	IV-244
Tabel 5.1	Rekapitulasi Program Prioritas Pembangunan Daerah beserta Sasaran Pembangunan dan Pagu Indikatif	V-11
Tabel 5.2	Rancangan Akhir Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	

Tahun 2025..... V-11

Tabel 6.1 Proyeksi Indikator Makro Kabupaten Tasikmalaya Tahun
2023-2025..... VI-2

Tabel 6.2 Target Indikator Kinerja Utama Kabupaten tasikmalaya Tahun
2025..... VI-4

Tabel 6.3 Target Indikator Kinerja Daerah terhadap Kinerja
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Tingkat dampak/Impact
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022-2025 VI-5

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Sistematika Gambaran Umum Daerah	II-1
Gambar 2.2	Peta Kabupaten Tasikmalaya	II-2
Gambar 2.3	Proporsi Kondisi Kemiringan Lahan Kabupaten Tasikmalaya	II-5
Gambar 2.4	Kondisi Kemiringan Lahan Kabupaten Tasikmalaya.....	II-6
Gambar 2.5	Peta Sebaran Ketinggian Kabupaten Tasikmalaya	II-7
Gambar 2.6	Peta Curah Hujan Kabupaten Tasikmalaya	II-15
Gambar 2.7	Kerangka Pemikiran Potensi Pengembangan Kawasan/ Wilayah	II-18
Gambar 2.8	Peta Sebaran Bencana Banjir Kabupaten Tasikmalaya.....	II-23
Gambar 2.9	Peta Sebaran Bencana Letusan Gunung Api Galunggung	II-31
Gambar 2.10	Peta Sebaran Bencana Longsor Kabupaten Tasikmalaya..	II-33
Gambar 2.11	Peta Sebaran Bencana Tsunami Kabupaten Tasikmalaya	II-34
Gambar 2.12	Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2023	II-36
Gambar 2.13	Piramida Penduduk Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023	II-37
Gambar 2.14	Rata-Rata Kepadatan Penduduk Per Km2 Menurut Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023.....	II-40
Gambar 2.15	<i>Sex Ratio</i> Menurut Kecamatan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023.....	II-41
Gambar 2.16	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2023.....	II-51
Gambar 2.17	Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2019-2023.....	II-52
Gambar 2.18	Inflasi Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2023	II-60
Gambar 2.19	Indeks Gini Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2023 ...	II-61
Gambar 2.20	Perbandingan Gini Ratio Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2019-2023	II-61
Gambar 2.21	Garis Kemiskinan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2023.....	II-62
Gambar 2.22	Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2023	II-63
Gambar 2.23	Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2019-2023	II-63
Gambar 2.24	Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Keparahan Kemiskinan	

	Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2023	II-65
Gambar 2.25	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2023	II-66
Gambar 2.26	Perbandingan IPM Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2019-2023.....	II-67
Gambar 2.27	Angka Harapan Hidup Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2023.....	II-68
Gambar 2.28	Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2023	II-69
Gambar 2.29	Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2023.....	II-70
Gambar 2.30	Pengeluaran per Kapita Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2023.....	II-71
Gambar 2.31	Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2023.....	II-73
Gambar 2.32	Perbandingan TPT Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2019-2023.....	II-73
Gambar 2.33	Grafik Perkembangan Seni Budaya Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019– 2023	II-76
Gambar 2.34	Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Tasikmalaya.....	II-116
Gambar 2.35	Perbandingan Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2023.....	II-133
Gambar 2.36	Perbandingan Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perubahan Tahun Anggaran 2023.....	II-133
Gambar 2.37	Realisasi Keuangan dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023.....	II-140
Gambar 2.38	Realisasi Keuangan dan Capaian Kinerja Kecamatan Tahun 2023.....	II-141
Gambar 2.39	Perbandingan Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024.....	II-149
Gambar 2.40	Perbandingan Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Tahun Anggaran 2024	II-149
Gambar 2.41	Realisasi Keuangan dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2024	II-152
Gambar 2.42	Realisasi Keuangan Kecamatan Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2024.....	II-155
Gambar 3.1	Pangsa Perekonomian Provinsi di Jawa Barat terhadap	

	Nasional Tahun 2023	III-5
Gambar 3.2	Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Jawa Barat Berdasarkan Permintaan (% yoy).....	III-7
Gambar 3.3	Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Jawa Barat Berdasarkan Permintaan (% yoy).....	III-8
Gambar 3.4	Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi Kab. Tasikmalaya Tahun 2015-2023.....	III-11
Gambar 3.5	Inflasi Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2018-2023	III-13
Gambar 3.6	Garis Kemiskinan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2023.....	III-14
Gambar 3.7	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Tasikmalaya 2019-2023	III-15
Gambar 3.8	Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Tasikmalaya 2019-2023	III-16
Gambar 3.9	Gini Ratio Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2023	III-17
Gambar 3.10	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tasikmalaya 2015-2020 dan Prospek Ekonomi kabupaten Tasikmalaya 2022-2023	III-21
Gambar 4.1	Kerangka Pikir Perumusan Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025	IV-2
Gambar 4.2	Target Sasaran Visi Indonesia Emas Menuju 2045.....	IV-3
Gambar 4.3	Upaya Transformatif Super Prioritas (Game Changers).....	IV-4
Gambar 4.4	Prioritas Nasional Tahun 2025	IV-6
Gambar 4.5	Tantangan Multi Dimensi RKP 2025.....	IV-6
Gambar 4.6	Fokus Dalam Prioritas Daerah “Peningkatan Pelayanan Pendidikan”	IV-56
Gambar 4.7	Fokus Dalam Prioritas Daerah “Peningkatan Pelayanan Kesehatan daerah seat Penurunan Angka Prevalensi Stunting”	IV-56
Gambar 4.8	Fokus Dalam Prioritas Daerah “Pembangunan Infrastruktur untuk Peningkatan Konektivitas Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi”	IV-57
Gambar 4.9	Fokus Dalam Prioritas Daerah “Mitigasi dan Penanggulangan Bencana”	IV-57
Gambar 4.10	Fokus Dalam Prioritas Daerah “ Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem”	IV-58
Gambar 4.11	Fokus Dalam Prioritas Daerah “ Peningkatan Infrastruktur	

dan Daya Saing Produk Pertanian dan Perikanan untuk
menunjang Pangan” IV-58

Gambar 4.12 Fokus Dalam Prioritas Daerah “Peningkatan Ekonomi
Masyarakat melalui Pengembangan Sektor Unggulan
Periwisata, Ekonomi Kreatif, Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan usaha Mikro” IV-59

Gambar 4.13 Fokus Dalam Prioritas Daerah “Inovasi Pelayanan Publik” IV-59

Gambar 4.14 Fokus Dalam Prioritas Daerah “Peningkatan Kemandirian
Desa “ IV-60

PENDAHULUAN

BAB

1

TAHAPAN PENYUSUNAN RKPD KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2025



Persiapan Penyusunan RKPD
Desember 2023



Penyusunan Rancangan Awal RKPD
Januari 2024



Penyusunan Rancangan RKPD
Februari - Maret 2024



Penyusunan Rancangan Akhir RKPD
April - Juni 2024



Penetapan RKPD 2025
Juli 2024



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 yang selanjutnya disebut RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026. Penyusunan Dokumen RKPD Tahun 2025 mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perencanaan pembangunan sebagaimana tertuang dalam dokumen rencana pembangunan daerah agar terlaksana dengan baik, sinergis dan terarah diperlukan perencanaan yang matang dan memperhatikan aspek kontinuitas, kompleksitas, dan keterpaduan guna mendukung pencapaian laju perkembangan dalam mencapai masyarakat adil, sejahtera dan makmur. Perencanaan dilakukan guna merumuskan program dan kegiatan pembangunan yang secara efisien dan efektif dapat memperoleh hasil yang optimal dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia dan potensi yang ada.

RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi target dan capaian kinerja pembangunan tahun 2023, serta dinamika lingkungan global diantaranya sektor kesehatan, sosial, dan ekonomi masyarakat. RKPD

Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 juga diselaraskan dengan RPJMN Tahun 2025-2029, RKP Tahun 2025, RPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 dan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025, kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaanya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penetapan program prioritas berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkesinambungan dan berkelanjutan yang diarahkan guna mendukung pencapaian Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs) serta pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang sudah ditetapkan.

Penyusunan RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 menggunakan empat pendekatan yaitu teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas. (1) Pendekatan teknokratik dalam penyusunan RKPD dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. (2) Pendekatan partisipatif dilakukan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. (3) Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. Sedangkan (4) pendekatan atas-bawah dan (5) bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga nasional.

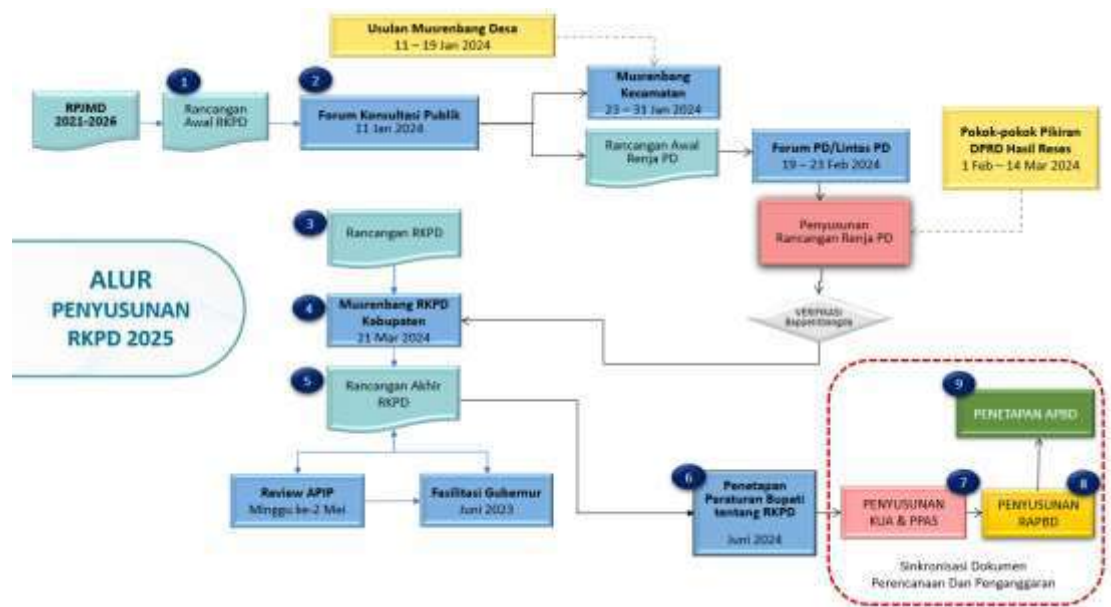
Selain itu, perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi, menggunakan pendekatan holistik-tematik, integratif dan spasial. (1) Pendekatan holistik-tematik dilaksanakan dengan mempertimbangkan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. (2) Pendekatan integratif dilakukan dengan menyatukan beberapa

kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah. Sedangkan (3) pendekatan spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan. Hal tersebut dilakukan untuk menjamin sinergitas perencanaan.

Sebagai salah satu dokumen resmi rencana daerah, RKPD mempunyai kedudukan strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu RKPD harus disusun secara sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan. Secara umum, tahapan dan proses penyusunan RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan RKPD antara lain pembentukan tim penyusun RKPD, penyusunan agenda kerja dan penyiapan data serta informasi;
2. Penyusunan Rancangan Awal RKPD antara lain pengolahan data dan informasi, analisis gambaran umum kondisi daerah, analisis kondisi perekonomian dan keuangan daerah, evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2023, telaah kebijakan pemerintah pusat dan provinsi, telaah pokok-pokok pikiran DPRD, perumusan permasalahan pembangunan daerah, perumusan rancangan kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan daerah, perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta pagu indikatif, perumusan program prioritas dan pagu indikatif, penyajian dan sosialisasi Rancangan RKPD;
3. Penyusunan Rancangan RKPD sebagai bahan Forum Perangkat Daerah dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD;
4. Pelaksanaan Musrenbang RKPD yang didahului kegiatan Forum Konsultasi Publik dan Forum Perangkat Daerah;
5. Perumusan RKPD berdasarkan hasil Musrenbang RKPD; dan
6. Penetapan RKPD dengan Peraturan Bupati.

Proses penyusunan RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 dapat dilihat sebagaimana tertera pada gambar berikut:



Gambar 1.1.

Proses Penyusunan RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025

Sumber: Bappelitbangda Kab. Tasikmalaya, 2024

RKPD Tahun 2025 menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari tiap Perangkat Daerah. Program dan kegiatan pada RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 menjadi acuan dalam penyusunan KUA-PPAS APBD dan selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten (RKPD) Tasikmalaya Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Nomor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023/No.41, Tambahan Lembar Negara Nomor 6856);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

16. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 215);
18. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
19. Intruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahunn 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 288);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan

- Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor ... Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
 28. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025;
 29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
 31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);
 32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 33. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026;

34. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor ... Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2025;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2025;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 10);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
40. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026;
41. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tasikmalaya 2024-2044.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

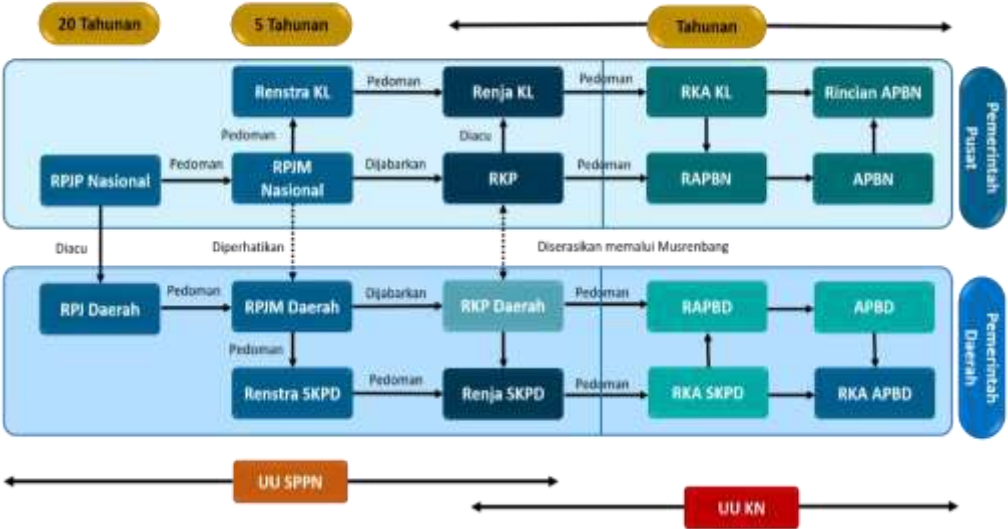
Secara umum, keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan negara telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, posisi dokumen RKPD sebagai

dokumen perencanaan pembangunan tahunan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 merupakan penjabaran RPJMD yang berpedoman pada RPJP Daerah. RKPD tersebut menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah, di mana Renja Perangkat Daerah akan menjadi bahan masukan dalam finalisasi RKPD. Dalam hubungannya dengan RKP, RKPD diselaraskan dengan RKP melalui forum Musrenbang Nasional.

Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada arah kebijakan pembangunan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2025, RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 serta RPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 147 ayat (2) dan (3). Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2025.

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 diperlukan untuk menjamin terjadinya keselarasan, keterkaitan dan konsistensi dalam sistem pembangunan daerah antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Selanjutnya dokumen RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen KUA dan PPAS Tahun 2025. Dokumen KUA dan PPAS tersebut merupakan dasar untuk penyusunan RKA Perangkat Daerah tahun 2025 serta dasar penyusunan RAPBD Kabupaten Tasikmalaya tahun 2025. Dengan demikian, dokumen RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 menjadi bagian penting dan tidak terpisahkan dengan dokumen lainnya dan menjadi bagian dalam proses penyusunan APBD Tahun 2025 sebagaimana gambar berikut.



Gambar 1.2.
Hubungan Antar Dokumen Perencanaan
Sumber: Bappenas, data diolah 2024

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 adalah sebagai pedoman perencanaan dan penganggaran Tahun 2025 yang merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026, dengan tujuan:

- 2. Mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Tasikmalaya;
- 3. Menetapkan prioritas pembangunan, strategi dan arah kebijakan, serta program dan kegiatan Tahun 2025;
- 4. Mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi pembangunan, baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar tingkat pemerintahan;
- 5. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha, perguruan tinggi dan komunitas, dan
- 6. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

6.1. Sistematika Dokumen RKPD

Dokumen RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 disusun dengan sistematika sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian

dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat gambaran umum penyusunan dokumen RKPD.

1.1. Latar Belakang

Berisikan tentang pengertian ringkas mengenai RKPD dan proses penyusunan RKPD.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Berisikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 mulai dari Undang-undang sampai ke peraturan perundang-undangan terbawah.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Berisikan tentang hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain diantaranya dengan dokumen RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota, RKP/program strategis nasional, dan RKPD Provinsi.

1.4. Maksud dan Tujuan

Berisikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RKPD dan sasaran penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Berisikan tentang sistematika penyusunan dokumen RKPD yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini memuat evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu yaitu menguraikan hasil evaluasi RKPD tahun 2023, selain itu juga

memperhatikan dokumen RPJMD Kabupaten Tasikmalaya tahun 2021-2026 dan dokumen RKPD tahun 2024 sebagai bahan acuan.

2.1. Kondisi Umum Daerah

Bagian ini sangat penting untuk menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Sub bab ini memuat beberapa bahasan dibawah ini:

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

Berisi mengenai kondisi umum geografis mengenai kondisi geografi daerah, potensi pengembangan wilayah, dan wilayah rawan bencana.

2.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

2.1.1.2. Letak dan Kondisi Geografis

2.1.1.3. Potensi Pengembangan Wilayah

2.1.1.4. Wilayah Rawan Bencana

2.1.1.5 Kondisi Demografi

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Berisi mengenai kondisi umum kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan.

2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

2.1.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

Berisi mengenai kondisi umum aspek pelayanan umum sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan.

2.1.3.1. Urusan Wajib

2.1.3.2. Urusan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

2.1.3.3. Urusan Pemerintahan Pilihan

2.1.3.4. Urusan Penunjang

2.1.3.5. Urusan Pendukung

2.1.3.6. Unsur Pengawasan

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

Menjelaskan kondisi umum aspek daya saing daerah sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan.

2.1.4.1. Kemampuan Ekonomi Daerah

2.1.4.2. Fasilitas Wilayah dan Infrastruktur

2.1.4.3. Iklim Investasi

2.1.4.4. Sumber Daya Manusia

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Berisi mengenai telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dan realisasi RPJMD.

2.2.1. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2023 dan Triwulan I Tahun 2024

Berisi tentang hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun lalu. Evaluasi meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah, menyangkut realisasi capaian target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja program tahun lalu terhadap RPJMD.

2.2.1.1. Perbandingan Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

2.2.1.2. Realisasi Keuangan Tahun 2023 dan Trwiulan I Tahun 2024

2.2.1.3. Capaian Kinerja Perangkat Daerah dan Capaian Kinerja Sesuai Urusan Tahun Anggaran 2023

2.2.1.4. Realisasi Capaian Target RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022-2023 dan Target Capaian Kinerja Tahun 2025

2.2.1.5. Capaian Penangan Stunting Sampai Tahun 2023

2.2.2. Evaluasi Capaian Target RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026

Berisi tentang hasil realisasi RPJMD yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat daerah tahun lalu dan realisasi Renstra Perangkat Daerah oleh masing-masing Perangkat daerah dan/atau dari laporan pertanggungjawaban APBD menurut tahun-tahun yang berkenaan.

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah.

2.3.1. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

2.3.2. Identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah

Permasalahan pada bagian ini merupakan permasalahan pembangunan yang dibuat tiap urusan yang menyangkut layanan dasar dan tugas/fungsi tiap Perangkat Daerah. Urusan-urusan tersebut diantaranya: Urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan penunjang.

2.3.1.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

2.3.1.2. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

2.3.1.3. Urusan Pilihan

2.3.1.4. Urusan Penunjang

2.3.1.5. Urusan Pendukung

2.4. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Berisi tentang pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Adapun jenis pelayanan dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, meliputi: SPM Bidang Pendidikan, SPM Bidang Kesehatan, SPM Bidang Pekerjaan Umum, SPM Bidang Perumahan Rakyat, SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat, dan SPM Bidang Sosial.

2.5. Capaian Inovasi Daerah

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Pada bab ini memuat penjelasan mengenai kondisi ekonomi pada tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator makro daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Berisikan tentang arah kebijakan ekonomi daerah yang ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi misi Kepala Daerah, serta isu strategis daerah, sebagai dasatr perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025.

3.1.1. Kondisi Pembangunan Ekonomi

Berisikan tentang gambaran kondisi perekonomian yang terjadi di Nasional, Provinsi Jawa Barat maupun Kabupaten Tasikmalaya dari segi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pertumbuhan ekonomi, inflasi, kemiskinan, dan ketimpangan pendapatan.

3.1.2. Tantangan dan Prospek Pembangunan

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berisikan tentang uraian kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya berkaitan dengan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Pada bab ini memuat penjelasan tentang prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2023, keterkaitannya dengan dokumen RPJMD dan RPJPD, serta identifikasi prioritas pembangunan di tingkat daerah dan nasional.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025

Menjelaskan tentang hubungan visi misi dan tujuan/sasaran pembangunan 5 (lima) tahun yang diambil dari dokumen RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026.

4.1.1. Telaahan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025

4.1.2. Telaahan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2025

4.1.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025

Berisikan tentang rumusan prioritas pembangunan daerah Tahun 2025 yang mengacu kepada RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026.

4.2.1. Telaahan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025

4.2.2. Telaahan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2025

4.2.3. Isu Strategis, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya

4.2.3.1. Isu Strategis

4.2.3.2. Strategi dan Arah Kebijakan

- 4.2.4. Prioritas Pembangunan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025
- 4.3. Sinkronisasi dan Keterkaitan Antara Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya dengan Prioritas Provinsi Jawa Barat dan Prioritas Nasional Tahun 2025
- 4.4. Rencana Inovasi Daerah Tahun 2025

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Memuat rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

- 5.1. Rencana Program Prioritas Daerah
- 5.2. Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Memuat Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun indikator Kinerja Daerah (IKD)

BAB VII PENUTUP

Pada bab ini menguraikan tentang hal-hal pokok yang termuat dalam keseluruhan dokumen RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025, sebagai pedoman bagi semua pihak dalam memfungsikan RKPD sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BAB

2

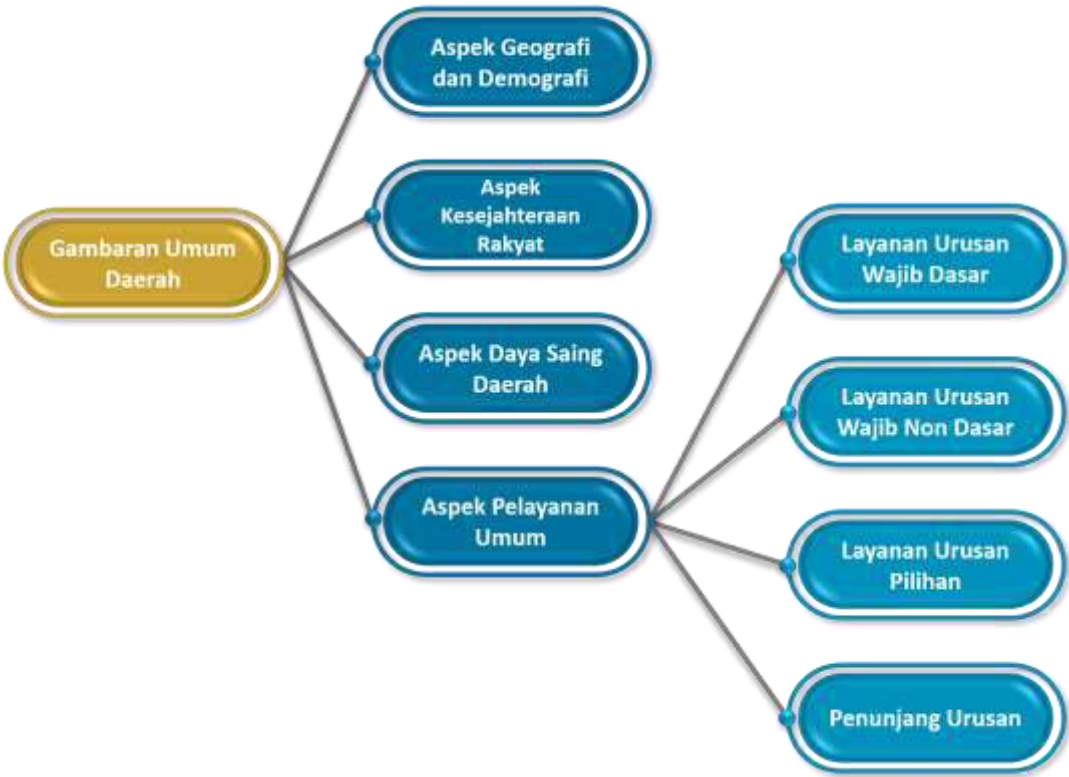


BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Umum Daerah

Analisis gambaran umum kondisi daerah memberikan gambaran sejauh mana keberhasilan pembangunan daerah yang telah dilaksanakan dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor atau berbagai aspek yang perlu ditingkatkan untuk optimalisasi pencapaian keberhasilan pembangunan daerah pada tahun berikutnya.

Kondisi umum daerah Kabupaten Tasikmalaya digambarkan melalui beberapa aspek yaitu aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan rakyat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah. Seluruh aspek tersebut menjadi bahan acuan dalam proses pengambilan kebijakan dan sebagai salah satu dasar analisis dalam perumusan isu strategis di Kabupaten Tasikmalaya.



Gambar 2.1
Sistematika Gambaran Umum Daerah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

2.1.1. Aspek Geografis dan Demografi

Aspek geografis dan aspek demografi merupakan hal yang sangat penting dalam pembangunan suatu daerah karena dalam proses perencanaan pembangunan perlu diketahui terlebih dahulu kondisi

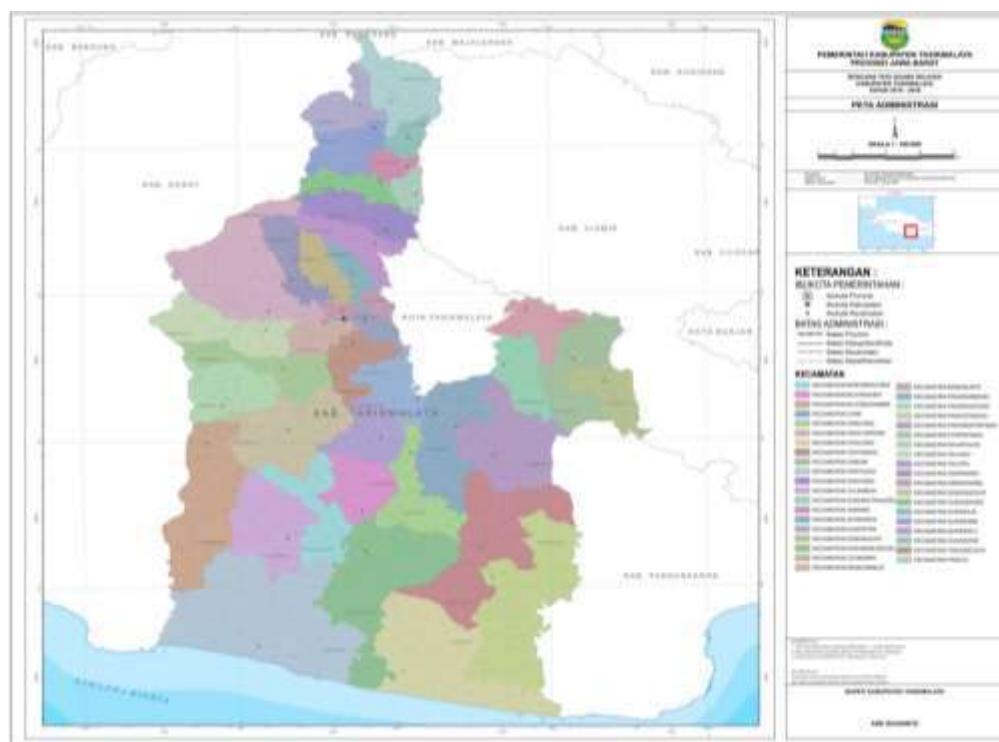
geografi dan demografi wilayah agar tepat tujuan dan tepat sasaran. Analisis pada aspek geografi Kabupaten Tasikmalaya perlu dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah serta kerentanan wilayah terhadap bencana.

2.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Tasikmalaya merupakan bagian dari wilayah bagian Provinsi Jawa Barat yang secara definitif menjadi Daerah Tingkat II berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Majalengka;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Ciamis, Pangandaran;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Garut

Kabupaten Tasikmalaya mempunyai luas 270.677,66 hektar. Gambaran wilayah secara administratif dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:



Gambar 2.2

Peta Kabupaten Tasikmalaya

Sumber : RTRW Kab. Tasikmalaya Tahun 2024-2044

Secara administratif Kabupaten Tasikmalaya terbagi dalam 39 kecamatan dan 351 desa. Luas dan pembagian wilayah administratif Kabupaten Tasikmalaya dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Wilayah Administrasi Kabupaten Tasikmalaya

No	Kecamatan	Luas Wilayah		Jumlah Desa
		Hektar	Presentase	
1	Kecamatan Bantarkalong	6.415,23	2,37	8
2	Kecamatan Bojongasih	5.186,45	1,92	6
3	Kecamatan Bojonggambir	12.682,30	4,69	10
4	Kecamatan Ciawi	4.458,17	1,65	11
5	Kecamatan Cibalong	6.174,26	2,28	6
6	Kecamatan Cigalontang	14.567,21	5,38	16
7	Kecamatan Cikalong	16.086,96	5,94	13
8	Kecamatan Cikatomas	14.221,17	5,25	9
9	Kecamatan Cineam	7.413,41	2,74	10
10	Kecamatan Cipatujah	24.199,04	8,94	15
11	Kecamatan Cisayong	5.032,34	1,86	13
12	Kecamatan Culamega	8.629,00	3,19	5
13	Kecamatan Gunungtanjung	4.777,82	1,77	7
14	Kecamatan Jamanis	1.597,86	0,59	8
15	Kecamatan Jatiwaras	8.906,05	3,29	11
16	Kecamatan Kadipaten	4.305,49	1,59	6
17	Kecamatan Karangjaya	4.597,76	1,70	4
18	Kecamatan Karangnunggal	15.325,97	5,66	14
19	Kecamatan Leuwisari	3.116,95	1,15	7
20	Kecamatan Mangunreja	2.671,81	0,99	6
21	Kecamatan Manonjaya	4.343,59	1,60	12
22	Kecamatan Padakembang	1.955,38	0,72	5
23	Kecamatan Pagerageung	6.430,35	2,38	10
24	Kecamatan Pancatengah	16.211,30	5,99	11
25	Kecamatan Parungponteng	5.049,56	1,87	8
26	Kecamatan Puspahiang	5.765,26	2,13	8
27	Kecamatan Rajapolah	1.634,00	0,60	8
28	Kecamatan Salawu	7.027,39	2,60	12
29	Kecamatan Salopa	10.500,68	3,88	9
30	Kecamatan Sariwangi	3.855,15	1,42	8
31	Kecamatan Singaparna	2.010,71	0,74	10
32	Kecamatan Sodonghilir	10.152,74	3,75	12
33	Kecamatan Sukahening	2.891,34	1,07	7
34	Kecamatan Sukaraja	4.648,20	1,72	8
35	Kecamatan Sukarame	1.617,04	0,60	6
36	Kecamatan Sukaratu	4.272,12	1,58	8
37	Kecamatan Sukaresik	1.736,99	0,64	8
38	Kecamatan Tanjungjaya	3.910,88	1,44	7
39	Kecamatan Taraju	6.298,64	2,33	9
40	Pulau Batukolotok	0,41	0,0002	

No	Kecamatan	Luas Wilayah		Jumlah Desa
		Hektar	Presentase	
41	Pulau Nusamanuk	0,68	0,0003	
Luas Total Wilayah		270.677,66	100,00	351

Sumber : RTRW Kab. Tasikmalaya Tahun 2024-2044

2.1.1.2 Letak dan Kondisi Geografis

Kabupaten Tasikmalaya secara geografis terletak di antara 7°02’29” dan 7°49’08” Lintang Selatan serta 107°54’10” dan 108°25’42” Bujur Timur. Setelah pemekaran dengan Kota Tasikmalaya, luas tanah Kabupaten Tasikmalaya setelah pemekaran dengan Kota Tasikmalaya adalah sebesar 270.130,26 hektar. Kecamatan Cipatujah memiliki luas lahan paling besar yaitu 24.244,21 hektar, sedangkan kecamatan dengan luas lahan paling kecil ialah Kecamatan Jamanis yaitu 1.600,47 hektar.

a. Kondisi Topografi dan Kemiringan Lereng

Wilayah Kabupaten Tasikmalaya memiliki ketinggian berkisar antara 0 – 2.500 meter di atas permukaan laut (dpl). Secara umum wilayah tersebut dapat dibedakan menurut ketinggiannya, yaitu: bagian Utara merupakan wilayah dataran tinggi dengan ketinggian berkisar antara 1.000–2.500 meter dpl dan bagian Selatan merupakan wilayah dataran rendah dengan ketinggian berkisar antara 0 – 100 meter dpl.

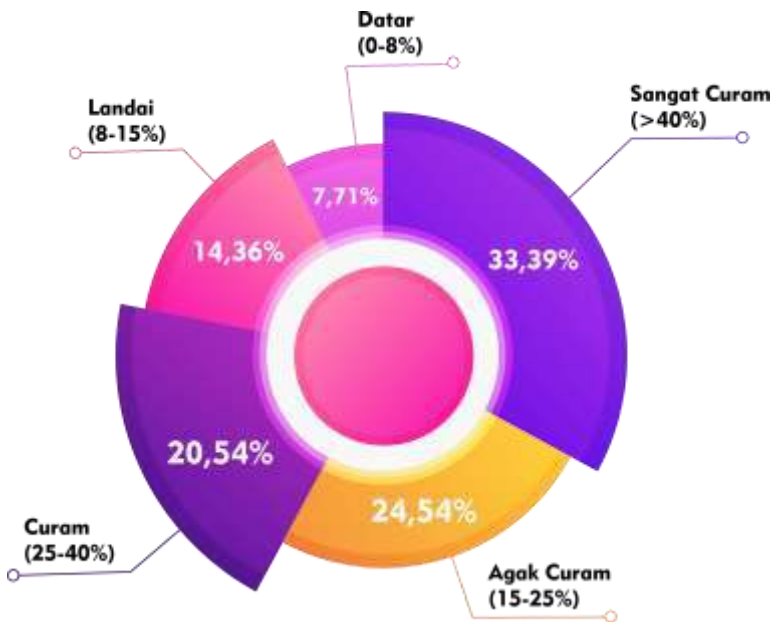
Tabel 2.2
Sebaran Ketinggian Per Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya

No.	Ketinggian (m dpl)	Sebaran (Kecamatan)
1	0 - 500	Bantarkalong, Bojongasih, Bojonggambir, Ciawi, Cibalong, Cigalontang, Cikalong, Cikatomas, Cineam, Cipatujah, Cisayong, Culamega, Gunungtanjung, Jamanis, Jatiwaras. Kadipaten, Karangjaya, Karangnunggal, Leuwisari, Mangunreja, Manonjaya, Padakembang, Pagerageung, Parungpoteng, Pancatengah, Puspahiang, Rajapolah, Salawu, Salopa, Sariwangi, Singaparna, Sodonghilir, Sukahening, Sukaraja, Sukarame, Sukaratu, Sukaresik, Tanjungjaya, dan Taraju.

No.	Ketinggian (m dpl)	Sebaran (Kecamatan)
2	500 – 1.000	Bantarkalong, Bojongasih, Bojonggambir, Ciawi, Cibalong, Cigalontang, Cineam, Cipatujah, Cisayong, Culamega, Gunungtanjung, Jamanis, Jatiwaras, Kadipaten, Karangjaya, Leuwisari, Mangunreja, Padakembang, Pagerageung, Parungpoteng, Puspahiang, Rajapolah, Salawu, Salopa, Sariwangi, Sodonghilir, Sukahening, Sukaraja, Sukaratu, Sukaresik, Tanjungjaya, dan Taraju.
3	1.000 – .500	Ciawi, Cigalontang, Cineam, Cisayong, Kadipaten, Leuwisari, Pagerageung, Puspahiang, Salawu, Salopa, Sariwangi, Sukahening, Sukaratu, dan Taraju.
4	1.500 – 2.000	Ciawi, Cigalontang, Cisayong, Kadipaten, Leuwisari, Pagerageung, Sariwangi, Sukahening, dan Sukaratu.
5	2.000 -2.500	Cigalontang, Cisayong, Sariwangi, Sukahening, dan Sukaratu.

Sumber: RTRW Kab. Tasikmalaya Tahun 2024-2044

Bentang alam berdasarkan kemiringan lahan Kabupaten Tasikmalaya didominasi oleh bentuk permukaan bumi agak curam sampai dengan curam yaitu sebesar 78,47% kondisi kemiringan lahan tersebut kurang menguntungkan untuk pengembangan prasarana dan sarana wilayah. Sedangkan kemiringan lahan yang sangat menunjang untuk pengembangan permukiman perkotaan hanya sebesar 21,53% dari total luas kabupaten, luasan tersebut umumnya terdistribusi di sekitar kota-kota kecamatan.

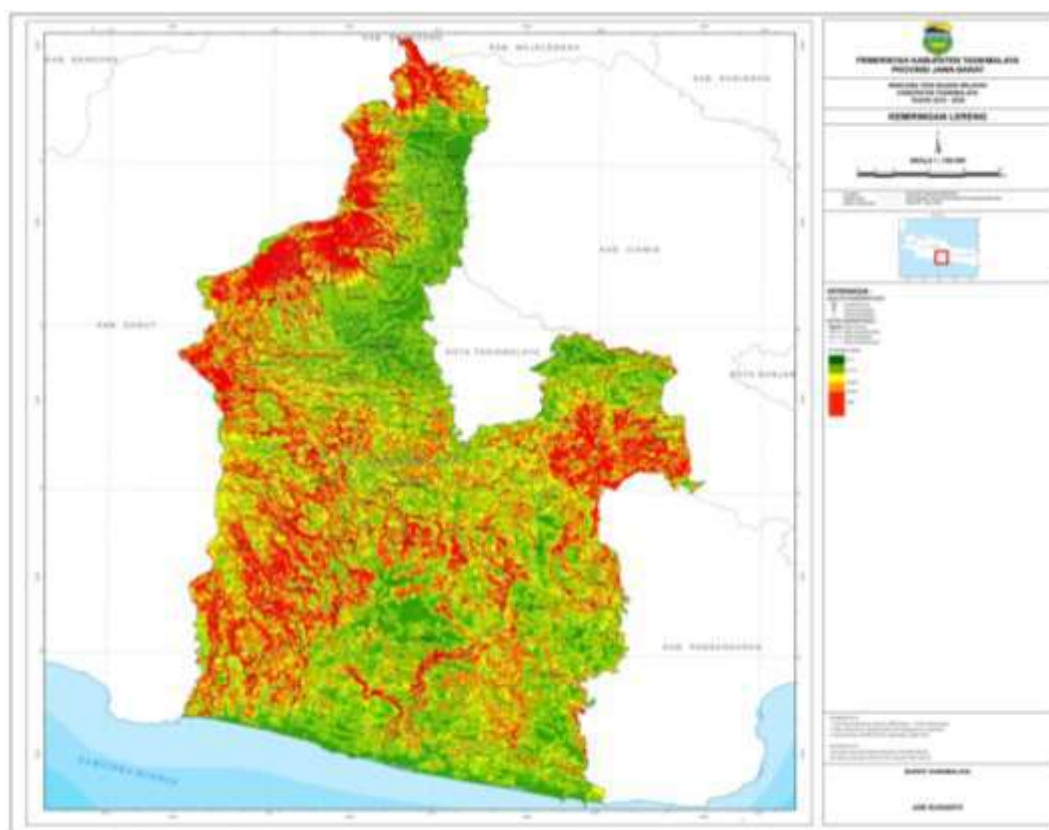


Gambar 2.3
Proporsi Kondisi Kemiringan Lahan Kabupaten Tasikmalaya
Sumber: RTRW Kab. Tasikmalaya Tahun 2024-2044

Kemiringan di Kabupaten Tasikmalaya dominan pada ketinggian landai antara 0-2 % dengan luas wilayah 89.049,241 ha tersebar di Kecamatan Bantarkalong, Bojongasih, Bojonggambir, Ciawi, Cibalong, Cigalontang, Cikalong, Cikatomas, Cineam, Cipatujah, Cisayong, Culamega, Gunungtanjung, Jamanis, Kadipaten, Karangjaya, Karangnunggal, Leuwsari, Mangunreja, Manonjaya, Padakembang, Pagerageung, Pancatengah, Parungponteng, Puspahiang, Rajapolah, Salawu, Salopa, Sariwangi, Singgaparna, Sodonghilir, Sukahening, Sukaraja, Sukarame, Sukaratu, Sukaresik, Tanjungjaya, dan Taraju, untuk ketinggian > 40% dengan luas wilayah 3.766,328 Ha.



Gambar 2.4
Kondisi Kemiringan Lahan Kabupaten Tasikmalaya
Sumber: RTRW Kab. Tasikmalaya Tahun 2024-2044



Gambar 2.5
Peta Sebaran Ketinggian Kabupaten Tasikmalaya
Sumber: RTRW Kab. Tasikmalaya Tahun 2024-2044

Berdasarkan peta kemiringan lereng, diketahui fisiografi dan bentuk wilayah Kabupaten Tasikmalaya terdiri atas grup Marin (M), Fluvio Marin (B), Aluvial (A), Sistem Dataran (*Plain system*), Sistem Perbukitan (*Hilly System*), dan Sistem Vulkanik (*Volcanik System*). Sebagian besar daerah terdiri dari fisiografi Vulkanik. Bentuk wilayah sebagian besar bergelombang sampai berbukit, kecuali di kecamatan-kecamatan bagian utara, berbukit sampai bergunung.

b. Geologi

Kondisi geologi di wilayah Kabupaten Tasikmalaya dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu :

1. Geologi Landscape Depresi

Daerah ini terisi oleh material-material vulkanis akibat munculnya vulkanis Gunung Galunggung, Gunung Sawal dan Galunggung Cakrabuana.

2. Geologi Landscape Pegunungan Lipatan dan Patahan

Batuan di daerah ini berbeda-beda, baik dari jenis maupun sifatnya dan dapat di bedakan ke dalam dua golongan, yaitu:

- a. Golongan pertama : Batuan Kapur
- b. Golongan kedua : Batuan Pasir Laut

3. Geologi Landscape dataran Pantai Selatan

Material ini terdiri dari batuan pasir liat, batuan kapur dan sedimen pasir pantai yang kadang-kadang dalam bentuk rawa pantai.

Berdasarkan kondisi geomorfologinya, wilayah Kabupaten Tasikmalaya dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) satuan, yaitu:

1. Satuan Vulkanik Berelief Tinggi

Sebagian besar batumannya terbentuk dari hasil erupsi vulkanik dan berpola aliran radier. Hampir seluruh anak sungai dari satuan ini ditampung oleh aliran Sungai Ciwulan. Satuan ini membentang seperti tapak kuda yang melingkar dan terbuka ke arah Selatan.

2. Satuan Perbukitan Sedimen

Satuan ini tersebar berelief tinggi dan sedang dengan batuan yang berupa sedimen klastika, berpola aliran dentritik dan hampir paralel. Daerah satuan ini dialiri oleh sungai yang agak besar sebanyak lima buah dan hampir paralel ke arah Selatan menempati bagian tengah dari tapak kuda satuan perbukitan vulkanik.

3. Satuan Kara Berelief Sedang

Satuan ini terdiri dari batu gamping, secara keseluruhan berpola aliran dentritik dan beberapa sungai ada yang mengalir di bawah permukaan tanah. Satuan ini menyebar di bagian bawah permukaan tanah dalam lingkaran dari satuan perbukitan sedimen terlipat.

4. Satuan Peneplain

Satuan ini terdiri dari batuan vulkanik dan sedimen klastika yang berumur paling tua yang terdapat di Tasikmalaya, mempunyai relief rendah, berpola aliran hampir paralel menuju sungai yang menampungnya.

Berdasarkan formasi batumannya, wilayah Kabupaten Tasikmalaya terdiri dari 4 (empat) formasi, yaitu :

1. Formasi Jampang

Batuannya terdiri atas erupsi vulkanik dan bersisipan dengan batuan pasir, batu gamping batu lanau, dan batu lempung serta beberapa batuan di atasnya yang terereksikan. Formasi ini berumur miosen bawah, mempunyai anggota bentang dengan batuan berkomposisi Tuf Asam bersisipan Batuan Gamping.

2. Formasi Pamutuan

Formasi ini yang terdapat hanya anggotanya, yaitu Kalkarenit yang berbentuk batu gamping klasik berselingan dengan napal dan berumur Miosen Tengah.

3. Formasi Halang

Formasi ini terdiri dari batu pasir, batu lempung dengan sisipan batu pasir gampingan, batu gamping pasiran, breksi, konglomerat, bagian bawah dominan batu pasir litik ke arah atas dominan napalan.

4. Formasi Bentang

Formasi ini terdiri atas batu pasir tufan, batu pasir gampingan dengan sisipan breksi tif, konglomerat, batu pasir, batu lempung, tufan berlapis baik. Sukaraja termasuk dalam formasi ini, batuanya berupa batu gamping terumbu berselingan dengan batu gamping pasiran.

c. Hidrologi

Ketersediaan sumber daya air di Kabupaten Tasikmalaya sangat banyak yang berasal dari beberapa sumber, baik air tanah maupun air permukaan. Hal ini disebabkan karena letak wilayahnya yang berbukit-bukit dan didominasi oleh hutan, sehingga ketersediaan air di wilayah perencanaan sangat banyak. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari akan air bersih, penduduk pada umumnya menggunakan air permukaan.

Penggunaan air tanah dan air permukaan wajib mempertimbangkan daya dukung air melalui kajian kelayakan (teknis, lingkungan, sosial, dan ekonomi) serta memenuhi ketentuan yang berlaku dan mendapatkan rekomendasi teknis dari instansi yang

berwenang. Kondisi hidrologi berdasarkan fungsi terbagi atas sumber air (air baku) dari sungai, mata air maupun situ.

1) Sungai

Wilayah Sungai di Kabupaten Tasikmalaya terdiri dari Daerah Aliran besar dan sungai kecil, merupakan bagian dari sistem drainase yang dipengaruhi kondisi topografi dan struktur fisiografinya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.3 di bawah ini.

Tabel 2.3
Daerah Aliran Sungai (DAS) di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya

No	Nama DAS	Wilayah Aliran Sungai	Luas Das (Ha)	Panjang Anak Sungai (km)	Debit (m ³ /det)
1	Cipangukusan	Bojonggambir, Cipatujah, Culamega	11.107,6	S. Cibalanak ; 0,83 S. Cikaenang ; 2,36 S. Cipangukusan ; 3,92	1,69
2	Cilangla	Bantarkalong, Bojongasih, Bojonggambir, Cipatujah, Karangnunggal, Sodonghilir, Taraju	40.610	S. Cibeureum ; 0,56 S. Cicadas ; 1,6 S. Cilangla ; 10,32 S. Cipalu ; 2,63	19,65
3	Cimedang	Cikalong, Cikatomas, Pancatengah, Salopa	44.770,82	Ci Kondang ; 0,81 S. Cibongas ; 1,3 S. Cicantigi ; 0,49 S. Cigugur ; 0,02 S. Ciharuman ; 1,16 S. Cikembang ; 4,64 S. Cikondang ; 7,44 S. Cimedang ; 5,24 S. Citoe ; 3,66 S. Ciwalen ; 0,89	16,97
4	Cipanyeurang	Cipatujah, Culamega,	4.571,35	S. Cibalanak ; 0,83 S. Cikaengan ; 2,36 S. Cipangukusan ; 3,92	1,77
5	Cipatujah	Bojonggambir, Cipatujah, Culamega	16.294	S. Cibalanak ; 0,83 S. Cikaenang ; 2,36 S. Cipangukusan ; 3,92 S. Cipalu ; 1,95 S. Cipayeurang ; 0,03 S. Cipatujah ; 4,75	4,34
6	Citanduy	Ciawi, Cineam, Cisayong, Gunungtanjung, Jamanis, Kadipaten, Karangjaya, Manonjaya, Pagerageung, Rajapolah, Salopa, Sukaratu, Sukaresik	49.718	S. Cihapitan ; 0,66 S. Cikembang ; 2,8 S. Cipajajaran ; 0,33 S. Ciseel ; 2,5 S. Citanduy	29,66

No	Nama DAS	Wilayah Aliran Sungai	Luas Das (Ha)	Panjang Anak Sungai (km)	Debit (m ³ /det)
7	Ciwulan	Cibalong, Cigalontang, Cikalong, Cikatomas, Jatiwaras, Karangnunggal, Leuwisari, Mangunreja, Padakembang, Parungponteng, Puspahiang, Salawu, Sariwangi, Singaparna, Sodonghilir, Sukaraja, Sukarame, Sukaratu, Tanjungjaya	104.000	S. Cigembor ; 2,08 S. Cikunir ; 1,82 S. Cikunten ; 3,13 S. Cilonggan ; 4,83 S. Cimawate ; 9,2 S. Cimerah ; 2,08 S. Ciwulan ; 23,15	29,46

Sumber : RTRW Kab. Tasikmalaya Tahun 2024-2044

b) Mata Air

Satu-satunya sumber air dalam tanah yang ada di Kabupaten Tasikmalaya adalah mata air yang dimanfaatkan sebagai air baku untuk air minum dengan lokasi menyebar di kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Tasikmalaya yaitu di Kecamatan Leuwisari, Sariwangi, Parungponteng, Puspahiang, Sodonghilir, Pancatengah, Cikalong, Cipatujah, Bantarkalong, Cisayong, Sukahening, Sukaresik dan Pagerageung.

c) Situ

Situ yang ada di Kabupaten Tasikmalaya dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian dan juga pariwisata, adapun situ yang dimaksudkan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Nama Situ, Lokasi dan Luas Situ
di Kabupaten Tasikmalaya

No	Nama Situ	Lokasi		Luas (Ha)
		Desa	Kecamatan	
1	Denuh	Cikuya	Bantarkalong	1,15
2	Cisodong	Sindangsari	Bojongasih	1,50
3	Ciburial	Kertamukti	Ciawi	-
4	Cigaleuh	Kalapa Genep	Cikalong	1,40
5	Cirojeh	Mandalaguna	Cikalong	1,75
6	Datar/Cisempur	Cisempur	Cikalong	1,00
7	Oblok	Mandalajaya	Cikalong	0,45

No	Nama Situ	Lokasi		Luas (Ha)
		Desa	Kecamatan	
8	Ciloa	Cilumba	Cikatomas	1,00
9	Cilameta	Ciampanan	Cineam	0,78
10	Garunggang	Rajadatu	Cineam	10,66
11	Rajadatu	Rajadatu	Cineam	1,00
12	Cikadu	Bantarkalong	Cipatujah	1,00
13	Citilu	Bantarkalong	Cipatujah	40,00
14	Karikil	Tobangjaya	Cipatujah	0,80
15	Cigagak	Ciwarak	Jatiwaras	0,25
16	Mustik/Negla	Neglasari	Jatiwaras	0,10
17	Citambal (Embung)	Karanglayung	Karangjaya	-
18	Batu Hawu	Cikupa	Karangnunggal	1,29
19	Cilambu	Margahayu	Manonjaya	3,00
20	Cibuluh/Ciakar	Sukamaju	Pagerageung	2,00
21	Curuglima	Sukapada	Pagerageung	-
22	Sarbeni	Sukapada	Pagerageung	3,00
23	Asta	Sukapada	Pagerageung	-
24	Cikerenceng	Guranteng	Pagerageung	-
25	Cipicung	Guranteng	Pagerageung	-
26	Galuh Taruna	Cibuniasih	Pancatengah	2,00
27	Gede	Mekarsari	Pancatengah	1,50
28	Legok Nangka	Panjalu/Ciomas	Panjalu	2,00
29	Labuan Bulan	Giri Kencana	Parungponteng	2,00
30	Bulakan	Cimanggu	Puspahiang	0,45
31	Pasir Batu Karut	Puspahiang	Puspahiang	2,00
32	Cijengkol	Mangunjaya	Rajapolah	-
33	Cikarapyak	Mangunjaya	Rajapolah	-
34	Cirasik	Sunabana	Salopa	0,19
35	Cisaladah	Kiarajangkung	Sukahening	0,40
36	Gunung Galunggung	Linggajati	Sukaratu	32,00
37	Buleud	Cipondok	Sukaresik	5,00
38	Sanghiang	Cibalanarik, Ciloloh	Tanjungjaya	16,75
39	Cilangla	Raksasari	Taraju	2,60
Jumlah				139,02

Sumber: RTRW Kab. Tasikmalaya Tahun 2024-2044

d. Klimatologi

Temperatur Kabupaten Tasikmalaya pada daerah dataran rendah adalah 34°C dengan kelembaban 50%. Sedangkan pada daerah dataran tinggi mempunyai temperatur 18°-22°C dengan kelembaban berkisar antara 61%-73%. Curah hujan rata-rata per tahun Kabupaten Tasikmalaya adalah 2.171,95 mm dengan jumlah hari hujan efektif dalam satu tahun sebanyak 84 hari. Curah hujan tertinggi terjadi pada

bulan November, dengan musim hujan terjadi antara bulan Oktober dan musim kemarau terjadi antara bulan Juni-September.

Berdasarkan peta klimatologi Kabupaten Tasikmalaya dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Wilayah dengan curah hujan antara 2500-3000 mm/tahun meliputi Kecamatan Sukaraja, Cibalong, Salopa, Pagerageung, Ciawi, dan Jamanis.
- 2) Wilayah dengan curah hujan antara 3000-3500 mm/thn meliputi: Kecamatan Cipatujah, Bantarkalong, Karangnunggal, Salopa, Sodonghilir, Cineam, dan Manonjaya.
- 3) Wilayah dengan curah hujan 3500-4000 mm/thn meliputi Bojonggambir, Sodonghilir, Singaparna, Cisayong, Rajapolah, Cikalong, Pancatengah, Cikatomas, sebagian Pagerageung.
- 4) Wilayah dengan curah hujan diatas 4000 mm/thn adalah Kecamatan Taraju, Salawu, Cigalontang, Leuwisari, dan Cisayong. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.5 Peta Klimatologi Kabupaten Tasikmalaya, sedangkan untuk data curah hujan setiap kecamatan dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

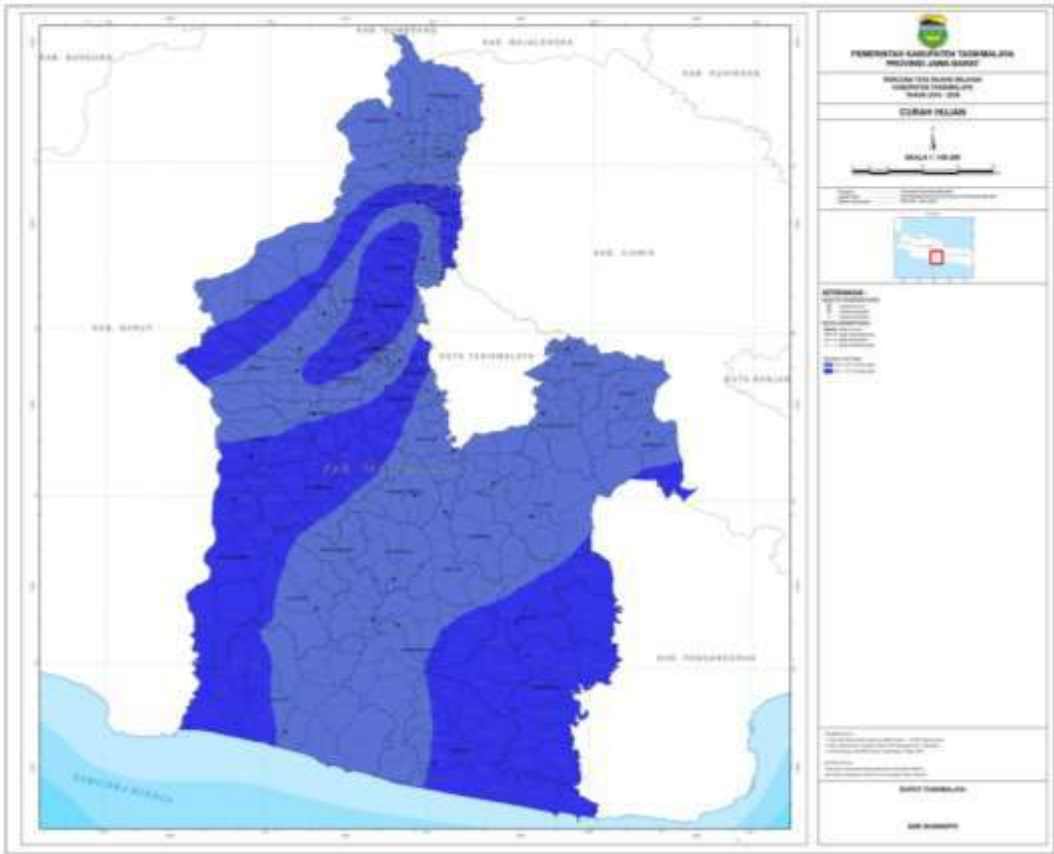
Tabel 2.5
Curah Hujan per Kecamatan

Kecamatan	Curah Hujan
Bantarkalong	13,6 - 20,7 mm/hari hujan
	20,7 - 27,7 mm/hari hujan
Bojongasih	13,6 - 20,7 mm/hari hujan
Bojonggambir	20,7 - 27,7 mm/hari hujan
Ciawi	13,6 - 20,7 mm/hari hujan
	20,7 - 27,7 mm/hari hujan
Cibalong	13,6 - 20,7 mm/hari hujan
	20,7 - 27,7 mm/hari hujan
Cigalontang	13,6 - 20,7 mm/hari hujan
	20,7 - 27,7 mm/hari hujan
Cikalong	13,6 - 20,7 mm/hari hujan
	20,7 - 27,7 mm/hari hujan
Cikatomas	13,6 - 20,7 mm/hari hujan
	20,7 - 27,7 mm/hari hujan
Cineam	13,6 - 20,7 mm/hari hujan
	20,7 - 27,7 mm/hari hujan
Cipatujah	13,6 - 20,7 mm/hari hujan

Kecamatan	Curah Hujan
	20,7 - 27,7 mm/hari hujan
Cisayong	13,6 - 20,7 mm/hari hujan
	20,7 - 27,7 mm/hari hujan
Culamega	13,6 - 20,7 mm/hari hujan
	20,7 - 27,7 mm/hari hujan
Gunungtanjung	13,6 - 20,7 mm/hari hujan
Jamanis	13,6 - 20,7 mm/hari hujan
	20,7 - 27,7 mm/hari hujan
Jatiwaras	13,6 - 20,7 mm/hari hujan
Kadipaten	13,6 - 20,7 mm/hari hujan
Karangjaya	13,6 - 20,7 mm/hari hujan
	20,7 - 27,7 mm/hari hujan
Karangnunggal	13,6 - 20,7 mm/hari hujan
	20,7 - 27,7 mm/hari hujan
Leuwisari	13,6 - 20,7 mm/hari hujan
	20,7 - 27,7 mm/hari hujan
Mangunreja	13,6 - 20,7 mm/hari hujan
	20,7 - 27,7 mm/hari hujan
Manonjaya	13,6 - 20,7 mm/hari hujan
Padakembang	13,6 - 20,7 mm/hari hujan
	20,7 - 27,7 mm/hari hujan
Pagerageung	13,6 - 20,7 mm/hari hujan
Pancatengah	20,7 - 27,7 mm/hari hujan
Parungponteng	13,6 - 20,7 mm/hari hujan
	20,7 - 27,7 mm/hari hujan
Puspahiang	13,6 - 20,7 mm/hari hujan
	20,7 - 27,7 mm/hari hujan
Rajapolah	13,6 - 20,7 mm/hari hujan
	20,7 - 27,7 mm/hari hujan
Salawu	13,6 - 20,7 mm/hari hujan
	20,7 - 27,7 mm/hari hujan
Salopa	13,6 - 20,7 mm/hari hujan
	20,7 - 27,7 mm/hari hujan
Sariwangi	13,6 - 20,7 mm/hari hujan
	20,7 - 27,7 mm/hari hujan
Singaparna	13,6 - 20,7 mm/hari hujan
	20,7 - 27,7 mm/hari hujan
Sodonghilir	13,6 - 20,7 mm/hari hujan
	20,7 - 27,7 mm/hari hujan
Sukahening	13,6 - 20,7 mm/hari hujan
	20,7 - 27,7 mm/hari hujan
Sukaraja	13,6 - 20,7 mm/hari hujan
	20,7 - 27,7 mm/hari hujan
Sukarame	13,6 - 20,7 mm/hari hujan
	20,7 - 27,7 mm/hari hujan

Kecamatan	Curah Hujan
Sukaratu	13,6 - 20,7 mm/hari hujan
	20,7 - 27,7 mm/hari hujan
Sukaresik	13,6 - 20,7 mm/hari hujan
Tanjungjaya	13,6 - 20,7 mm/hari hujan
	20,7 - 27,7 mm/hari hujan
Taraju	13,6 - 20,7 mm/hari hujan
	20,7 - 27,7 mm/hari hujan

Sumber: RTRW Kab. Tasikmalaya Tahun 2024-2044



Gambar 2.6
Peta Curah Hujan Kabupaten Tasikmalaya
Sumber: RTRW Kab. Tasikmalaya Tahun 2024-2044

Perubahan iklim El-Nino memiliki dampak signifikan terhadap kondisi klimatologi dan produktivitas pangan di Kabupaten Tasikmalaya. El-Nino menyebabkan perubahan pola curah hujan dan kekeringan parah yang mengakibatkan penurunan signifikan dalam ketersediaan air untuk irigasi serta berdampak negatif pada hasil pertanian. Kekeringan juga memicu peningkatan suhu udara, memperparah kondisi lahan pertanian dan mengurangi produktivitas. Selain itu, kekurangan air mengakibatkan berkurangnya kualitas air bagi tanaman dan hewan ternak. Oleh karena itu, diperlukan strategi

mitigasi untuk mengurangi dampak negatif El-Nino terhadap sektor pertanian.

e. **Penggunaan Lahan**

Kondisi penggunaan lahan Kabupaten Tasikmalaya terdiri dari beberapa fungsi lahan antara lain hutan, permukiman, persawahan, perkebunan dan lain sebagainya. Berikut adalah tabel penggunaan lahan di Kabupaten Tasikmalaya. Tutupan lahan tersebut dianalisis berdasarkan pada warna yang ditampilkan pada hasil interpretasi Citra Satelit Spot 6 dan Spot 7 Tahun 2018.

Tabel 2.6
Tata Guna Lahan di Kabupaten Tasikmalaya

No	Penggunaan Lahan	Luas Lahan (Ha)
1	Belukar	64.891,93
2	Danau	13,55
3	Hutan	57.669,13
4	Ladang	42.803,25
5	Perkebunan Campuran	31.316,73
6	Permukiman	20.636,27
7	Sawah	49.545,39
8	Tambak / Empang	1.180,61
9	Pasir Pantai	226,06
10	Sungai	2.182,98
11	Jalan	470,40
Jumlah Total		271.130,25

Sumber: RTRW Kab. Tasikmalaya Tahun 2024-2044

a. **Kawasan Budidaya**

Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Kawasan budidaya di Kabupaten Tasikmalaya terdiri atas:

- Kawasan peruntukan pertanian, yang dapat dirinci meliputi: pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, dan hortikultura.
- Kawasan peruntukan perkebunan, yang dapat dirinci berdasarkan jenis komoditas perkebunan.
- Kawasan peruntukan perikanan, yang dapat dirinci meliputi kawasan: kawasan budidaya perikanan, dan kawasan pengolahan ikan.

- Kawasan peruntukan industri, yang dapat dirinci meliputi kawasan untuk industri kecil/rumah tangga, industri agro, industri ringan, industri berat dan industri lainnya.
- Kawasan peruntukan pariwisata, yang dapat dirinci meliputi kawasan untuk semua jenis wisata alam, wisata budaya, wisata buatan/taman rekreasi, dan wisata lainnya.
- Kawasan peruntukan permukiman, yang dapat dirinci meliputi kawasan untuk permukiman perdesaan dan permukiman perkotaan.
- Kawasan budidaya lainnya.

b. Kawasan Lindung

Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Kawasan lindung di Kabupaten Tasikmalaya terdiri atas :

- Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, meliputi : kawasan bergambut dan kawasan resapan air.
- Kawasan perlindungan setempat, meliputi: sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau atau waduk, kawasan sekitar mata air, serta kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal.
- Kawasan pelestarian alam dan cagar budaya meliputi: taman hutan raya, taman wisata alam dan taman wisata alam laut, serta kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.
- Kawasan rawan bencana meliputi: kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan gelombang pasang, dan kawasan rawan banjir.
- Kawasan lindung lainnya.

2.1.1.3 Potensi Pengembangan Wilayah

Pengembangan wilayah merupakan suatu proses untuk meningkatkan kualitas wilayah dengan cara meningkatkan potensi yang dimiliki serta memunculkan potensi baru.

Pengembangan wilayah jika dilihat dari sudut pandang ekonomi, secara umum berorientasi pada meningkat atau menurunnya

produktivitas wilayah dengan indikatornya adalah jumlah penduduk, pendapatan, kesempatan kerja, dan *additional value* (nilai tambah) dari sektor industri pengolahan. Sedangkan jika dilihat dari sudut pandang sosial, pengembangan wilayah berfokus terhadap tujuan agar terjadinya perubahan dari kondisi yang kurang berkembang menjadi berkembang atau maju yang terjadi secara bertahap dan diharapkan dapat membantu pengembangan daerah sekitarnya.

Untuk jangka panjang, pengembangan wilayah menjadi lebih penting bagi masyarakat, yakni untuk mengenal potensi sumber daya dan potensi pengembangan lokal wilayah, khususnya potensi-potensi yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat, tidak terkecuali penurunantng serta juga hambatan pembangunan daerah dapat teratasi dalam rangka meraih tujuan dari pembangunan.

Kabupaten Tasikmalaya memiliki beragam potensi pengembangan wilayah yang keunggulannya perlu dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat serta perlu diantisipasi perkembangannya sehingga tidak berdampak buruk bagi sosial dan lingkungan di masa yang akan datang.

Berikut kerangka pemikiran potensi pengembangan kawasan wilayah Kabupaten Tasikmalaya.



Gambar 2.7

Kerangka Pemikiran Potensi Pengembangan Kawasan/Wilayah

Sumber : Bappelitbangda Kab. Tasikmalaya, 2024

Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah, beberapa wilayah di Kabupaten Tasikmalaya yang diidentifikasi memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan strategis diantaranya:

1. Kawasan Strategis Nasional (KSN) di Wilayah Kabupaten

Kawasan strategis nasional di Kabupaten Tasikmalaya adalah Kawasan pada wilayah Kabupaten Tasikmalaya yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam lingkup provinsi dari sudut Pertahanan dan Keamanan. Kawasan strategis ditetapkan dengan kriteria:

- 1) Diperuntukkan bagi kepentingan pemeliharaan keamanan dan pertahanan negara berdasarkan geostrategis nasional;
- 2) Diperuntukkan bagi basis militer, daerah latihan militer, daerah pembuangan amunisi dan peralatan pertahanan lainnya, gudang amunisi, daerah uji coba sistem, dan/atau Kawasan industri sistem pertahanan.
- 3) Merupakan wilayah kedaulatan negara termasuk pulau-pulau kecil terluar yang berbatasan langsung dengan negara tetangga dan/atau laut lepas.

Kawasan Strategis Nasional (KSN) yang ada di Kabupaten Tasikmalaya adalah kawasan strategis dari sudut pertahanan dan keamanan yang berada di Pulau Nusa Manuk Kecamatan Cikalong.

2. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK)

Kawasan strategis yang ada di kabupaten memiliki peluang sebagai kawasan strategis nasional dan provinsi. Kawasan strategis di Kabupaten Tasikmalaya terdiri atas :

- 1) Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) merupakan hasil perumusan dan kesepakatan pemangku kepentingan (stakeholder) penataan ruang wilayah Kabupaten Tasikmalaya. KSK di Kabupaten Tasikmalaya, meliputi:
 - a) KSK dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, meliputi:
 - (1) KSK Perkotaan Singaparna;
 - (2) KSK Perkotaan Ciawi;
 - (3) KSK Perkotaan Manonjaya;
 - (4) KSK Perkotaan Karangnunggal;

- (5) KSK Industri dan Perdagangan Kerajinan Rajapolah;
- (6) KSK Industri Manufaktur Cisayong dan Sukaratu;
- (7) KSK Wisata Pantai Karangtawulan; dan
- (8) KSK Wisata Alam Gunung Galunggung;
- (9) KSK Agrobisnis Pasir Batang.
- b) KSK dari sudut kepentingan sosial budaya, meliputi:
 - (1) KSK Kampung Naga;
 - (2) KSK Wisata Ziarah Pamijahan;
 - (3) KSK Pesantren Suryalaya;
 - (4) KSK Pesantren Miftahul Huda;
 - (5) KSK Pesantren Cipasung dan
 - (6) KSK Pesantren Sukamanah.
- c) KSK dari sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/teknologi tinggi, meliputi:
 - (1) KSK Geothermal Karaha Bodas berada di Kecamatan Kadipaten;
 - (2) KSK Batu Mulia Jasper berada di Desa Buni Asih Kecamatan Pancatengah;
 - (3) KSK Plasma Nutfah Sirah Cimunjul berada di Kecamatan Cipatujah;
 - (4) KSK kawasan pertambangan yang berada di Kecamatan Cipatujah, Kecamatan Cikalong; dan Kecamatan Karangnunggal;
 - (5) KSK Kawasan Pesisir berada di Kecamatan Cipatujah, Kecamatan Karangnunggal, dan Kecamatan Cikalong.

2.1.1.4. Wilayah Rawan Bencana

a. Potensi Bencana

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 mendefinisikan Bencana sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Salah satu faktor pemicu terjadi bencana adalah kondisi wilayah. Secara topografi, Kabupaten Tasikmalaya memiliki topografi yang beragam yaitu dataran bergelombang lemah sampai bergelombang kuat di daerah selatan sampai tengah, dan ke utara topografinya berupa perbukitan sampai pegunungan. Rata-rata curah hujan kabupaten Tasikmalaya adalah sebesar 3.442 mm, Kondisi curah hujan berpengaruh terhadap potensi bencana.

Sebagai salah satu wilayah Rawan Bencana dengan intensitas tinggi yang telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat memerlukan perhatian khusus pemerintah Daerah terutama dalam perencanaan pembangunan harus mengacu pada RPJMD Kabupaten Tasikmalaya 2021-2026, RTRW dan KLHS.

Pada tahun 2018 Badan Nasional Penanggulangan Bencana telah melakukan Pengkajian Resiko Bencana di Kabupaten Tasikmalaya untuk menghasilkan Tingkat Resiko Bencana melalui penghitungan 3 komponen utama yaitu bahaya, kerentanan dan kapasitas. Ketiga komponen tersebut ditentukan berdasarkan parameter masing-masing.

Komponen Bahaya ditentukan melalui Analisis Probabilitas (peluang kejadian) dan intensitas (besarnya kejadian), Komponen Kerentanan dihitung berdasarkan empat parameter yaitu, Kerentanan Sosial (penduduk terpapar), Kerentanan Ekonomi (kerugian lahan produktif) kerentanan fisik (kerugian akibat kerusakan rumah dan bangunan), dan Kerentanan Lingkungan (kerusakan lingkungan). Terakhir komponen Kapasitas ditentukan dengan menggunakan 2 parameter yaitu, Ketahanan daerah (sektor Pemerintah) dan Kesiapsiagaan Masyarakat (sektor masyarakat). Pengkajian juga bertujuan untuk mengetahui luas dan Index bahaya, sementara bagi Pemerintah Daerah akan menjadi bahan dalam menentukan kebijakan penanganan bencana di wilayah kabupaten Tasikmalaya. Potensi Bencana yang ada di Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan hasil Kajian Bencana dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.7
Potensi Bencana di Kabupaten Tasikmalaya

1. Banjir	6. Kebakaran Hutan Dan Lahan
2. Banjir Bandang	7. Kekeringan
3. Cuaca Ekstrim	8. Letusan Gunungapi
4. Gelombang Ekstrim Dan Abrasi	9. Tanah Longsor
5. Gempa bumi	10. Tsunami

Sumber: Kajian Resiko Bencana Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2023

1. Bencana Banjir

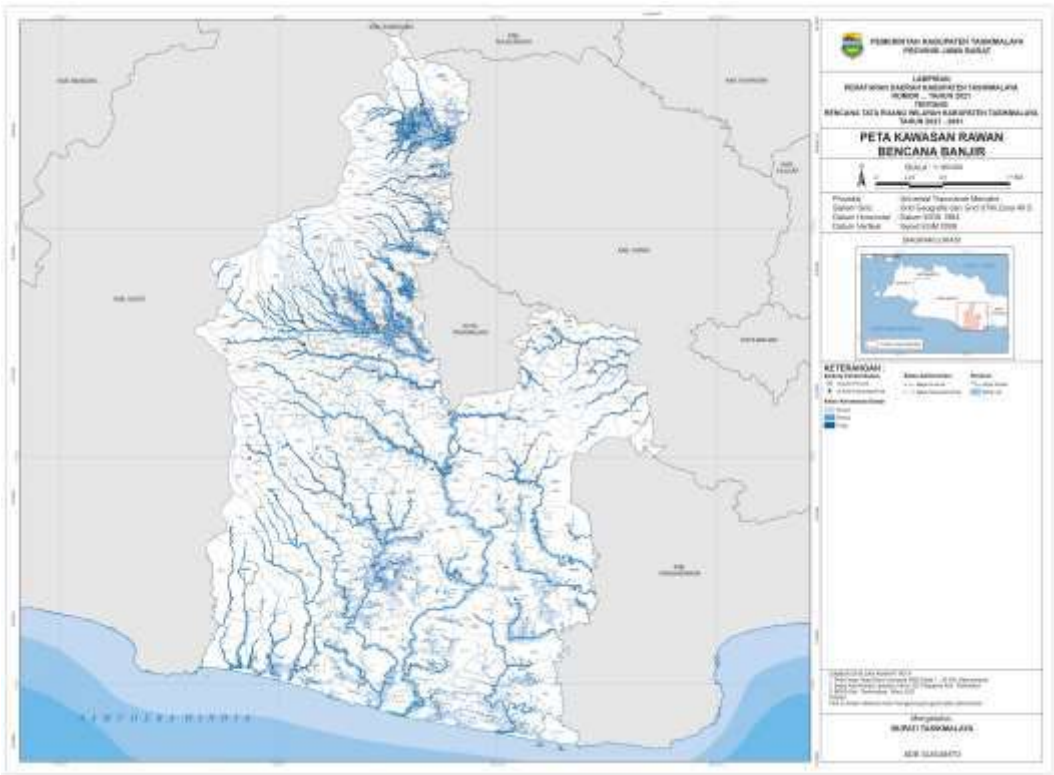
Berdasarkan hasil kajian, potensi bahaya banjir di kabupaten Tasikmalaya diperkirakan seluas 53.154 Ha yang tersebar pada 39 kecamatan, dengan kategori terdiri atas 11 kecamatan Kelas **BAHAYA RENDAH**, 3 kecamatan kelas **BAHAYA SEDANG** dan 25 kecamatan termasuk kelas **BAHAYA TINGGI**, sementara kecamatan Sukaresik dan kecamatan Cipatujah menjadi wilayah yang sering mengalami bencana banjir terparah. Sebagaimana terlihat pada Tabel 2.8.

Tabel 2.8
Resiko Bencana Banjir per Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya

No.	Kecamatan	Luas Resiko (Ha)			Total	Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi		
1	Bantarkalong	897,21	232,06	300,53	1.429,80	Rendah
2	Bojongasih	593,88	139,22	190,45	923,55	Rendah
3	Bojonggambir	268,45	180,88	630,57	1.079,90	Tinggi
4	Ciawi	241,68	278,48	331,81	851,97	Tinggi
5	Cibalong	852,38	181,35	197,17	1.230,91	Rendah
6	Cigalontang	525,60	369,01	888,35	1.782,97	Tinggi
7	Cikalong	2.566,53	657,77	544,29	3.768,59	Rendah
8	Cikatomas	1.763,41	430,98	417,87	2.612,26	Rendah
9	Cineam	380,89	202,60	346,03	929,52	Tinggi
10	Cipatujah	3.756,50	1.070,21	1.292,07	6.118,78	Tinggi
11	Cisayong	429,13	371,82	376,93	1.177,88	Tinggi
12	Culamega	359,54	150,27	344,94	854,75	Tinggi
13	Gunungtanjung	192,76	55,84	84,41	333,01	Tinggi
14	Jamanis	159,48	144,14	122,82	426,44	Tinggi
15	Jatiwaras	709,01	214,40	258,77	1.182,18	Rendah
16	Kadipaten	177,04	177,13	284,09	638,26	Tinggi
17	Karangjaya	135,32	68,36	182,28	385,96	Tinggi
18	Karangnunggal	3.092,53	838,88	651,23	4.582,64	Rendah
19	Leuwisari	230,76	244,68	167,41	642,85	Tinggi
20	Mangunreja	356,73	122,64	107,38	586,76	Rendah
21	Manonjaya	208,67	104,16	173,94	486,77	Tinggi
22	Padakembang	341,84	418,10	436,81	1.196,75	Tinggi
23	Pegerageung	643,57	340,17	206,62	1.190,36	Tinggi

No.	Kecamatan	Luas Resiko (Ha)			Total	Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi		
24	Pancatengah	3.138,09	834,84	868,62	4.841,55	Rendah
25	Parungponteng	568,75	167,41	184,26	920,42	Rendah
26	Puspahiang	165,21	45,75	106,78	317,74	Tinggi
27	Rajapolah	174,22	100,26	81,75	356,23	Tinggi
28	Salawu	233,54	151,59	249,73	634,86	Tinggi
29	Salopa	740,15	235,79	451,15	1.427,10	Tinggi
30	Sariwangi	424,82	303,75	318,99	1.047,56	Tinggi
31	Singaparna	562,24	472,16	259,12	1.293,52	Tinggi
32	Sodonghilir	548,34	199,56	364,66	1.112,56	Tinggi
33	Sukahening	56,61	88,64	181,76	327,01	Tinggi
34	Sukaraja	518,74	112,38	136,99	768,11	Rendah
35	Sukarame	917,68	584,67	361,97	1.864,32	Sedang
36	Sukaratu	541,33	637,40	399,96	1.578,68	Sedang
37	Sukaresik	367,24	310,35	284,96	962,54	Tinggi
38	Tanjungjaya	708,31	163,15	230,71	1.102,17	Tinggi
39	Taraju	63,13	47,75	77,50	186,56	Tinggi
Kabupaten Tasikmalaya		28.609,47	11.448,63	13.095,68	53.153,78	Tinggi

Sumber: Kajian Resiko Bencana Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2023



Gambar 2.8
Peta Sebaran Bencana Banjir Kabupaten Tasikmalaya
Sumber: RTRW Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024-2044

2. Banjir bandang

Dari parameter bahaya banjir bandang, maka dapat ditentukan luas bahaya dan kelas bahaya banjir bandang per kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya pada Tabel 2.9.

Tabel 2.9
Luas Bahaya dan Kelas Bahaya Banjir Bandang
Per Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya

No.	Kecamatan	Luas Bahaya (Ha)			Total Luas	Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi		
1	Bantarkalong	7,19	56,86	159,06	223,11	Tinggi
2	Bojongasih	11,36	69,30	192,21	272,87	Tinggi
3	Bojonggambir	4,96	59,04	290,83	354,83	Tinggi
4	Ciawi	17,81	161,74	298,77	478,32	Tinggi
5	Cibalong	4,77	49,35	190,05	244,17	Tinggi
6	Cigalontang	3,21	65,58	276,91	345,70	Tinggi
7	Cikalong	3,13	31,66	303,93	338,71	Tinggi
8	Cikatomas	2,51	43,11	167,67	213,30	Tinggi
9	Cineam	-	22,91	79,39	102,30	Tinggi
10	Cipatujah	6,67	39,47	239,34	285,48	Tinggi
11	Cisayong	39,05	195,44	475,03	709,52	Tinggi
12	Culamega	0,69	40,08	187,10	227,87	Tinggi
13	Gunungtanjung	-	4,17	26,34	30,51	Tinggi
14	Jamanis	19,70	93,08	165,70	278,48	Tinggi
15	Jatiwaras	1,68	48,24	159,72	209,64	Tinggi
16	Kadipaten	0,95	20,30	67,59	88,84	Tinggi
17	Karangjaya	1,80	10,84	58,42	71,07	Tinggi
18	Karangnunggal	13,26	76,11	407,61	496,99	Tinggi
19	Mangunreja	3,51	16,94	57,23	77,69	Tinggi
20	Manonjaya	0,87	34,86	78,32	114,06	Tinggi
21	Pagerageung	5,33	59,45	176,52	241,30	Tinggi
22	Pancatengah	1,55	55,39	302,96	359,89	Tinggi
23	Parungponteng	-	16,14	48,75	64,89	Tinggi
24	Puspahiang	0,39	12,93	44,31	57,63	Tinggi
25	Rajapolah	4,71	50,75	136,57	192,03	Tinggi
26	Salawu	3,69	50,39	136,28	190,37	Tinggi
27	Salopa	6,89	62,72	287,27	356,88	Tinggi
28	Sariwangi	7,44	53,99	102,77	164,20	Tinggi
29	Singaparna	2,36	12,42	44,17	58,94	Tinggi
30	Sodonghilir	6,10	91,00	216,74	313,84	Tinggi
31	Sukahening	7,34	55,73	129,02	192,10	Tinggi
32	Sukaraja	4,22	21,54	87,64	113,40	Tinggi
33	Sukarame	-	14,04	66,47	80,51	Tinggi
34	Sukaratu	15,97	104,77	268,14	388,88	Tinggi
35	Sukaresik	15,10	65,54	108,59	189,23	Tinggi
36	Tanjung Jaya	2,73	21,88	83,59	108,20	Tinggi
37	Taraju	4,83	33,59	160,88	199,30	Tinggi
Kabupaten Tasikmalaya		231,79	1.921,38	6.281,89	8.435,05	Tinggi

Sumber: Kajian Resiko Bencana Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2023

3. Bencana Cuaca Ekstrim

Adapun potensi luas bahaya dan kelas bahaya cuaca ekstrim per kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.10
Potensi Bahaya Cuaca Ekstrim Per Kecamatan
di Kabupaten Tasikmalaya

No.	Kecamatan	Luas Bahaya (Ha)			Total Luas	Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi		
1	Bantarkalong	-	20,04	610,66	630,69	Tinggi
2	Bojongasih	-	26,29	583,46	609,75	Tinggi
3	Bojonggambir	-	178,71	82,79	261,51	Tinggi
4	Ciawi	-	66,63	1.550,52	1.617,15	Tinggi
5	Cibalong	-	99,55	1.044,92	1.144,47	Tinggi
6	Cigalontang	-	6,77	479,09	485,86	Tinggi
7	Cikalong	-	1.981,96	5.175,43	7.157,39	Tinggi
8	Cikatomas	-	260,27	3.203,00	3.463,27	Tinggi
9	Cineam	-	95,04	2.302,93	2.397,97	Tinggi
10	Cipatujah	-	2.773,83	6.805,25	9.579,08	Tinggi
11	Cisayong	-	68,34	4.124,85	4.193,19	Tinggi
12	Gunungtanjung	-	37,96	756,67	794,63	Tinggi
13	Jamanis	-	46,47	2.073,18	2.119,66	Tinggi
14	Jatiwaras	-	34,09	1.470,31	1.504,40	Tinggi
15	Kadipaten	-	4,33	493,46	497,79	Tinggi
16	Karangnunggal	-	618,99	6.974,52	7.593,51	Tinggi
17	Leuwisari	-	572,28	3.292,70	3.864,98	Tinggi
18	Mangunreja	-	46,91	944,82	991,73	Tinggi
19	Manonjaya	-	126,17	2.706,99	2.833,16	Tinggi
20	Padakembang	-	111,86	3.142,56	3.254,43	Tinggi
21	Pagerageung	-	59,04	1.872,37	1.931,41	Tinggi
22	Pancatengah	-	1.239,53	9.006,68	10.246,21	Tinggi
23	Parungponteng	-	-	14,66	14,66	Tinggi
24	Puspahiang	-	2,82	166,51	169,33	Tinggi
25	Rajapolah	-	57,09	2.078,27	2.135,37	Tinggi
26	Salawu	-	17,64	353,92	371,56	Tinggi
27	Salopa	-	271,66	1.354,38	1.626,04	Tinggi
28	Sariwangi	-	366,12	2.212,07	2.578,18	Tinggi
29	Singaparna	-	124,53	2.314,72	2.439,25	Tinggi
30	Sodonghilir	-	-	10,35	10,35	Tinggi
31	Sukahening	-	45,22	805,69	850,91	Tinggi
32	Sukaraja	-	80,84	1.206,71	1.287,56	Tinggi
33	Sukarame	-	114,35	2.596,59	2.710,94	Tinggi
34	Sukaratu	-	98,12	3.631,89	3.730,01	Tinggi
35	Sukaresik	-	175,00	1.415,02	1.590,02	Tinggi
36	Tanjung Jaya	-	114,98	1.365,14	1.480,12	Tinggi
37	Taraju	-	54,51	90,76	145,27	Tinggi
Kabupaten Tasikmalaya		-	9.997,95	78.313,86	88.311,81	Tinggi

Sumber: Kajian Resiko Bencana Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2023

4. Bencana Gelombang Ekstrim Abrasi

Dari parameter bahaya gelombang ekstrim dan abrasi, maka dapat ditentukan luas bahaya dan kelas bahaya bencana gelombang ekstrim dan abrasi di Kabupaten Tasikmalaya. Adapun rekapitulasi pengkajian bahaya gelombang ekstrim dan abrasi di masing-masing kecamatan dijelaskan pada Tabel 2.11.

Tabel 2.11
Potensi Bahaya Gelombang Ekstrim dan Abrasi
Per Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya

No.	Kecamatan	Luas Bahaya (Ha)			Total Luas	Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi		
1	Cikalong	-	-	322,14	322,14	Tinggi
2	Cipatujah	-	-	473,50	473,50	Tinggi
3	Karangnunggal	-	-	61,46	61,46	Tinggi
Kabupaten Tasikmalaya		-	-	857,09	857,09	Tinggi

Sumber: Kajian Resiko Bencana Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2023

Tabel 2.11 menunjukkan bahwa besaran luas bahaya gelombang ekstrim dan abrasi di Kabupaten Tasikmalaya seluas 857,09 Ha yang terdapat pada 3 kecamatan dengan kelas bahaya TINGGI.

5. Bencana Gempa Bumi

Dari kajian dan analisa parameter bahaya gempa bumi, diperoleh luas bahaya dan kelas bahaya gempa bumi di Kabupaten Tasikmalaya. Adapun potensi luas bahaya untuk bencana gempa bumi di Kabupaten Tasikmalaya dapat dilihat pada Tabel 2.12.

Tabel 2.12
Potensi Bahaya Gempa Bumi Per Kecamatan
di Kabupaten Tasikmalaya

No.	Kecamatan	Luas Bahaya (Ha)			Total Luas	Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi		
1	Bantarkalong	4.024,04	1.698,63	260,33	5.983,00	Sedang
2	Bojongasih	2.897,55	820,52	139,93	3.858,00	Rendah
3	Bojonggambir	13.382,96	3.546,04	-	16.929,00	Rendah
4	Ciawi	3.914,50	554,57	62,92	4.532,00	Sedang
5	Cibalong	4.217,65	1.619,12	21,23	5.858,00	Rendah
6	Cigalontang	9.170,02	2.690,38	114,59	11.975,00	Sedang
7	Cikalong	3.297,90	9.151,91	1.516,19	13.966,00	Sedang
8	Cikatomas	8.050,54	4.936,27	281,19	13.268,00	Sedang

No.	Kecamatan	Luas Bahaya (Ha)			Total Luas	Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi		
9	Cineam	7.700,88	178,12	-	7.879,00	Rendah
10	Cipatujah	9.006,43	12.830,26	2.830,30	24.667,00	Tinggi
11	Cisayong	3.467,15	2.472,85	-	5.940,00	Sedang
12	Culamega	5.455,17	1.376,83	-	6.832,00	Rendah
13	Gunungtanjung	2.656,42	974,58	-	3.631,00	Sedang
14	Jamanis	1.589,39	533,29	5,32	2.128,00	Sedang
15	Jatiwaras	5.858,98	1.434,00	44,02	7.337,00	Rendah
16	Kadipaten	4.281,91	276,69	20,40	4.579,00	Sedang
17	Karangjaya	4.637,24	152,76	-	4.790,00	Rendah
18	Karangnunggal	3.816,91	7.724,04	2.092,05	13.633,00	Sedang
19	Leuwisari	1.741,98	3.486,33	97,69	5.326,00	Sedang
20	Mangunreja	522,27	1.466,37	3,36	1.992,00	Sedang
21	Manonjaya	2.502,02	1.438,98	-	3.941,00	Sedang
22	Padakembang	662,39	2.997,51	111,10	3.771,00	Sedang
23	Pagerageung	5.851,30	815,93	6,77	6.674,00	Sedang
24	Pancatengah	6.287,41	12.693,85	1.203,74	20.185,00	Sedang
25	Parungponteng	3.265,58	1.430,87	30,55	4.727,00	Sedang
26	Puspahiang	2.960,13	529,87	-	3.490,00	Rendah
27	Rajapolah	748,11	1.396,89	-	2.145,00	Sedang
28	Salawu	4.164,43	885,57	-	5.050,00	Sedang
29	Salopa	10.214,74	1.950,64	10,62	12.176,00	Sedang
30	Sariwangi	2.327,29	2.068,88	569,83	4.966,00	Tinggi
31	Singaparna	-	1.919,36	562,64	2.482,00	Tinggi
32	Sodonghilir	7.172,42	2.138,58	-	9.311,00	Sedang
33	Sukahening	2.816,27	25,73	-	2.842,00	Rendah
34	Sukaraja	3.038,18	1.269,82	-	4.308,00	Rendah
35	Sukarame	113,77	2.137,55	712,68	2.964,00	Tinggi
36	Sukaratu	2.486,26	3.049,58	177,16	5.713,00	Sedang
37	Sukaresik	627,67	1.141,70	10,63	1.780,00	Sedang
38	Tanjung Jaya	1.869,60	1.799,40	-	3.669,00	Sedang
39	Taraju	3.900,65	1.684,35	-	5.585,00	Sedang
Kabupaten Tasikmalaya		160.698,15	99.298,61	10.885,24	270.882,00	Tinggi

Sumber: Kajian Resiko Bencana Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2023

Secara keseluruhan Kabupaten Tasikmalaya memiliki potensi luas bahaya bencana gempa bumi sebesar 270.882 Ha yang tersebar pada 10 kecamatan kelas bahaya RENDAH, 25 kecamatan kelas bahaya SEDANG, dan 4 kecamatan kelas bahaya TINGGI.

6. Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla)

Dari parameter bahaya kebakaran hutan dan lahan, maka dapat ditentukan luas bahaya dan kelas bahaya per kecamatan yang

terdampak bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tasikmalaya yang dapat dilihat pada Tabel 2.13.

Tabel 2.13
Potensi Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan Per Kecamatan
di Kabupaten Tasikmalaya

No.	Kecamatan	Luas Bahaya (Ha)			Total Luas	Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi		
1	Bantarkalong	393,82	-	-	393,82	Rendah
2	Bojongasih	853,34	37,07	-	890,41	Rendah
3	Bojonggambir	1.787,40	124,44	-	1.911,84	Sedang
4	Ciawi	1.477,47	5,99	-	1.483,46	Rendah
5	Cibalong	1.318,26	-	-	1.318,26	Rendah
6	Cigalontang	4.747,20	-	-	4.747,20	Rendah
7	Cikalong	247,08	774,03	-	1.021,11	Sedang
8	Cikatomas	1.208,83	77,55	-	1.286,37	Rendah
9	Cineam	1.810,28	214,32	-	2.024,60	Sedang
10	Cipatujah	2.458,95	3.330,46	-	5.789,41	Sedang
11	Cisayong	777,11	-	-	777,11	Rendah
12	Culamega	1.604,42	258,62	-	1.863,04	Rendah
13	Gunungtanjung	343,38	-	-	343,38	Rendah
14	Jatiwaras	493,36	231,99	-	725,35	Sedang
15	Kadipaten	806,08	341,48	-	1.147,56	Sedang
16	Karangjaya	1.628,30	196,67	-	1.824,96	Sedang
17	Karangnunggal	489,41	274,02	-	763,43	Sedang
18	Leuwisari	1.941,54	-	-	1.941,54	Rendah
19	Manonjaya	45,57	-	-	45,57	Rendah
20	Padakembang	345,18	-	-	345,18	Rendah
21	Pagerageung	1.003,55	232,94	-	1.236,49	Rendah
22	Pancatengah	1.324,70	479,42	-	1.804,12	Sedang
23	Parungponteng	437,01	18,49	-	455,51	Rendah
24	Puspahiang	435,05	-	-	435,05	Rendah
25	Salawu	1.037,93	-	-	1.037,93	Rendah
26	Salopa	1.384,00	503,74	-	1.887,75	Sedang
27	Sariwangi	2.409,78	-	-	2.409,78	Rendah
28	Sodonghilir	738,12	-	-	738,12	Rendah
29	Sukahening	1.269,40	7,89	-	1.277,29	Rendah
30	Sukaraja	148,25	294,25	-	442,50	Sedang
31	Sukaratu	1.366,10	-	-	1.366,10	Rendah
32	Tanjung Jaya	-	44,07	-	44,07	Sedang
33	Taraju	592,40	582,48	-	1.174,88	Sedang
Kabupaten Tasikmalaya		36.923,23	8.029,94	-	44.953,18	Sedang

Sumber: Kajian Resiko Bencana Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2023

7. Bencana Kekeringan

Parameter bahaya kekeringan yang digunakan dalam kajian ini adalah kekeringan meteorologis. Hasil analisi bahaya kering berupa luas bahaya dan kelas bahaya per kecamatan yang terdampak bencana kekeringan di Kabupaten Tasikmalaya yang dapat dilihat pada Tabel 2.14.

Tabel 2.14
Potensi Bahaya Kekeringan Per Kecamatan
di Kabupaten Tasikmalaya

No.	Kecamatan	Luas Bahaya (Ha)			Total Luas	Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi		
1	Bantarkalong	654,90	4.771,28	556,82	5.983,00	Sedang
2	Bojongasih	-	3.269,74	588,26	3.858,00	Sedang
3	Bojonggambir	15.164,70	-	1.764,30	16.929,00	Rendah
4	Ciawi	214,72	3.135,67	1.181,62	4.532,00	Tinggi
5	Cibalong	-	5.176,33	681,67	5.858,00	Sedang
6	Cigalontang	8.917,73	1.244,15	1.813,12	11.975,00	Sedang
7	Cikalong	-	12.773,06	1.192,94	13.966,00	Sedang
8	Cikatomas	-	11.639,54	1.628,46	13.268,00	Sedang
9	Cineam	-	5.679,97	2.199,03	7.879,00	Sedang
10	Cipatujah	5.571,95	17.105,08	1.989,97	24.667,00	Sedang
11	Cisayong	158,57	3.714,79	2.066,65	5.940,00	Tinggi
12	Culamega	2.062,21	4.136,09	633,70	6.832,00	Sedang
13	Gunungtanjung	-	2.477,61	1.153,39	3.631,00	Sedang
14	Jamanis	-	1.329,27	798,73	2.128,00	Tinggi
15	Jatiwaras	-	6.108,07	1.228,93	7.337,00	Sedang
16	Kadipaten	26,24	3.889,10	663,66	4.579,00	Sedang
17	Karangjaya	-	3.736,13	1.053,87	4.790,00	Sedang
18	Karangnunggal	-	12.505,04	1.127,96	13.633,00	Sedang
19	Leuwisari	2.285,63	1.853,51	1.186,87	5.326,00	Sedang
20	Mangunreja	71,24	1.347,98	572,78	1.992,00	Sedang
21	Manonjaya	-	2.248,39	1.692,61	3.941,00	Tinggi
22	Padakembang	229,99	2.234,42	1.306,58	3.771,00	Sedang
23	Pagerageung	256,13	5.290,38	1.127,49	6.674,00	Tinggi
24	Pancatengah	41,39	16.645,86	3.497,74	20.185,00	Sedang
25	Parungponteng	-	3.742,71	984,29	4.727,00	Sedang
26	Puspahiang	1.472,48	1.553,79	463,73	3.490,00	Sedang
27	Rajapolah	-	1.101,76	1.043,24	2.145,00	Tinggi
28	Salawu	4.055,10	52,85	942,06	5.050,00	Tinggi
29	Salopa	-	10.013,87	2.162,13	12.176,00	Sedang
30	Sariwangi	3.907,59	364,29	694,11	4.966,00	Tinggi
31	Singaparna	-	1.769,23	712,77	2.482,00	Tinggi
32	Sodonghilir	4.371,17	3.194,49	1.745,34	9.311,00	Sedang
33	Sukahening	193,30	1.963,61	685,10	2.842,00	Sedang
34	Sukaraja	-	3.388,41	919,59	4.308,00	Sedang

No.	Kecamatan	Luas Bahaya (Ha)			Total Luas	Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi		
35	Sukarame	-	2.151,97	812,03	2.964,00	Tinggi
36	Sukaratu	1.091,52	3.320,53	1.300,95	5.713,00	Tinggi
37	Sukaresik	-	932,79	847,21	1.780,00	Tinggi
38	Tanjung Jaya	-	2.940,53	728,47	3.669,00	Sedang
39	Taraju	4.240,94	64,37	1.279,69	5.585,00	Rendah
Kabupaten Tasikmalaya		54.987,50	168.866,64	47.027,86	270.882,00	Tinggi

Sumber : Kajian Resiko Bencana Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2023

Secara keseluruhan bencana kekeringan di Kabupaten Tasikmalaya memiliki potensi luas bahaya dengan total 270.882 Ha yang tersebar pada 2 kecamatan kelas bahaya RENDAH, 25 kecamatan kelas bahaya SEDANG, dan 12 kecamatan kelas bahaya TINGGI.

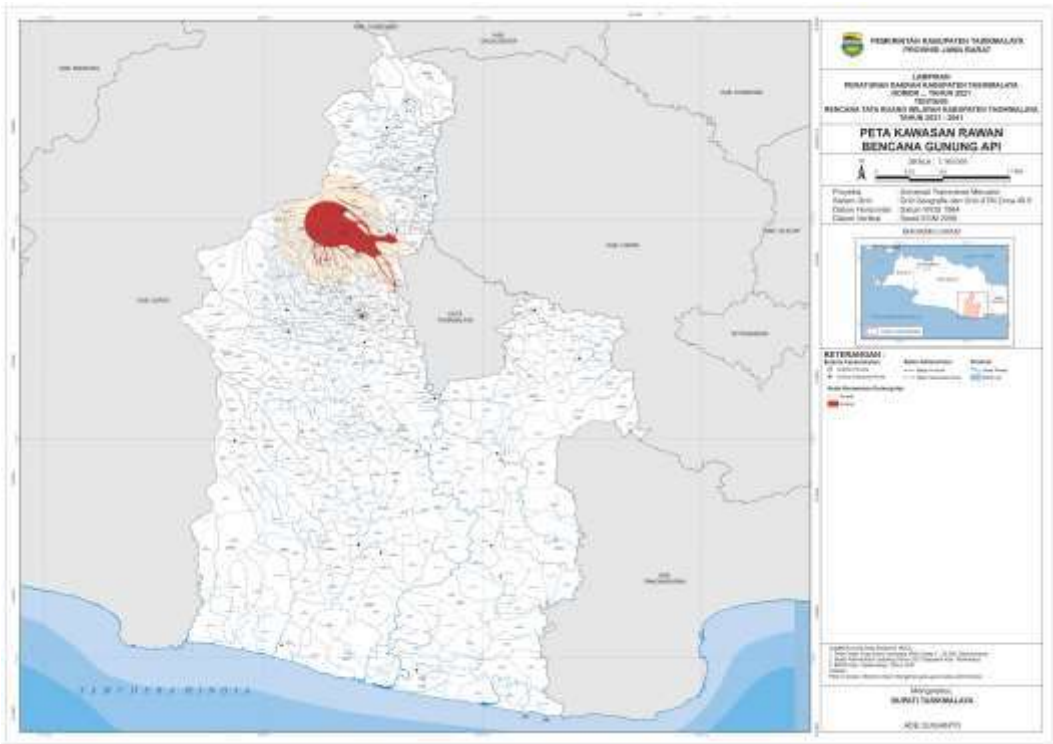
8. Bencana Letusan Gunung Api Galunggung

Dari parameter bahaya letusan gunung api, maka dapat ditentukan luas bahaya dan kelas bahaya per kecamatan yang terdampak bencana Letusan Gunungapi Galunggung di Kabupaten Tasikmalaya yang dapat dilihat pada Tabel 2.15.

Tabel 2.15
Potensi Bahaya Letusan Gunungapi Galunggung
per Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya

No.	Kecamatan	Luas Bahaya (Ha)			Total Luas	Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi		
1	Cigalontang	1.448,20	149,90	-	1.598,10	Rendah
2	Cisayong	1.092,88	116,12	-	1.209,00	Sedang
3	Leuwisari	2.502,28	962,40	-	3.464,68	Rendah
4	Mangunreja	38,15	-	-	38,15	Rendah
5	Padakembang	2.223,23	537,50	-	2.760,73	Rendah
6	Sariwangi	2.396,36	810,28	-	3.206,64	Rendah
7	Singaparna	342,78	10,46	-	353,24	Rendah
8	Sukahening	441,04	-	-	441,04	Rendah
9	Sukaraja	14,03	-	-	14,03	Rendah
10	Sukarame	451,90	-	-	451,90	Rendah
11	Sukaratu	1.968,06	2.646,60	-	4.614,66	Sedang
12	Tanjung Jaya	86,24	-	-	86,24	Rendah
Kabupaten Tasikmalaya		13.005,16	5.233,26	-	18.238,42	Sedang

Sumber: Kajian Resiko Bencana Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2023



Gambar 2.9
Peta Sebaran Bencana Letusan Gunung Api Galunggung
Sumber: RTRW Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024-2044

9. Bencana Tanah Longsor

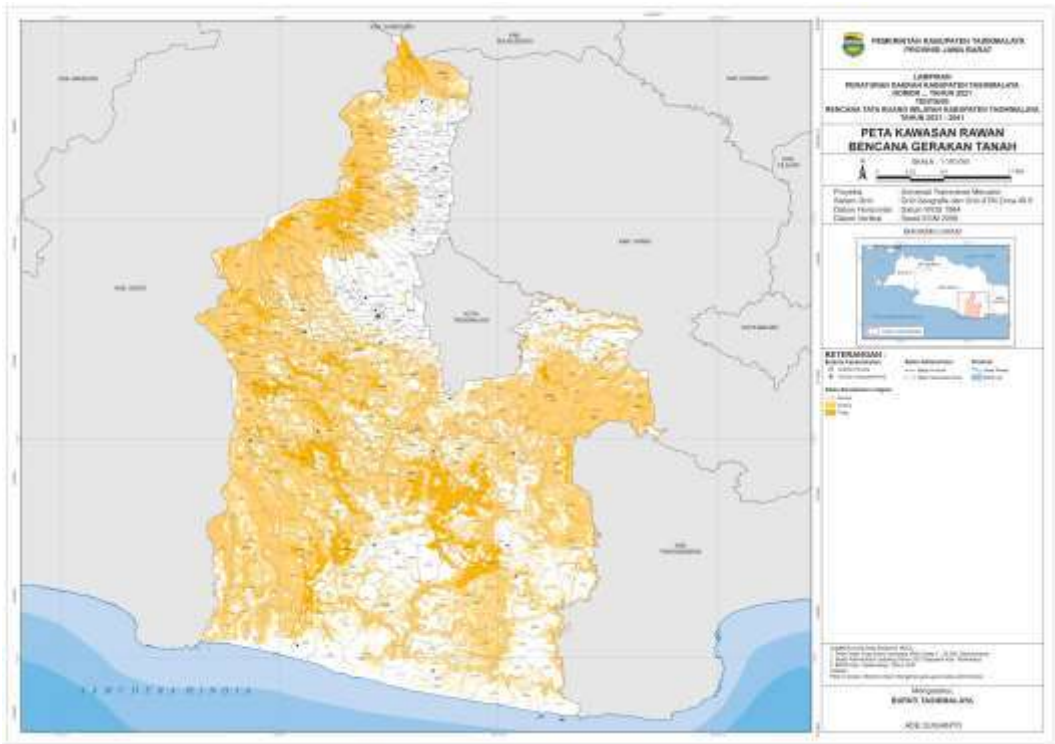
Dari parameter bahaya tanah longsor, maka dihasilkan potensi bahaya tanah longsor di Kabupaten Tasikmalaya memiliki potensi luas bahaya dengan total luasan 164.326 Ha. Bahaya tanah longsor tersebar pada 3 kecamatan kelas bahaya RENDAH, 27 kecamatan kelas bahaya SEDANG, dan 8 kecamatan kelas bahaya TINGGI di Kabupaten Tasikmalaya. Adapun potensi luas bahaya tanah longsor dan kelas bahaya per kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya dapat dilihat secara lebih rinci pada Tabel 2.16.

Tabel 2.16
Potensi Bahaya Tanah Longsor Per Kecamatan
di Kabupaten Tasikmalaya

No.	Kecamatan	Luas Bahaya (Ha)			Total Luas	Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi		
1	Bantarkalong	574,41	2.576,24	1.584,31	4.734,96	Tinggi
2	Bojongasih	315,59	2.349,32	384,50	3.049,41	Sedang
3	Bojonggambi	1.411,49	12.631,84	855,03	14.898,36	Sedang
4	Ciawi	172,62	2.322,02	246,32	2.740,96	Sedang
5	Cibalong	241,09	1.798,88	2.251,78	4.291,75	Tinggi
6	Cigalontang	38,19	8.491,42	1.319,66	9.849,28	Sedang

No.	Kecamatan	Luas Bahaya (Ha)			Total Luas	Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi		
7	Cikalong	2.450,54	4.282,91	12,53	6.745,98	Sedang
8	Cikatomas	1.399,74	6.649,22	1.108,77	9.157,73	Tinggi
9	Cineam	77,04	4.854,63	213,88	5.145,55	Sedang
10	Cipatujah	3.054,62	9.923,87	983,32	13.961,80	Sedang
11	Cisayong	149,82	1.111,07	180,53	1.441,42	Sedang
12	Culamega	589,37	4.738,01	780,37	6.107,76	Sedang
13	Gunungtanju	216,36	2.288,93	246,50	2.751,79	Sedang
14	Jamanis	12,86	-	-	12,86	Rendah
15	Jatiwaras	161,99	4.145,87	796,87	5.104,74	Tinggi
16	Kadipaten	317,74	2.848,97	327,69	3.494,40	Sedang
17	Karangjaya	16,10	3.879,73	246,49	4.142,32	Sedang
18	Karangnungg	1.553,70	2.791,57	1.208,11	5.553,38	Tinggi
19	Leuwisari	92,48	1.011,87	387,03	1.491,38	Sedang
20	Mangunreja	56,62	774,15	176,32	1.007,09	Sedang
21	Manonjaya	194,91	920,28	42,36	1.157,55	Sedang
22	Padakemban	136,39	232,75	31,56	400,69	Sedang
23	Pagerageung	625,19	3.169,12	654,30	4.448,61	Sedang
24	Pancatengah	3.807,42	5.601,01	51,76	9.460,20	Sedang
25	Parungponte	119,12	2.923,95	211,36	3.254,42	Sedang
26	Puspahiang	25,80	2.632,97	387,49	3.046,26	Tinggi
27	Rajapolah	4,34	-	-	4,34	Rendah
28	Salawu	15,05	3.666,68	571,04	4.252,78	Sedang
29	Salopa	61,10	8.809,84	834,21	9.705,16	Sedang
30	Sariwangi	146,36	1.732,67	467,38	2.346,41	Sedang
31	Singaparna	79,00	39,24	-	118,24	Sedang
32	Sodonghilir	385,11	5.225,45	2.012,84	7.623,39	Tinggi
33	Sukahening	235,29	1.216,39	150,19	1.601,86	Sedang
34	Sukaraja	405,68	2.445,62	-	2.851,30	Sedang
35	Sukarame	285,76	-	-	285,76	Rendah
36	Sukaratu	231,92	983,83	565,34	1.781,08	Sedang
37	Tanjung Jaya	265,03	1.669,84	119,05	2.053,92	Sedang
38	Taraju	8,29	2.902,83	1.340,91	4.252,04	Tinggi
Kabupaten Tasikmalaya		19.934,13	123.642,98	20.749,80	164.326,91	Tinggi

Sumber: Kajian Resiko Bencana Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2023



Gambar 2.10
Peta Sebaran Bencana Longsor Kabupaten Tasikmalaya
Sumber: RTRW Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024-2044

Berdasarkan hasil analisis bahaya diketahui bahwa Kecamatan Cigalontang mempunyai kelas bahaya tanah longsor TINGGI dan Kecamatan Sodonghilir dan Kecamatan Sukahening yang berada pada kelas SEDANG mengalami bencana tanah longsor sebanyak 5 kejadian dalam tahun 2018 (data BPBD Kabupaten Tasikmalaya). Kejadian bencana tanah longsor disebabkan oleh intensitas curah hujan yang tinggi dan ketidakmampuan tanah menahan beban sehingga menyebabkan gerakan tanah/longsor.

10. Bencana Tsunami

Dari parameter Tsunami, maka dapat dapat ditentukan luas bahaya dan kelas bahaya per kecamatan yang terdampak bencana Tsunami di Kabupaten Tasikmalaya seperti pada Tabel 2.17.

Tabel 2.17
Potensi Bahaya Tsunami Per Kecamatan
di Kabupaten Tasikmalaya

No.	Kecamatan	Luas Bahaya (Ha)			Total Luas	Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi		
1	Cikalong	21,75	17,23	281,54	320,52	Tinggi
2	Cipatujah	5,66	16,69	280,04	302,40	Tinggi
3	Karangnunggal	2,59	7,12	62,10	71,81	Tinggi
Kabupaten Tasikmalaya		30,00	41,04	623,69	694,73	Tinggi

Sumber: Kajian Resiko Bencana Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2023

Tabel 2.17. menunjukkan secara keseluruhan bencana tsunami di Kabupaten Tasikmalaya memiliki potensi luas bahaya dengan total luasan 694.73 Ha yang berada pada kelas TINGGI.



Gambar 2.11
Peta Sebaran Bencana Tsunami Kabupaten Tasikmalaya
Sumber: RTRW Kab. Tasikmalaya Tahun 2024-2044

2.1.1.5 Kondisi Demografi

Aspek demografi menggambarkan kondisi penduduk secara keseluruhan atau kelompok dalam waktu tertentu. Aspek demografi di Kabupaten Tasikmalaya dapat digambarkan melalui kondisi demografi seperti ukuran, struktur dan distribusi penduduk serta bagaimana

jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan. Analisis kependudukan dapat merujuk pada populasi masyarakat secara keseluruhan atau kelompok tertentu yang didasarkan kriteria seperti pendidikan, kewarganegaraan, agama, atau etnis tertentu.

Perkembangan demografi berperan penting dalam pembangunan karena merupakan modal dasar keberhasilan pembangunan suatu wilayah. Besaran, komposisi dan distribusi penduduk akan mempengaruhi struktur ruang dan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat. Seluruh aspek pembangunan memiliki korelasi dan interaksi dengan kondisi kependudukan.

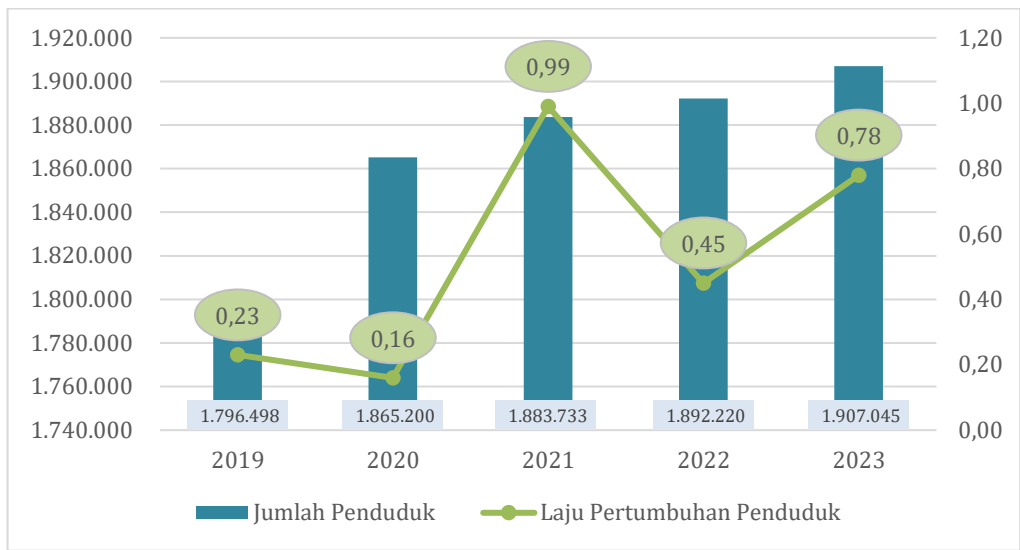
Pengelolaan kependudukan dan pembangunan keluarga adalah upaya terencana untuk mengarahkan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk pada seluruh dimensi penduduk. Perkembangan kependudukan adalah kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan kependudukan yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan berkelanjutan. Kualitas penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan nonfisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertaqwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan dan hidup layak (Kementerian Keuangan, 2015).

a. Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Tasikmalaya tahun 2023 tercatat sebanyak 1.907.045 jiwa, terdiri atas 965.602 jiwa penduduk laki – laki dan 941.443 jiwa penduduk perempuan dengan laju pertumbuhan penduduk tahun 2020-2023 sebesar 1,04 persen.

Laju pertumbuhan penduduk per tahun adalah angka yang menunjukkan rata-rata tingkat pertambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai persentase dari penduduk dasar. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten

Tasikmalaya pada tahun 2023 sebesar 0,78% dan mengalami kenaikan 0,33% dari tahun 2022.

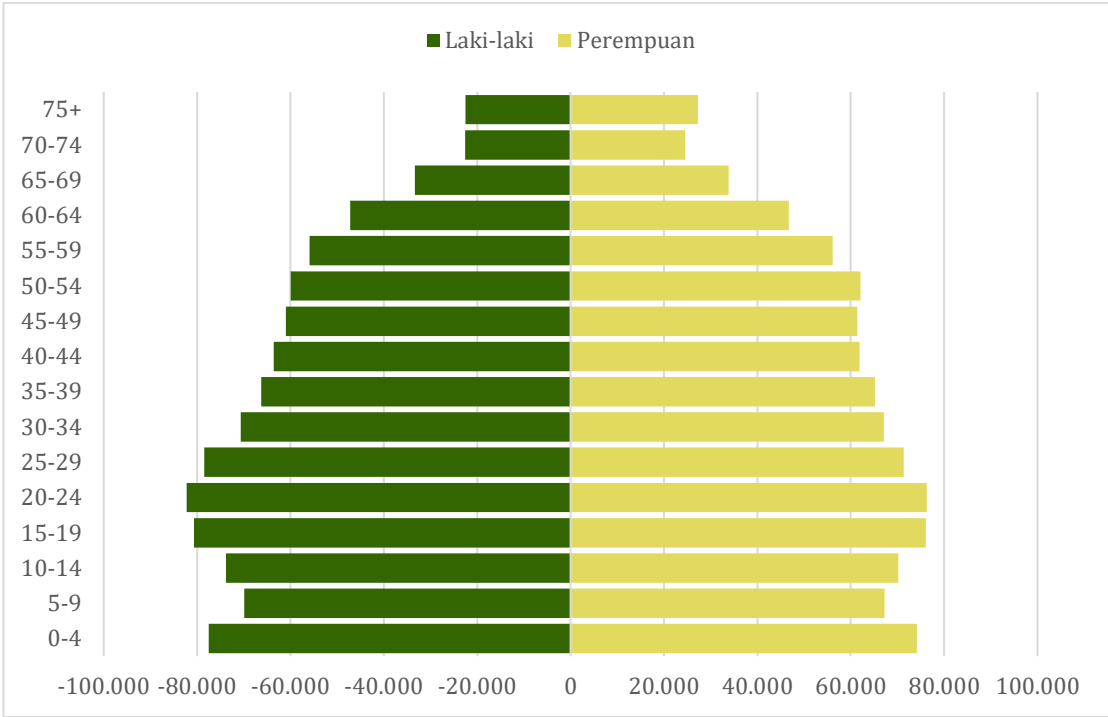


Gambar 2.12
Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2023

Sumber : BPS Kabupaten Tasikmalaya, 2024

Penduduk di Kabupaten Tasikmalaya dapat dianalisis berdasarkan struktur umur. Hal ini dapat dijadikan sebagai informasi yang penting karena berkaitan dengan resiko dan kebutuhan pelayanan yang berbeda-beda pada setiap kelompok umur. Jika dilihat dari struktur usia penduduk, berdasarkan gambar piramida penduduk Kabupaten Tasikmalaya selama tahun 2023 didominasi oleh penduduk usia 15-19 tahun dan usia 20-24 tahun.

Pada gambar berikut digambarkan piramida penduduk Kabupaten Tasikmalaya tahun 2023.



Gambar 2.13
Piramida Penduduk Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023
Sumber : BPS Kabupaten Tasikmalaya, 2024

Angka tersebut menunjukkan bahwa jumlah penduduk usia produktif di Kabupaten Tasikmalaya relatif lebih besar dibandingkan penduduk usia non produktif sekaligus merupakan bonus demografi. Secara rinci penduduk Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan kelompok umur disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.18
Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2023

Table with 6 columns: Kelompok Umur, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. It lists population counts for various age groups from 0-4 to 65-69 across the years 2019 to 2023.

Kelompok Umur	2019	2020	2021	2022	2023
70-74		43.055	46.560	50.379	47.095
75+		42.411	45.247	48.521	49.763
Jumlah	1.796.498	1.865.203	1.883.733	1.906.288	1.907.045

Sumber : BPS Kabupaten Tasikmalaya, 2024

b. Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan

Distribusi penduduk adalah pola persebaran penduduk di suatu wilayah, baik berdasarkan batas-batas geografis maupun berdasarkan batas-batas administrasi pemerintahan. Distribusi dan kepadatan penduduk di Kabupaten Tasikmalaya tidak merata. Kondisi ini penting diwaspadai karena berpotensi negatif dalam pembangunan dari aspek sosial, ekonomi, budaya dan politik.

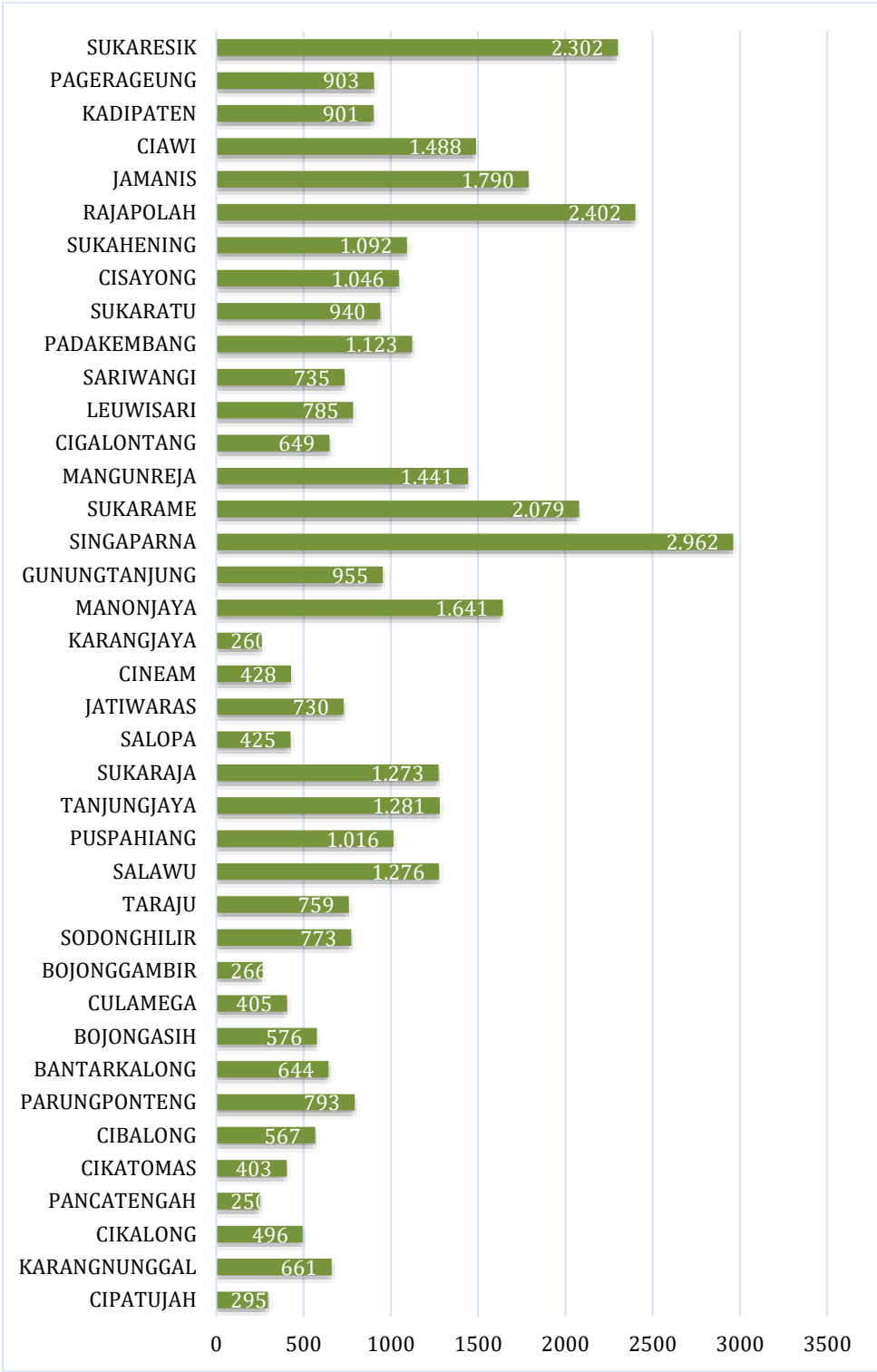
Secara sosial, daerah yang penduduknya padat akan banyak bermunculnya masalah sosial, seperti pemukiman kumuh, angka kemiskinan yang tinggi, dan lainnya. sedangkan daerah yang penduduknya rendah cenderung merasa terisolir atau tertutup dari dunia luar yang membuat mereka tidak bisa berkomunikasi dan mengembangkan potensinya. Secara ekonomi, sebaran penduduk yang tidak merata dapat menimbulkan terpusatnya kegiatan ekonomi pada daerah tertentu. Sebagai contoh Kecamatan Singaparna yang menjadi pusat ekonomi karena penduduknya paling padat. Berbeda dengan daerah lain yang tidak bisa berkembang karena penduduknya sedikit. Akibatnya daerah yang padat penduduk membuat tingginya angka pengangguran. Dari aspek budaya, sebaran penduduk yang tidak merata akan membuat upaya untuk melestarikan budaya hanya terpusat pada daerah tertentu saja. Secara budaya, sebaran penduduk yang tidak merata dapat menimbulkan sistem politik yang tidak seimbang.

Tabel 2.19
Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023

No.	Kecamatan	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk/km ²
1	Cipatujah	3.82	295
2	Karangnunggal	4.73	661
3	Cikalong	3.63	496
4	Pancatengah	2.64	250

No.	Kecamatan	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk/km ²
5	Cikatomas	2.81	403
6	Cibalong	1.74	567
7	Parungponteng	1.96	793
8	Bantarkalong	2.02	644
9	Bojongasih	1.16	576
10	Culamega	1.45	405
11	Bojonggambir	2.36	266
12	Sodonghilir	3.77	773
13	Taraju	2.22	759
14	Salawu	3.38	1.276
15	Puspahiang	1.86	1.016
16	Tanjungjaya	2.46	1.281
17	Sukaraja	2.87	1.273
18	Salopa	2.72	425
19	Jatiwaras	2.81	730
20	Cineam	1.77	428
21	Karangjaya	0.65	260
22	Manonjaya	3.39	1.641
23	Gunungtanjung	1.68	955
24	Singaparna	3.86	2.962
25	Sukarame	2.17	2.079
26	Mangunreja	2.24	1.441
27	Cigalontang	4.07	649
28	Leuwisari	2.19	785
29	Sariwangi	1.92	735
30	Padakembang	2.22	1.123
31	Sukaratu	2.81	940
32	Cisayong	3.26	1.046
33	Sukahening	1.63	1.092
34	Rajapolah	2.70	2.402
35	Jamanis	2.00	1.790
36	Ciawi	3.54	1.488
37	Kadipaten	2.16	901
38	Pagerageung	3.16	903
39	Sukaresik	2.15	2.302
Tasikmalaya		100.00	705

Sumber : BPS Kabupaten Tasikmalaya, 2024



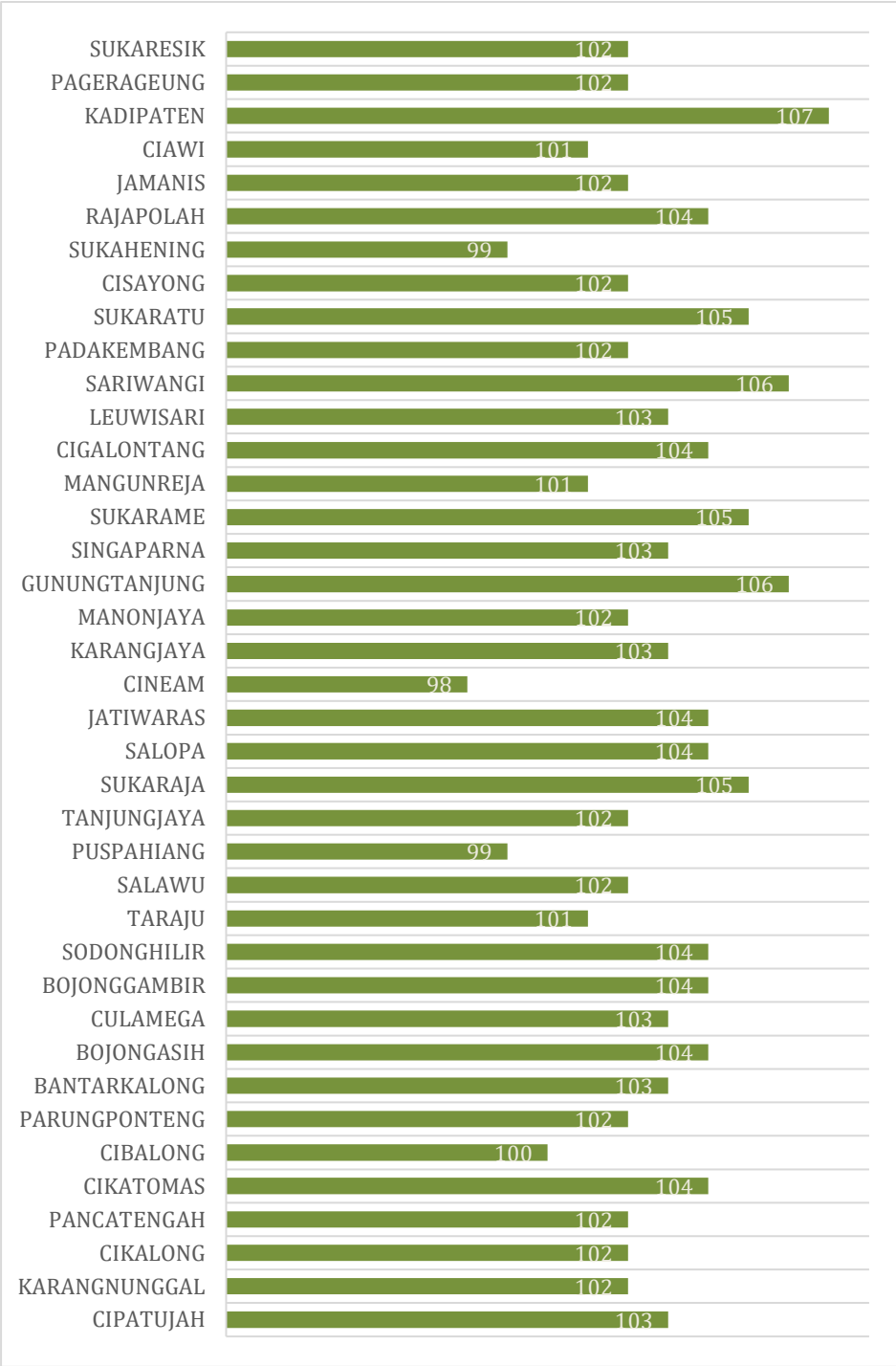
Gambar 2.14
Rata-Rata Kepadatan Penduduk Per Km² Menurut Kecamatan
di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023

Sumber : BPS Kabupaten Tasikmalaya, 2024

c. Sex Ratio

Rasio jenis kelamin adalah perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan per 100 penduduk perempuan. Data rasio jenis kelamin berguna untuk pengembangan perencanaan pembangunan berwawasan gender, terutama yang

berkaitan dengan perimbangan pembangunan laki-laki dan perempuan secara adil. *Sex ratio* Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2023 sebesar 103. Artinya tiap 100 orang penduduk perempuan terdapat 103 orang penduduk laki-laki. Pada tahun 2023 data *Sex Ratio* menurut kecamatan dari BPS sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 2.13.



Gambar 2.15
Sex Ratio Menurut Kecamatan
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023
 Sumber : BPS Kabupaten Tasikmalaya, 2024

d. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari keahlian, kemampuannya dan ilmu pengetahuan yang dimiliki. Asumsinya, semakin tinggi pendidikan diharapkan semakin tinggi kemampuan dan keahlian yang dimilikinya. Indikator jenjang pendidikan yang ditamatkan bisa digunakan untuk melihat keberhasilan pemerintah dalam menyelenggarakan program wajib belajar 9 tahun. Komposisi penduduk Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan tingkat pendidikan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.20
Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Per Kecamatan
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023

No	Kecamatan	Tingkat Pendidikan									
		Tidak/ Belum Sekolah	Belum Tamat SD/ Sederajat	SD/ Sederajat	SLTP/ Sederajat	SLTA/ Sederajat	Diploma I/II	Akademi/ Diploma III/S.Muda	Diploma IV/ Strata I	Strata II	Strata III
1	Cipatujah	11.915	7.930	29.742	12.965	9.415	96	204	1.173	33	1
2	Karangnunggal	16.634	7.588	40.355	14.177	10.722	160	358	1.858	80	9
3	Cikalong	13.828	6.079	30.680	10.995	7.797	111	229	1.415	83	4
4	Pancatengah	11.142	4.083	23.007	7.793	4.336	38	126	712	40	1
5	Cikatomas	10.308	4.424	23.747	9.167	6.014	93	187	1.187	38	3
6	Cibalong	4.486	3.003	12.727	7.353	5.866	87	200	919	39	1
7	Parungponteng	5.765	3.264	15.032	7.140	6.440	65	119	940	49	1
8	Bantarkalong	6.675	3.558	14.815	7.406	5.397	61	139	1.008	47	2
9	Bojongasih	4.297	2.118	9.331	4.138	2.039	23	56	327	15	0
10	Culamega	4.655	2.561	11.850	4.455	2.476	25	29	369	8	0
11	Bojonggambir	10.321	3.333	20.124	6.296	3.314	43	74	573	27	2

No	Kecamatan	Tingkat Pendidikan									
		Tidak/ Belum Sekolah	Belum Tamat SD/ Sederajat	SD/ Sederajat	SLTP/ Sederajat	SLTA/ Sederajat	Diploma I/II	Akademi/ Diploma III/S.Muda	Diploma IV/ Strata I	Strata II	Strata III
12	Sodonghilir	12.979	6.330	27.663	13.794	8.689	103	170	1.367	70	4
13	Taraju	7.436	4.360	19.295	7.455	4.380	66	140	621	20	1
14	Salawu	10.482	5.908	29.946	10.044	7.790	113	240	1.206	48	3
15	Puspahiang	5.851	2.859	18.585	6.167	3.327	33	109	536	29	1
16	Tanjungjaya	8.857	4.542	21.952	7.048	5.013	72	147	801	34	1
17	Sukaraja	9.053	5.721	24.210	8.842	6.528	82	214	871	38	2
18	Salopa	8.851	5.259	21.597	9.716	6.282	44	129	947	43	3
19	Jatiwaras	9.326	5.284	25.093	9.079	5.585	70	138	823	32	0
20	Cineam	4.848	2.537	15.194	6.352	5.476	91	231	1.187	59	3
21	Karangjaya	1.926	1.060	6.038	2.061	1.715	21	48	276	12	0
22	Manonjaya	10.104	6.155	22.903	11.741	12.707	209	615	2.487	147	6
23	Gunungtanjung	5.113	3.177	16.178	4.884	2.843	33	65	362	13	2
24	Singaparna	13.280	7.397	21.033	11.675	16.525	355	999	4.049	395	9
25	Mangunreja	6.573	4.182	18.368	6.592	5.826	59	240	949	55	2
26	Sukarame	7.079	4.838	17.144	6.471	6.577	74	244	1.247	72	10
27	Cigalontang	12.712	8.068	34.227	12.894	10.267	92	235	1.295	101	5
28	Leuwisari	6.747	4.435	13.747	8.558	9.025	96	266	1.413	97	1
29	Padakembang	8.085	4.197	15.891	7.142	6.855	92	241	1.139	83	3
30	Sariwangi	6.743	3.778	11.777	7.936	6.654	72	213	1.140	64	3
31	Sukaratu	10.661	4.704	20.661	8.830	7.881	59	208	862	28	2
32	Cisayong	11.102	5.621	22.689	11.674	11.131	135	402	1.613	83	6
33	Sukahening	5.847	2.556	14.085	5.911	4.264	40	154	750	46	1
34	Rajapolah	7.923	5.804	16.687	9.781	9.903	135	441	1.694	102	4

No	Kecamatan	Tingkat Pendidikan									
		Tidak/ Belum Sekolah	Belum Tamat SD/ Sederajat	SD/ Sederajat	SLTP/ Sederajat	SLTA/ Sederajat	Diploma I/II	Akademi/ Diploma III/S.Muda	Diploma IV/ Strata I	Strata II	Strata III
35	Jamanis	7.956	3.860	14.325	7.763	5.716	73	182	901	46	5
36	Ciawi	10.922	6.137	27.989	11.384	10.062	185	451	1.956	155	9
37	Kadipaten	9.759	3.696	17.630	5.570	3.769	47	86	488	17	0
38	Pagerageung	10.741	5.535	26.430	10.409	8.049	100	333	1.692	101	5
39	Sukaresik	7.115	4.042	13.769	8.312	7.579	65	229	1.340	51	4
Total		338.097	179.983	786.516	329.970	264.234	3.418	8.891	44.493	2.500	119
Persentase		17,27	9,19	40,16	16,85	13,49	0,17	0,45	2,27	0,13	0,01

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tasikmalaya, 2024

Tingkat pendidikan yang paling banyak di Kabupaten Tasikmalaya yaitu pada jenjang SD/Sederajat sebesar 40,16%, disusul dengan Tidak/Belum Sekolah yang cukup besar yaitu sebesar 17,27%. Untuk tamatan jenjang perguruan tinggi masih relatif kecil yaitu 2,27%.

e. Jumlah Penduduk Menurut Pelayanan Dasar Kesehatan

Urusan kesehatan merupakan urusan wajib pelayanan dasar yang mendukung capaian kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kabupaten Tasikmalaya. Pengumpulan data SPM oleh Dinas Kesehatan melalui verifikasi dan validasi data dari program yang bersumber dari fasyankes di wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Data ini mencakup berbagai indikator kesehatan yang penting untuk memastikan bahwa pelayanan kelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Data sasaran penerima pelayanan dasar per kecamatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.21
Jumlah Penduduk Menurut Pelayanan Dasar Kesehatan Per Kecamatan
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023

No	Kecamatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Pelayanan Kesehatan Balita	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan TB	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV
1	Cipatujah	1.084	1.057	1.013	7.979	5.839	53.699	8.813	5.374	1.138	42	862	1.397
2	Karangnunggal	1.243	1.109	1.078	7.264	7.910	65.580	10.893	6.375	1.390	170	339	1.785
3	Cikalong	1.012	1.041	996	6.438	7.132	50.735	8.693	5.124	1.075	63	484	1.317
4	Pancatengah	720	829	813	3.563	5.480	36.548	6.685	3.929	775	60	471	939
5	Cikatomas	795	759	704	4.283	6.899	39.738	6.734	4.198	842	22	170	1.033
6	Cibalong	660	662	616	5.833	3.851	25.189	7.345	2.972	534	48	841	637
7	Parungponteng	574	585	539	4.308	5.843	28.364	5.255	3.239	601	22	459	730
8	Bantarkalong	620	648	603	4.433	14.313	28.436	6.526	3.246	603	48	623	713
9	Bojongasih	471	450	408	2.003	3.961	16.098	6.605	2.206	341	7	134	405

No	Kecamatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Pelayanan Kesehatan Balita	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan TB	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV
10	Culamega	435	400	396	2.783	1.897	19.494	6.256	2.492	413	42	262	462
11	Bojonggambir	764	826	815	3.983	3.758	32.387	6.312	3.578	686	32	576	840
12	Sodonghilir	1.096	1.047	997	6.977	7.848	51.739	6.020	5.599	1.097	64	152	799
13	Taraju	647	677	643	2.401	4.667	31.867	7.392	3.535	675	50	23	848
14	Salawu	1.332	942	908	7.225	6.669	47.597	11.423	4.860	1.009	112	382	1256
15	Puspahiang	628	576	532	3.383	3.781	27.266	9.003	3.147	578	67	152	715
16	Tanjungjaya	741	818	778	2.813	7.399	35.052	7.329	3.803	743	99	153	922
17	Sukaraja	811	820	774	3.966	3.662	40.562	9.685	4.267	860	54	115	1.079
18	Salopa	795	787	758	8.356	5.773	38.587	6.397	4.101	818	22	1051	1.086
19	Jatiwaras	767	721	676	5.157	4.129	40.106	7.296	4.229	850	62	81	1.007
20	Cineam	468	513	468	2.546	5.395	25.689	8.926	3.014	545	53	200	686
21	Karangjaya	275	272	232	2.318	3.547	9.432	4.702	1.645	200	16	496	1.619
22	Manonjaya	1.346	1069	1030	6.248	11.622	48.616	7.511	4.946	1.030	87	480	640
23	Gunungtanjung	524	543	496	2.833	3.348	24.204	7.799	2.889	513	50	465	853
24	Singaparna	738	692	644	4.296	5.532	30.346	6.421	3.406	643	61	542	778
25	Tinewati	622	569	522	3.233	14.735	24.026	5.556	2.874	509	45	667	1124
26	Mangunreja	732	638	591	4.609	3.673	31.516	6.269	3.505	668	48	723	857
27	Sukarame	842	772	726	5.082	11.427	32.037	8.039	3.549	679	42	319	1.411
28	Cigalontang	1.073	1.154	1.122	5.253	9.408	57.772	12.331	5.717	1.225	108	475	847
29	Leuwisari	853	686	640	5.369	7.848	31.827	6.602	3.531	675	89	355	247
30	Padakembang	683	666	648	3.163	6.455	31.593	6.374	3.512	670	53	858	744

No	Kecamatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Pelayanan Kesehatan Balita	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan TB	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV
31	Sariwangi	649	587	546	3.098	5.596	27.663	7.032	3.180	586	61	730	850
32	Sukaratu	787	774	728	3.795	5.585	39.661	7.223	4.191	841	72	150	1.003
33	Cisayong	852	862	818	4.838	10.923	46.452	10.678	4.763	985	29	97	1.232
34	Sukahening	664	576	534	3.133	4010	24.337	7.497	2.900	516	45	905	633
35	Rajapolah	856	856	814	6.441	8.883	38.562	6.819	4.099	817	44	486	1.286
36	Jamanis	725	677	634	3.783	4.913	29.229	6.939	3.312	620	89	333	756
37	Ciawi	1.264	1.266	1233	9.333	8.012	50.304	11.597	5.088	1.067	80	886	1.595
38	Kadipaten	773	726	693	6.383	3.951	30.342	5.959	3.406	643	58	360	767
39	Pagerageung	1119	1021	1060	7.557	6.954	45.077	10.300	4.647	955	93	192	1.129
40	Sukaresik	709	662	628	4.883	9.921	30.354	7.835	3.417	643	119	442	818
41	RS SMC											18	
42	RS RESPATI											875	
Jumlah		30.025	31.989	30.535	29.081	191.970	261.040	1.418.082	309.869	153.474	30.058	2.428	18.629

Sumber: Laporan SPM Kabupaten Tasikmalaya, 2024

f. Bonus Demografi (*Demographic Deviden*)

Pengertian bonus demografi menurut para ahli antara lain sebagai berikut:

1. Jimmy Ginting (2016), menurutnya fenomena ini adalah sebuah ledakan penduduk usia produktif yang kemungkinan akan terjadi di Indonesia pada tahun 2020 hingga 2030.
2. Tifatul Sembiring (Kominfo) mendefinisikan *demographic dividend* sebagai suatu keadaan yang membawa keuntungan, karena jumlah penduduk didominasi oleh individu-individu yang masih berada dalam usia produktif.
3. Wongboonsin (2003) mengartikan masa tersebut sebagai keuntungan ekonomis yang disebabkan oleh menurunnya rasio ketergantungan penduduk, sebagai hasil fertilitas dalam jangka panjang.

Secara umum, bonus demografi adalah kondisi yang terjadi saat sebuah negara memiliki jumlah penduduk usia produktif yang lebih tinggi daripada penduduk usia non-produktif. Usia produktif yang dimaksud adalah rentang usia 15 hingga 64 tahun.

Bonus demografi dapat bermanfaat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tasikmalaya. Pertumbuhan ekonomi merupakan instrumen yang sangat baik dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Manfaat bonus demografi bagi pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya dalam memicu pertumbuhan ekonomi adalah tersedianya sumber daya manusia dalam pembangunan ekonomi yaitu tersedianya tenaga kerja usia produktif. Selain itu, semakin besar jumlah penduduk maka permintaan terhadap barang konsumsi juga akan meningkat, sehingga dapat peningkatan produksi yang akan membuat usaha semakin luas dan meningkatkan usaha baru. Bonus demografi ini dikaitkan dengan munculnya suatu kesempatan yang disebut dengan jendela peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, bonus demografi yang dimanfaatkan dengan optimal akan mengurangi kemiskinan dengan signifikan

Namun demikian, melimpahnya penduduk bisa menciptakan kondisi yang buruk jika tidak dikelola dengan baik. Melimpahnya

penduduk usia kerja yang tidak memiliki keahlian dan keterampilan dapat meningkatkan tingkat pengangguran, tingkat kriminalitas, tingkat kemiskinan, dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, berbagai kebijakan perlu dirumuskan untuk dapat memetik manfaat melalui jendela peluang yang diperkirakan akan terjadi pada tahun 2030-2040 di Indonesia.

Di Kabupaten Tasikmalaya saat ini, komposisi penduduk menurut kelompok umur pada tahun 2023 menunjukkan proporsi penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih besar dibanding penduduk usia non produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas). Perbedaan yang tajam antara kelompok umur tersebut mencerminkan bahwa Kabupaten Tasikmalaya berada dalam masa bonus demografi karena 68,70% penduduknya berada di dalam rentang usia produktif. Namun disisi lain, seiring dengan peningkatan umur harapan hidup, persentase penduduk usia lanjut (60 tahun ke atas) juga mengalami penurunan dari 8,76 persen pada tahun 2022 menjadi 8,60 persen di tahun 2023. Hal ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Tasikmalaya akan memasuki era *Aging Population* dimana persentase penduduk usia 60 tahun ke atas mencapai 10 persen atau lebih dari total populasi penduduk.

Dalam mengoptimalkan manfaat bonus demografi, beberapa hal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya untuk mendorong pembangunan di daerah antara lain sebagai berikut:

1. Mengembangkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
2. Memperluas pasar tenaga kerja
3. Mengelola pertumbuhan populasi
4. Meningkatkan aspek kesehatan penduduk

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat mencakup gambaran dan analisis terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya yang secara spesifik terdiri dari beberapa fokus yaitu:

- a. Fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi;
- b. Fokus kesejahteraan sosial; dan

c. Fokus seni budaya dan olahraga.

Kinerja masing-masing aspek kesejahteraan masyarakat sampai dengan tahun 2023 diuraikan sebagai berikut :

2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat yang tinggi merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap daerah. Namun manfaat tersebut harus juga dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan kata lain, aspek pemerataan menjadi pertimbangan penting dalam keberhasilan pembangunan. Dalam bagian ini akan diuraikan beberapa indikator yang menggambarkan tingkat kesejahteraan dan pemerataan ekonomi Kabupaten Tasikmalaya.

Kondisi perekonomian daerah mempunyai peranan penting dalam mendukung laju pembangunan ekonomi. Keberhasilan pembangunan perekonomian Kabupaten Tasikmalaya ditentukan oleh berbagai indikator makro ekonomi yang tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 2.22
Target dan Capaian Indikator Makro Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2022-2024

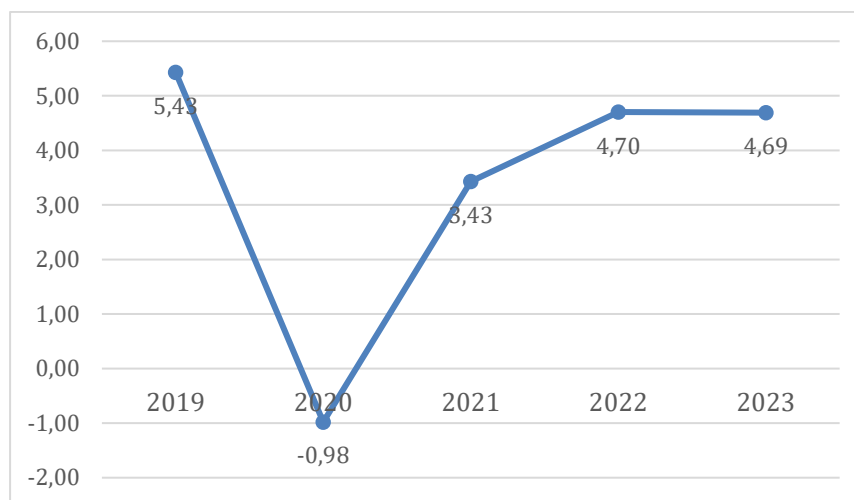
No	Indikator Makro	Satuan	Capaian 2022	Target 2023	Capaian 2023	Target 2024
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	66,84	67,38	69,38	67,91
2	Persentase Penduduk Miskin	%	10,73	10,67	10,28	10,60
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,17	4,17	3,89	4,17
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,70	4,50	4,69	4,50
5	PDRB Per Kapita ADHK	Rp. Juta	13,82	14,20	24,17	14,57
6	Ketimpangan Pendapatan (<i>Gini Ratio</i>)	Poin	0,378	0,370	0,404	0,370

Sumber: - RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026
- BPS Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024

a. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah

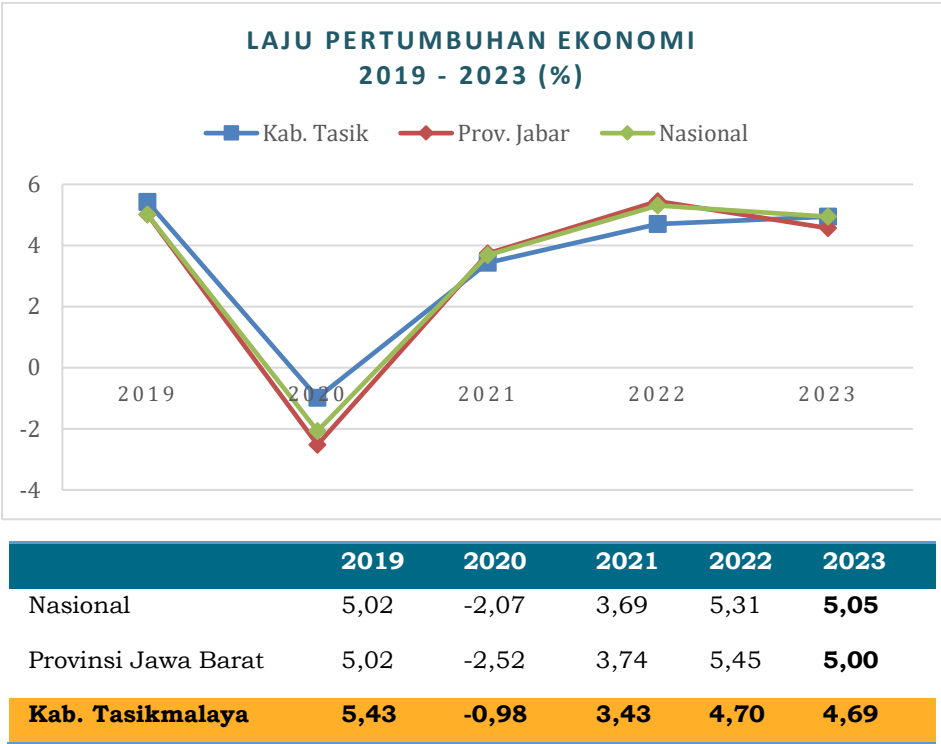
barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun. Besaran nilai laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB Atas Dasar Harga Konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Berikut adalah grafik pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019-2023.



Gambar 2.16
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2019-2023

Sumber: BPS Kabupaten Tasikmalaya, 2024

Terdapat fluktuasi dalam pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tasikmalaya selama tahun 2019-2023. Meskipun angka pertumbuhan ekonomi cenderung naik dan turun, tren umum menunjukkan adanya peningkatan. Namun, pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan akibat dampak pandemi Covid-19 sebelum pertumbuhan ekonomi mulai pulih kembali pada tahun 2021 dengan nilai 3,43% didorong oleh pelonggaran pembatasan dan stimulus ekonomi. Tren positif berlanjut pada 2022 dan 2023 hingga mencapai 4,70% dan 4,69%, menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten Tasikmalaya dalam kondisi stabil.



Gambar 2.17
Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten
Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2019-2023
 Sumber : BPS, 2024

Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2021-2023 berada di bawah Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Berikutnya adalah tabel perbandingan LPE Kabupaten Tasikmalaya dengan Kabupaten/Kota Sekitar.

Tabel 2.23
Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional,
Kabupaten/Kota Sekitar,
dan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2023

Kabupaten/Kota	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)		
	2021	2022	2023
Nasional	3,69	5,31	5,05
Provinsi Jawa Barat	3,74	5,45	5,00
Kabupaten Garut	3,58	5,08	4,94
Kabupaten Tasikmalaya	3,43	4,70	4,69
Kabupaten Ciamis	3,66	5,02	4,99
Kabupaten Pangandaran	3,67	5,03	5,26
Kota Tasikmalaya	3,57	5,01	5,96
Kota Banjar	3,69	4,28	4,63

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2024

Peningkatan ini menunjukkan adanya upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dalam memperbaiki kondisi

ekonomi dan memacu pertumbuhan. Beberapa langkah yang dilakukan antara lain adalah revitalisasi pasar tradisional seperti Taraju, Ciawi, Manonjaya, Ciikatomas, Singaparna. Selain itu, terdapat pengembangan destinasi wisata, kemudahan perizinan dalam membuka usaha melalui pelayanan satu pintu, pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi melalui MTU (Mitra Terampil Usaha) dan BLK (Balai Latihan Kerja), serta pembangunan pusat layanan terpadu UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah).

Langkah-langkah tersebut bertujuan untuk mendorong sektor ekonomi di Kabupaten Tasikmalaya, memberikan dukungan kepada pelaku usaha, meningkatkan kualitas tenaga kerja, dan memperluas peluang bisnis. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan manusia di Kabupaten Tasikmalaya. Pemerintah perlu terus melakukan upaya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan, merangsang sektor-sektor ekonomi yang potensial, dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi dan usaha. Dengan strategi dan kebijakan yang tepat, diharapkan Kabupaten Tasikmalaya dapat terus mengalami pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

b. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) didefinisikan sebagai jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam satu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam satu wilayah. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga pada setiap tahun (harga yang mengalami perubahan sesuai dengan ekonomi yang terjadi), sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dan menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai dasar.

Berdasarkan indikator pertumbuhan PDRB, Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tasikmalaya dapat dilihat dari nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dihitung dengan dua pendekatan harga yaitu harga berlaku dan harga konstan yang semakin meningkat.

PDRB Kabupaten Tasikmalaya Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) pada Tahun 2023 mencapai Rp 46.097.955,1. Sedangkan PDRB Kabupaten Tasikmalaya Atas Dasar Harga Konstan 2010 (ADHK) pada Tahun 2023 mencapai Rp 27.599.158,6.

Selama tahun 2019-2023, sektor-sektor yang memberikan kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB Atas Dasar Harga Konstan adalah Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Perdagangan Besar dan Eceran, Konstruksi, Industri Pengolahan, Informasi dan Komunikasi serta Jasa Pendidikan. Perkembangan nilai PDRB atas dasar harga konstan dan kontribusi sektor dalam PDRB Kabupaten Tasikmalaya selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.24
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha
(juta rupiah), 2019-2023 Kabupaten Tasikmalaya

No	Lapangan Usaha/Industry	2019	2020	2021	2022	2023
		Juta (Rp.)	Juta (Rp.)	Juta (Rp.)	Juta (Rp.)	Juta (Rp.)
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	8.031.420,90	8.136.220	8.440.770	8.828.223,00	9.079.899,0
2	Pertambangan dan Penggalian	61.885,00	61.800	66.010	67.062,09	68.092,8
3	Industri Pengolahan	1.817.901,10	1.945.720	1.993.850	2.127.604,36	2.271.455,5
4	Pengadaan Listrik dan Gas	16.966,50	16.450	18.480	18.969,19	19.459,4
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	4.556,80	5.490	5.890	6.007,56	6.088,2
6	Konstruksi	2.063.533,90	2.117.750	2.249.900	2.345.928,72	2.345.008,4
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.698.019,30	4.665.390	4.810.240	5.017.998,82	5.375.350,5
8	Transportasi dan Pergudangan	769.533,90	814.740	815.580	867.880,22	962.018,8
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	314.401,80	366.390	360.480	398.139,56	419.639,4
10	Informasi dan Komunikasi	1.137.838,60	1.593.620	1.714.860	1.819.575,72	1.944.347,7
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	715.331,60	742.910	777.120	804.755,59	849.759,2
12	Real Estat	356.030,20	394.880	436.890	461.370,95	492.569,6
13	Jasa Perusahaan	108.844,80	101.100	109.710	120.404,49	131.700,8
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	980.438,90	961.500	943.040	932.479,27	970.824,1
15	Jasa Pendidikan	1.604.208,70	1.774.070	1.775.530	1.827.554,49	1.908.831,2
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	175.575,50	185.780	196.330	210.464,45	226.912,2
17	Jasa Lainnya	436.426,10	461.060	464.810	507.242,67	527.201,8
Produk Domestik Bruto		23.319.913,60	24.344.860	25.179.480	26.361.661,16	27.599.158,6

Sumber : BPS Kabupaten Tasikmalaya, 2024

Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan memiliki pertumbuhan dan kontribusi terbesar terhadap PDRB Kabupaten Tasikmalaya. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tasikmalaya terus meningkat dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023.

Sedangkan Perkembangan nilai PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha Kabupaten Tasikmalaya selama 5 tahun terakhir seperti pada tabel berikut :

Tabel 2.25
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah),
2019 - 2023 Kabupaten Tasikmalaya

No	Lapangan Usaha/Industry	2019	2020	2021	2022	2023
		Juta (Rp.)	Juta (Rp.)	Juta (Rp.)	Juta (Rp.)	Juta (Rp.)
1	Pertanian,Kehutanan,dan Perikanan	12.938.947,60	14.155.600	14.777.110	16.213.265,61	17.411.171,9
2	Pertambangan dan Penggalian	78.160,00	80.760	88.330	91.112,60	97.524,2
3	Industri Pengolahan	2.566.499,20	2.854.810	3.003.520	3.310.543,22	3.676.746,2
4	Pengadaan Listrik dan Gas	23.505,60	22.980	25.920	28.564,09	29.999,3
5	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah,Limbah,dan Daur Ulang	6.811,90	8.610	9.280	9.770,45	10.340,7
6	Konstruksi	2.734.803,70	2.900.240	3.240.480	3.459.944,68	3.567.843,1
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6.523.937,20	6.807.150	7.144.880	7.810.320,50	8.507.691,5
8	Transportasi dan Pergudangan	1.461.111,00	1.580.380	1.613.980	1.776.345,29	2.107.189,5
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	451.275,30	535.910	544.390	626.415,23	687.637,0
10	Informasi dan Komunikasi	1.134.141,40	1.577.190	1.691.920	1.789.723,84	1.913.908,1
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.057.418,00	1.146.700	1.237.950	1.367.788,72	1.501.964,0
12	Real Estat	439.231,40	494.660	548.080	588.724,20	638.115,6
13	Jasa Perusahaan	149.162,40	162.320	177.470	203.056,94	230.724,0
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	1.492.615,50	1.480.540	1.462.900	1.442.894,76	1.525.883,2
15	Jasa Pendidikan	2.115.858,90	2.752.700	2.813.570	2.925.546,20	3.087.083,9
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	218.539,50	244.650	263.270	287.224,05	317.850,9
17	Jasa Lainnya	578.185,90	638.230	642.590	728.262,39	786.282,0
Produk Domestik Bruto		33.970.204,2	37.443.450	39.285.640	42.659.502,77	46.097.955,1

Sumber : BPS Kabupaten Tasikmalaya, 2024

c. Inflasi

Sebagaimana dikutip dari laman resmi Bank Indonesia (BI), inflasi diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Kebalikan dari inflasi adalah deflasi, yakni penurunan harga barang secara umum dan terus menerus. Penyebab inflasi karena banyak faktor. Menurut laman resmi Kementerian Keuangan, setidaknya ada enam faktor penyebab inflasi antara lain permintaan yang tinggi terhadap suatu barang atau jasa sehingga membuat harga barang atau jasa tersebut mengalami kenaikan. Penyebab inflasi lainnya yakni adanya peningkatan biaya produksi, bertambahnya uang yang beredar di masyarakat, dan ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran. Penyebab inflasi berikutnya perilaku masyarakat yang seringkali memprediksi atau biasa disebut sebagai inflasi ekspektasi, dan terakhir penyebab inflasi karena kekacauan ekonomi dan politik

Berdasarkan the *Classification of individual consumption by purpose*, inflasi yang diukur dengan IHK di Indonesia dikelompokkan ke dalam 7 kelompok pengeluaran yaitu :

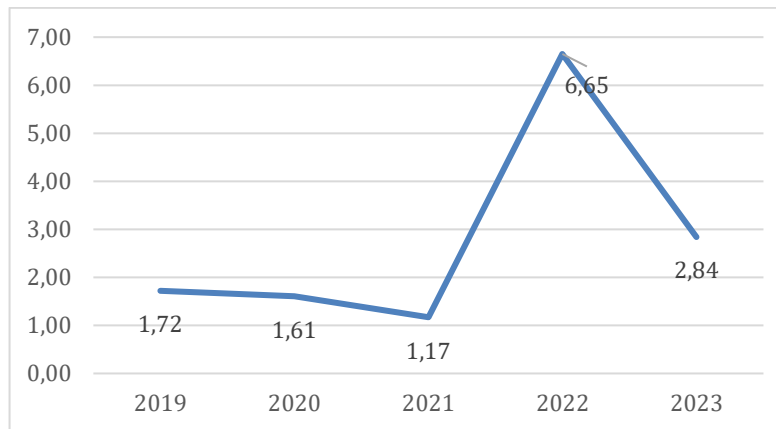
- 1) Kelompok Bahan Makanan;
- 2) Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau;
- 3) Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar;
- 4) Kelompok Sandang;
- 5) Kelompok Kesehatan;
- 6) Kelompok Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga;
- 7) Kelompok Transpor, Komunikasi, dan Jasa Keuangan.

Berdasarkan tingkat keparahannya, inflasi dibagi menjadi 4 yaitu:

- 1) **Inflasi Ringan**, yaitu inflasi yang mudah untuk dikendalikan dan belum begitu mengganggu perekonomian suatu negara. Terjadi kenaikan harga barang/jasa secara umum, yaitu di bawah 10% per tahun dan dapat dikendalikan.
- 2) **Inflasi Sedang**, yaitu inflasi yang dapat menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat berpenghasilan tetap, namun belum membahayakan aktivitas perekonomian suatu negara. Inflasi ini berada di kisaran 10% – 30% per tahun.

- 3) **Inflasi Berat**, yaitu inflasi yang mengakibatkan kekacauan perekonomian di suatu negara. Pada kondisi ini umumnya masyarakat lebih memilih menyimpan barang dan tidak mau menabung karena bunganya jauh lebih rendah ketimbang nilai inflasi. Inflasi ini berada di kisaran 30% – 100% per tahun.
- 4) **Inflasi Sangat Berat** (*Hyperinflation*), yaitu inflasi yang telah mengacaukan perekonomian suatu negara dan sangat sulit untuk dikendalikan meskipun dilakukan kebijakan moneter dan fiskal. Inflasi ini berada di kisaran 100% ke atas per tahun.

Kondisi perekonomian yang baik, idealnya adalah apabila angka pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dibanding dengan perkembangan harga atau besaran PDRB ADHK berada di atas PDRB ADHB. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara makro potensi ekonomi di Kabupaten Tasikmalaya masih dalam tahap berkembang sebagaimana yang terjadi pada hampir seluruh daerah di Provinsi Jawa Barat, bahkan di tingkat nasional. Sementara itu, tingkat pendapatan masyarakat dapat ditunjukkan oleh PDRB yang dapat menggambarkan tingkat kemajuan perekonomian pada suatu daerah. Tingkat pendapatan perkapita dibandingkan dengan laju inflasi akan menunjukkan seberapa besar kekuatan daya beli masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya. Hal ini bisa dikatakan jika pertumbuhan pendapatan diasumsikan sama dengan kesejahteraan masyarakat maka gap antara pertumbuhan pendapatan dengan tingkat inflasi menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum. Perkembangan inflasi Kabupaten Tasikmalaya mengacu pada tingkat inflasi Kota Tasikmalaya. Sampai dengan bulan Desember 2023 tingkat inflasi Kota Tasikmalaya sebesar 2,84% (mtm). Perkembangan inflasi Kota/Kabupaten Tasikmalaya dapat terlihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 2.18
Inflasi Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2023
Sumber : BPS Kabupaten Tasikmalaya, 2024

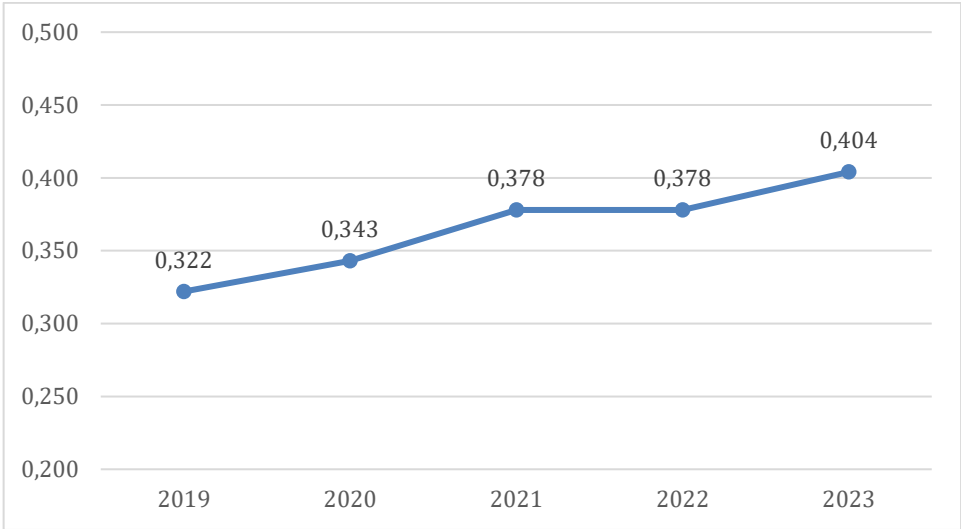
Secara umum inflasi di Kota/Kabupaten Tasikmalaya termasuk kriteria ringan atau *creeping inflation* karena kurang dari 10% setahun. Inflasi seperti ini wajar terjadi pada negara atau daerah berkembang yang selalu berada dalam proses pembangunan. Inflasi sendiri memiliki dampak positif maupun dampak negatif, hal ini tergantung pada parah atau tidaknya inflasi.

2.1.2.2.Fokus Kesejahteraan Sosial

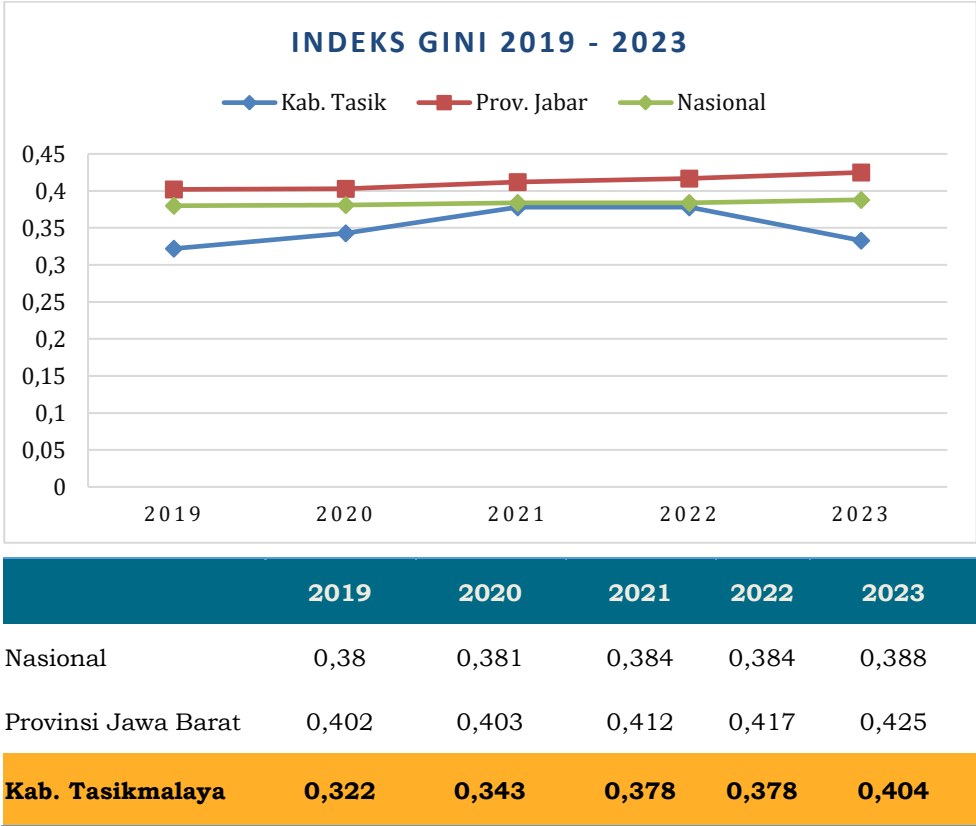
a. Ketimpangan Pendapatan (*Gini Ratio*)

Indeks Gini (*Gini Ratio*) merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Gini Ratio berkisar antara 0 hingga 1. Gini Ratio bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan, Gini Ratio bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa. Gini Ratio diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk. Kategori Gini Ratio adalah:

- a) $G < 0,3$ = ketimpangan rendah,
- b) $0,3 \leq G \leq 0,5$ = ketimpangan sedang, dan
- c) $G > 0,5$ = ketimpangan tinggi.



Gambar 2.19
Indeks Gini Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2023
Sumber : BPS Kabupaten Tasikmalaya, 2024



Gambar 2.20
Perbandingan Gini Ratio Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2019-2023
Sumber : BPS, 2024

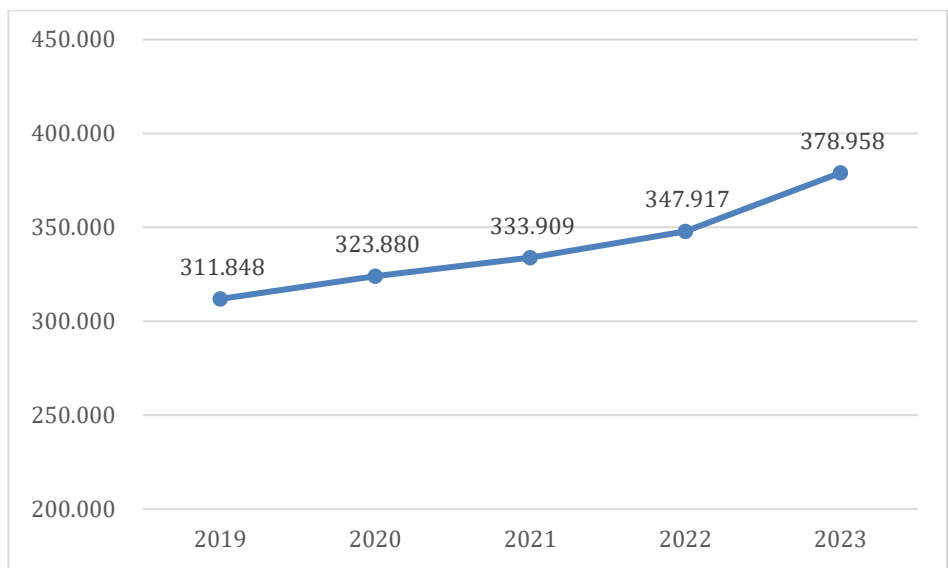
Tahun 2023 Indeks Gini Kabupaten Tasikmalaya mengalami kenaikan menjadi 0,404 poin dari 0,378 pada tahun 2022, namun masih berada pada kategori yang sama yaitu SEDANG. Jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat Indeks Gini Kabupaten Tasikmalaya lebih

rendah, namun masih berada diatas nasional. Diharapkan posisi ini secara bertahap mampu menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat.

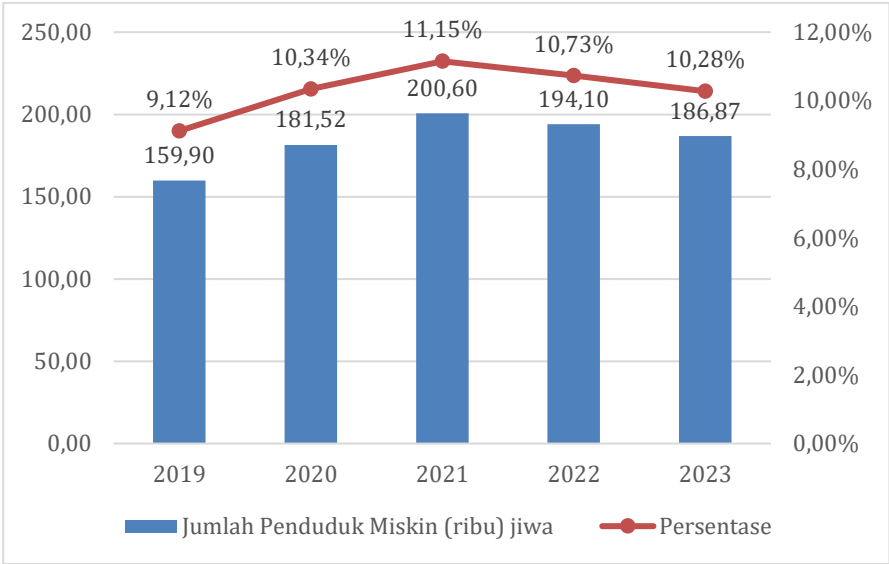
b. Persentase Penduduk Miskin

Kemiskinan untuk beberapa daerah dan lingkup pemerintah merupakan suatu hal yang memiliki pandangan negatif dalam pencapaian pembangunan daerah karena sering kali menghambat laju pembangunan manusia misalnya penduduk miskin sering mengalami kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan yang layak. Kemiskinan menjadi beban sekaligus tanggung jawab yang harus diemban oleh segenap pemerintah daerahdi Indonesia beserta semua aspek yang mempengaruhinya.

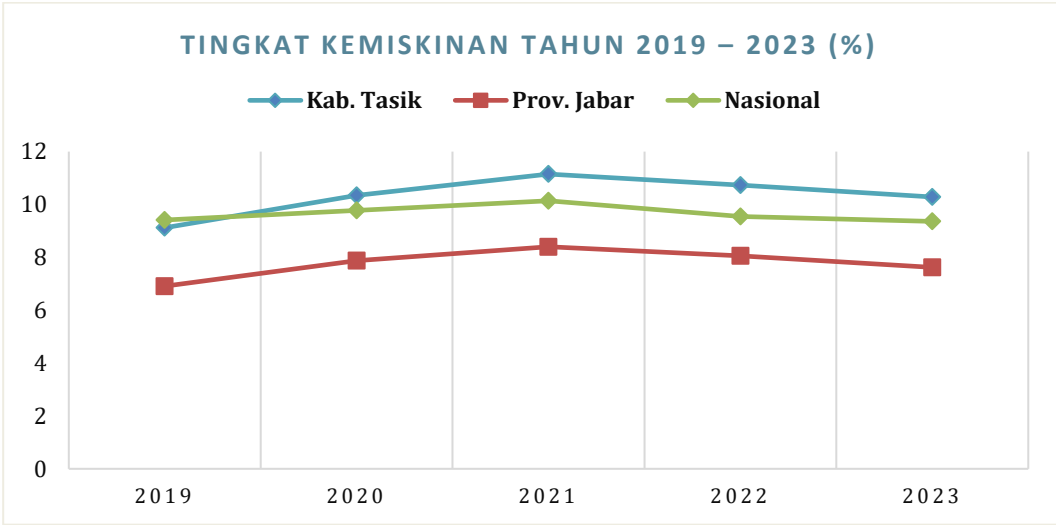
Persentase penduduk miskin yang kemudian disebut tingkat kemiskinan adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023 dilihat dari pendapatan di bawah Rp378.958/kapita/bulan sebagaimana ditampilkan pada gambar berikut.



Gambar 2.21
Garis Kemiskinan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2023
 Sumber : BPS Kabupaten Tasikmalaya, 2024



Gambar 2.22
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2023
Sumber : BPS Kabupaten Tasikmalaya, 2024



	2019	2020	2021	2022	2023
Nasional	9,41	9,78	10,14	9,54	9,36
Provinsi	6,91	7,88	8,4	8,06	7,62
Kab. Tasikmalaya	9,12	10,34	11,15	10,73	10,28

Gambar 2.23
Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Tasikmalaya,
Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2019-2023
Sumber : BPS, 2024

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 10,28%, namun masih berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Oleh karena itu dalam upaya

menurunkan tingkat kemiskinan perlu melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan dan program terkait penanggulangan kemiskinan agar tepat sasaran.

Tabel 2.26
Perbandingan Tingkat Kemiskinan Nasional,
Kabupaten/Kota Sekitar,
dan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2023

Kabupaten/Kota	Tingkat Kemiskinan (%)		
	2021	2022	2023
Nasional	10,14	9,54	9,36
Provinsi Jawa Barat	8,4	8,06	7,62
Kabupaten Garut	10,65	10,42	9,77
Kabupaten Tasikmalaya	11,15	10,73	10,28
Kabupaten Ciamis	7,97	10,42	7,42
Kabupaten Pangandaran	9,65	7,72	8,98
Kota Tasikmalaya	13,13	12,72	11,53
Kota Banjar	7,11	6,73	6,14

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2024

Persentase Penduduk Miskin (p0) Kabupaten Tasikmalaya selama periode tahun 2019-2023 secara signifikan mengalami penurunan, hal ini berarti bahwa pembangunan yang telah dilaksanakan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya telah memberikan dampak positif dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Namun adanya Pandemi Covid-19 yang berlangsung selama dua tahun menjadi salah satu faktor kenaikan persentase penduduk miskin menjadi 10,34% pada tahun 2020, sedangkan pada tahun 2021 menjadi 11,15% dan menurun kembali pada tahun 2022 dan 2023 menjadi 10,73% dan 10,28%.

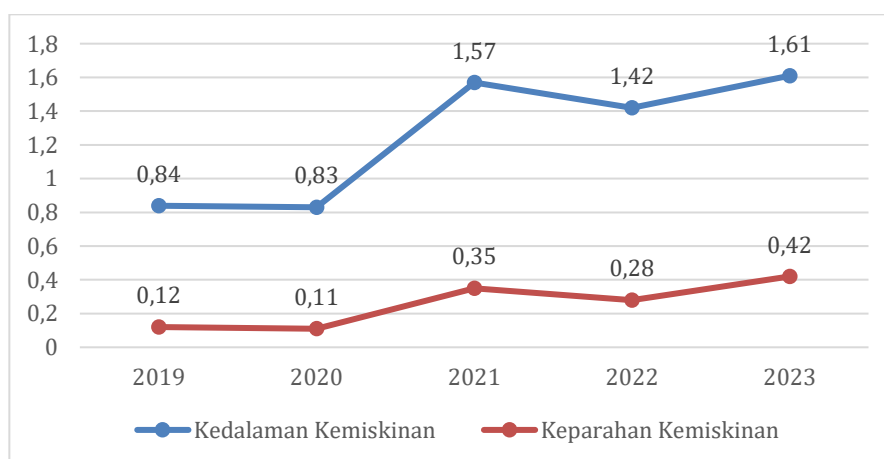
Permasalahan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk, kebijakan penanggulangan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Nilai agregat dari *poverty gap index* menunjukkan biaya mengentaskan kemiskinan dengan membuat target transfer yang sempurna terhadap

penduduk miskin dalam hal tidak adanya biaya transaksi dan faktor penghambat. Semakin kecil nilai *poverty gap index*, semakin besar potensi ekonomi untuk dana pengentasan kemiskinan berdasarkan identifikasi karakteristik penduduk miskin dan juga untuk target sasaran bantuan dan program. Penurunan nilai indeks Kedalaman Kemiskinan mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit.

Indeks Keparahan Kemiskinan (*Proverty Severity Index-P2*) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Indikator ini memberikan informasi yang saling melengkapi pada insiden kemiskinan. Sebagai contoh, mungkin terdapat kasus bahwa beberapa kelompok penduduk miskin memiliki insiden kemiskinan yang tinggi tetapi jurang kemiskinannya (*poverty gap*) rendah, sementara kelompok penduduk lain mempunyai insiden kemiskinan yang rendah tetapi memiliki jurang kemiskinan yang tinggi bagi penduduk yang miskin.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Tasikmalaya mengalami kenaikan. Pada tahun 2023, PI tercatat mengalami kenaikan menjadi 1,61 yang semula 1,42 pada tahun 2022. Demikian pula halnya dengan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami kenaikan dari 0,28 pada tahun 2022 menjadi 0,42 pada tahun 2023.



Gambar 2.24
Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2023

Sumber : BPS Kabupaten Tasikmalaya, 2024

c. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks dimana bertujuan untuk dapat memberikan gambaran terkait pembangunan manusia disuatu wilayah. Indonesia sendiri pertama kali menghitung IPM pada tahun 1996. Sejak saat itu hingga sekarang IPM terus dihitung. Indikator IPM pun juga mengalami perubahan dan menyesuaikan dengan kebutuhan.

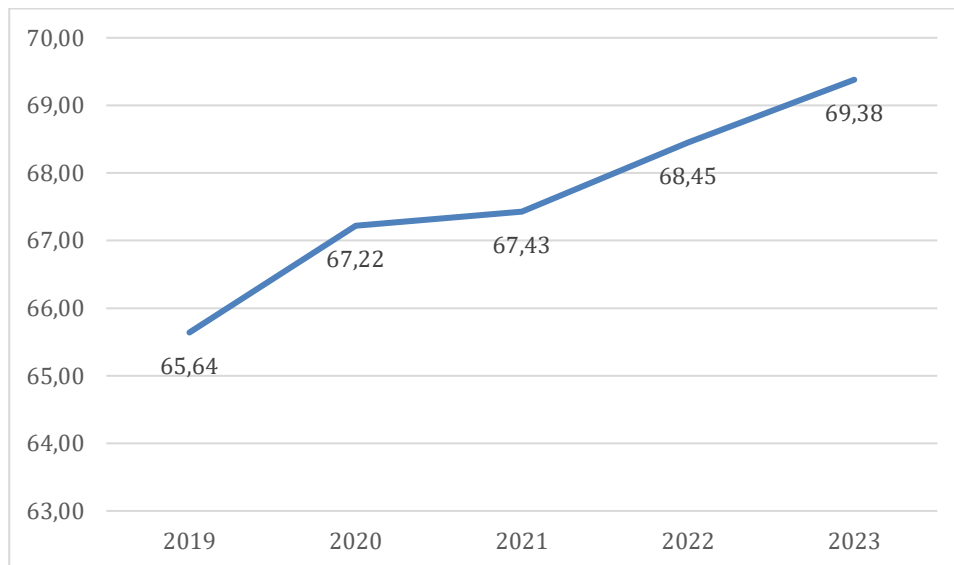
IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/ penduduk). IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU). Capaian IPM antar wilayah dapat dilihat melalui pengelompokkan IPM ke dalam kategori sebagai berikut:

IPM <60 : IPM rendah

$60 \leq \text{IPM} < 70$: IPM sedang

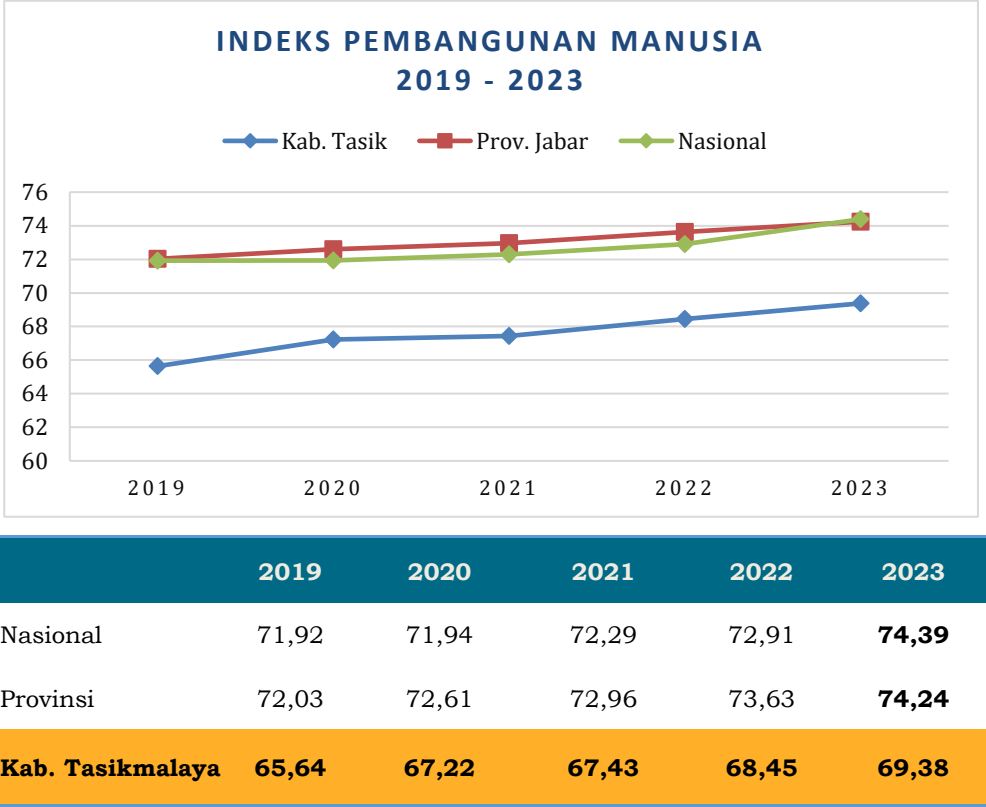
$70 \leq \text{IPM} < 80$: IPM tinggi

$\text{IPM} \geq 80$: IPM sangat tinggi



Gambar 2.25
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2019-2023

Sumber : BPS Kabupaten Tasikmalaya, 2024



Gambar 2.26
Perbandingan IPM Kabupaten Tasikmalaya,
Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2019-2023
Sumber : BPS, 2024

Tahun 2019 – 2023, IPM Kab. Tasikmalaya lebih rendah dari Rata-rata Provinsi Jawa Barat dan Nasional, namun mengalami kenaikan setiap tahunnya. Berikutnya adalah tabel perbandingan IPM Kabupaten Tasikmalaya dengan Kabupaten/Kota Sekitar.

Tabel 2.27
Perbandingan IPM Nasional, Kabupaten/Kota Sekitar,
dan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2023

Kabupaten/Kota	IPM (Poin)		
	2021	2022	2023
Nasional	72,29	72,91	74,39
Provinsi Jawa Barat	72,96	73,63	74,24
Kabupaten Garut	67,53	68,51	69,22
Kabupaten Tasikmalaya	67,43	68,45	69,38
Kabupaten Ciamis	72,00	72,52	73,12
Kabupaten Pangandaran	69,46	70,21	70,57
Kota Tasikmalaya	74,31	74,84	75,47
Kota Banjar	73,30	73,93	74,45

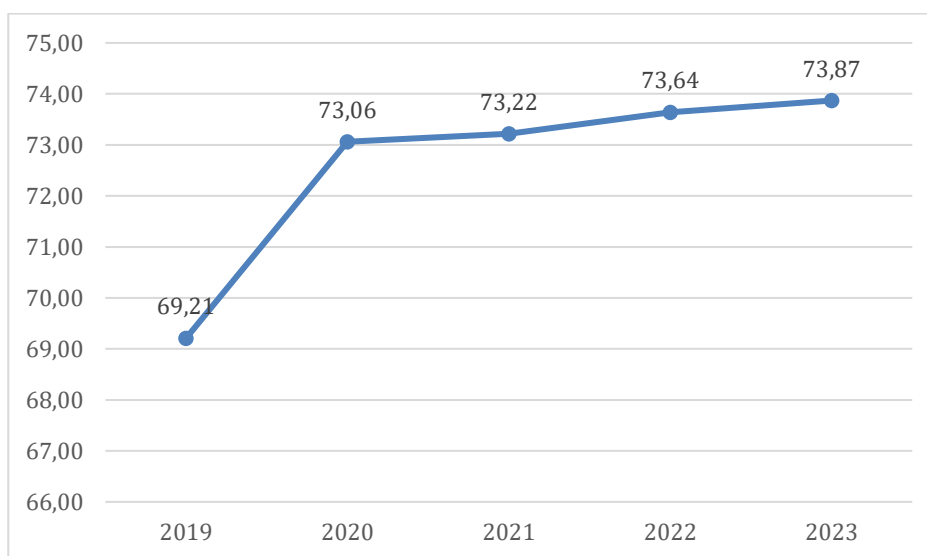
Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2024

Secara umum, IPM Kabupaten Tasikmalaya dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir mengalami peningkatan. Pada tahun 2023 mencapai

69,38, meningkat 0.93 dibanding tahun 2022 dengan capaian 68,45. IPM Kabupaten Tasikmalaya berada dalam kategori SEDANG. Untuk meningkatkan capaian IPM, perlu meningkatkan capaian pada faktor atau variabel pembentuk yaitu Indeks Pendidikan, Indeks Kesehatan dan Pengeluaran Perkapita, serta melakukan analisis terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi pada ketiga variabel di Kabupaten Tasikmalaya.

Saat ini IPM terdiri dari 3 variabel pembentuk yang meliputi Indeks Pendidikan, Indeks Kesehatan, dan Indeks Pengeluaran Per kapita. Masing-masing indeks tersebut dibentuk melalui indikator yang meliputi Angka Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah, Rata-Rata Lama Sekolah, dan Pengeluaran Per Kapita.

Angka Harapan Hidup Saat Lahir-AHH (*Life Expectancy-e₀*)Angka Harapan Hidup saat Lahir didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir.AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. AHH dihitung dari hasil sensus dan survei kependudukan.Angka Harapan Hidup Saat Lahir berhubungan erat dengan pembangunan bidang kesehatan. Kesehatan merupakan inti dari kesejahteraan dan hal ini merupakan hal yang fundamental untuk membentuk kemampuan manusia yang lebih luas sebagai inti makna pembangunan. Apabila dilihat lebih jauh lagi, kesehatan merupakan prasyarat bagi peningkatan produktivitas.

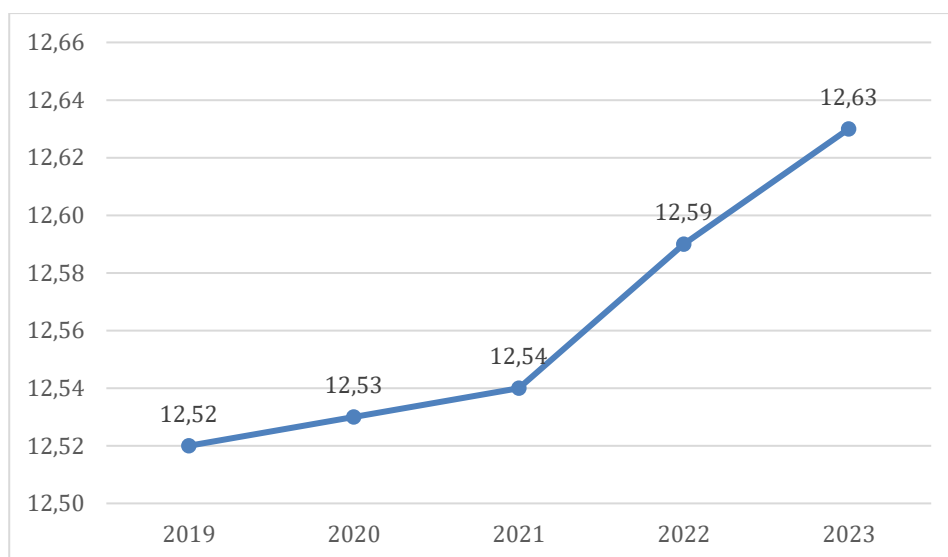


Gambar 2.27
Angka Harapan Hidup
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2023
 Sumber : BPS Kabupaten Tasikmalaya, 2024

Secara umum, AHH Kabupaten Tasikmalaya dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir mengalami peningkatan. AHH Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2023 mencapai 73,87 tahun, meningkat dibanding tahun 2022 dengan capaian 73,64 tahun.

Angka Harapan Lama Sekolah-HLS (*Expected Years of Schooling - EYS*). HLS adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunansistem pendidikan diberbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuklamanya pendidikan yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Angka HLS menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk mengenyam pendidikan formal pada waktu tertentu.



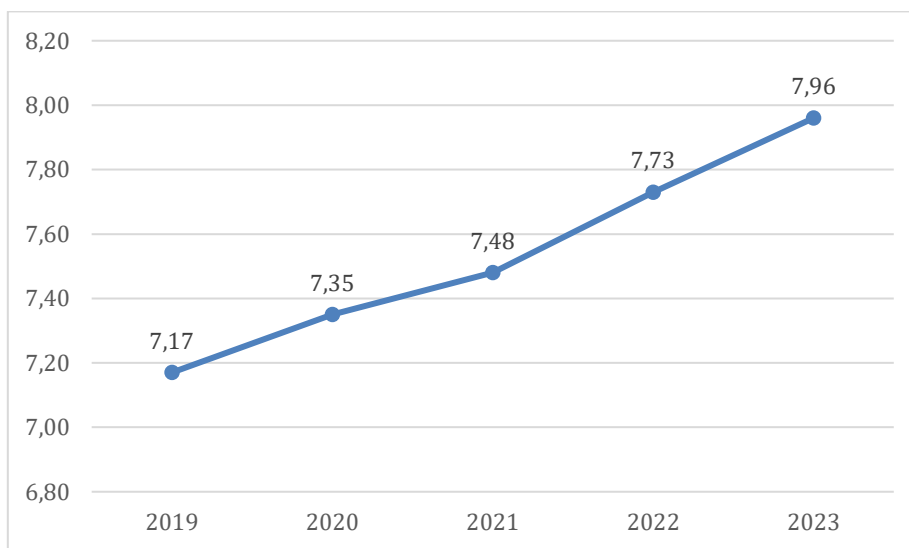
Gambar 2.28
Angka Harapan Lama Sekolah
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2023
 Sumber : BPS Kabupaten Tasikmalaya, 2024

HLS Kabupaten Tasikmalaya dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir mengalami peningkatan. Pada tahun 2023, HLS mencapai 12,63 tahun atau meningkat 0,04 tahun dibanding tahun 2022 dengan capaian 12,59 tahun.

Rata-rata Lama Sekolah-RLS didefnisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Di Indonesia sendiri, Rata-rata Lama Sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia

15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan yang pernah dijalani. Untuk mereka yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, tamat SM diperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak. RLS dapat digunakan untuk mengetahui kualitas pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah.

Rata-rata lama sekolah merupakan variabel yang dapat mempengaruhi jumlah persentase penduduk miskin di suatu wilayah. Semakin tinggi capaian angka rata-rata lama sekolahnya maka bisa diprediksi jumlah penduduk miskinnya relatif kecil. Peningkatan keahlian atau pendidikan akan membuat orang lebih mudah mencari pekerjaan atau lebih banyak pilihan pekerjaan. Saputra (2011) menyatakan teori pertumbuhan baru menekankan pentingnya peranan pemerintah terutama dalam meningkatkan pembangunan modal manusia dan mendorong penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan produktivitas manusia.



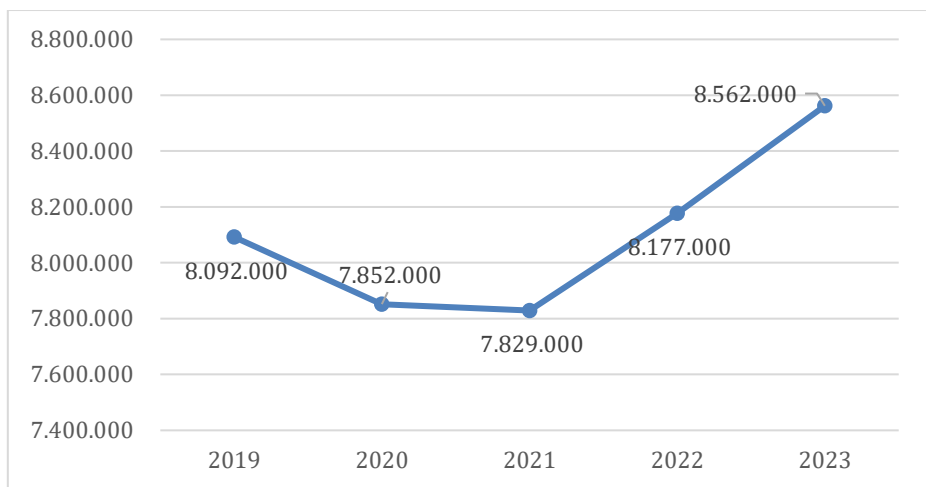
Gambar 2.29
Rata-rata Lama Sekolah
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2023
 Sumber : BPS Kabupaten Tasikmalaya, 2024

Pada tahun 2023, capaian Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Tasikmalaya 7,96 tahun, Hal ini dapat diartikan bahwa rata-rata penduduk Kabupaten Tasikmalaya hanya mampu mengenyam pendidikan sampai kelas 7 atau kelas 1 SMP.

Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama

sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga. Pengeluaran untuk konsumsi makanan dihitung selama seminggu terakhir, sedangkan konsumsi bukan makanan dihitung sebulan dan setahun terakhir. Baik konsumsi makanan maupun bukan makanan selanjutnya dikonversikan ke dalam pengeluaran rata-rata sebulan. Angka konsumsi/pengeluaran rata-rata per kapita yang disajikan dalam publikasi ini diperoleh dari hasil bagi jumlah konsumsi seluruh rumah tangga (baik mengonsumsi makanan maupun tidak) terhadap jumlah penduduk.

Pengeluaran perkapita dipengaruhi oleh pendapatan perkapita, sedangkan pendapatan perkapita berpengaruh terhadap peningkatan kesempatan kerja.



Gambar 2.30
Pengeluaran per Kapita
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2023

Sumber: BPS Kabupaten Tasikmalaya, 2024

Pengeluaran per kapita Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2023 mengalami kenaikan dari tahun 2022. Pada tahun 2023 sebesar Rp 8.562.000,00 per tahun naik dari tahun 2022 dengan capaian Rp8.177.000,00 per tahun.

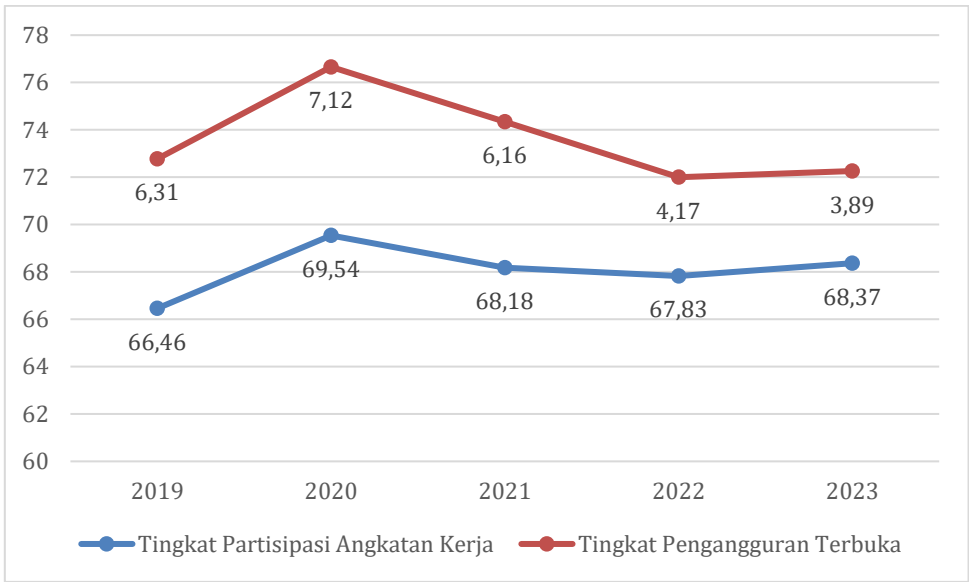
d. Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) saat ini menjadi salah satu Indikator Kinerja Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase

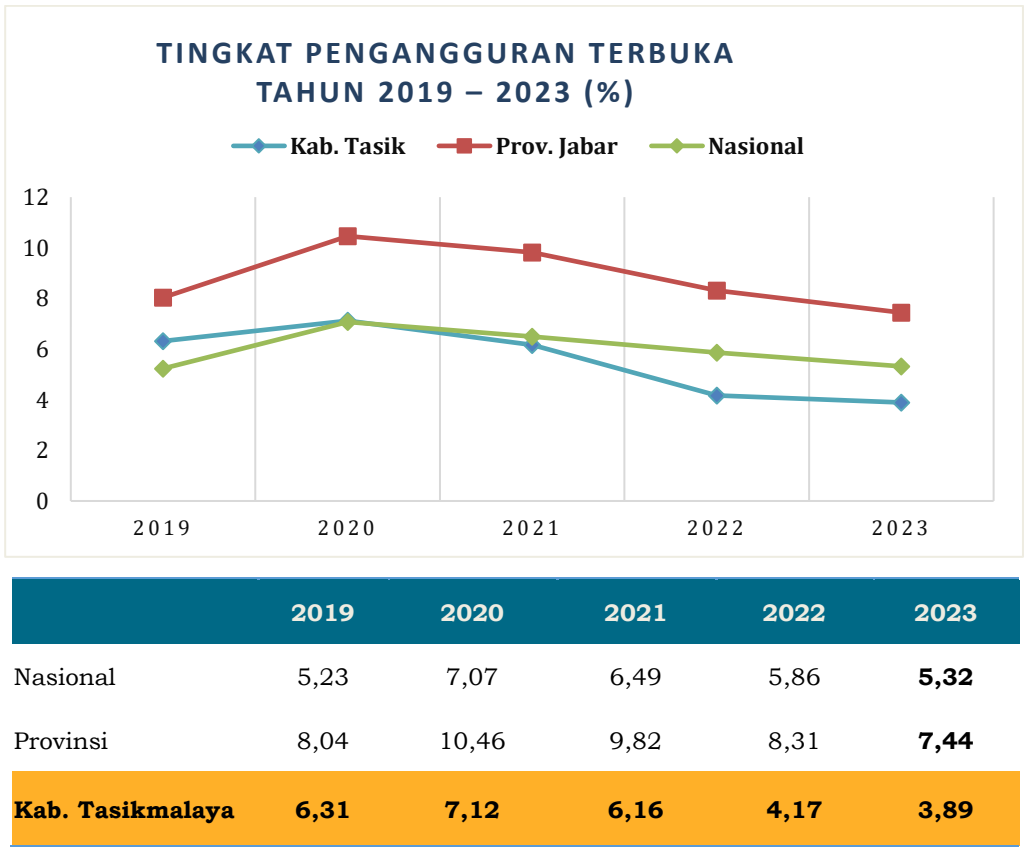
jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja, sehingga berdasarkan definisi tersebut dan rumus yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), maka besar kecilnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dapat ditentukan oleh 2 variabel, yaitu jumlah angkatan kerja dan jumlah pengangguran.

Jumlah Angkatan Kerja bila dilihat dari karakteristiknya memiliki perkembangan yang cenderung alamiah, dimana dalam setiap tahun jumlah angkatan kerja selalu mengalami pertumbuhan, mengingat selain disebabkan oleh bertambahnya usia, setiap manusia dengan usia yang cukup (> 15 tahun) setelah lulus sekolah pada umumnya mereka telah bekerja dan mencari pekerjaan untuk memperoleh penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Terkait dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), jumlah pengangguran merupakan salah satu variabel yang menarik untuk dibahas secara lebih mendalam, mengingat pengangguran menjadi suatu persoalan dalam pembangunan yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Keberadaan pengangguran menggambarkan banyaknya orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Terjadinya pengangguran disebabkan oleh beberapa faktordiantaranya pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan penduduk, tingkat pendidikan, tingkat upah, dan tingkat inflasi.

Tingkat Pengangguran Terbuka merupakan perbandingan antara jumlah pencari kerja terhadap angkatan kerja, sedangkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja adalah perbandingan antara angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas.



Gambar 2.31
Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2023
Sumber : BPS Kabupaten Tasikmalaya, 2024



Gambar 2.32
Perbandingan TPT Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2019-2023
Sumber : BPS, 2024

Tingkat pengangguran di Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2023 sebesar 3,89% cukup baik di bawah capaian Provinsi Jawa Barat maupun Nasional. Berikut adalah tabel perbandingan tingkat

pengangguran terbuka Kabupaten Tasikmalaya dengan Kabupaten/Kota Sekitar.

Tabel 2.28
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka
Nasional, Kabupaten/Kota Sekitar,
dan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2023

Kabupaten/Kota	TPT (%)		
	2021	2022	2023
Nasional	6,49	5,86	5,32
Provinsi Jawa Barat	9,82	8,31	7,44
Kabupaten Garut	8,68	7,60	7,33
Kabupaten Tasikmalaya	6,16	4,17	3,89
Kabupaten Ciamis	5,06	3,75	3,52
Kabupaten Pangandaran	3,25	1,56	1,52
Kota Tasikmalaya	7,66	6,62	6,55
Kota Banjar	6,09	5,53	5,43

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2024

Tingkat Pengangguran terbuka (TPT) Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2023 dibandingkan dengan kabupaten/kota di wilayah Priangan berada pada peringkat ketiga terendah setelah Kabupaten Pangandaran dan kabupaten Ciamis. Capaian tahun 2023 merupakan yang terbaik dan terendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Walaupun Kabupaten Tasikmalaya memiliki sedikit lapangan usaha skala besar, data menunjukkan bahwa UMKM turut berperan dalam menyerap Angkatan kerja serta didukung oleh konsistensi Balai Latihan Kerja (BLK) yang melaksanakan program jemput bola ke desa-desa untuk menyelenggarakan pelatihan-pelatihan sesuai kebutuhan pasar kerja.

2.1.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Pembangunan kebudayaan di Kabupaten Tasikmalaya ditujukan untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah serta mempertahankan jati diri dan nilai-nilai budaya daerah ditengah-tengah semakin derasnya arus informasi dan pengaruh budaya global. Pembangunan seni dan budaya di Kabupaten Tasikmalaya sudah mengalami kemajuan yang ditandai dengan meningkatnya pemahaman terhadap nilai budaya dan penggunaan Bahasa Sunda di lingkungan pendidikan dan instansi pemerintah.

Kebudayaan Tasikmalaya yang telah terbentuk selama ribuan tahun menampilkan corak khas yang menunjukkan adanya akulturasi budaya

yang kuat. Hal itu didasari oleh lokasi Tasikmalaya yang strategis, dan disinggahi banyak orang dari berbagai latar belakang yang berbeda sehingga sejak dulu Tasikmalaya sudah menjadi pusat peradaban yang penuh warna dengan percampuran bahasa, adat istiadat, dan keyakinan. Meskipun secara umum kebudayaan Tasikmalaya lebih didominasi oleh Sunda religius, tetapi kebudayaan seperti Jawa dan Melayu juga berkembang cukup baik di Kabupaten Tasikmalaya. Latar belakang percampuran berbagai kebudayaan yang berbeda seperti itu pada akhirnya menjadikan Masyarakat Kabupaten Tasikmalaya sebagai Masyarakat religius, Egaliter, Demokratis dan Toleran. Semua jenis kebudayaan dan seni berkembang tanpa ada gejolak, baik yang berasal dari Sunda, Jawa ataupun Melayu.

Kabupaten Tasikmalaya memiliki banyak keragaman budaya tradisional dan ritus adat yang berkaitan erat dengan latar belakang budayanya sebagai masyarakat religius agraris. Dengan kondisi alam Kabupaten Tasikmalaya yang subur dan banyak dipergunakan menjadi pertanian, budaya agraris dengan pengaruh keyakinan Sunda Buhun berkembang luas di berbagai pelosok Kabupaten Tasikmalaya.

Kesenian yang terdapat di Kabupaten Tasikmalaya diantaranya meliputi seni tari, seni teater, seni sastra, seni musik, seni film, seni rupa dan seni media. Kesenian tersebut diantaranya adalah Terbang Sejak, Calung Renteng, Angklung Sereb, Seni Kaulinan Pagarageungan, Aseuk Hatong, Lodong Gejlig, Rarangken Huma, Angklung Landung, Angklung Rendeng, Angklung Betot, Calung Tarawangsa dan Rarangken Sawah. Jumlah seni dan budaya di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

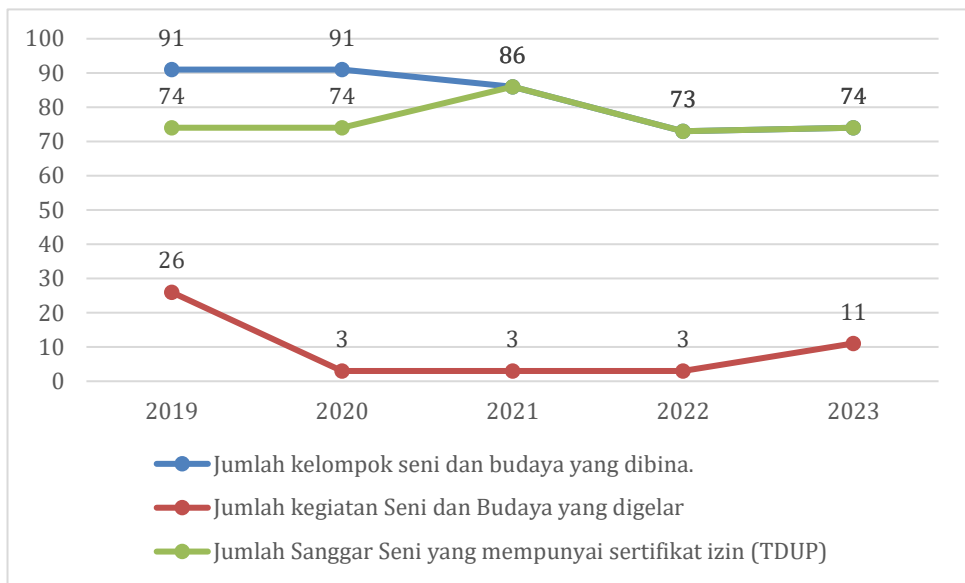
Tabel 2.29
Perkembangan Urusan Seni Budaya
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2023

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
		2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah kelompok seni dan budaya yang dibina.	Lembaga	91	91	86	73	74
Jumlah kegiatan Seni dan Budaya yang digelar	Event	26	3	3	3	11

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
		2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Sanggar Seni yang mempunyai sertifikat izin (TDUP)	Sanggar	74	74	86	73	74

Sumber : LKIP Kabupaten Tasikmalaya Berbagai Tahun

Perkembangan Seni Budaya di Kabupaten Tasikmalaya, dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 2.33
Grafik Perkembangan Seni Budaya
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 - 2023
 Sumber : LKIP Kabupaten Tasikmalaya berbagai Tahun

Pada tahun 2023 jumlah kelompok seni dan budaya yang dibina sebanyak 74 kelompok telah sesuai dengan target tahun 2023. Pembinaan dilakukan secara online dengan memanfaatkan teknologi, melalui Program Pengembangan Kebudayaan, Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota.

Jumlah kegiatan seni dan budaya yang digelar pada tahun 2023 mengalami peningkatan yaitu sebanyak 11 kegiatan dari 3 kegiatan di tahun 2022. Berkurangnya kegiatan seni dan budaya yang digelar pada tahun 2021 sebagai upaya pencegahan penyebaran virus covid-19 dengan melakukan pembatasan kegiatan-kegiatan yang mengundang kerumuman. Sehingga pada tahun 2021 dan 2022 kegiatan kebudayaan yang digelar hanya 3 kegiatan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan membatasi jumlah pengunjung.

Jumlah sanggar seni yang mempunyai sertifikat izin (TDUP) sebanyak 73 sanggar, melebihi target sejak tahun 2019-2020. Upaya yang dilakukan antara lain mendorong para sanggar seni untuk memenuhi perizinan, melalui Program Pengembangan Kebudayaan, Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota.

Pemuda mempunyai fungsi dan peran yang sangat strategis dalam perkembangan dan pembangunan bangsa sehingga perlu dikembangkan potensi dan perannya melalui penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan sebagai bagian dari pembangunan. Pembangunan kepemudaan meliputi proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan kepemudaan dapat dilakukan dengan penyadaran, pemberdayaan, pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan serta kepeloporan pemuda.

Pemberdayaan pemuda adalah kegiatan untuk membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda. Fasilitasi kepemudaan dapat juga dilakukan melalui pengembangan kepemimpinan dan pengembangan kewirausahaan untuk menggali potensi keterampilan pemuda dan mendorong kemandirian berusaha.

Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan dan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahraga menyatakan tanggung jawab pemerintah untuk memajukan prestasi olahraga nasional dengan memberikan dukungan pembinaan bagi para atlet yang punya potensi untuk berprestasi. Prestasi olahraga merupakan salah satu bidang yang dapat mengharumkan nama bangsa dan negara di tingkat internasional.

Prestasi olahraga harus dikembangkan secara berjenjang dari usia anak sampai dewasa serta dari tingkat daerah, nasional sampai internasional. Berikut adalah tabel capaian tingkat prestasi olahraga di Kabupaten Tasikmalaya.

Tabel 2.30
Tingkat Prestasi Olahraga
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021–2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian		
			2021	2022	2023
1	Tingkat prestasi olahraga	Medali	43	156	130

Sumber: LKIP berbagai tahun

Dari target 10 medali pada tahun 2023, atlet Kabupaten Tasikmalaya mendapatkan 130 medali yang diperoleh dari Peparpeda III di Kabupaten Garut, Asean Paragames XII Kamboja, Fox's Indonesia Para Badminton Internasional, Asian Para Games 4th tahun 2022 di Hangzhou Cina, Parabadminton Internasional, POPDA, PORPENAS dan Cycling D'Jabar. Rincian perolehan medali atlet pada tahun 2023 yaitu emas 58 medali, perak 27 medali, dan perunggu 47 medali.

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1. Layanan Urusan Wajib

1. Pendidikan

Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya menetapkan Pendidikan sebagai salah satu program prioritas pada RPJPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2025 guna mencapai misi mewujudkan masyarakat beriman, bertaqwa, berakhlakul karimah dan berkualitas, kemudian dipedomani dan dijabarkan dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 untuk menjawab permasalahan-permasalahan bidang pendidikan yang menjadi isu Kabupaten Tasikmalaya.

Gambaran capaian IKU Urusan Pendidikan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.31
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pendidikan
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019–2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	78,6	75,69	98,06	44,10	79,6
2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Sederajat.	%	101,09	100,39	97,1	102	100,25
3	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Sederajat	%	95,7	93,65	92,46	97,20	95,75
4	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Sederajat	%	120,29	108,09	101,08	92,70	100,25

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2019	2020	2021	2022	2023
5	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Sederajat	%	95,55	90	92,01	80,40	91,62
6	Rasio Guru SD-MI terhadap Murid SD-MI	Rasio	23,89	20,67	18,57	-	-
7	Rasio Guru SMP-MTs terhadap Murid SMP-MTs	Rasio	26,59	16,78	12,8	-	-
8	Angka Melanjutkan (AM) dari SD-MI ke SMP-MTs	%	106,11	120,45	94,87	-	-
9	Persentase pemenuhan SPM PAUD	%	78,6	92,97	72,487	92,64	97,87
10	Persentase pemenuhan SPM Pendidikan Dasar	%	95,66	95,5	92,31	93,17	100
11	Persentase pemenuhan SPM Pendidikan kesetaraan	%	0,009	99,22	92,31	97,75	100
12	Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	%	79,21	80,47	89,94	-	55,18
13	Angka Partisipasi Sekolah usia 5-6 Tahun	%	N/A	N/A	N/A	N/A	83,59
14	Angka Partisipasi Sekolah usia 7 - 15 Tahun	%	94,62	91,83	92,31	97,15	98,64
15	Angka Partisipasi Sekolah Usia 7 -18 Kesetaraan	%	N/A	N/A	N/A	N/A	14,78

Sumber : LKIP berbagai tahun

2. Kesehatan

Berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa kesehatan merupakan salah satu urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Penyelenggaraan urusan kesehatan dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan kualitas layanan dan cakupan akses pelayanan. Pedoman penyelenggaraan urusan wajib daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang kesehatan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 4 tahun 2019.

Keberhasilan capaian program pembangunan bidang kesehatan dapat dilihat dari capaian Indeks Kesehatan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Indeks Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya sampai dengan tahun 2023 tercatat sebesar 82,88%. Indeks Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya terus mengalami kenaikan selama 5 tahun terakhir. Adapun capaian indikator kinerja urusan Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.32
Capaian Indikator Kinerja Urusan Kesehatan
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2019	2020	2021	2022	2023
1.	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Orang	6	5	6	7	9
2.	Angka Kelangsungan Hidup Bayi	Orang	5	4	5	6	6
3.	Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI) per 100.000 kelahiran hidup	Orang	75	75	157	158	126
4.	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	Orang	1	1	1	1	1
5.	Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup	Orang	7	5	5	6	8
6.	Prosentase Keluarga Sehat	%	60,3	31,69	31,69	72,2	72,2
7.	Prosentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar	%	100,87	91,25	93,94	98,99	99,04
8.	Prosentase Ibu Bersalin mendapatakan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	96	94,84	98,79	98,25	94,40
9.	Prosentase Bayi Baru Lahir mendapatakan pelayanan persalinan sesuai standar	%	99,6	99,69	103,97	98,24	98,30
9.	Presentase Balita mendapatakan pelayanan sesuai standar	%	84,18	75,6	88,26	88,98	98,29
10.	Presentase anak pada pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	96	78,02	89,76	90,16	90,17
11.	Presentase warga negara usia 15 s.d 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	91,75	100	42,06	83,19	63,23
12.	Presentase orang usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	93,04	72,8	73,17	85,10	87,40
13.	Presentase balita gizi buruk	%	0,04	0,03	0,55	0,52	0,4
14.	Presentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan	%	100	100	100	100	100
15.	Presentase orang beresiko terinfeksi HIV mendapatkn pemeriksaan HIV sesuai standar	%	95,79	99,34	99,52	58,28	70
16.	Presentase orang penderita TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	%	100	100	100	100	100
17.	Presentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan secondary prevention sesuai standar	%	100	100	100	81,37	81,79

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2019	2020	2021	2022	2023
18.	Presentase penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	77,22	83,40
19.	Presentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan Kesehatan	%	78,48	80,07	88,18	86,20	87,23
20.	Prosentase Desa Siaga Aktif	%	100	19,09	56,41	64,10	69,23
21.	Prosentase Kecamatan mempunyai cakupan PHBS Rumah Tangga mencapai 50%	%	54,01	57,2	30,94	46,37	44,49
22.	Prosentase Desa STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) yang telah mencapai akses 100%	%	0	0	0	0	0
23.	Rasio Sarana Kesehatan Per Satuan Peduduk	0/00	0,14	0,14	0,13	0,13	0,13
24.	Rasio Puskesmas per satuan penduduk (1 : 30.000)	1/30.000	0,67	1/45.047	1/46.647	1/47.047	1/48.492
25.	Rasio Puskesmas Pembantu per satuan penduduk	0/000	0,85	1/11.777	1/12.195	1/11.911	1/12.355
26.	Rasio Rumah Sakit per satuan Penduduk	0/0000	0,11	0,11	1/10.718	1/9.409	1/969.842
27.	Rasio Poliklinik per satuan penduduk	0/000	0,031	1/28.601	1/29.617	1/34.850	1/31.798
28.	Pembangunan Rumah Sakit type D/RS Pratama Cikatomas	Buah	0	1	0	0	1
29.	Rintisan Pembangunan Rumah Sakit Tipe D/RS Pratama Ciawi, Manonjaya, Karangnunggal	Buah	0	0	2	3	3
30.	Prosentase Puskesmas yang terakreditasi sesuai standar nasional	%	100	100	100	100	100
31.	Prosentase Pemenuhan Obat Esensial di Pelayanan Dasar	%	100	100	100	91,7	90
32.	Rasio Tenaga Medis per satuan penduduk	0/00	0,09	0,09	0,122	0,125	0,083
33.	Cakupan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit (Pelayanan sesuai Standar)	%	89,31	77	82	82,62	82,78
34.	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	85,99	85,5	80,7	89,80	89,86
35.	Status Akreditasi	Status	Paripurna	Paripurna	83 (Paripurna)	Paripurna	Paripurna
36.	Prosentase Bayi mendapatkan Asi Eksklusif	%	N/A	73,4	74,7	71,58	76,57
37.	Cakupan Alat dan Sarana Prasarana Rumah Sakit	%	N/A	77	80	82,62	82,78

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2019	2020	2021	2022	2023
38	Cakupan Pendayagunaan Fasilitas Pendukung Pelayanan Rumah Sakit	%	N/A	77	79	99,10	93,61

Sumber : LKIP berbagai tahun

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang terkait dengan bidang urusan pekerjaan umum di Kabupaten Tasikmalaya menunjukkan kemajuan. Hal ini tercermin dari beberapa capaian indikator, antara lain tingkat kemantapan jalan, kondisi jaringan irigasi yang baik, serta cakupan pelayanan air minum dan sanitasi. Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya terus berupaya meningkatkan kualitas infrastruktur terutama yang terkait dengan infrastruktur pelayanan dasar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Salah satu fokus utama adalah pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang menjadi kewenangan kabupaten, karena jaringan irigasi berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi yang berperan penting dalam mendukung produktivitas lahan pertanian. Program rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dilakukan dalam upaya meningkatkan kondisi jaringan irigasi, sehingga mampu meningkatkan capaian indikator persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik dari 65,91% pada tahun 2022 menjadi 69,99% pada tahun 2023.

Selain itu, kinerja dalam penyelenggaraan jalan juga mengalami peningkatan, panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik tahun 2023 bertambah sepanjang 31,79 km, dimana tahun 2022 sepanjang 705,89 km menjadi 737,68 km dari total panjang jalan sebesar 1.303,32 dengan 176 ruas jalan, sehingga indikator proporsi panjang jaringan dalam kondisi baik pada tahun 2023 menjadi sebesar 0,566 yang pada tahun sebelumnya sebesar 0,542.

Infrastruktur yang terkait dengan penyediaan air minum juga terus dibangun dan ditingkatkan. Meskipun tidak signifikan, cakupan pelayanan air minum menunjukkan peningkatan dari 65,97% pada tahun 2022 menjadi 66,44% pada tahun 2023. Adapun capaian indikator kinerja urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.33
Capaian Indikator Kinerja
Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 – 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Poin	N/A	0,481	0,512	0,542	0,566
2	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	N/A	68,39	66,84	69,51	69,99
3	Persentase Ketersediaan Bangunan Pemerintahan dan Fasilitas Pendukungnya yang Layak Difungsikan	%	N/A	46,94	47,67	51,40	59,08
4	Ketaatan terhadap RTRW	%	N/A	21,76	21,77	22,44	26,61
5	Persentase penduduk berakses air minum	%	N/A	65,11	65,61	65,97	66,44
6	Persentase rumah tinggal berakses sanitasi	%	N/A	48,66	48,91	49,16	50,43

Sumber : LKIP berbagai tahun

N/A pada tahun 2019 mencerminkan penggunaan indikator baru dalam RPJMD tahun 2021-2026

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pembangunan bidang perumahan rakyat adalah cakupan pemenuhan kebutuhan rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimal luas bangunan serta kesehatan penghuninya, bertujuan menjamin hak warga negara untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat. Sasarannya adalah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang belum memiliki tempat tinggal layak (Rumah Tidak Layak Huni) atau yang digolongkan ke dalam penduduk miskin. Sedangkan kawasan permukiman menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

Realisasi pembangunan bidang perumahan dan kawasan permukiman yang telah dilaksanakan tahun 2019-2023 sebagaimana dapat dilihat pada tabel di berikut.

Tabel 2.34
Capaian Indikator Kinerja
Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Rasio Rumah Layak Huni	Poin	N/A	0,2527	0,2528	0,2535	0,2541
2	Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang Didukung dengan PSU pada kurun waktu tertentu	%	N/A	52,06	52,14	52,16	52,18

Sumber : LKIP berbagai tahun

N/A pada tahun 2019 mencerminkan penggunaan indikator baru dalam RPJMD tahun 2021-2026

5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Penyelenggaraan urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat bertujuan mewujudkan kondisi kehidupan masyarakat yang tenteram, aman yang memungkinkan setiap warga dapat melaksanakan kehidupannya secara wajar. Dalam upaya pencapaian tujuan tersebut telah ditetapkan indikator kinerja utama untuk periode 2021-2026.

Capaian indikator kinerja utama urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tahun 2019 - 2023 tercantum pada tabel berikut.

Tabel 2.35
Capaian Indikator Kinerja
Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%	N/A	100	100	95,56	99,36
2	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	%	N/A	52,78	96,3	-	-
3	Indeks Risiko Bencana	Point	142,11	177,09	168,36	174,11	159,14
4	Indeks Kapasitas Daerah (Kebencanaan)	Poin	Sedang	Sedang	Sedang	0,50	0,58

Sumber : LKIP berbagai tahun

N/A pada tahun 2019 mencerminkan penggunaan indikator baru dalam RPJMD tahun 2021-2026

6. Sosial

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang sosial diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria

masalah sosial, meliputi kemiskinan; ketelantaran; kecacatan; keterpencilan; ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku; korban bencana; korban tindak kekerasan, serta korban eksploitasi dan diskriminasi yang dikelompokkan sebagai *Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)* serta masyarakat/kelompok masyarakat yang menyelenggarakan penanganan masalah Kesejahteraan Sosial yaitu mereka yang termasuk dalam kelompok Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) diantaranya adalah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Taruna Siaga Bencana (TAGANA), Karang Taruna, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Penyuluh Sosial, Dunia Usaha, dan lain-lain.

Urusan sosial merupakan salah satu pengampu SPM (Standar Pelayanan Minimal) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal yang dijabarkan melalui Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Jenis pelayanan dasar urusan bidang sosial yang **wajib** diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah:

- a) rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luarpanti;
- b) rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
- c) rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
- d) rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
- e) perlindungan dan jaminan sosial korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana di wilayah kabupaten/kota.

Capaian Indikator Kinerja Utama Urusan sosial Tahun 2019-2023 sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2.36
Capaian Indikator Kinerja
Urusan Sosial Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase PPKS yang tertangani	%	100	100	100	4,13	4,21
2	Persentase masyarakat miskin dan rentan miskin yang memperoleh bantuan sosial	%	N/A	2,67	41,70	57,96	76,66
3	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/ Kota	%	N/A	100	100	100	100
4	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis di luar panti yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	N/A	100	100	100	100

Sumber : LKIP berbagai tahun
N/A pada tahun 2019 mencerminkan penggunaan indikator baru dalam RPJMD tahun 2021-2026

2.1.3.2. Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

Penyelenggaraan urusan ketenagakerjaan mempunyai tujuan meningkatkan kesempatan dan penyediaan lapangan pekerjaan. Gambaran ketenagakerjaan di Kabupaten Tasikmalaya pada umumnya dapat diamati dari aspek ketersediaan dan kebutuhan (*demand*), artinya jumlah penduduk yang mencari pekerjaan terpenuhi oleh jumlah lapangan kerja yang tersedia. Masalah ketimpangan antara Pencari Kerja dengan Lowongan Kerja yang mengakibatkan tingkat pengangguran masih menjadi salah satu kendala dalam pembangunan bidang ketenagakerjaan di Kabupaten Tasikmalaya. Pandemi Covid-19 berdampak pada meningkatnya Tingkat Pengangguran Terbuka pada tahun 2020 menjadi sebesar 7,12% dari tahun sebelumnya 2019 sebesar 6,31%, namun pada tahun berikutnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Tasikmalaya mengalami penurunan setiap tahunnya

menjadi 3,89% pada tahun 2023 dengan tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPT) pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 68,37%.

Adapun capaian indikator kinerja urusan Tenaga kerja Kabupaten Tasikmalaya tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.37
Capaian Indikator Kinerja
Urusan Tenaga Kerja Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan	%	NA	23,85	29,37	29,99	31,74
2	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	%	NA	2,08	3,38	12,82	13,67
3	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	66,46	69,54	68,18	67,83	68,37
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,31	7,12	6,16	4,17	3,89

Sumber : LKIP berbagai tahun

N/A pada tahun 2019 mencerminkan penggunaan indikator baru dalam RPJMD tahun 2021-2026

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Penyelenggaraan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dititikberatkan pada upaya peningkatan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan melalui peningkatan peran perempuan dalam masyarakat agar mampu mandiri, penguatan kelembagaan serta perlindungan terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan. Pembentukan dan penguatan kelembagaan berbasis gender merupakan salah satu upaya yang telah dilakukan dalam rangka peningkatan kesetaraan gender. Sedangkan upaya peningkatan pemberdayaan perempuan berbasis keluarga telah dilaksanakan melalui pemberdayaan kelompok Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) dan program Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) yang dilaksanakan setiap tahun.

Capaian indikator pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.38
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2020	2020	2021	2022	2023
1	Persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	85	90	100	100	100
2	Status capaian Kabupaten Layak Anak (KLA)	status/ skor	Pratama dengan skor 505	Pratama dengan skor 505	Menuju Madya skor 550,65	Menuju Madya skor 499,60	Belum Rilis
3	Persentase pelaksanaan PUG termasuk PPRG pada Instansi Pemerintah	%	N/A	10,94	-	-	-
4	Persentase pelembagaan Pemenuhan Hak Anak (PHA) pada lembaga pemerintah dan non pemerintah	%	N/A	53,33	56,92	56,92	-
5	Persentase lembaga layanan Pemenuhan Hak Anak yang terfasilitasi	%	N/A	65	65	65	65
6	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	%	N/A	64,13	63,79	65,40	61,52

Sumber : LKIP berbagai tahun
N/A pada tahun 2019 mencerminkan penggunaan indikator baru dalam RPJMD tahun 2021-2026

Berdasarkan tabel tersebut beberapa target indikator tidak ada angka capaian atau realisasi target, hal ini disebabkan karena pada tahun 2021 dan 2022 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tidak melaksanakan penilaian untuk indikator Capaian kategori Anugerah Parahita Ekapraya (APE) sebagai wujud upaya peningkatan kesetaraan gender dalam pembangunan dan indikator Persentase pelaksanaan PUG termasuk PPRG pada Instansi Pemerintah.

3. Pangan

Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Capaian urusan pangan di Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2023 mengalami penurunan, terlihat dari capaian indikator persentase peningkatan produksi tanaman pangan menjadi -1,02% dari 0,91% pada tahun 2022. Hal ini dikarenakan produksi luas panen turun yang disebabkan oleh El-nino ekstrim sehingga terjadi kekeringan panjang terutama pada padi. Kemudian, tingkat ketersediaan energi dan protein sudah mencukupi, harga pangan strategis sudah stabil ditinjau dari koefisien keragaman harga pangan, dan kualitas konsumsi pangan cenderung meningkat setiap tahunnya sehingga stabilitas pangan di kabupaten Tasikmalaya sudah baik walaupun mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi 2,68% dari 3,27% pada tahun 2022. Adapun realisasi indikator kinerja urusan Pangan Kabupaten Tasikmalaya tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.39
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pangan
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	82,5	81,5	80,25	81,80	93,40
2	Persentase peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	%	0,83	0,81	-	0,91	-1,02
3	Persentase rata-rata ketersediaan energi dan protein dalam bahan pangan per kapita	%	82,5	81,5	-	3,27	2,68
4	Meningkatnya konsumsi pangan masyarakat	%	N/A	2	2,3	22,78	-

Sumber : LKIP berbagai tahun

N/A pada tahun 2019 mencerminkan penggunaan indikator baru dalam RPJMD tahun 2021-2026

4. Pertanian

Urusan pemerintahan bidang pertanian menjadi kewenangan urusan Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya, dengan indikator jumlah masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan yang terselesaikan dengan capaian kinerja tahun 2023 sebanyak 4 lokasi.

Tabel 2.40
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pertanahan
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan yang terselesaikan	Lokasi	N/A	0	1	4	4

Sumber : LKIP berbagai tahun
N/A pada tahun 2019 mencerminkan penggunaan indikator baru dalam RPJMD tahun 2021-2026

5. Lingkungan Hidup

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 ayat (2) adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang meliputi perencanaan, pemanfaatan pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum. Pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Tasikmalaya penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya misi ke-4, yaitu Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah berbasis tata ruang yang berkelanjutan.

Perkembangan pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Tasikmalaya yang dapat dilihat tahun 2023, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Tasikmalaya tercatat 63,73 poin menurun dari tahun sebelumnya sebesar 68,43 poin, hal ini disebabkan oleh cuaca panas yang berkepanjangan sehingga berdampak pada indeks kualitas air dan udara menjadi menurun. Selain itu, sarana dan prasarana persampahan terus bertambah sehingga persentase jumlah sampah yang tertangani mengalami kenaikan dari 9,05% menjadi 9,84%. Adapun capaian setiap indikator kinerja urusan Lingkungan Hidup sebagaimana di atas dapat digambarkan sebagai berikut.

Tabel 2.41
Capaian Indikator Kinerja Urusan Lingkungan Hidup
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	N/A	64,58	67,72	68,43	63,73
2	Persentase jumlah sampah yang tertangani	%	N/A	6,75	8	9,05	9,84

Sumber : LKIP beberapa tahun
N/A pada tahun 2019 mencerminkan penggunaan indikator baru dalam RPJMD tahun 2021-2026

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan Pembangunan sektor lain. Sebagai upaya untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan dalam rangka memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang diambil oleh penduduk, maka sesuai amanat Pasal 7 (tujuh) ayat 1 (satu) pemerintah kabupaten/kota berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan.

Dalam mewujudkan kebijakan Pemerintah, sejak tahun 2016 fokus pelayanan administrasi dokumen kependudukan masyarakat dilakukan dengan strategi meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan penataan administrasi kependudukan dengan indikator capaian kinerja meliputi Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga berdasarkan Aplikasi SIAK, Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP-el), Cakupan Penerbitan Kartu Identitas Anak, Cakupan Akta Kematian, Cakupan Penerbitan Akte Kelahiran Usia 0-18 Tahun, Cakupan Penerbitan Akte Kelahiran berdasarkan Aplikasi SIAK dan Pengolahan Perubahan Data yang terakumulasikan pada upaya terwujudnya tertib pengelolaan Administrasi kependudukan dan meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan.

Dalam rangka penyempurnaan database pembangunan kependudukan serta pencapaian target peningkatan cakupan kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) maka pada tahun 2020 hingga

2022 telah dilakukan kerjasama pemanfaatan data dengan lembaga/SKPD/desaA, namun masih adanya keterbatasan alat perekaman KTP-elektronik dan alat Pencetakan KIA. Adapun capaian Kinerja urusan kependudukan dan Catatan Sipil tercantum dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.42
Capaian Indikator Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2019	2020	2021	2022	2023
1.	Persentase Rata -rata kepemilikan dokumen kependudukan	%	69,31	73,43	76,85	87,46	89,59
	a. Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP-el)	%	96,95	97,54	99,23	97,84	98,57
	b.Cakupan Penerbitan Kartu Identitas Anak	%	12,87	38,41	47,59	53,80	60,48
	c.Cakupan Penerbitan Akta Kematian	%	68,37	71,3	82,07	100	100
	d.Cakupan Penerbitan Akte Kelahiran Usia 0-18 Tahun	%	97,87	95,06	95,85	98,20	99,33
2.	Jumlah validasi data kependudukan oleh Perangkat Daerah pengguna hak akses	Data	N/A	N/A	N/A	11.930	26.473

Sumber : LKIP beberapa tahun

N/A pada tahun 2019 mencerminkan penggunaan indikator baru dalam RPJMD tahun 2021-2026

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Urusan pemberdayaan masyarakat dan desa merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kedisiplinan, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dilaksanakan melalui peningkatan dan penguatan kelembagaan kemasyarakatan dan lembaga perekonomian desa serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa. Pemberdayaan kelembagaan kemasyarakatan desa difokuskan pada pemberdayaan

kader dan revitalisasi posyandu serta Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), sedangkan pemberdayaan lembaga perekonomian desa pada pembentukan dan penguatan kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Pasar Desa. Adapun capaian kinerja urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.43
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase Posyandu aktif	%	85,04	98,11	100	100	100
2	Persentase penyelenggaraan penataan desa mandiri dan maju	%	N/A	19,66	24,78	46,43	64,95
3	Persentase peningkatan kerjasama desa	%	N/A	0,57	0,28	0	0

Sumber : LKIP beberapa tahun
(-) indikator sudah tidak digunakan lagi pada RPJMD Tahun 2021-2026
N/A pada tahun 2019 mencerminkan penggunaan indikator baru dalam RPJMD tahun 2021-2026

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Perkembangan demografi sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan, karena penduduk dapat menjadi modal dasar pembangunan namun juga dapat menjadi masalah suatu daerah. Besaran, komposisi dan distribusi penduduk akan mempengaruhi struktur ruang dan kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Kabupaten Tasikmalaya memiliki luas wilayah 270.677,66 hektar juga memiliki jumlah penduduk yang cukup banyak tercatat 1.907.045 jiwa menurut BPS Kabupaten Tasikmalaya tahun 2023. Laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2020-2023 tercatat 1,04%. Pertumbuhan tersebut satu sisi merupakan dampak positif meningkatnya Indeks Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2021 sebesar 77,22 poin. Namun di sisi lain, perlu menjadi perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya terutama dalam pengendalian penduduk melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh urusan terkait, karena apabila laju pertumbuhan penduduk terus mengalami peningkatan akan berpengaruh terhadap kemampuan keuangan untuk pembangunan.

Gambaran capaian Indikator kinerja urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.44
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Prosentase Pemakaian Kontrasepsi (CPR)	%	71,53	70,47	71,23	76,01	-
2	Prosentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmetneed) (%)	%	11,29	12,64	12,64	-	-
3	Prosentase Peserta KB Aktif yang menggunakan MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang)	%	18,6	19,04	19,07	-	-
4	Cakupan Anggota BKB (Bina Keluarga Balita) ber-KB	%	47,3	82,08	82,08	-	-
5	Cakupan Anggota BKR (Bina Keluarga Remaja) ber-KB	%	38,83	59,03	59,03	-	-
6	Cakupan Anggota BKL (Bina Keluarga Lansia) ber-KB	%	22,76	59,67	59,67	-	-
7	Angka Kelahiran Total (TFR)	%	N/A	2,41	2,6	-	-
8	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)	Tahun	N/A	21	21	21	21
9	Prosentase pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK)	%	N/A	0	100	-	-
10	Jumlah Lembaga dan Pendidikan Institusi yang di bina	Lembaga	N/A	0	39	-	-
11	Prosentase Ketersediaan Data	%	N/A	100	100	100	100
12	Jumlah Gedung Balai Penyuluhan KB	Gedung	N/A	9	2	-	-
13	Prosentase Pemenuhan BKB Kit/Stunting	%	N/A	23	23	-	-
14	Rasio Akseptor KB	%	N/A	70,82	71,9	79,07	72,44

Sumber : LKPJ dan LKIP beberapa tahun

N/A pada tahun 2019 mencerminkan penggunaan indikator baru dalam RPJMD tahun 2021-2026

9. Perhubungan

Pelayanan urusan perhubungan berkaitan erat dengan kebutuhan masyarakat terhadap ketersediaan dan kelancaran sarana transportasi dan prasarana pelengkap. Urusan Perhubungan menyelenggarakan pengelolaan angkutan, teknik sarana perhubungan dan lalu lintas merujuk pada penetapan indikator kinerja capaian sasaran terciptanya

ketertiban dan keselamatan pengguna jalan, Terciptanya peningkatan kinerja pelayanan transportasi dan tersedianya sarana dan prasarana perhubungan yang memadai dan berkualitas.

Capaian indikator kinerja Urusan Perhubungan tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.45
Capaian Indikator Kinerja Urusan Perhubungan
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2019	2020	2021	2022	2023
1.	Persentase Fasilitas Perhubungan yang memadai:	%	37,57	37,61	38,31	39,01	42,22
	a. Rambu-rambu Lalu Lintas	%	60,38	60,38	61,377	62,25	62,25
	b. Guardrail	Meter	45,94	45,94	51,01	56,88	56,88
	c. Marka Jalan	Meter	3,93	3,93	3,93	4,55	4,55
	d. Penerangan Jalan Umum (PJU)	%	20,47	20,68	20,63	21,11	23,11
	e. Warning Light/Traffic Light	%	57,14	57,14	57,14	64,29	64,29
2.	Prosentase kendaraan bermotor wajib uji dalam keadaan laik jalan	%	84	89,93	82,42	80	99,24
3.	Survey kepuasan masyarakat layanan publik bidang perhubungan	%	80,56	82,05	82,15	-	99,40
4.	Persentase tingkat keselamatan jalan	%	N/A	N/A	N/A	72,45	80,81
5.	Persentase penggunaan moda transportasi umum di perkotaan	%	N/A	N/A	N/A	27,62	30,25

Sumber: LKIP berbagai tahun

N/A artinya indikator baru digunakan pada tahun 2022

10. Komunikasi dan Informatika

Upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan berbasis *e-government* di Kabupaten Tasikmalaya merupakan tujuan penyelenggaraan urusan Komunikasi dan Informatika. Untuk mencapai tujuan tersebut, ditetapkan beberapa indikator sebagai ukuran keberhasilan yang kepada sasaran Kabupaten Tasikmalaya.

Capaian indikator kinerja utama Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut:

Tabel 2.46
Capaian Indikator Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Indeks Domain Tata Kelola SPBE	Poin	N/A	2	1,4	1,6	1,8
2	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	%	N/A	35,23	58,34	44,35	65
3	Indeks KAMI	Level	N/A	II	II	II	II

Sumber : LKIP berbagai tahun

N/A pada tahun 2019 mencerminkan penggunaan indikator baru dalam RPJMD tahun 2021-2026

11. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Kinerja pembangunan daerah di Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tahun 2022-2023 memperlihatkan tren positif. Hal ini dapat terlihat dari meningkatnya volume usaha koperasi dari tahun 2022 sebesar Rp356.112.848.643,00 menjadi Rp362.350.540.276,00 pada tahun 2023. Selain itu, persentase usaha mikro mengalami peningkatan secara signifikan dari 99,75% pada tahun 2022 menjadi 144,42% pada tahun 2023. Begitu pula jumlah usaha mikro meningkat menjadi 154.592 pada tahun 2023 dari sebelumnya yang hanya sebesar 95.970 usaha mikro.

Tabel 2.47
Capaian Indikator Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Volume Usaha Koperasi	Rp	N/A	485.813.822.000	490.671.960.220	356.112.848.643	362.350.540.276
2	Persentase Usaha Mikro	%	N/A	99,71	99,73	99,75	144,42
3	Jumlah Usaha Mikro	Unit	N/A	84.968	91.765	95.970	154.592
4	Jumlah koperasi yang berkualitas	Koperasi	N/A	N/A	-	0	4

Sumber : LKIP berbagai tahun

N/A pada tahun 2019 mencerminkan penggunaan indikator baru dalam RPJMD tahun 2021-2026

12. Penanaman Modal

Penanaman Modal (investasi) adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing, untuk melakukan usaha di seluruh sektor bidang usaha di wilayah negara Republik Indonesia (UU No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal).

Investasi menjadi salah satu indikator yang menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah atau negara. Melalui investasi, akan tersedia lapangan kerja dan berbagai sarana produksi yang dapat dioptimalkan untuk menghasilkan *output* dan nilai tambah yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Peran investasi dalam Pemulihan Ekonomi setelah pasca pandemi antar lain yaitu:

1. Penyerap tenaga kerja dan menurunkan angka pengangguran;
2. Meningkatkan produktivitas melalui transfer teknologi dan pengetahuan, peningkatan SDM dan daya saing;
3. Meningkatkan kinerja ekspor;
4. Memberikan *multiplier effect* terhadap ekonomi dan meningkatkan pendapatan masyarakat;

Pandemi Covid-19 membawa dampak pada perekonomian dunia baik dari sisi perdagangan dan investasi. Mengingat peran investasi yang begitu penting maka Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya terus berupaya menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif guna menarik minat investor.

Capaian indikator kinerja bidang Penanaman Modal tahun 2019-2023, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.48
Capaian Indikator Kinerja Urusan Penanaman Modal
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Investor Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)/Penanaman Modal Asing (PMA)	Investor	1.201	424	1.427	-	-
2	Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)/Penanaman Modal Asing (PMA)	Rp	898.361.971.681	750.600.276.197	8.599.700.000	211.553.020.823	446.296.142.757
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Perijinan di Kabupaten Tasikmalaya	Skor	85,25	85,63	86,04	88,52	86,91

Sumber : LKIP berbagai tahun

Nilai Realisasi Penanaman Modal Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2023 berdasarkan data LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) yang dikeluarkan oleh Kementerian Investasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui DPMPTSP Provinsi Jawa Barat sampai dengan triwulan IV adalah Rp. 446.296,142,757,- dari target Rp.155.812.000.000,-.

13. Kepemudaan dan Olahraga

Pembangunan bidang Kepemudaan dan Olahraga bertujuan untuk meningkatkan peran aktif pemuda dalam berbagai bidang pembangunan baik melalui organisasi kepemudaan maupun prestasi lainnya yang diharapkan lebih meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Namun pada tahun 2023, tingkat prestasi olahraga mengalami penurunan dengan perolehan medali sebanyak 130 dibandingkan dengan tahun 2022 sebanyak 156 medali. Perkembangan capaian indikator kinerja urusan Kepemudaan dan Olahraga sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.49
Capaian Indikator Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	N/A	39,14	41,36	42,51	42,39
2	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi kemasyarakatan	%	N/A	51,78	51,56	55,63	55,63
3	Tingkat Prestasi Olahraga	Medali	N/A	3	43	156	130
4	Tingkat Partisipasi Masyarakat Berolahraga	%	N/A	0	43,44	43,49	43,49
5	Persentase wirausaha muda	%	N/A	-	-	21,51	20,56
6	Persentase Organisasi Pemuda yang aktif	%	13,33	22,22	27,03	24,06	24,06
7	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan	%	N/A	-	19,91	24,59	23,78
8	Cakupan Pembinaan Olahraga	%	N/A	-	49,35	56,34	59,70
9	Cakupan Pembinaan Atlet Muda	%	N/A	-	23,60	23,60	47,29
10	Cakupan Pelatih yang Bersertifikat	%	N/A	-	18,07	18,07	22,54

Sumber : LKIP berbagai tahun

N/A pada tahun 2019 mencerminkan penggunaan indikator baru dalam RPJMD tahun 2021-2026

14. Statistik

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang statistik bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan data statistik daerah khususnya data statistik sektoral yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Data berperan penting dalam setiap tahapan pembangunan terutama pada penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Karena hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya terus berupaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan data statistik daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah.

Tabel 2.50
Capaian Indikator Kinerja Urusan Statistik
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase ketersediaan data statistik sektoral untuk tiap bidang urusan pemerintahan	%	N/A	71	71	83,33	90

Sumber : LKIP berbagai tahun
N/A pada tahun 2019 mencerminkan penggunaan indikator baru dalam RPJMD tahun 2021-2026

15. Persandian

Persandian bertujuan untuk mengamankan, melindungi dan menjamin orisinalitas sebuah berita atau dokumen pemerintah. Hal ini merupakan hal yang amat penting di era serba teknologi informasi saat ini. Modernisasi pemerintahan akan sangat bergantung dan didukung oleh penggunaan teknologi informasi di segala aspek mulai dari administrasi perkantoran (*e-office*), perencanaan (*e-planning*), keuangan (*e-budgetting*), dan fungsi pemerintahan lainnya. Pemberdayaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah akan menghadapi beberapa risiko diantaranya penyadapan, hacking dan berbagai ancaman lainnya. Hadirnya ancaman dalam pengelolaan pemerintahan yang berbasis teknologi informasi (*e-government*) tersebut membuat pengelolaan persandian oleh pemerintah daerah menjadi penting.

Tabel 2.51
Capaian Indikator Kinerja Urusan Persandian
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Cakupan tingkat keamanan informasi	%	N/A	30	30	30	-

Sumber: LKIP berbagai tahun

16. Kebudayaan

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang kebudayaan bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan. Kekayaan budaya yang dimiliki Kabupaten Tasikmalaya yang harus terus digali dan dilestarikan. Untuk itu, pengarusutamaan kebudayaan dalam berbagai aspek pembangunan dinilai penting dan strategis dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Persentase seni dan budaya yang dilestarikan menjadi salah satu indikator yang menunjukkan kemajuan kebudayaan.

Berikut capaian kinerja urusan kebudayaan dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 2.52
Capaian Indikator Kinerja Urusan Kebudayaan
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah warisan budaya tak benda yang ditetapkan	Buah	N/A	1	1	1	1
2	Jumlah warisan budaya benda yang ditetapkan	Buah	N/A	2	0	0	0
3	Jumlah even kesenian tradisional yang dilenggarakan	Kegiatan	N/A	5	5	5	5
4	Jumlah ritual adat istiadat yang dikelola	Kegiatan	N/A	3	3	3	3
5	Jumlah situs/cagar budaya	Cagar Budaya	N/A	42	42	42	42
6	Persentase pelestarian warisan budaya	Persen	N/A	18,18	20,31	23,86	35,82

Sumber : LKIP berbagai tahun

N/A pada tahun 2019 mencerminkan penggunaan indikator baru dalam RPJMD tahun 2021-2026

17. Perpustakaan

Dalam penyelenggaraan urusan perpustakaan, Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya berupaya untuk memenuhi kebutuhan

masyarakat akan akses informasi dan pengetahuan, melalui pelayanan perpustakaan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Adapun sasaran urusan Perpustakaan adalah meningkatnya minat budaya baca masyarakat dengan capaian indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.53
Capaian Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah pengunjung perpustakaan umum dan khusus / tahun	Orang	619.320	365.174	327.054	-	-
2	Jumlah koleksi buku perpustakaan	Judul / Eksemplar	288 (1.152 Eks)	500 (1.000 Eks)	1.112 (2.224 Eks)	-	-
3	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	N/A	64,17	56,15	65,15	55,9

Sumber : LKIP berbagai tahun
(-) indikator sudah tidak digunakan lagi pada RPJMD Tahun 2021-2026
N/A pada tahun 2019 mencerminkan penggunaan indikator baru dalam RPJMD tahun 2021-2026

18. Kearsipan

Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya dalam penyelenggaraan urusan kearsipan berusaha untuk menjamin ketersediaan arsip yang tercipta dari kegiatan yang dilaksanakan seluruh perangkat daerah Kabupaten Tasikmalaya, yang autentik dan terpercaya sesuai dengan kaidah, prinsip, dan standar kearsipan, serta peraturan perundang-undangan sehingga arsip dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah. Arsip-arsip yang tercipta tersebut, apabila memiliki nilai guna kesejarahan maka Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya wajib untuk menyelamatkan dan mengamankan arsiparsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Beberapa upaya yang dilakukan yaitu pembinaan kearsipan melalui workshop, bimbingan teknis, pengawasan internal kearsipan, pengelolaan arsip melalui pengintensifan kegiatan penyusutan arsip pada perangkat daerah, inovasi pengelolaan arsip berbasis TIK, peningkatan penyelamatan dan pelestarian arsip melalui penelusuran arsip-arsip tokoh-tokoh skala Kabupaten Tasikmalaya, alih

media arsip, serta digitalisasi arsip, penyelamatan arsip perangkat daerah yang dibubarkan, digabung, serta penyelamatan arsip pasca bencana. Ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sangat bergantung pada standar pengelolaan arsip secara baku yang telah dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah. Capaian indikator kinerja urusan kearsipan tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.54
Capaian Indikator Kinerja Urusan Kearsipan
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Kearsipan secara Baku	%	43,28 (29/67)	49,2 (31/63)	52,38 (33/63)	10,17 (6/59)	13,15 (8/59)
2	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	%	N/A	54,12	56,28	-	-
3	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	N/A	40	53,33	-	-

Sumber : LKIP berbagai tahun

N/A pada tahun 2019 mencerminkan penggunaan indikator baru dalam RPJMD tahun 2021-2026

2.1.3.3. Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

Capaian pada bidang kelautan dan perikanan pada tahun 2023 mengalami kenaikan, hal ini terlihat dari indikator jumlah produksi perikanan tangkap mengalami kenaikan karena el nino atau kemarau panjang menyebabkan ikan yang ada di laut merapat ke pinggiran atau ke sisi yang lebih dangkal. Berikut adalah capaian kinerja urusan kelautan dan perikanan:

Tabel 2.55
Capaian Indikator Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya + Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	%	7,75	2,9	1,34	2,25	2,72
2	Produksi perikanan	Ton	N/A	69.169,51	73.740,17	81.534	83.748
3	Konsumsi ikan	Ton	N/A	30,5	31,5	32	32,5
4	Cakupan bina kelompok nelayan	Kelompok	N/A	90	91	95	-
5	Produksi perikanan kelompok nelayan	Ton	N/A	1770,21	1578,99	1281	1282
6	Nilai tukar nelayan	Indeks	N/A	112	112	112	112
7	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data : <i>one data KKP</i>)	Ton	N/A	70.710,00	73.740,17	81.534	83.748

Sumber : LKIP berbagai tahun

N/A pada tahun 2019 mencerminkan penggunaan indikator baru dalam RPJMD tahun 2021-2026

2. Pariwisata

Untuk mengatur kelancaran pembangunan kepariwisataan, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata Pasal 3 menyatakan bahwa kepariwisataan berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Sektor pariwisata Kabupaten Tasikmalaya memiliki peranan yang sangat penting sejalan dengan perkembangan dan kontribusi yang diberikan sektor pariwisata melalui penerimaan devisa, pendapatan daerah, pengembangan wilayah, maupun dalam penyerapan investasi dan tenaga kerja. Melalui *multiplier effect*-nya, pariwisata dapat dan mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Oleh karena itu, percepatan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas dapat dilakukan dengan mempromosikan pengembangan pariwisata.

Sejalan dengan hal tersebut, RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 – 2026 telah menjadikan akselerasi pertumbuhan pariwisata sebagai salah satu strategi dari akselerasi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tasikmalaya. Namun pada tahun 2023, jumlah kunjungan wisatawan mengalami penurunan, karena daya beli masyarakat menurun, serta kurangnya sarana dan prasarana di daerah serta objek wisata.

Arah pembangunan kepariwisataan Kabupaten Tasikmlaya ialah berbasis pedesaan, yang diwujudkan dengan ditetapkanya 92 Desa Wisata.

Tabel 2.56
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pariwisata
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	1,449,314	658.170	590.908	726.021	783.115
2	Jumlah PAD Sektor Pariwisata	Rupiah	1,290,099,500	986.264.000	5.540.036	-	-
3	Persentase peningkatan keanekaragaman produk ekonomi kreatif	%	N/A	0,96	0,41	1,26	2,53
4	Jumlah Daya Tarik, Destinasi Wisata dan Kawasan Pariwisata Yang Telah Dikembangkan	Unit	N/A	8	8	8	8
5	Jumlah Pendapatan Retribusi Sektor Pariwisata	Rupiah	N/A	979.264.000	1.026.383.500	1.200.000.000	1.169.000.000
6	Tingkat hunian akomodasi	%	N/A	3	5,32	6,59	7,49
7	Persentase peningkatan usaha pariwisata yang terdaftar	%	N/A	4	5	-	-
8	Persentase Produk/ Karya Ekraf terdaftar HAKI	%	N/A	0	0	-	-
9	Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang disertifikasi	%	N/A	0	0,21	1,25	2,53
10	Persentase Pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara	%	N/A	134 orang	2	27,050	27,050

Sumber : LKIP berbagai tahun

N/A pada tahun 2019 mencerminkan penggunaan indikator baru dalam RPJMD tahun 2021-2026

3. Pertanian

Sektor pertanian termasuk di dalamnya perikanan merupakan potensi unggulan yang memberikan kontribusi terbesar terhadap perekonomian Kabupaten Tasikmalaya. Besarnya kontribusi sektor sektor pertanian termasuk di dalamnya perikanan tersebut, perlu ditindaklanjuti dengan intensifikasi secara modernisasi dan industri pengolahan hasil sebagai upaya untuk meningkatkan daya saing produksi di masa mendatang mengingat adanya tantangan kedepan terhadap alih fungsi lahan semakin besar seiring dengan adanya pengaruh dari pertumbuhan penduduk yang terjadi.

Capaian di bidang pertanian tahun 2023 mengalami peningkatan dan penurunan, terlihat dari tercapainya target indikator penyuluhan pertanian dikarenakan jumlah penerima manfaat mencapai hampir seluruh kelompok tani yang ada di Kabupaten Tasikmalaya. Namun, terjadinya penurunan produksi luas panen disebabkan karena El-nino ekstrim sehingga terjadi kekeringan panjang terutama pada padi karena tanam dilakukan di lahan darat atau padi ladang. Pada produksi bidang peternakan juga menurun disebabkan oleh harga pakan naik atau kualitas pakan menurun sehingga pertumbuhan unggas terhambat menyebabkan populasinya menurun, serta masih adanya efek dari LSD (*Lumpy Skin Disease*) dan PMK (Penyakit Mulut dan Kuku), selain itu adanya pemusnahan ternak unggas penghasil telur/*cutting egg* untuk menstabilkan harga telur.

Capaian indikator kinerja urusan Pertanian dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.57
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pertanian
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Prosentase peningkatan produksi komoditas peternakan yang ASUH	%	1,98	0,33	0,58	2,10	-0,71
2	Meningkatnya penyuluhan pertanian	%	N/A	52,96	24,53	40,83	80,32
3	Meningkatnya produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	%	N/A	N/A	2,05	0,91	-1,02

Sumber : LKIP berbagai tahun
N/A pada tahun 2019 mencerminkan penggunaan indikator baru dalam RPJMD tahun 2021-2026

4. Energi dan Sumber Daya Mineral

Urusan bidang energi dan sumber daya mineral diukur dengan satu indikator yaitu persentase perizinan pemanfaatan sumber daya alam yang terfasilitasi. Urusan ini diampu oleh Sekretariat Daerah. Berikut adalah capaian kinerja urusan energi dan sumber daya mineral tahun 2019-2023:

Tabel 2.58
Capaian Indikator Kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase perizinan pemanfaatan sumber daya alam yang terfasilitasi	%	N/A	100	100	100	100

Sumber : LKIP berbagai tahun

N/A pada tahun 2019 mencerminkan penggunaan indikator baru dalam RPJMD tahun 2021-2026

5. Perdagangan

Perdagangan adalah salah satu pilar utama dalam perekonomian sebuah negara. Secara umum, urusan perdagangan melibatkan berbagai aktivitas yang berhubungan dengan pertukaran barang dan jasa, baik di tingkat domestik maupun internasional. Berikut adalah capaian kinerja urusan perdagangan tahun 2019-2023:

Tabel 2.59
Capaian Indikator Kinerja Urusan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Pertumbuhan Pelaku Usaha Perdagangan	%	N/A	1	1	602	12,8
2	PDRB Sektor Perdagangan	Rp. Juta		6.807.282	7.144.879,30	7.810.320,50	8.507.691,5
3	Ekspor Bersih Perdagangan	US \$	4.336.366,29	2.658.628,37	4.540.781,79	8.283.933,87	11.275.591,77
4	Cakupan pelayanan Tera dan tera ulang alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan lainnya (UTTP)	Unit	N/A	8282	10178	4.406	3238
5	Persentase Kenaikan Ekspor bersih Produk Kabupaten Tasikmalaya	%	N/A	2	2	82,43	36,11

Sumber : LKPJ dan LKIP berbagai tahun

N/A pada tahun 2019 mencerminkan penggunaan indikator baru dalam RPJMD tahun 2021-2026

6. Perindustrian

Urusan perindustrian mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan ekonomi yaitu sebagai pemicu kegiatan ekonomi lain yang berdampak ekspansif atau meluas ke berbagai sektor jasa, penyediaan bahan baku, transportasi, distribusi atau perdagangan, pariwisata dan sebagainya. Pembangunan urusan perindustriaian menjadi sangat penting karena kontribusinya terhadap pencapaian sasaran pembangunan ekonomi terutama dalam pembentukan PDRB sangat berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi (*primeover*) karena kemampuannya dalam peningkatan nilai tambah yang tinggi. Selain itu industri juga dapat membuka peluang untuk menciptakan dan memperluas lapangan pekerjaan, yang berarti meningkatkan kesejahteraan serta mengurangi kemiskinan. Walaupun telah dicapai berbagai perkembangan yang cukup penting, namun dirasakan industri belum tumbuh seperti yang diharapkan dan ada kecenderungan menurunnya daya saing industri di pasar nasional maupun internasional. Penurunan daya saing ini terkait dengan tingginya biaya atau kurang efisiennya proses produksi. Masalah biaya industri ini umumnya dikaitkan dengan meningkatnya biaya energi dan ekonomi biaya tinggi terkait dengan layanan birokrasi. Sementara kelemahan struktur industri juga ditunjuk sebagai salah satu penyebabnya. Kelemahan struktur industri ini tercermin dari lemahnya keterkaitan antar industri, misalnya antara industri hulu dan hilir dan antara industri besar dan kecil, serta belum berkembangnya industri pendukung. Klaster-klaster industri yang belum sepenuhnya terbangun juga merupakan indikator lemahnya struktur industri.

Capaian Kinerja urusan Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.60
Capaian Indikator Kinerja Urusan Perindustrian
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Pertumbuhan Industri	%	1,5	1,2	0,8	1,1	1,5
2	PDRB Sektor Industri	Rp. Juta	2.869. 722,4	2.854. 810,7	3.003. 519,3	3.310. 543,22	3.676. 746,2
3	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	%	N/A	2,61	2,58	-	11,7

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2019	2020	2021	2022	2023
4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Ijin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang Dikeluarkan oleh Instansi Terkait	%	N/A	100	100	100	100

Sumber : LKIP berbagai tahun
N/A pada tahun 2019 mencerminkan penggunaan indikator baru dalam RPJMD tahun 2021-2026

7. Transmigrasi

Urusan Transmigrasi merupakan urusan pilihan yang didasarkan pada Undang undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah penyelenggaraan urusan transmigrasi merupakan upaya pemerintah untuk meratakan pembangunan wilayah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2.61
Capaian Indikator Kinerja Urusan Transmigrasi
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah transmigran yang telah memiliki sertifikat pelatihan	KK	N/A	N/A	N/A	0	0
2	Penyediaan Sarana dan Prasarana Translok	Paket	50	N/A	N/A	0	0

Sumber : LKIP berbagai tahun
N/A pada tahun 2019 mencerminkan penggunaan indikator baru dalam RPJMD tahun 2021-2026

2.1.3.4. Urusan Penunjang

1. Kesekretariatan Daerah

Capaian di bidang kesekretariatan daerah mengalami kenaikan, hal ini terlihat dari indikator nilai IKM Kabupaten dari 81 poin pada tahun 2022 menjadi 81,72 poin pada tahun 2023. Kemudian untuk indikator lainnya juga mengalami kenaikan seperti pada indikator level kematangan/maturitas pengadaan barang dan jasa dari level 6 menjadi level 8. Berikut adalah capaian kinerja urusan kesekretariatan daerah tahun 2019-2023.

Tabel 2.62
Capaian Indikator Kinerja Urusan Kesekretariatan Daerah
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Predikat Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten	Predikat	B	B	B	B	B
2	Nilai IKM Kabupaten	Poin	78,9	78,93	80,48	81	81,72
3	Persentase regulasi peraturan pusat yang ditindaklanjuti menjadi peraturan perundang-undangan daerah	%	100	100	100	100	100
4	Persentase penyelenggaraan kegiatan keagamaan dan nasional yang dilaksanakan pemerintah daerah	%	100	100	100	100	100
5	Persentase bahan kebijakan umum lingkup perekonomian dan pembangunan yang ditindaklanjuti	%	N/A	100	100	100	100
6	Level kematangan/maturitas pengadaan barang dan jasa	Level	N/A	0	4	6	8
7	Persentase bahan kebijakan umum lingkup pemerintahan	%	N/A	100	100	100	100

Sumber : LKIP berbagai tahun

N/A pada tahun 2019 mencerminkan penggunaan indikator baru dalam RPJMD tahun 2021-2026

2. Kesekretariatan DPRD

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang berkedudukan secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Capaian kesekretariatan DPRD pada tahun 2022 dan 2023 mengalami kenaikan dari tahun 2021, hal ini terlihat dari indikator persentase fasilitasi dukungan terhadap penyelenggaraan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD dari 88,43% pada tahun 2022 menjadi 100% pada tahun 2022 dan 2023. Berikut adalah tabel capaian kinerja urusan kesekretariatan DPRD tahun 2019-2023:

Tabel 2.63
Capaian Indikator Kinerja Urusan Kesekretariatan DPRD
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase fasilitasi dukungan terhadap penyelenggaraan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD	%	N/A	100	88,43	100	100

Sumber : LKPJ dan LKIP berbagai tahun

N/A pada tahun 2019 mencerminkan penggunaan indikator baru dalam RPJMD tahun 2021-2026

2.1.3.5 Urusan Pendukung

1. Perencanaan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 9 ayat 1 menyatakan bahwa Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkruen, dan urusan pemerintahan umum. Dalam pasal 3 diterangkan bahwa urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Urusan perencanaan berdasarkan ketentuan peraturan di atas tidak termasuk kepada urusan wajib maupun urusan pilihan akan tetapi merupakan urusan penunjang yang menunjang terhadap pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan.

Capaian kinerja urusan perencanaan diukur melalui nilai perencanaan kinerja dalam Evaluasi SAKIP Kabupaten. Pada tahun 2023, indikator ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, yaitu dari 21,64% menjadi 21,80%. Informasi lebih lengkap dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.64
Capaian Indikator Kinerja Urusan Perencanaan
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Nilai perencanaan kinerja dalam Evaluasi SAKIP Kabupaten	%	N/A	23,45	23,46	21,64	21,80

Sumber : LKIP berbagai tahun
N/A pada tahun 2019 mencerminkan penggunaan indikator baru dalam RPJMD tahun 2021-2026

2. Keuangan

Transparansi Informasi APBD dalam rangka transparansi pengelolaan keuangan merupakan salah satu indikator utama yang ditekankan oleh pemerintah untuk mencegah tindak pidana korupsi serta dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Government*). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dalam upaya mewujudkan transparansi pengelolaan keuangan, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mewajibkan setiap badan publik menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana. Berikut adalah capaian kinerja urusan keuangan Tahun 2019-2023.

Tabel 2.65
Capaian Indikator Kinerja Urusan Keuangan
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Rata-rata persentase penetapan APBD yang tepat waktu; laporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	%	16,05	100	100	100	100
2	Persentase Barang Milik Daerah yang telah dilengkapi dengan Dokumen Bukti Kepemilikan	%	N/A	74	77,98	80,77	84,68
3	Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah	%	N/A	-6,48	8,14	25,50	4,08
4	Persentase PAD terhadap pendapatan	%	N/A	8,51	11,57	9,69	-

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2019	2020	2021	2022	2023
5	Persentase SILPA terhadap APBD	%	N/A	3,19	6,19	-	-
6	Penetapan APBD	Tepat Waktu/ Tidak Tepat Waktu	N/A	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
7	Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	%	N/A	4,89	5,81	-	-
8	Rasio PAD	%	N/A	0,82	0,95	-	-
9	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi <i>transfer expenditures</i>)	%	N/A	57,62	65,51	-	-
10	Opini Laporan Keuangan	Nilai	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
11	Deviasi realisasi PAD terhadap Belanja Total dalam APBD	%	N/A	13,84	4,14	-	-
12	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	N/A	8,21	12,45	-	-
13	Manajemen Aset		N/A	Ya	Ya	Ya	Ya
14	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	%	N/A	3,10	5,31	-	-
15	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya ==> pendapatan pemerintah/pdb	%	N/A	0,82	0,95	-	-
16	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB ==> pajak daerah/pdb	%	N/A	0,19	0,19	-	-

Sumber : LKIP berbagai tahun

N/A pada tahun 2019 mencerminkan penggunaan indikator baru dalam RPJMD tahun 2021-2026

3. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tasikmalaya merupakan Badan Tipe A yang melaksanakan fungsi sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan dalam pengelolaan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan. Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sesuai dengan peraturan Bupati Kabupaten Tasikmalaya Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tasikmalaya mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang bidang kepegawaian, pendidikan dan latihan dan tugas lain yang diberikan

Bupati. Adapun fungsi Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tasikmalaya adalah sebagai berikut:

- Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis pengelolaan kepegawaian daerah, pendidikan dan latihan
- Pelaksanaan tugas pengelolaan kepegawaian meliputi perencanaan dan pengendalian pegawai, manajemen kinerja pegawai, peningkatan kapasitas dan kompetensi pegawai.
- Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, pendidikan dan latihan.
- Pembinaan teknis bidang kepegawaian
- Penyelenggaraan administrasi dan ketatausahaan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati.

Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tasikmalaya telah menetapkan indikator kinerja utama untuk periode 2021-2026. Capaian kinerja urusan kepegawaian tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.66
Capaian Indikator Kinerja Utama Urusan Kepegawaian
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	JP/ Orang/ Tahun	15,83	9,6	10	12,21	13,28
2	Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	77,55	77,54	77,01	81,51	86,5
3	Indeks Sistem Merit		N/A	280	285	280	284,5

Sumber : LKPJ dan LKIP berbagai tahun

4. Penelitian dan Pengembangan

Capaian di bidang penelitian dan pengembangan pada tahun 2023 mengalami penurunan, hal ini terlihat dari capaian indikator indeks inovasi daerah dari 50,42 poin tahun 2022 menjadi 43,12 poin. Hal ini disebabkan oleh jumlah inovasi yang dikirimkan di kurang dari standar jumlah yang ditetapkan. Namun, untuk capaian indikator persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan oleh stakeholder dari tahun 2021 sampai tahun 2023 masih sama di angka 100%. Berikut adalah capaian kinerja urusan penelitian dan pengembangan tahun 2019-2023.

Tabel 2.67
Capaian Indikator Kinerja Urusan Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan oleh stakeholder	%	N/A	0	100	100	100
2	Indeks Inovasi Daerah	Inovatif	N/A	Kurang Inovatif	45,72 (Inovatif)	50,42 (Inovatif)	43,12 (Inovatif)

Sumber : LKIP berbagai tahun

N/A pada tahun 2019 mencerminkan penggunaan indikator baru dalam RPJMD tahun 2021-2026

2.1.3. Unsur Pengawasan

1. Pengawasan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang baik dan bersih, dimana Inspektorat Daerah dituntut sebagai pionir untuk melaksanakan manifestasi Undang-Undang tersebut. Inspektorat Daerah merupakan instansi yang mempunyai tugas mengawasi jalannya pelaksanaan pemerintahan di Kabupaten Tasikmalaya. Sebagai instansi pengawas, Inspektorat Daerah diharapkan dapat mendeteksi secara dini kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan anggaran. Fungsi Pengawasan Inspektorat Daerah sangat penting dalam menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien.

Inspektorat Daerah sebagai lembaga pengawas internal pemerintah daerah harus mampu melaksanakan fungsinya secara optimal untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Dalam pelaksanaan tugasnya Inspektorat Daerah juga bekerja sama dengan lembaga pengawas lain seperti KPK, BPKP dan BPK serta untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada pemerintah daerah, Inspektorat Daerah juga diminta memainkan perannya dalam pengawasan dan pengendalian mutu pelayanan kepada publik atau masyarakat, khususnya yang berada di lingkungan pemerintahan daerah. Capaian kinerja urusan pengawasan tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.68
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pengawasan
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2023

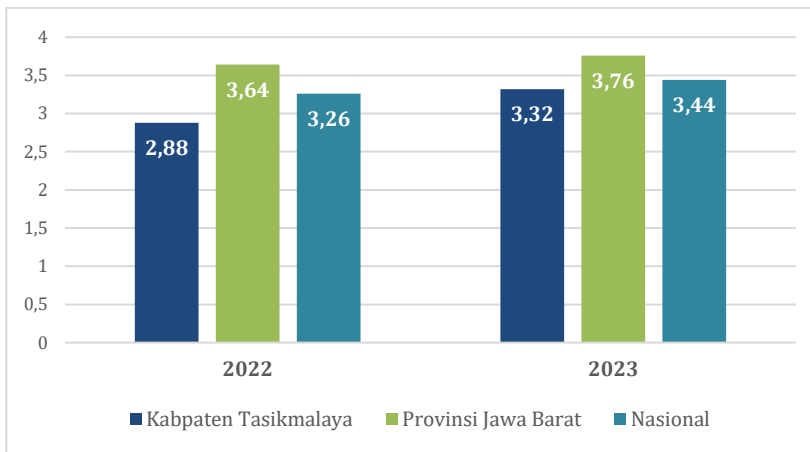
No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Prosentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang selesai ditindaklanjuti	%	55,77	81,75	83,79	88,92	89,19
2	Hasil leveling lembaga pengawasan	Level	N/A	2	2	2	3

Sumber : LKPJ dan LKIP beberapa tahun

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek penting dalam tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berkaitan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah dan infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

Pengukuran daya saing pada tingkat Kabupaten/Kota melalui Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) yang merefleksikan tingkat produktivitas daerah. IDSD terdiri dari empat komponen, yaitu Lingkungan Pendukung, Sumber Daya Manusia, Pasar, dan Ekosistem Inovasi. Hasil pengukuran IDSD Kabupaten Tasikmalaya tahun 2022-2023 mengalami peningkatan sebesar 0,44 poin, dari 2,88 pada tahun 2022 menjadi 3,32 pada tahun 2023. Akan tetapi, capaian tersebut masih berada dibawah Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Berikut adalah grafik capaian indeks daya saing daerah Kabupaten Tasikmalaya.



Gambar 2.35
Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Tasikmalaya
 Sumber: Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2024

2.1.4.1. Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi suatu daerah antara lain dapat terlihat dari pengeluaran per kapitanya. Pengeluaran per kapita merupakan biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga yang telah disesuaikan dengan paritas daya beli. Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas (rupiah) di Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2022 dan 2023 sebagai berikut:

Tabel 2.69
Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas (rupiah) di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022-2023

No	Kelompok Komoditas	Tahun 2022		Tahun 2023	
		Rp	%	Rp	%
1	Makanan	498.169	56,33%	595.685	55,79%
2	Bukan Makanan	386.134	43,67%	472.007	44,21%
Jumlah		884.303	100,00%	1.067.692	100,00%

Sumber: BPS Kabupaten Tasikmalaya, 2024

Di samping itu, kemampuan ekonomi suatu daerah dapat terlihat pula dari perkembangan produktivitas sektor-sektor pembentuk PDRB. Sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB Kabupaten Tasikmalaya di lima tahun terakhir ini (2019-2023) yang tertinggi adalah Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 37,77%, kemudian diikuti Perdagangan Besar dan Eceran 18,46%, Industri Pengolahan 7,98%, Konstruksi 7,74%, dan Jasa Pendidikan sebesar 6,70% sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel 2.70
Persentase Kontribusi Lapangan Usaha PDRB ADHK Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2023

No	Lapangan Usaha/Industry	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	37,48%	37,81%	37,61%	38,01%	37,77%
2	Pertambangan dan Penggalian	0,21%	0,22%	0,22%	0,21%	0,21%
3	Industri Pengolahan	7,69%	7,62%	7,65%	7,76%	7,98%
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,07%	0,06%	0,07%	0,07%	0,07%
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%
6	Konstruksi	8,18%	7,75%	8,25%	8,11%	7,74%
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	19,35%	18,18%	18,19%	18,31%	18,46%
8	Transportasi dan Pergudangan	4,21%	4,22%	4,11%	4,16%	4,57%
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,38%	1,43%	1,39%	1,47%	1,49%
10	Informasi dan Komunikasi	3,34%	4,21%	4,31%	4,20%	4,15%
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,01%	3,06%	3,15%	3,21%	3,26%
12	Real Estat	1,30%	1,32%	1,40%	1,38%	1,38%
13	Jasa Perusahaan	0,49%	0,43%	0,45%	0,48%	0,50%
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	4,16%	3,95%	3,72%	3,38%	3,31%
15	Jasa Pendidikan	6,70%	7,35%	7,16%	6,86%	6,70%
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,66%	0,65%	0,67%	0,67%	0,69%
17	Jasa Lainnya	1,72%	1,70%	1,64%	1,71%	1,71%
Produk Domestik Bruto		100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: BPS Kabupaten Tasikmalaya, 2024

2.1.4.2. Fasilitas Wilayah dan Infrastruktur

2.1.4.2.1. Fasilitas Wilayah dan Infrastruktur

Prasarana wilayah atau infrastruktur menunjang daya saing daerah dalam hubungannya dengan ketersediaannya dalam mendukung aktivitas daerah di berbagai sektor di daerah dan antar-wilayah. Kondisi infrastruktur dapat dijelaskan secara rinci berdasarkan pembangunan beberapa prasarana berikut yang disajikan dalam Tabel di bawah ini.

Tabel 2.71
Prasarana Wilayah/Infrastruktur
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2023

No	Uraian	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Cakupan Kelengkapan Perlengkapan Jalan	%	N/A	71	71	71	71
2	Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir Sampah	Unit	N/A	1	1	1	1
3	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Poin	N/A	0,481	0,512	0,542	0,566
4	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	N/A	68,39	66,84	69,51	69,99
5	Persentase penduduk berakses air minum	%	N/A	65,11	65,61	65,97	66,44
6	Persentase rumah tinggal berakses sanitasi	%	N/A	48,66	48,91	49,16	50,43

Sumber: Dinas PUTRLH Kabupaten Tasikmalaya, 2024

2.1.4.2.2. Ketersediaan Penginapan/Hotel dan Restoran

Ketersediaan penginapan/hotel merupakan salah satu aspek yang penting dalam meningkatkan daya saing daerah, terutama dalam menerima dan melayani jumlah kunjungan dari luar daerah. Semakin berkembangnya investasi ekonomi daerah akan meningkatkan daya tarik kunjungan ke daerah tersebut. Dengan semakin banyaknya jumlah kunjungan orang dan wisatawan ke suatu daerah perlu didukung oleh ketersediaan penginapan/hotel.

Ketersediaan restoran pada suatu daerah menunjukkan tingkat daya tarik investasi suatu daerah. Banyaknya restoran dan rumah makan menunjukkan perkembangan kegiatan ekonomi suatu daerah dan peluang-peluang yang ditimbulkannya.

Begitu pula halnya dengan keberadaan fasilitas lembaga keuangan khususnya perbankan. Fungsi intermediasi perbankan akan sangat strategis karena dapat menyediakan dana untuk investasi melalui saluran kredit atau pembiayaan. Serapan kredit atau pembiayaan yang digunakan pelaku usaha sebagai tambahan modal akan meningkatkan kapasitas perusahaan sehingga akan sangat berpengaruh dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menekan angka pengangguran. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2.72
Ketersediaan Penginapan, Hotel dan Restoran
Di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023

No	Uraian	Satuan	2023
1	Hotel/Akomodasi	Unit	16
		Kamar	419
		Tempat Tidur	784
2	Restoran	Unit	48

Sumber : BPS Kabupaten Tasikmalaya, tahun 2024

2.1.4.3. Iklim Investasi

Iklim investasi suatu negara atau suatu daerah mencerminkan kinerja kebijakan pemerintah dan peraturan dalam mengendalikan baik konsep dan tingkat operasional. Secara umum, saat ini iklim investasi di Indonesia dalam kondisi yang tidak memuaskan. Iklim investasi daerah yang baik mencerminkan sejumlah kondisi yang berkaitan dengan wilayah tertentu yang membentuk kesempatan dan insentif bagi investor untuk membuka usaha yang layak dari segi bisnis. Daya saing investasi daerah tidak terjadi dengan serta merta. Pembentukan daya saing investasi, berlangsung terus-menerus dari waktu ke waktu dan dipengaruhi oleh banyak faktor.

Masalah ekonomi pasca Covid-19 sangat berpengaruh terhadap iklim investasi daerah dan harus segera diatasi, oleh karena itu sangat dibutuhkan kesungguhan pemangku kebijakan untuk memacu investasi di Kabupaten Tasikmalaya sehingga mengakselerasi pertumbuhan ekonomi daerah.

Tabel 2.73
Hasil Kinerja Penanaman Modal (Investasi)
di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah Investor Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)/Penanaman Modal Asing (PMA)	Investor	1.201	424	1.427	-	-
2.	Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)/ Penanaman Modal Asing (PMA)	Rp	898.361.971.681	750.600.276.197	8.599.700.000	211.553.020.823	446.296.142.757

Sumber: Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tasikmalaya, 2024

2.1.4.4. Sumber Daya Manusia

Pada tahun 2022 dan 2023, persentase penduduk Kabupaten Tasikmalaya kategori usia muda, usia produktif dan usia lansia tidak banyak berubah. Komposisi penduduk usia produktif di Kabupaten Tasikmalaya memiliki persentase terbesar yaitu mencapai 68,63% pada tahun 2022 dan 68,70% pada tahun 2023. Kondisi ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Tasikmalaya sudah memasuki tahapan bonus demografi (*demographic dividend*) sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Rasio ketergantungan Kabupaten Tasikmalaya selama dua tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.74
Rasio Ketergantungan Kabupaten Tasikmalaya

No	Uraian	Tahun		
		2021	2022	2023
1	Jumlah Penduduk Usia <15 Tahun	434.116	432.343	432.842
2	Jumlah Penduduk Usia >64 Tahun	155.512	165.738	164.095
3	Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif (1) dan (2)	589.628	598.081	596.937
4	Jumlah Penduduk Usia 15-64 Tahun	1.294.105	1.308.517	1.310.108
5	Rasio Ketergantungan (3)/(4)	45,56%	45,71%	45,56%

Sumber: BPS Kabupaten Tasikmalaya, 2024

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2022 dan 2023 rasio ketergantungan di Kabupaten Tasikmalaya sebesar 45,71% dan 45,56% artinya 100 orang penduduk usia produktif mempunyai tanggungan sebanyak 46 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi.

Secara numerik dapat dilihat dengan angka ketergantungan penduduk tahun 2022 dan 2023 keduanya berada di bawah 50%, artinya penduduk usia produktif (15-64 tahun) menanggung sedikit penduduk usia non produktif (64 tahun), dimana kualitas penduduk (baik tingkat pendidikan, skill, profesionalitas dan kreativitas) mampu menekan beban ketergantungan sampai tingkat terendah yang berguna untuk mendorong pembangunan ekonomi.

Semakin tinggi persentase *dependency ratio* menunjukkan semakin tinggi beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung

penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Salah satu solusi untuk menekan angka rasio ketergantungan yaitu dengan menurunkan angka kelahiran melalui program keluarga berencana.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan bahwa tahapan perencanaan pembangunan nasional merupakan suatu siklus mulai dari penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan rencana dan evaluasi pelaksanaan rencana. Sebagai suatu siklus, tahapan pengendalian dan evaluasi membantu mengarahkan pelaksanaan pembangunan pada tujuan yang ingin dicapai yang diiringi dengan peningkatan kualitas perencanaan pembangunan Daerah.

Pasal 180 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menyatakan bahwa pengendalian dan evaluasi bertujuan untuk mewujudkan konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan, konsistensi antara RKPD dengan RPJMD, serta kesesuaian antara capaian pembangunan Daerah dengan kinerja yang telah ditetapkan. Selanjutnya pasal 12 menyatakan bahwa RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pusat. Adapun tata cara penyusunannya dilakukan melalui beberapa tahapan, pada tahapan penyusunan rancangan awal RKPD dimulai pada minggu pertama bulan Desember 2 (dua) tahun sebelum tahun rencana.

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai dengan tahun berjalan dan realisasi RPJMD mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan Daerah berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dan realisasi RPJMD yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan renja Perangkat daerah tahun lalu dan realisasi Renstra Perangkat Daerah oleh masing – masing Perangkat

Daerah dan atau dari laporan pertanggungjawaban APBD menurut tahun-tahun yang berkenaan.

Kewenangan pemerintah daerah berkenaan dengan pengendalian dan evaluasi diatur dalam Pasal 181 dan Pasal 183 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa Bupati/walikota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan Daerah lingkup kabupaten/kota yang dilakukan pada waktu perumusan kebijakan perencanaan pembangunan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan Daerah serta evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 merupakan rencana pembangunan Daerah tahun kelima penjabaran RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 dan memiliki posisi sangat strategis bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya karena mengemban target dalam rangka mewujudkan tujuan akhir RPJMD Tahun 2021-2026 melalui 8 (delapan) sasaran dan 14 (empat belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) serta program prioritas yang selanjutnya dijabarkan melalui program dan kegiatan.

2.2.1 Evaluasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan RKPD Tahun 2023 dan Triwulan I Tahun 2024

Evaluasi terhadap hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tasikmalaya tahun 2023 dapat dijelaskan melalui perbandingan jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan, realisasi keuangan, capaian kinerja program berdasarkan urusan serta capaian kinerja seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya serta capaian kinerja dan realisasi keuangan sampai dengan triwulan I tahun anggaran 2024.

2.2.1.1 Perbandingan Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Membandingkan jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan merupakan cara untuk melihat sejauhmana konsistensi dan kesesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan dalam perencanaan dengan pelaksanaan, serta alasan yang mendasarinya dilihat dari target

perencanaan tahun 2023 pada dokumen RPJMD Kabupaten Tasikmalaya tahun 2021-2026 dengan RKPD Tahun 2023, APBD Tahun 2023, Perubahan RKPD dengan Perubahan APBD tahun 2023. Berikut disajikan dalam bentuk tabel dan gambar.

Tabel 2.75
Perbandingan Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023

No.	Perangkat Daerah	RKPD			APBD			RKPD P			APBD P			Program yang tidak memperoleh anggaran
		Prog	Keg	Subkeg	Prog	Keg	Subkeg	Prog	Keg	Subkeg	Prog	Keg	Subkeg	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	9	22	129	4	13	76	5	22	131	4	12	79	a. Program Pengembangan Kurikulum; b. Program Pendidik dan tenaga Kependidikan; c. Program Pengendalian perizinan Pendidikan; d. Program Pembinaan Sejarah e. Program Pelestarian dan Pengelolaan cagar Budaya
2	Dinas Kesehatan	5	24	104	5	19	70	5	24	106	5	19	71	
3	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup	26	49	149	15	22	47	26	49	149	15	24	50	a. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase; b. Program Pengembangan jasa Konstruksi; c. Program Kawasan Pemukiman; d. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman; e. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan

No.	Perangkat Daerah	RKPD			APBD			RKPD P			APBD P			Program yang tidak memperoleh anggaran
		Prog	Keg	Subkeg	Prog	Keg	Subkeg	Prog	Keg	Subkeg	Prog	Keg	Subkeg	
														Utilitas Umum; f. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3); g. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Ijin Lingkungan dan Ijin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH); h. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat; i. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat; j. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup; k. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA, Kearifan Lokal dan Hal MHA yang terkait dengan PPLH)
4	Satuan Polisi Pamong Praja	2	10	37	2	8	25	2	10	37	2	8	25	

No.	Perangkat Daerah	RKPD			APBD			RKPD P			APBD P			Program yang tidak memperoleh anggaran
		Prog	Keg	Subkeg	Prog	Keg	Subkeg	Prog	Keg	Subkeg	Prog	Keg	Subkeg	
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3	14	40	3	9	19	3	14	39	3	8	19	
6	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	14	31	91	12	26	54	14	32	98	12	27	54	a. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan; b. Program Perlindungan Khusus Anak
7	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	12	18	39	5	9	21	5	9	21	5	9	21	a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal; b. Program Promosi Penanaman Modal; c. Program Pelayanan Penanaman Modal; d. Program Pengelolaan data dan Sistem Informasi Penanaman Modal; e. Program Perencanaan Tenaga Kerja f. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi g. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5	15	31	3	8	20	5	15	31	3	8	20	a. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;

No.	Perangkat Daerah	RKPD			APBD			RKPD P			APBD P			Program yang tidak memperoleh anggaran
		Prog	Keg	Subkeg	Prog	Keg	Subkeg	Prog	Keg	Subkeg	Prog	Keg	Subkeg	
														b. Program Pengelolaan Profil Kependudukan
9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5	10	43	4	9	23	5	10	37	5	10	25	a. Program Penataan Desa;
10	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	5	20	54	5	17	49	5	20	55	5	15	32	
11	Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan	14	21	41	3	7	19	14	21	42	5	9	21	a. Program Penilaian Kesehatan KSP atau USP Koperasi; b. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian; c. Program Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi; d. Program Pengembangan UMKM; e. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan; f. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting; g. Program Pengembangan Ekspor; h. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen;

No.	Perangkat Daerah	RKPD			APBD			RKPD P			APBD P			Program yang tidak memperoleh anggaran
		Prog	Keg	Subkeg	Prog	Keg	Subkeg	Prog	Keg	Subkeg	Prog	Keg	Subkeg	
														i. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri; j. Program Pengendalian Ijin Usaha Industri; k. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional;
12	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	8	24	62	7	13	25	8	24	63	7	15	28	a. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
13	Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan	15	40	115	8	15	30	13	38	111	8	16	31	a. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian; b. Program Perijinan Usaha pertanian; c. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; d. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan kemandirian Pangan; e. Program Peningkatan Difersifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat; f. Program Penanganan Kerawanan Pangan;

No.	Perangkat Daerah	RKPD			APBD			RKPD P			APBD P			Program yang tidak memperoleh anggaran
		Prog	Keg	Subkeg	Prog	Keg	Subkeg	Prog	Keg	Subkeg	Prog	Keg	Subkeg	
														g. Program Pengawasan keamanan Pangan
14	Sekretariat Daerah	9	29	87	6	22	60	9	29	87	6	22	61	a. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno; b. Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan; c. Program Pengelolaan Tanah Kosong;
15	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	5	19	69	5	16	34	5	17	58	5	26	35	
16	Sekretariat DPRD	2	17	58	2	16	49	2	19	69	2	16	49	
17	Badan Kepegawaian dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia	3	12	36	3	10	21	3	12	36	3	10	22	
18	Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Daerah	4	13	71	4	12	55	4	12	55	4	12	55	
19	Inspektorat Daerah	3	11	33	3	10	30	3	11	33	3	10	22	
20	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6	12	49	6	11	30	6	12	48	6	11	30	

No.	Perangkat Daerah	RKPD			APBD			RKPD P			APBD P			Program yang tidak memperoleh anggaran
		Prog	Keg	Subkeg	Prog	Keg	Subkeg	Prog	Keg	Subkeg	Prog	Keg	Subkeg	
Jumlah		154	411	1338	105	272	757	146	400	1306	108	287	750	
21	Kecamatan Cibalong	3	8	16	5	10	16	5	12	20	5	11	18	
22	Kecamatan Parungponteng	5	11	19	5	10	16	5	12	21	5	11	12	
23	Kecamatan Jatiwaras	6	14	28	5	10	16	5	10	16	5	10	16	
24	Kecamatan Salopa	6	14	29	5	10	16	5	10	16	5	10	16	
25	Kecamatan Tanjungjaya	6	12	23	5	11	16	6	13	24	5	10	16	
26	Kecamatan Puspahiang	6	14	27	5	10	16	6	14	30	5	10	15	
27	Kecamatan Sukaraja	6	14	28	5	10	17	6	14	28	5	10	17	
28	Kecamatan Salawu	5	11	19	5	10	16	5	11	19	5	10	16	
29	Kecamatan Karangnunggal	6	14	26	5	10	17	6	14	27	5	10	17	
30	Kecamatan Bantarkalong	5	11	20	5	10	16	5	12	22	5	10	16	
31	Kecamatan Cipatujah	6	14	30	5	10	17	6	14	31	5	10	17	
32	Kecamatan Cikatomas	6	14	26	5	10	16	6	14	26	5	11	18	
33	Kecamatan Taraju	6	14	28	5	10	16	6	14	28	5	10	16	
34	Kecamatan Pancatengah	5	11	20	5	10	16	5	13	22	5	10	17	

No.	Perangkat Daerah	RKPD			APBD			RKPD P			APBD P			Program yang tidak memperoleh anggaran
		Prog	Keg	Subkeg	Prog	Keg	Subkeg	Prog	Keg	Subkeg	Prog	Keg	Subkeg	
35	Kecamatan Cikalong	6	14	29	5	10	16	6	13	29	5	10	16	
36	Kecamatan Sodonghilir	4	10	16	5	10	16	6	14	22	5	10	16	
37	Kecamatan Kadipaten	6	13	23	5	10	17	5	10	17	5	10	17	
38	Kecamatan Pagerageung	6	15	27	5	10	17	6	15	26	5	10	17	
39	Kecamatan Jamanis	6	12	24	5	10	16	6	12	24	5	10	16	
40	Kecamatan Rajapolah	4	8	17	5	10	16	5	11	21	5	10	16	
41	Kecamatan Ciawi	6	13	28	5	10	17	5	10	17	5	10	17	
42	Kecamatan Cineam	5	10	16	5	10	16	5	12	20	5	10	16	
43	Kecamatan Manonjaya	6	15	30	5	10	16	6	15	31	5	10	16	
44	Kecamatan Bojonggambir	6	14	33	5	10	16	6	14	34	5	10	16	
45	Kecamatan Cisayong	6	12	24	5	10	16	6	13	25	5	10	16	
46	Kecamatan Sariwangi	3	5	10	5	10	16	5	10	17	5	10	16	
47	Kecamatan Singaparna	5	12	24	5	10	16	5	10	16	5	10	16	
48	Kecamatan Sukarame	6	14	26	5	10	16	6	14	27	5	10	18	
49	Kecamatan Sukahening	5	10	15	5	10	15	5	10	18	5	10	16	

No.	Perangkat Daerah	RKPD			APBD			RKPD P			APBD P			Program yang tidak memperoleh anggaran
		Prog	Keg	Subkeg	Prog	Keg	Subkeg	Prog	Keg	Subkeg	Prog	Keg	Subkeg	
50	Kecamatan Sukaratu	6	15	31	5	10	17	6	15	32	5	11	19	
51	Kecamatan Cigalontang	6	15	31	5	10	16	6	14	33	5	10	16	
52	Kecamatan Leuwisari	6	15	30	5	10	16	5	10	16	5	10	16	
53	Kecamatan Padakembang	3	8	17	3	10	16	3	8	17	3	6	12	
54	Kecamatan Gunungtanjung	5	11	19	5	10	16	5	11	19	5	10	16	
55	Kecamatan Karangjaya	6	15	30	5	10	17	6	15	31	5	10	17	
56	Kecamatan Culamega	6	15	27	5	10	16	6	14	28	5	11	18	
57	Kecamatan Sukaresik	6	15	29	5	10	16	6	15	28	5	10	16	
58	Kecamatan Mangunreja	6	14	26	5	10	16	5	10	16	5	10	16	
59	Kecamatan Bojongasih	6	14	28	5	10	17	6	14	29	5	10	18	
Jumlah		213	490	949	193	391	632	214	486	923	193	391	636	
Total		363	882	2289	298	663	1389	360	886	2229	301	678	1386	

Sumber: Bappelitbangda Kab. Tasikmalaya diolah, 2024



Gambar 2.35
Perbandingan Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2023



Gambar 2.36
Perbandingan Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Perubahan Tahun Anggaran 2023

Berdasarkan tabel diatas, terdapat pengurangan jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan pada RKPD Tahun 2023 dengan jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan pada APBD Tahun 2023 untuk Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Namun program, kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum dalam APBD telah sesuai dan mengacu pada RKPD.

Perubahan program, kegiatan dan sub kegiatan serta anggaran dalam rangka efektif dan efisiensi disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan penganggaran Kabupaten Tasikmalaya, termasuk hasil evaluasi terhadap program kegiatan yang mendukung percepatan pencapaian target sasaran RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 dan sasaran IKU Perangkat Daerah. Selain itu dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan telah mempedomani pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, bahwa RKPD Tahun 2023 harus memuat prioritas pembangunan Daerah serta kebijakan pemulihan ekonomi dalam penanganan dampak pandemi Covid-19.

Selain itu, RKPD Kabupaten Tasikmalaya tahun 2023 juga harus memprioritaskan program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung dan akan berdampak secara langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 melalui capaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah Kabupaten Tasikmalaya, capaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) setiap perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya serta capaian kinerja urusan.

Perbandingan jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan pada RKPD Tahun 2023 dengan APBD Tahun 2023 untuk kecamatan hampir tidak mengalami perubahan karena program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan relatif sama.

Pada pelaksanaan APBD Tahun 2023 juga terdapat perubahan jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan dengan RKPD Tahun 2023 untuk sebagian besar perangkat daerah sebagai dampak pemberlakuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 212/PMK.07/022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan

Penggunaannya Tahun Anggaran 2023 yang ditetapkan pada tanggal 27 Desember tahun 2022 setelah RKPD Tahun 2022 ditetapkan 1 (satu) tahun sebelumnya. Dalam ketentuan tersebut bagian DAU yang ditentukan penggunaannya terdiri atas : a. penggajian formasi PPPK; b. pendanaan Kelurahan; c. bidang pendidikan; d. bidang kesehatan; dan e. bidang pekerjaan umum. Oleh karena itu pada bidang Pendidikan, bidang Kesehatan dan bidang pekerjaan umum terjadi perubahan jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan berdampak pada penambahan anggaran yang sangat besar. Hal ini juga diharapkan dapat mempercepat capaian target SPM mengingat pada tahun-tahun sebelumnya belum maksimal dilaksanakan oleh perangkat daerah pengampu.

2.2.1.2 Realisasi Keuangan Tahun 2023

Penyerapan anggaran sampai dengan triwulan IV tahun anggaran 2023, dari 301 program, 678 kegiatan dan 1386 sub kegiatan dengan total anggaran Rp.3.263.337.543.114 dengan penyerapan Rp.3.083.355.779.249 (94,48%). Penyerapan anggaran ini disebabkan karena pada beberapa perangkat daerah masih terdapat persentase capaian di bawah 90%, perlu melakukan evaluasi faktor-faktor penyebabnya. Sedangkan capaian kinerja 99,78% artinya penilaian kinerja SANGAT TINGGI.

Untuk mengetahui gambaran realisasi keuangan dan capaian kinerja perangkat daerah pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut:

Tabel 2.76
Realisasi Keuangan dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023

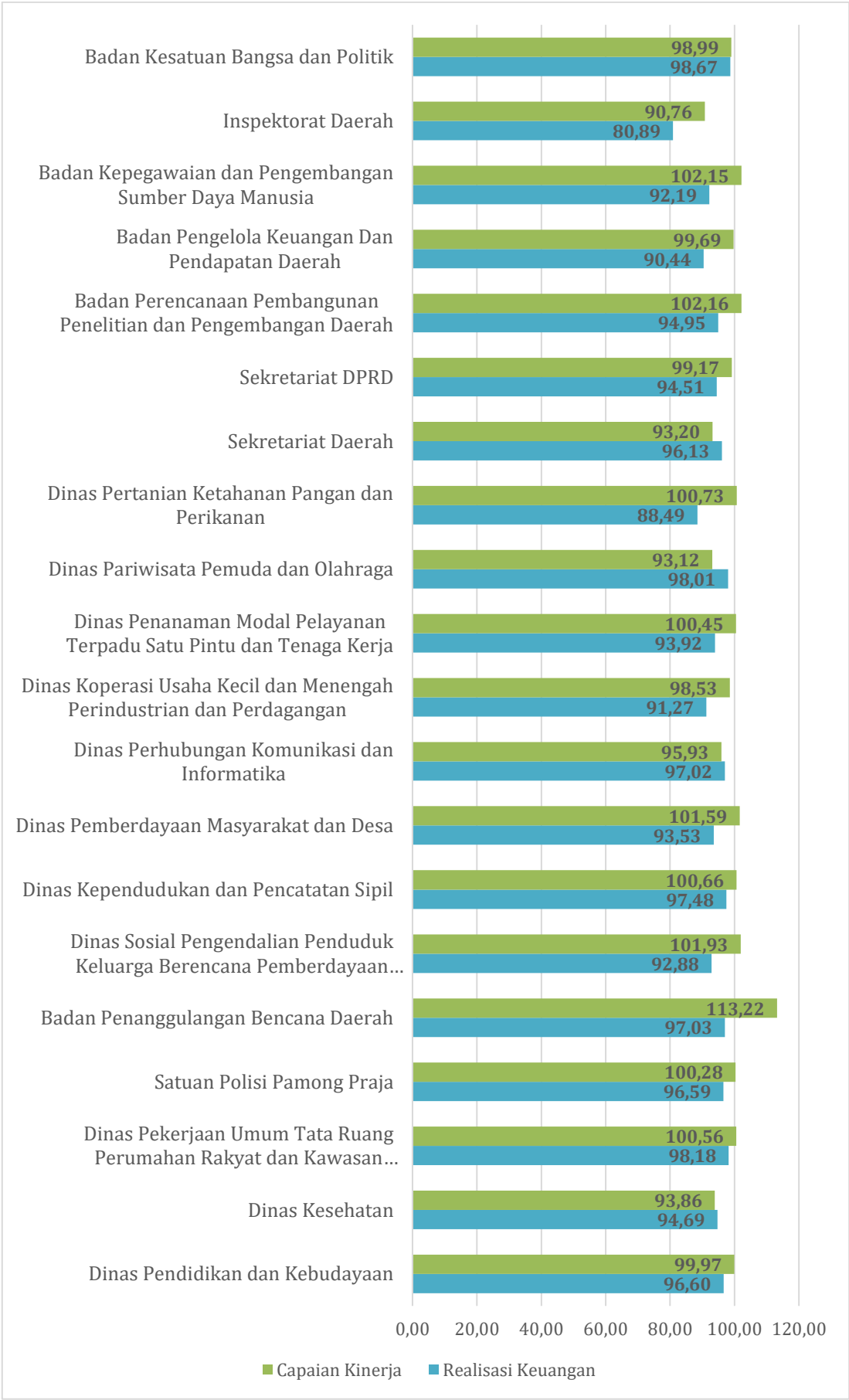
No	Perangkat Daerah	Pagu RKPD Perubahan	Pagu APBD Perubahan	Realisasi	%	
					Rp	Kinerja
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.286.013.897.396	1.324.319.111.273	1.279.238.531.984	96,60	99,97
2	Dinas Kesehatan	297.483.142.929	318.888.991.197	301.943.517.559	94,69	93,86
3	Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	199.301.844.488	211.445.691.560	207.607.327.143	98,18	100,56
4	Satuan Polisi Pamong Praja	13.750.276.527	15.647.454.585	15.114.001.201	96,59	100,28
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8.729.501.038	8.885.960.280	8.621.820.829	97,03	113,22
6	Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	42.451.192.922	42.736.233.924	39.691.959.925	92,88	101,93
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8.193.281.224	8.232.876.524	8.025.371.246	97,48	100,66
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	6.466.478.749	7.739.823.314	7.239.011.398	93,53	101,59
9	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika	36.234.455.814	43.294.518.715	42.003.733.163	97,02	95,93
10	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan	14.343.933.463	14.738.837.297	13.451.769.463	91,27	98,53
11	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	18.594.040.005	18.571.956.940	17.442.760.239	93,92	100,45
12	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	34.432.970.268	35.907.329.030	35.192.632.737	98,01	93,12
13	Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan	69.657.534.003	70.000.898.173	61.941.559.879	88,49	100,73

No	Perangkat Daerah	Pagu RKPD Perubahan	Pagu APBD Perubahan	Realisasi	%	
					Rp	Kinerja
14	Sekretariat Daerah	109.376.266.189	116.420.981.359	111.918.065.025	96,13	101,41
15	Sekretariat DPRD	60.523.266.482	61.277.298.664,00	57.911.055.131	94,51	99,17
16	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	12.484.290.509	12.598.401.558	11.962.650.926	94,95	102,16
17	Badan Pengelola Keuangan Dan Pendapatan Daerah	802.878.085.981	809.728.466.043	732.327.096.495	90,44	99,69
18	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	11.476.910.229	11.601.879.824	10.695.435.767	92,19	102,15
19	Inspektorat Daerah	15.895.622.761	17.415.622.761	14.088.028.584	80,89	90,76
20	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	33.422.607.435	36.963.321.758	36.471.353.430	98,67	98,99
21	Kecamatan Cibalong	2.037.230.957	2.051.408.646	1.871.309.620	91,22	100,00
22	Kecamatan Parungponteng	2.079.765.951	2.084.282.878	1.938.914.599	93,03	100,00
23	Kecamatan Jatiwaras	1.949.357.921	1.877.522.231	1.706.290.547	90,88	100,00
24	Kecamatan Salopa	1.806.679.340	1.795.082.633	1.647.650.506	91,79	100,00
25	Kecamatan Tanjungjaya	1.758.746.598	1.779.227.696	1.618.560.525	90,97	100,00
26	Kecamatan Puspahiang	1.823.497.757	1.922.700.495	1.782.572.804	92,71	100,00
27	Kecamatan Sukaraja	1.815.240.622	1.898.924.302	1.784.653.278	93,98	100,00
28	Kecamatan Salawu	1.834.948.396	1.896.077.979	1.699.423.736	89,63	100,00
29	Kecamatan Karangnunggal	2.163.401.239	2.189.833.882	1.975.173.994	90,20	100,00
30	Kecamatan Bantarkalong	1.776.823.882	1.862.234.431	1.702.338.171	91,41	100,00
31	Kecamatan Cipatujah	1.899.177.925	1.997.231.040	1.776.398.824	88,94	100,00
32	Kecamatan Cikatomas	1.751.980.864	1.836.123.103	1.708.161.520	93,03	100,00
33	Kecamatan Taraju	1.755.298.510	1.875.580.334	1.746.496.385	93,12	100,00
34	Kecamatan Pancatengah	1.868.499.240	1.867.015.130	1.685.867.883	90,30	100,00

No	Perangkat Daerah	Pagu RKPD Perubahan	Pagu APBD Perubahan	Realisasi	%	
					Rp	Kinerja
35	Kecamatan Cikalong	1.991.903.677	1.930.430.315	1.719.174.761	89,06	100,00
36	Kecamatan Sodonghilir	1.894.827.611	1.947.019.184	1.821.029.382	93,53	100,00
37	Kecamatan Kadipaten	1.894.912.106	1.943.138.143	1.820.548.050	93,69	100,00
38	Kecamatan Pagerageung	2.103.314.463	2.115.180.679	1.964.947.424	92,90	100,00
39	Kecamatan Jamanis	1.937.153.005	1.994.682.447	1.758.763.468	88,17	100,00
40	Kecamatan Rajapolah	1.768.348.328	1.909.316.755	1.786.022.512	93,54	100,00
41	Kecamatan Ciawi	2.176.583.750	2.171.352.290	1.975.599.892	90,98	100,00
42	Kecamatan Cineam	1.934.744.224	1.951.579.149	1.799.353.438	92,20	100,00
43	Kecamatan Manonjaya	1.985.650.280	2.083.650.280	1.908.973.924	91,62	100,00
44	Kecamatan Bojonggambir	1.894.700.575	1.968.776.188	1.831.963.379	93,05	100,00
45	Kecamatan Cisayong	2.242.331.772	2.255.400.814	2.094.195.367	92,85	100,00
46	Kecamatan Sariwangi	1.968.003.006	1.976.434.952	1.756.981.470	88,90	100,00
47	Kecamatan Singaparna	1.984.203.520	2.023.934.924	1.903.252.973	94,04	100,00
48	Kecamatan Sukarame	1.894.841.701	1.917.381.767	1.796.927.408	93,72	100,00
49	Kecamatan Sukahening	1.741.041.073	1.835.506.989	1.630.385.097	88,82	100,00
50	Kecamatan Sukaratu	2.283.783.388	2.316.895.298	2.151.039.417	92,84	100,00
51	Kecamatan Cigalontang	2.064.007.977	2.096.223.850	1.901.732.258	90,72	100,00
52	Kecamatan Leuwisari	1.971.568.279	2.058.072.147	1.851.468.126	89,96	100,00
53	Kecamatan Padakembang	1.864.802.086	1.907.797.085	1.743.478.215	91,39	100,00
54	Kecamatan Gunungtanjung	1.895.624.152	1.944.221.669	1.830.859.075	94,17	100,00
55	Kecamatan Karangjaya	1.858.944.664	1.855.086.416	1.694.840.220	91,36	100,00
56	Kecamatan Culamega	1.989.498.873	2.021.899.385	1.856.701.910	91,83	100,00
57	Kecamatan Sukaresik	1.938.862.686	1.976.597.841	1.779.597.566	90,03	100,00
58	Kecamatan Mangunreja	1.978.049.476	1.949.666.004	1.735.481.568	89,01	100,00

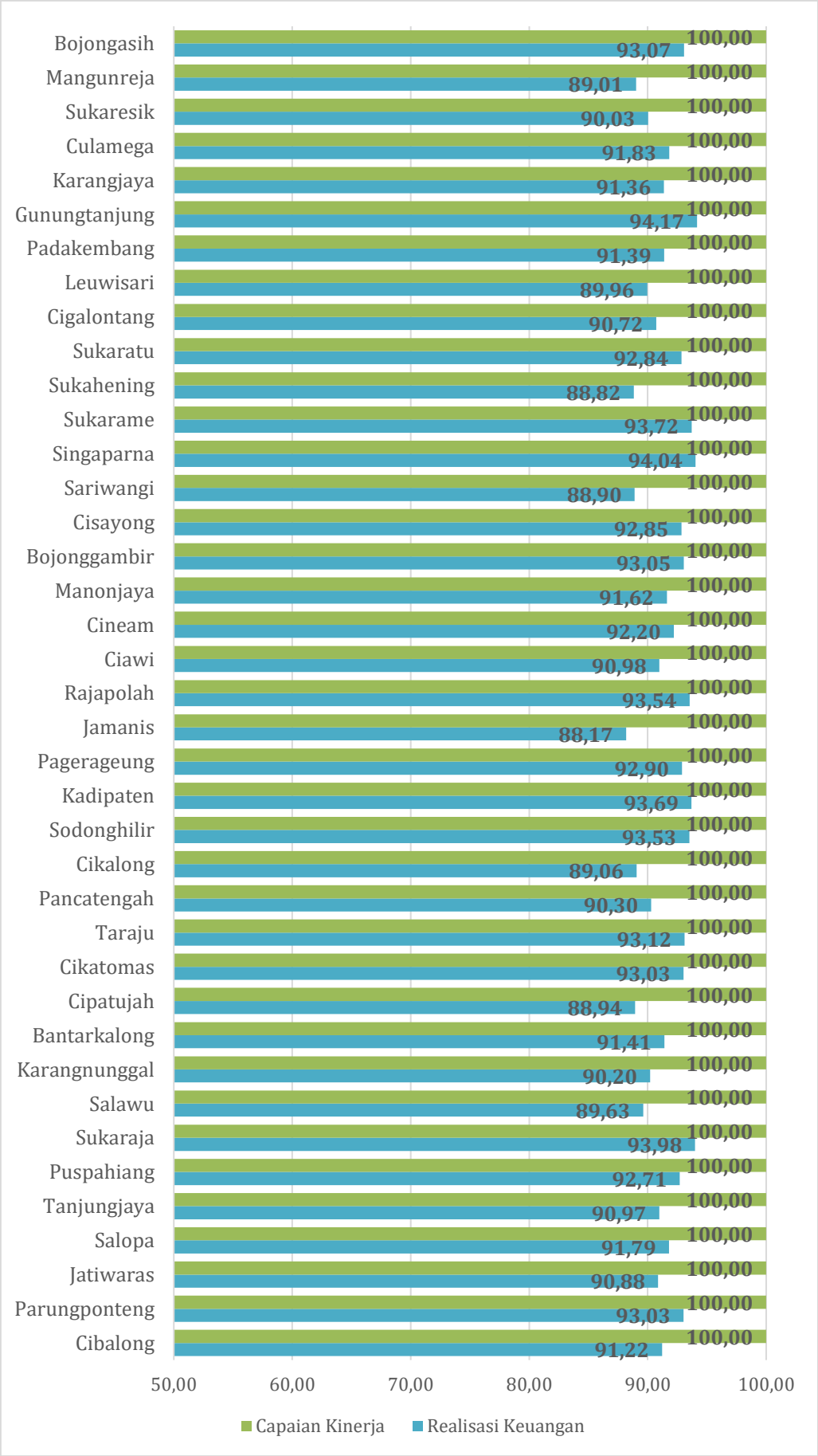
No	Perangkat Daerah	Pagu RKPD Perubahan	Pagu APBD Perubahan	Realisasi	%	
					Rp	Kinerja
59	Kecamatan Bojongasih	1.774.570.794	1.838.398.984	1.710.967.833	93,07	100,00
Total Perangkat Daerah dan Kecamatan		3.157.062.519.080	3.263.337.543.114	3.083.355.779.249	94,48	99,78

Sumber: Bappelitbangda Kab. Tasikmalaya, 2024 (diolah)



Gambar 2.37
Realisasi Keuangan dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah
Tahun 2023

Sumber: Bappelitbangda Kab. Tasikmalaya, 2024



Gambar 2.38
Realisasi Keuangan dan Capaian Kinerja Kecamatan
Tahun 2023

Sumber: Bappelitbangda Kab. Tasikmalaya, 2024

2.2.1.3 Capaian Kinerja Perangkat Daerah, Capaian Kinerja Program, dan Capaian Kinerja Sesuai Urusan Tahun Anggaran 2023

Capaian kinerja Perangkat Daerah termasuk di dalamnya capaian kinerja urusan diperoleh berdasarkan hasil penilaian kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dibandingkan dengan target perencanaan pada tahun berkenaan dengan ketentuan peringkat kinerja berdasarkan Skala Nilai Peringkat Kinerja pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Tabel 2.77
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1)	91<_ 100	Sangat Tinggi
2)	76<_90	Tinggi
3)	66<_75	Sedang
4)	51<_65	Rendah
5)	<-50	Sangat Rendah

Berdasarkan hasil pengukuran, capaian kinerja seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya dapat diklasifikasikan pada 3 (tiga) kategori, yaitu kategori TINGGI dengan interval 76<_90, kategori SANGAT TINGGI 91% ≤ 100%. Dengan interval 76<_90 dengan kategori TINGGI dan Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian/realisasi kinerja sudah memenuhi target perencanaan.

Selain itu, terdapat capaian kinerja pada beberapa perangkat daerah yang melebihi 100%, diantaranya Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup sebesar 100,56%, Sekretariat Daerah 101,41%, Satuan Polisi Pamong Praja sebesar 100,28%, Badan Penanggulangan Bencana Daerah 113,22%, Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 101,93%, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 100,66%, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 101,59%, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 100,45%, Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan 100,73%, Badan

Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah 102,16%. Dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 102,15%.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap laporan perangkat daerah, faktor penyebab capaian melebihi 100% karena pada indikator program penunjang yang menggunakan Nilai Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) targetnya dibawah capaian tahun 2023. Oleh karena itu pada perubahan RKPD tahun 2023 agar melakukan perubahan target kinerja.

Di sisi lain jika dilihat dari perbandingan antara realisasi keuangan atau penyerapan anggaran di bawah 95%, sedangkan capaian kinerja telah mencapai 100%, untuk efektifitas dan efisiensi anggaran serta *outcome* dari program yang telah dilaksanakan belum sepenuhnya terlaporkan dengan baik.

Untuk melihat gambaran capaian kinerja sesuai urusan pada tabel berikut :

Tabel 2.78
Realisasi Keuangan dan Capaian Kinerja Sesuai Urusan
Tahun 2023

No	Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Fisik (%)	Predikat Fisik	Keuangan (%)	Predikat Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A	URUSAN WAJIB	916.474.383.785	892.605.309.782	99,19	Sangat Tinggi	97,40	Sangat Tinggi
1	Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar	837.515.004.385	812.180.183.461	99,53	Sangat Tinggi	96,98	Sangat Tinggi
1.01	Pendidikan	446.021.890.849	437.995.683.856	100,00	Sangat Tinggi	98,20	Sangat Tinggi
1.02	Kesehatan	190.710.081.343	177.095.369.591	95,41	Sangat Tinggi	92,86	Sangat Tinggi
1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	182.510.792.285	179.656.401.841	100,00	Sangat Tinggi	98,44	Sangat Tinggi
1.04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.430.000.000	1.429.920.000	100,00	Sangat Tinggi	99,99	Sangat Tinggi
1.05	Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	6.729.717.408	6.457.581.088	101,76	Sangat Tinggi	95,96	Sangat Tinggi
1.06	Sosial	10.112.522.500	9.545.227.085	100,00	Sangat Tinggi	94,39	Sangat Tinggi
2	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar	78.959.379.400	80.425.126.321	98,86	Sangat Tinggi	101,86	Sangat Tinggi
2.07	Tenaga Kerja	10.513.505.000	10.103.816.330	100,00	Sangat Tinggi	96,10	Sangat Tinggi
2.08	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.863.300.000	2.811.256.490	100,00	Sangat Tinggi	98,18	Sangat Tinggi
2.10	Pertanahan	6.825.000.000	10.781.282.197	100,00	Sangat Tinggi	157,97	Sangat Tinggi
2.11	Lingkungan Hidup	5.200.163.400	4.979.798.327	100,00	Sangat Tinggi	95,76	Sangat Tinggi
2.12	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	100.000.000	98.065.000	100,00	Sangat Tinggi	98,07	Sangat Tinggi
2.13	Pemberdayaan Masyarakat Desa	3.068.000.000	2.741.545.100	96,25	Sangat Tinggi	89,36	Tinggi
2.14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	21.989.881.000	20.816.910.038	100,00	Sangat Tinggi	94,67	Sangat Tinggi
2.15	Perhubungan	6.222.160.000	6.195.271.550	99,32	Sangat Tinggi	99,57	Sangat Tinggi
2.16	Komunikasi dan Informatika	946.000.000	926.414.956	87,54	Tinggi	97,93	Sangat Tinggi
2.17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	670.170.000	665.653.400	100,00	Sangat Tinggi	99,33	Sangat Tinggi
2.18	Penanaman Modal	365.200.000	333.660.600	100,00	Sangat Tinggi	91,36	Sangat Tinggi
2.19	Kepemudaan dan Olahraga	15.511.000.000	15.483.187.974	97,64	Sangat Tinggi	99,82	Sangat Tinggi
2.20	Statistik	50.000.000	65.029.000	100,00	Sangat Tinggi	130,06	Sangat Tinggi
2.21	Persandian	50.000.000	45.704.219	100,00	Sangat Tinggi	91,41	Sangat Tinggi
2.22	Kebudayaan	4.285.000.000	4.100.741.740	99,84	Sangat Tinggi	95,70	Sangat Tinggi
2.23	Perpustakaan	250.000.000	248.805.800	100,00	Sangat Tinggi	99,52	Sangat Tinggi
2.24	Kearsipan	50.000.000	27.983.600	100,00	Sangat Tinggi	55,97	Rendah
3	URUSAN PILIHAN	55.329.355.546	48.421.115.337	96,24	Sangat Tinggi	87,51	Tinggi
3.25	Kelautan dan Perikanan	9.237.702.000	8.931.530.458	100,00	Sangat Tinggi	96,69	Sangat Tinggi
3.26	Pariwisata	13.461.137.546	13.405.456.573	82,50	Tinggi	99,59	Sangat Tinggi
3.27	Pertanian	28.731.927.000	22.802.492.204	98,72	Sangat Tinggi	79,36	Tinggi
3.28	Kehutanan	-	-	-	-	-	-

No	Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Fisik (%)	Predikat Fisik	Keuangan (%)	Predikat Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3.29	Energi dan Sumberdaya Mineral	-	-				
3.30	Perdagangan	370.000.000	369.425.000	100,00	Sangat Tinggi	99,84	Sangat Tinggi
3.31	Perindustrian	3.528.589.000	2.912.211.102	100,00	Sangat Tinggi	82,53	Tinggi
3.32	Transmigrasi	-	-				
4	PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	51.140.924.600	54.711.184.299	103,50	Sangat Tinggi	106,98	Sangat Tinggi
4.01	Sekretariat Daerah	38.335.133.200	42.322.688.264	107,09	Sedang	110,40	Sangat Tinggi
4.02	Sekretariat DPRD	12.805.791.400	12.388.496.035	100,00	Sangat Tinggi	96,74	Sangat Tinggi
5	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	697.660.131.369	703.787.833.028	43,28	Sangat Rendah	100,88	Sangat Tinggi
5.01	Perencanaan	1.523.000.000	1.700.873.246	100,00	Sangat Tinggi	111,68	Sangat Tinggi
5.02	Keuangan	691.664.036.569	697.724.004.791	100,61	Sangat Tinggi	100,88	Sangat Tinggi
5.03	Kepegawaian	1.199.494.800	1.102.614.566	98,02	Sangat Tinggi	91,92	Sangat Tinggi
5.04	Pendidikan dan Pelatihan	125.000.000	121.846.850	100,00	Sangat Tinggi	97,48	Sangat Tinggi
5.05	Penelitian dan Pengembangan	150.000.000	154.594.400	100,00	Sangat Tinggi	103,06	Sangat Tinggi
5.06	Penanggulangan Bencana	2.998.600.000	2.983.899.175	100,00	Sangat Tinggi	99,51	Sangat Tinggi
6	PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	1.468.511.000	1.413.454.297	76,09	Tinggi	96,25	Sangat Tinggi
6.01	Pengawasan	1.468.511.000	1.413.454.297	76,09	Tinggi	96,25	Sangat Tinggi
7	PEMERINTAHAN UMUM KEWILAYAHAN	76.921.888.335	70.468.097.125	100,00	Sangat Tinggi	91,61	Sangat Tinggi
7.01	Kecamatan	76.921.888.335	70.468.097.125	100,00	Sangat Tinggi	91,61	Sangat Tinggi
8	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	31.608.420.850	31.427.325.702	100,00	Sangat Tinggi	99,43	Sangat Tinggi
8.01	Kesatuan Bangsa dan Politik	31.608.420.850	31.427.325.702	100,00	Sangat Tinggi	99,43	Sangat Tinggi
9	NON URUSAN	1.382.456.521.115	1.280.521.459.679	102,41	Sangat Tinggi	92,63	Sangat Tinggi
	TOTAL	3.213.060.136.600	3.083.355.779.249	91,11	Sangat Tinggi	95,96	Sangat Tinggi

Sumber: Bappelitbangda Kab. Tasikmalaya, 2024

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap capaian kinerja seluruh urusan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2023 sebagaimana dapat dilihat dari tabel 2.78 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar, dari 6 (enam) urusan seluruhnya memperoleh predikat SANGAT TINGGI;
2. Urusan Wajin Non Pelayanan Dasar, dari 17 (tujuh belas) urusan, 16 (enam belas) urusan memperoleh predikat SANGAT TINGGI dan 1 (satu) urusan memperoleh predikat TINGGI;
3. Urusan Pilihan dari 8 (delapan) urusan, 7 (tujuh) memperoleh predikat SANGAT TINGGI dan 1 (satu) urusan memperoleh predikat TINGGI;
4. Pendukung Urusan Pemerintahan, dari 2 (dua) urusan, 2 (dua) urusan memperoleh predikat SANGAT TINGGI;
5. Penunjang Urusan Pemerintahan dari 6 (enam) urusan seluruhnya memperoleh predikat SANGAT TINGGI;
6. Pengawasan 1 (satu) urusan memperoleh predikat TINGGI;
7. Pemerintahan Umum Kewilayahan, dari 39 (tiga puluh sembilan) kecamatan seluruhnya memperoleh predikat SANGAT TINGGI;
8. Urusan Pemerintahan Umum adalah Kesatuan Bangsa 1 (satu) urusan memperoleh predikat SANGAT TINGGI.

2.2.1.4 Evaluasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Capaian Kinerja Sampai dengan Triwulan I Tahun Anggaran 2024

Sampai dengan triwulan I tahun anggaran 2024, dari 31 program, 704 kegiatan, dan 1484 sub kegiatan total anggaran Rp.3.663.409.086.788 (tiga triliun enam ratus enam puluh tiga miliar empat ratus sembilan juta delapan puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah), realisasi keuangan Rp404.300.327.888 (empat ratus empat miliar tiga ratus juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah) atau 8,74%.

Penyerapan anggaran ini masih kecil karena untuk program, kegiatan dan sub kegiatan yang bersumber dari DAK pada beberapa perangkat daerah masih menunggu petunjuk teknis dari kementerian

terkait, sedangkan untuk kegiatan yang didanai Bankeu Provinsi Jawa Barat untuk beberapa perangkat daerah masih dalam/ proses pengadaan barang dan jasa. Penyebab lainnya karena program, kegiatan dan sub kegiatan akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya. Oleh karena itu capaian kinerja masih RENDAH sebesar 11,63%.

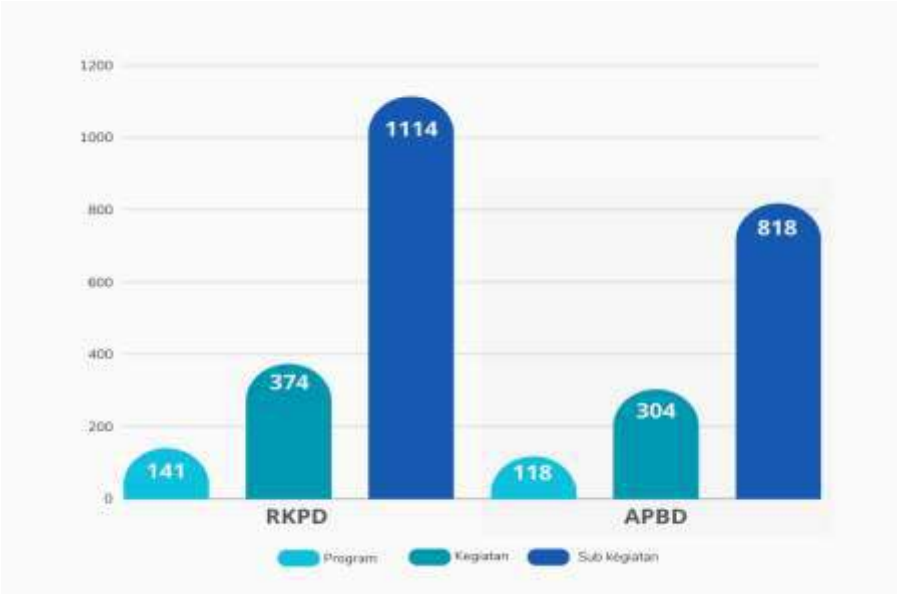
Untuk mengetahui gambaran pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah sampai dengan triwulan I tahun anggaran 2024 dapat dilihat dari tabel dan gambar mengenai perbandingan program, kegiatan dan sub kegiatan pada RKPD dengan APBD, realisasi keuangan dan capaian kinerja berikut:

Tabel 2.79
Perbandingan Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024

No	Perangkat Daerah	RKPD			APBD		
		Prog	Keg	Sub Keg	Prog	Keg	Sub Keg
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	7	19	102	5	15	79
2	Dinas Kesehatan	5	24	94	6	21	73
3	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup	17	25	56	15	24	54
4	Satuan Polisi Pamong Praja	2	10	34	2	9	26
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3	10	26	3	8	20
6	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	14	32	91	12	27	51
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5	14	29	5	10	24
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5	10	28	5	11	25
9	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	5	23	57	4	18	37
10	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	13	20	38	7	12	37
11	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	11	17	34	7	10	23
12	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	9	21	64	9	15	24

No	Perangkat Daerah	RKPD			APBD		
		Prog	Keg	Sub Keg	Prog	Keg	Sub Keg
13	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	16	41	103	8	19	39
14	Sekretariat Daerah	6	25	72	7	23	63
15	Sekretariat DPRD	2	16	52	2	18	51
16	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	5	19	66	5	20	43
17	Badan Pengelola Keuangan Dan Pendapatan Daerah	4	13	67	4	12	59
18	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3	12	29	3	10	28
19	Inspektorat Daerah	3	11	32	3	11	31
20	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6	12	40	6	11	31
JUMLAH		141	374	1114	119	306	826
21	Kecamatan Cibalong	5	10	17	5	10	16
22	Kecamatan Parungponteng	5	11	20	5	10	17
23	Kecamatan Jatiwaras	5	10	17	5	10	17
24	Kecamatan Salopa	5	11	20	5	10	17
25	Kecamatan Tanjungjaya	5	10	16	4	10	16
26	Kecamatan Puspahiang	5	10	16	4	10	16
27	Kecamatan Sukaraja	5	11	19	4	11	18
28	Kecamatan Salawu	5	10	17	5	10	16
29	Kecamatan Karangnunggal	5	10	17	5	10	17
30	Kecamatan Bantarkalong	6	14	31	5	11	18
31	Kecamatan Cipatujah	5	10	17	5	10	17
32	Kecamatan Cikatomas	6	13	26	5	10	17
33	Kecamatan Taraju	5	10	18	5	10	16
34	Kecamatan Pancatengah	5	11	18	5	10	16
35	Kecamatan Cikalong	5	11	17	5	10	16
36	Kecamatan Sodonghilir	5	11	18	5	10	16
37	Kecamatan Kadipaten	5	10	20	5	10	18
38	Kecamatan Pagerageung	5	11	18	5	11	18
39	Kecamatan Jamanis	5	12	20	5	10	16
40	Kecamatan Rajapolah	5	10	15	5	10	15
41	Kecamatan Ciawi	5	10	17	5	10	17
42	Kecamatan Cineam	5	11	17	5	10	17
43	Kecamatan Manonjaya	5	10	16	5	10	16
44	Kecamatan Bojonggambir	5	11	19	5	11	17
45	Kecamatan Cisayong	5	10	16	5	10	16
46	Kecamatan Sariwangi	5	10	17	5	10	17
47	Kecamatan Singaparna	5	10	16	5	10	16
48	Kecamatan Sukarame	5	12	21	5	11	20
49	Kecamatan Sukahening	5	10	16	5	10	16
50	Kecamatan Sukaratu	5	11	18	5	10	17
51	Kecamatan Cigalontang	5	10	16	5	10	16

No	Perangkat Daerah	RKPD			APBD		
		Prog	Keg	Sub Keg	Prog	Keg	Sub Keg
52	Kecamatan Leuwisari	6	13	25	5	10	15
53	Kecamatan Padakembang	6	12	20	5	10	17
54	Kecamatan Gunungtanjung	5	11	17	5	11	17
55	Kecamatan Karangjaya	5	11	19	5	10	17
56	Kecamatan Culamega	5	11	19	5	10	17
57	Kecamatan Sukaresik	6	15	29	5	11	19
58	Kecamatan Mangunreja	5	13	23	5	10	18
59	Kecamatan Bojongasih	6	14	30	5	11	20
JUMLAH		201	431	748	192	398	658
JUMLAH TOTAL		342	805	1862	311	704	1484



Gambar 2.39
Perbandingan Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024



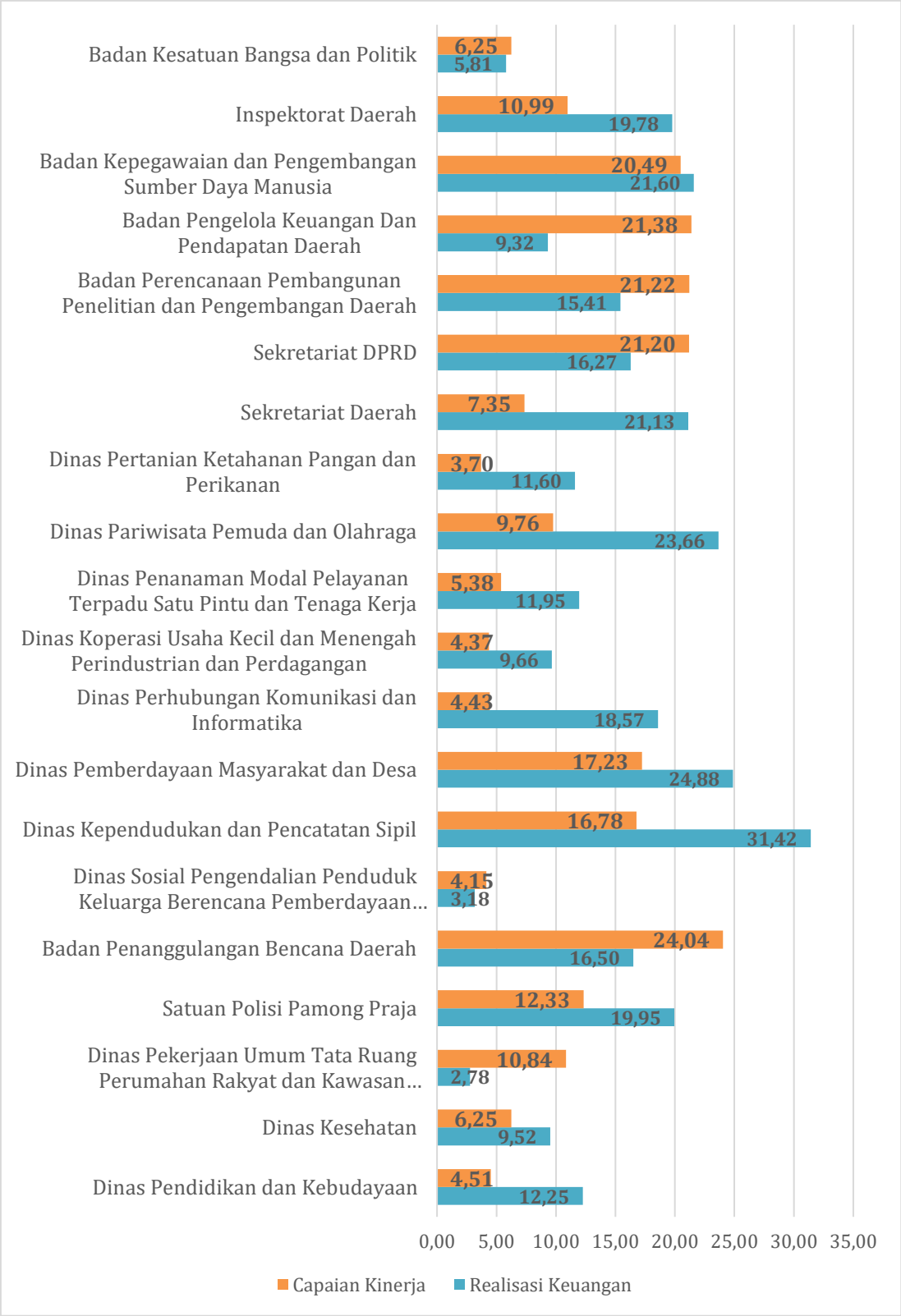
Gambar 2.40
Perbandingan Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Tahun 2024

Tabel 2.80
Realisasi Keuangan dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan I Tahun Anggaran 2024

No	Perangkat Daerah	RKPD	APBD	Realisasi	%	
					Rp	Kinerja
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.474.345.660.504	1.408.520.524.419	172.593.169.406	12,25	4,51
2	Dinas Kesehatan	634.497.325.496	611.019.192.145	58.157.352.751	9,52	6,25
3	Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	269.650.740.239	245.032.415.364	6.803.725.230	2,78	10,84
4	Satuan Polisi Pamong Praja	19.926.359.980	15.261.972.722	3.044.314.181	19,95	12,33
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	19.457.449.098	12.147.456.872	2.004.077.256	16,50	24,04
6	Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	49.051.966.217	39.976.168.877	1.271.087.819	3,18	4,15
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	14.845.721.265	11.530.356.515	3.623.205.473	31,42	16,78
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	24.956.490.838	22.352.270.677	5.560.794.967	24,88	17,23
9	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika	42.155.191.198	44.945.098.023	8.347.353.687	18,57	4,43
10	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan	28.899.239.151	25.282.191.903	2.442.545.264	9,66	4,37
11	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	21.190.604.000	15.459.454.702	1.847.737.665	11,95	5,38
12	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	87.299.940.617	22.166.526.789	5.245.632.273	23,66	9,76

No	Perangkat Daerah	RKPD	APBD	Realisasi	%	
					Rp	Kinerja
13	Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan	107.552.759.127	73.194.625.307	8.493.546.830	11,60	3,70
14	Sekretariat Daerah	158.133.267.697	139.332.427.903	29.434.684.599	21,13	7,35
15	Sekretariat DPRD	68.967.429.222	65.498.851.993	10.658.410.469	16,27	21,20
16	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	20.878.894.700	15.639.172.629	2.410.365.278	15,41	21,22
17	Badan Pengelola Keuangan Dan Pendapatan Daerah	1.407.866.469.301	737.703.200.417	68.761.600.028	9,32	21,38
18	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	15.797.085.229	14.067.257.281	3.037.905.514	21,60	20,49
19	Inspektorat Daerah	18.846.495.439	15.642.084.910	3.094.383.294	19,78	10,99
20	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	139.335.728.043	128.637.837.340	7.468.435.904	5,81	6,25
Total untuk 20 Perangkat Daerah		4.623.654.817.361	3.663.409.086.788	404.300.327.888	8,74	11,63

Sumber : Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya, 2024



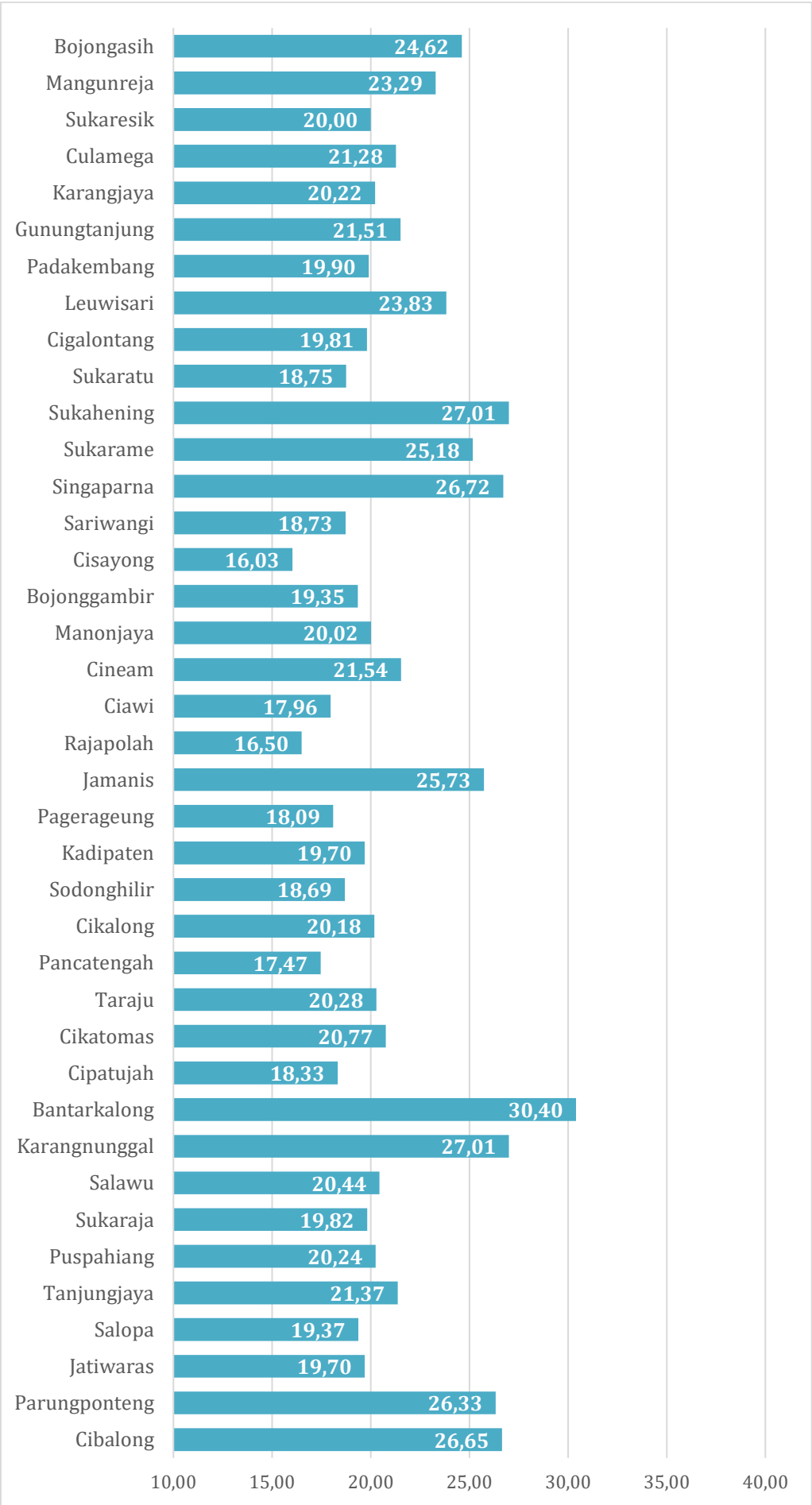
Gambar 2.41
Realisasi Keuangan dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2024

Tabel 2.81
Realisasi Keuangan dan Capaian Kinerja Kecamatan
Triwulan I Tahun Anggaran 2024

No	Kecamatan	RKPD	APBD	Realisasi Keuangan	%
1	Cibalong	2.153.893.297	2.049.164.875	546.114.877	26,65
2	Parungponteng	2.402.735.521	2.273.346.699	598.526.812	26,33
3	Jatiwaras	2.085.558.821	2.146.546.608	422.818.228	19,70
4	Salopa	2.180.114.498	1.972.600.178	382.155.973	19,37
5	Tanjungjaya	2.096.238.280	1.932.928.059	413.148.846	21,37
6	Puspahiang	1.984.541.206	2.116.705.557	428.504.564	20,24
7	Sukaraja	2.108.966.900	2.248.577.365	445.660.006	19,82
8	Salawu	2.071.298.750	2.081.580.138	425.568.750	20,44
9	Karangnunggal	2.584.290.776	2.499.102.350	674.952.822	27,01
10	Bantarkalong	2.151.259.063	2.147.454.424	652.916.308	30,40
11	Cipatujah	2.422.427.925	2.315.912.645	424.413.046	18,33
12	Cikatomas	2.140.521.601	2.055.328.761	426.835.880	20,77
13	Taraju	2.006.534.910	2.210.306.452	448.310.833	20,28
14	Pancatengah	2.215.307.369	2.116.839.921	369.785.039	17,47
15	Cikalong	2.490.129.361	2.171.142.025	438.225.126	20,18
16	Sodonghilir	2.235.319.600	2.225.660.230	415.986.709	18,69
17	Kadipaten	2.108.948.353	2.115.095.179	416.603.610	19,70
18	Pagerageung	2.248.948.811	2.268.019.382	410.388.317	18,09
19	Jamanis	2.371.086.748	1.881.251.253	484.138.749	25,73
20	Rajapolah	1.942.112.128	2.203.415.210	363.630.496	16,50
21	Ciawi	2.463.914.119	2.336.255.769	419.640.942	17,96
22	Cineam	2.113.873.158	2.119.044.630	456.360.810	21,54
23	Manonjaya	2.360.677.280	2.432.505.842	486.937.863	20,02
24	Bojonggambir	2.199.528.685	2.161.370.444	418.245.950	19,35
25	Cisayong	2.513.518.772	2.605.238.579	417.624.554	16,03
26	Sariwangi	2.312.823.969	2.004.801.331	375.519.913	18,73
27	Singaparna	2.158.541.255	2.445.841.612	653.443.813	26,72
28	Sukarame	2.267.227.000	2.116.522.248	532.846.862	25,18
29	Sukahening	2.018.134.873	2.226.511.433	601.285.340	27,01
30	Sukaratu	2.392.719.168	2.421.403.659	454.108.049	18,75
31	Cigalontang	2.340.761.929	2.317.532.324	459.061.527	19,81
32	Leuwisari	2.383.459.100	2.135.043.204	508.766.602	23,83
33	Padakembang	1.985.059.500	2.127.836.399	423.522.525	19,90
34	Gunungtanjung	2.081.833.402	2.055.224.724	442.098.863	21,51

No	Kecamatan	RKPD	APBD	Realisasi Keuangan	%
35	Karangjaya	2.202.102.075	1.887.130.569	381.666.628	20,22
36	Culamega	2.169.081.623	2.024.528.393	430.720.673	21,28
37	Sukaresik	2.149.993.592	2.135.298.561	427.165.801	20,00
38	Mangunreja	2.362.819.976	2.238.704.204	521.478.242	23,29
39	Bojongasih	2.077.768.182	2.149.028.203	529.157.840	24,62
Total 39 Kecamatan		86.554.071.576	84.970.799.439	18.128.337.788	21,33

Sumber : Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya, 2024



Gambar 2.42
Realisasi Keuangan Kecamatan Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2024

2.2.2 Realisasi Capaian Target RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2023 dan Target Capaian Kinerja Tahun 2024

Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan konsistensi antara RKPD dengan RPJMD. RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 merupakan tahapan ke-4 sekaligus periode terakhir RPJPD kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2025, dengan visi “Dengan Semangat Gotong Royong, Mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya Yang Religius/Islami, Berdaya Saing, dan Sejahtera“. Visi tersebut merupakan penjabaran dari Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil Pilkada 9 Desember 2020.

Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 dengan didasarkan pada perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, maka misi pembangunan Kabupaten Tasikmalaya sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing, berkepribadian dan berakhlakul karimah;
2. Mewujudkan pemerintahan yang melayani, bersih dan profesional;
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan pariwisata; dan
4. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dalam upaya mendorong pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan kerjasama skala lokal, Regional dan Global.

Ketercapaian Visi Misi tersebut dapat dilihat dari sejauhmana capaian sasaran dengan target indikator sasaran yang dijabarkan setiap tahun dapat terealisasi. Untuk melihat realisasi capaian sasaran RPJMD Kabupaten Tasikmalaya penjabaran tahun 2021-2023 dapat dilihat pada tabel 2.82.

Tabel 2.82
Capaian Sasaran RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2023 dan Target Kinerja Tahun 2024

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal 2020	Realisasi		Tahun 2023		Keterangan	Target Tahun 2024
						2021	2022	Target	Realisasi		
Misi 1 : Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing, berkepribadian dan berakhlakul karimah.											
T.1 Meningkatkan taraf hidup masyarakat agar lebih sehat. cerdas. berakhlaq mulia dan sejahtera	Indeks Pembangunan Manusia	S.1. Meningkatkan derajat Pendidikan Masyarakat Kabupaten Tasikmalaya	Indeks Pendidikan	Poin	59,31	59,77	60,74	61,41	61,62	Melampaui	62,13
		S.2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	Poin	76,11	76,42	76,85	77,22	82,88	Melampaui	83,00
		S.3. Meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial, Rehabilitasi Sosial dan Pemberdayaan sosial	Persentase Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Persen	66,68	68,04	68,04	68,07	68,22	Melampaui	68,61
		S.4. Meningkatkan Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan Lokal	Persentase Pemajuan Kebudayaan	Persen	NA	20,72	23,68	24,79	35,82	Melampaui	39,22
		S.5 Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	86,02	86,42	86,64	86,96	87,47	Melampaui	87,50

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal 2020	Realisasi		Tahun 2023		Keterangan	Target Tahun 2024
						2021	2022	Target	Realisasi		
			Indikator Kabupaten Layak Anak	Skor	505 (Pratama)	550,65 (Menuju Madya)	579,60 (Menuju Madya)	575 (Menuju Madya)	575 * (Menuju Madya)	Data sementara karena belum rilis	595 (Menuju Madya}
Misi 2 : Mewujudkan Pemerintahan yang Melayani, Bersih, dan Profesional.											
T.2 Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi	S.6 Meningkatnya koordinasi, akuntabilitas, dan profesionalitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah	Nilai LPPD	Skor	3,31 (Sedang)	3,34 (Sedang)	3,55 (Sedang)	3,38 (Sedang)	3,38* (Sedang)	Data sementara karena belum rilis	3,40
			Nilai SAKIP	Skor	B	62,89 (B)	63,41 (B)	65,15 (B)	64,20 (B)	Tidak Tercapai	67,35
			Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	78,9	80,48	81	81,12	81,72	Melampaui	81,75
			Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Poin	59,06	66,489	78,019	78,019	70,144	Tidak Tercapai	79
			Indeks Profesionalitas ASN	Poin	56,73	57,117	55,85	59	71,32	Melampaui	71,80
			Indeks Inovasi Daerah	Skor	Kurang Inovatif	45 (Inovatif)	50,42 (Inovatif)	46 (Inovatif)	43,12	Tidak Tercapai	51
Misi 3 : Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Penguatan Desa Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Pertanian Dan Pariwisata.											

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal 2020	Realisasi		Tahun 2023		Keterangan	Target Tahun 2024
						2021	2022	Target	Realisasi		
T.3 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis sektor- sektor unggulan	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	S.7 Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan daya saing sektor pertanian, perikanan, KUMKM, Perindustrian, perdagangan dan pariwisata berbasis pedesaan	PDRB Per Kapita (ADHB)	Rp. Juta	21,33	20,86	22,38	24,11	24,17	Melampaui	25,99
Misi 4 : Mewujudkan Iklim Investasi Yang Kondusif Dalam Upaya Mendorong Pengembangan Usaha Dan Penciptaan Lapangan Kerja Melalui Pengembangan Kerjasama Skala Lokal, Nasional, Regional, dan Global.											
T.4 Meningkatkan investasi daerah	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	S.8 Meningkatnya Realisasi Investasi Kabupaten Tasikmalaya	Pertumbuhan Realisasi Investasi	%	141.219 Juta	-1,0% 8.599 Juta	23,6% 211.553 juta	4%	1,11% 446.296 Juta	Tidak Tercapai	4%

Sumber: Bappelitbangda Kab. Tasikmalaya, 2024 (diolah)

Capaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Tasikmalaya untuk tahun 2023, dari 8 (delapan) sasaran dan 14 (empat belas) indikator sasaran masih terdapat angka sementara dan dalam proses perhitungan atau belum rilis. Terdapat 4 (empat) IKU yang tidak mencapai target, yaitu:

1. Nilai AKIP

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya menunjukkan bahwa nilai sebesar 64,20 dengan predikat “B”. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “Baik”, yaitu kualitas penerapan manajemen kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil telah menunjukkan hasil yang baik pada Sebagian unit kerja.

Beberapa catatan penting dan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, antara lain:

- a. Melakukan reviu dan perbaikan penjenjangan/cascading kinerja dari level jabatan tertinggi hingga ke level operasional dengan memerhatikan *logical framework* dan CSF dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Selanjutnya, memanfaatkan hasil penjenjangan/cascading kinerja tersebut sebagai dasar untuk menyempurnakan perencanaan kinerja secara keseluruhan;
- b. Melakukan penyesuaian target pada PK khususnya untuk target-target yang telah tercapai melebihi dari target di tahun berikutnya yang tertuang dalam realisasi kinerja Laporan Kinerja tahun sebelumnya;
- c. Menyampaikan PK sampai level terkecil untuk memastikan penjabaran kinerja yang mendukung pencapaian kinerja organisasi;
- d. Mendorong pelaksanaan pemantauan dan evaluasi capaian kinerja agar tidak hanya berfokus pada anggaran, namun juga pada kinerja. Sehingga ketercapaian kinerja dapat dan konsistensi antara perencanaan, pengukuran, 4 dan capaian kinerja dapat terjaga dengan baik

- e. Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja sebagai alat pertimbangan dalam penentuan strategi, target kinerja kedepan, pola pengembangan kompetensi dan mutasi rotasi pada ASN;
 - f. Menggunakan informasi dalam laporan kinerja untuk perbaikan perencanaan kinerja tahun berikutnya
 - g. Menyempurnakan penyusunan laporan kinerja pada pemerintah daerah dan PD mengacu pada PermenPAN-RB No. 53 Tahun 2014 yang memuat informasi terkait pencapaian kinerja, perbandingan realisasi dengan target tahun sebelumnya dan target jangka menengah, analisis peningkatan/penurunan kinerja, analisis program/kegiatan yang mendukung keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja serta analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja;
 - h. Menginformasikan Laporan Kinerja level PD dalam website kabupaten sebagai bagian dari transparansi atas pelaporan kinerja kepada publik;
 - i. Mendorong PD untuk dapat secara aktif melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja secara internal dan mendorong upaya monitoring dan evaluasi secara berkala untuk dapat dijadikan dasar pemberian *reward* dan *punishment* di internal PD;
 - j. Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja agar lebih menggambarkan tingkat akuntabilitas unit yang dievaluasi, serta memastikan rekomendasi hasil evaluasi tersebut ditindaklanjuti dan dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik perbaikan manajemen kinerja secara berkelanjutan.
2. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)
- Capaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah tahun 2023 sebesar 70,144 mengalami penurunan dari tahun 2022 sebesar 78,019. Dalam perhitungan IPKD terdapat 6 dimensi penilaian, yaitu:
- 1) Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, dengan bobot 15.
 - 2) Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD, dengan bobot 20.
 - 2) Transparansi pengelolaan keuangan daerah, dengan bobot 15.
 - 3) Penyerapan anggaran, dengan bobot 20.

4) Kondisi keuangan daerah, dengan bobot 15.

5) Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), dengan bobot 15.

Hasil perhitungan tahun 2023 menunjukkan bahwa terdapat penurunan pada dimensi 4 yaitu penyerapan anggaran, dari bobot 20 menjadi 15. Hal ini disebabkan oleh realisasi Belanja Tidak Terduga (BTT) dibawah 80%, yaitu 44,63% sehingga sangat mempengaruhi hasil penilaian IPKD Tahun 2023.

3. Indeks Inovasi Daerah

Berdasarkan hasil perhitungan dari Kementerian Dalam Negeri, indeks inovasi daerah Kabupaten Tasikmalaya tahun 2023 adalah sebesar 43,12 dari target tahun 2023 yang sebesar 46. Aspek penilaiannya terdiri dari 8 variabel meliputi institusi, sumber daya manusia, ekosistem inobasi, kajian infrastruktur, output pengetahuan dan teknologi, kecepatan bisnis proses, kecanggihan produk, jumlah inovasi dan hasil kreatif. Dari 8 variabel tersebut, jumlah inovasi yang dikirimkan Kabupaten Tasikmalaya kurang dari standar jumlah yang ditetapkan, sehingga penilaian indeks inovasi daerah tahun 2023 mengalami penurunan.

5. Pertumbuhan Realisasi Investasi

Investasi menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD karena akan mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi daerah. Melalui investasi diharapkan dapat menyerap tenaga kerja dan menurunkan angka pengangguran, meningkatkan produktivitas melalui transfer teknologi dan pengetahuan, meningkatkan SDM yang daya saing, meningkatkan kinerja ekspor serta memberikan *multiplier effect* terhadap ekonomi dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Nilai Realisasi Penanaman Modal Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2022 berdasarkan data LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) yang dikeluarkan oleh Kementerian Investasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui DPMPTSP Provinsi Jawa Barat sampai dengan triwulan IV adalah Rp. 211.553.020.823,- dari target Rp. 80.000.000.000,- dengan

capaian kinerja sebesar 264,44%. Pada tahun 2023 realisasi sebesar Rp.446.296.142.757 (1,11%) dari target 4%.

Nilai ini lebih rendah dibandingkan dengan Kabupaten Garut Rp 1,17 Trilyun. Salah satu penyebab tidak tercapai target disebabkan karena infrastruktur dasar berupa tata kelola yang akan menjadi arah kebijakan penanaman modal di Kabupaten Tasikmalaya atau yang disebut Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) sesuai Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2022 tentang RUPM belum tersedia. RUPM merupakan dokumen perencanaan penanaman modal jangka panjang berlaku sampai dengan tahun 2025.

Oleh karena itu pada perencanaan tahun berikutnya Perangkat daerah yang menangani urusan penanaman modal agar memprioritaskan terbentuknya Perda tentang RUPM sebagai bagian dari solusi permasalahan yang dihadapi selama ini.

2.2.1.5 Capaian Penanganan Stunting Sampai Tahun 2023

Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Sebagai salah satu bentuk komitmen untuk mempercepat penurunan stunting, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Perpres ini merupakan payung hukum bagi Strategi Nasional (Stranas) Percepatan Penurunan Stunting yang telah diluncurkan dan dilaksanakan sejak tahun 2018. Perpres ini juga untuk memperkuat kerangka intervensi yang harus dilakukan dan kelembagaannya dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting.

Dalam rangka melaksanakan amanat pasal 21 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Kabupaten Tasikmalaya telah menetapkan Keputusan Bupati Nomor 445/Kep.28.Dinsos, PPKB,P3A/2022 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting dan Peraturan Bupati Nomor 22 tahun 2023 tentang Percepatan Penurunan Stunting yang akan memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan berupa langkah-langkah konkrit yang harus dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas dalam percepatan penurunan stunting.

Untuk terwujudnya percepatan penurunan stunting telah ditetapkan strategi percepatan penurunan stunting yang dijabarkan dalam Rencana Aksi Daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan pemangku Kepentingan dengan sasaran tujuan untuk:

1. Menurunkan Prevalensi Stunting;
2. Meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
3. Menjamin pemenuhan asupan gizi;
4. Memperbaiki pola asuh
5. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan;
6. Meningkatkan akses air minum dan sanitasi

Terdapat 8 Aksi pelaksanaan intervensi penurunan stunting terintegrasi yang harus di lakukan oleh Kabupaten/Kota. Dalam Pelaksanaannya harus terintegrasi dan membutuhkan perubahan pendekatan pelaksanaan program dan perilaku lintas sektor, agar program kegiatan intervensi dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh keluarga sasaran rumah tangga khususnya pada kelompok usai 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Berikut adalah 8 aksi pelaksanaan intervensi penurunan stunting Kabupaten Tasikmalaya.

Tabel 2.83
8 Aksi Pelaksanaan Intervensi Penurunan Stunting
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023

Kegiatan	Hasil
Aksi 1 (Analisis Situasi)	Rapat Koordinasi Pembahasan Analisis dan Situasi Penanganan Stunting dengan hasil Penetapan Desa Lokasi Prioritas Pelaksanaan Program dan Kegiatan Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2024 melalui Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor : KS.04/Kep.178-Kesra/2023
Aksi 2 (Rencana Kegiatan)	Penyusunan RKA Perubahan Tahun 2023 dan RKA Tahun 2024 Rencana Tahun 2022 : Jumlah Sub Kegiatan 33, dengan total anggaran 206.508.910.000 Rencana Tahun 2023 : Jumlah Sub Kegiatan 23, dengan total anggaran 29.376.300.000.
Aksi 3 (Rembuk Stunting)	Rembuk Stunting merupakan suatu langkah penting yang harus dilakukan pemerintah kabupaten/kota untuk memastikan pelaksanaan kegiatan intervensi pencegahan dan penurunan stunting dilakukan secara bersama-sama antara OPD penerima layanan dengan sektor/lembaga non pemerintah dan lembaga. Rembuk Stunting dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023 di Aula Wiradadaha Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya yang dipimpin langsung oleh Bupati Tasikmalaya dengan penandatanganan Berita Acara serta Komitmen dan Kesepakatan Bersama.

Kegiatan	Hasil
Aksi 4 (Peraturan Bupati tentang Percepatan Penurunan Stunting))	Sosialisasi Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 22 Tahun 2023 tentang Percepatan Penurunan Stunting serta regulasi/kebijakan lain yang mendukung terhadap Percepatan Penurunan Stunting.
Aksi 5 (Pembinaan Kader Pembangunan Manusia (KPM) dan Penerbitan SK KPM Desa)	– Adanya Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan pelaku dan pemerintahan desa (KPM, TPK, TPPS Desa & Kelembagaan Masyarakat Desa) – Setiap pelaku dan pemerintahan desa (KPM, TPK, TPPS Desa & Kelembagaan Masyarakat Desa) memiliki rencana kerja; – Meningkatnya Pengetahuan dan Keterampilan pelaku dan pemerintahan desa (KPM, TPK, TPPS Desa & Kelembagaan Masyarakat Desa) tentang Penanganan Stunting dengan adanya pelatihan dan bimbingan teknis
Aksi 6 (Sistem Manajemen Data)	– Perbaiki Manajemen Data, dengan hasil data terkait stunting yang lengkap dan akurat; dan – Rapat Koordinasi Analisis dan Perencanaan Perbaiki ketersediaan Data Penanganan Stunting dengan hasil analisa data dan perencanaan terkait penanganan stunting.
Aksi 7 (Pengukuran dan Publikasi Stunting)	– Pengukuran dan Penimbangan Balita pada Bulan Agustus 2023 yang langsung di monitoring oleh Perangkat Daerah; – Analisa terhadap Hasil Pengukuran dan Penimbangan Balita; – Mempublikasikan Hasil Analisis Pengukuran dan Penimbangan Balita melalui media elektronik (<i>website</i> dan media sosial); – Audit Kasus Stunting (AKS) dilakukan 2 kali pada tahun 2023. – Penyebaran AKS I di 1 (satu) desa yaitu Desa Cikubang Kecamatan Taraju, dengan sebaran sasaran sebagai berikut: • Calon Pengantin sebanyak 3 Orang;

Kegiatan	Hasil
	- Ibu Hamil sebanyak 2 Orang; - Ibu Nifas/Pasca Persalinan sebanyak 1 Orang; - Bayi Dibawah Usia Lima Tahun sebanyak 3 Orang. – Penyebaran AKS II di 1 (satu) desa yaitu Desa Gunungsari Kecamatan Sukaratu, dengan sebaran sasaran sebagai berikut: - Calon Pengantin sebanyak 3 Orang; - Ibu Hamil sebanyak 3 Orang; - Ibu Nifas/Pasca Persalinan sebanyak 3 Orang; - Bayi Dibawah Usia Lima Tahun sebanyak 3 Orang.
Aksi 8 (Reviu Kinerja Tahunan)	Reviu Kinerja Tahunan Penanganan Stunting Tahun 2023 di Kabupaten Tasikmalaya bersama Perangkat Daerah.

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya, 2024

Pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Tasikmalaya diatur oleh Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 22 Tahun 2023 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Kemudian pada tahun 2022 Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya juga telah mengeluarkan Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor 445/Kep.28-Dinsos PPK,P3A/2022 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dari tingkat Kabupaten, kecamatan sampai tingkat Desa. Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) merupakan kerja lintas sektor dalam rangka penanganan stunting dan tugas awal tim tersebut yakni mengidentifikasi dan menginventarisir wilayah yang membutuhkan perhatian khusus. Terdiri dari TPPS Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

Berikut adalah beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Kabupaten Tasikmalaya dalam percepatan penurunan stunting:

- Penetapan Regulasi Percepatan Penurunan Stunting
- Penguatan Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) di 351 Desa.

- Pendampingan Keluarga Beresiko Stunting Oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK)
- Pemberian Olahan Ikan Untuk meningkatkan Konsumsi Gemar Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN) Pada Posyandu
- Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.
- REMBUG STUNTING Tingkat Desa
- Pemberian Makanan Tambahan BALITA DAN IBU HAMIL
- Penyuluhan Perkawinan Pra Nikah dan Calon Pengantin
- Panduan Peningkatan Hidup Bersih Sehat Pesantren
- Penyuluhan Melalui Majelis Taklim
- Iklan Layanan Masyarakat
- Talkshow Interaktif Media Radio
- Pengelolaan dan Pengembangan sistem penyediaan air minum
- Pengelolaan dan pengolahan air limbah.

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan kesenjangan antara harapan (target kinerja pembangunan) dengan realita (capaian kinerja pembangunan). Kesenjangan tersebut mengharuskan pemerintah daerah mengidentifikasi dari berbagai kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Identifikasi permasalahan pembangunan merupakan salah satu upaya evaluasi atas kinerja pembangunan yang telah dan sedang dilaksanakan dengan tujuan untuk lebih tepat dalam memprioritaskan program dan kegiatan di tahun selanjutnya.

Berdasarkan hasil evaluasi pembangunan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023 dan Triwulan I Tahun 2024, permasalahan pembangunan daerah di Kabupaten Tasikmalaya yang teridentifikasi antara lain sebagai berikut.

2.3.1 Identifikasi Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Kabupaten Tasikmalaya mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Perubahan tersebut dilakukan untuk lebih efektif dan efisien pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Adapun Pengelompokan urusan daerah di Kabupaten Tasikmalaya sebagai berikut :

Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri dari:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2. Dinas Kesehatan
3. Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup
4. Satuan Polisi Pamong Praja
5. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri dari :

1. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
2. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3. Sekretariat Daerah
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
6. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
7. Dinas Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan
8. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Urusan Pemerintahan Penunjang terdiri dari :

1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4. Inspektorat
5. Sekretariat Daerah

6. Sekretariat DPRD
7. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.

2.3.1.1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1. Urusan Pendidikan dan Kebudayaan

1. Pendidikan

- a. Masih rendahnya angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yaitu 7,73 pada tahun 2023 dan berada pada posisi 7 terendah di Provinsi Jawa Barat. Angka ini lebih rendah dibandingkan RLS Provinsi Jawa Barat yang mencapai 8,78 tahun. Kondisi ini disebabkan oleh tingginya jumlah penduduk berusia diatas 25 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan tingkat SLTP.
- b. Masih rendahnya Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) yaitu 12,59 pada tahun 2023 yang berada pada posisi 14 di Provinsi Jawa Barat. Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan angka HLS Provinsi Jawa Barat yaitu sebesar 14,18 Tahun. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya dan belum meratanya akses pendidikan, infrastruktur sekolah yang belum optimal, dan rendahnya kemampuan ekonomi keluarga.
- c. Masih rendahnya rata-rata kemampuan literasi dan numerasi para siswa. Berdasarkan data tahun 2022, rata-rata kemampuan literasi siswa di Kabupaten Tasikmalaya adalah 64,71 persen, sedangkan kemampuan numerasinya yaitu 46,86 persen. Hal ini disebabkan oleh masih kurangnya budaya membaca di kalangan siswa dan rendahnya rasa ingin tahu (*intellectual curiosity*).

2. Kesehatan

- a. Masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI), yaitu 126 orang/100.000 kelahiran hidup pada tahun 2023. Angka ini masih jauh dari target tahun 2023 sebesar 80 orang/100.000 kelahiran hidup. Meskipun demikian, angka tersebut masih di bawah AKI Provinsi Jawa Barat, yaitu 187 orang/100.000 kelahiran hidup dan AKI Nasional yaitu 305 orang/100.000 kelahiran hidup. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan yang berkualitas, kurangnya sarana dan prasarana pertolongan persalinan, asupan

makanan pada ibu hamil yang kurang bergizi, masih kurang optimalnya manajemen sistem rujukan dan kegawat-daruratan pelayanan kesehatan ibu melahirkan, serta jumlah tenaga kesehatan yang belum sesuai standar dan penyebarannya tidak merata.

- b. Masih tingginya Angka Kematian Bayi (AKB), yaitu 9 orang/1.000 kelahiran hidup pada tahun 2023, sedangkan target pada tahun tersebut adalah 3 orang/1.000 kelahiran hidup. Meskipun demikian, angka tersebut masih di bawah AKB Provinsi Jawa Barat yaitu 13,56 orang/1.000 kelahiran hidup dan AKB Nasional yaitu 16,9 orang/1.000 kelahiran hidup. Hal ini disebabkan masih belum optimalnya akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan yang berkualitas dan kurangnya pemeriksaan dan pemberian imunisasi pada ibu hamil dan bayi.
- c. Masih adanya kasus kematian balita dengan Angka Kematian Balita (AKABA) pada tahun 2023 yaitu 1 orang/1000 kelahiran hidup. Angka ini jauh di bawah AKABA Provinsi Jawa Barat yaitu 15,91 orang/1000 kelahiran hidup dan AKABA nasional yaitu 19,83 orang/1000 kelahiran hidup. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan perilaku keluarga dalam memberikan asupan gizi, ASI eksklusif, pemberian MP ASI, serta imunisasi dasar lengkap pada balita dan cakupan pemantauan tumbuh kembang balita (Kartu Menuju Sehat) belum optimal.
- d. Masih tingginya kematian akibat penyakit menular dan tidak menular yang disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat terhadap Perilaku Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), belum semua masyarakat memiliki jaminan kesehatan, dan belum memadainya jumlah tenaga kesehatan yang kompeten.
- e. Masih tingginya angka prevalensi stunting yaitu 20,7% menurut data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) pada tahun 2023. Meskipun demikian, berdasarkan aplikasi Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat secara Elektronik (e-PPGBM) angka prevalensi stunting di Kabupaten Tasikmalaya yaitu 14,2 persen. Perbedaan angka ini disebabkan oleh angka prevalensi stunting SSGI dihasilkan dari survei sedangkan angka prevalensi stunting e-PPGBM dihasilkan dari hasil penimbangan dan

pengukuran di setiap posyandu yang dilaksanakan bulan Februari dan Agustus. Tingginya angka prevalensi stunting ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan masyarakat tentang makanan sehat dan bergizi serta kurangnya akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak.

- f. Tingginya angka kesakitan (morbiditas) di Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2022, yaitu 2,037%. Hal ini menunjukkan bahwa dari 100.000 orang penduduk, terdapat 2.037 kasus penyakit. Angka ini lebih tinggi dibandingkan angka Provinsi Jawa Barat, yaitu 1,585%, tetapi masih lebih rendah dibandingkan dengan angka morbiditas nasional, yaitu 12,83%.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- a. Masih rendahnya proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik. Pada tahun 2023, panjang jalan dalam kondisi baik baru mencapai 56,6%. Hal ini disebabkan masih terbatasnya kegiatan pemeliharaan berkala dan pemeliharaan rutin jalan sehingga umur jalan tidak sesuai dengan yang diharapkan serta kondisi geografis yang sebagian besar rawan gerakan tanah.
- b. Masih rendahnya persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik. Pada tahun 2023, luas daerah irigasi dalam kondisi baik baru mencapai 69,99%. Hal ini disebabkan masih terbatasnya kegiatan pemeliharaan jaringan irigasi dan seringnya longsor serta gerakan tanah yang merusak jaringan irigasi.
- c. Masih rendahnya persentase rumah tinggal berakses sanitasi, yaitu 50,43% pada tahun 2023. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kemampuan masyarakat dalam penyediaan sarana sanitasi yang layak dan aman.
- d. Masih rendahnya persentase penduduk berakses air minum, yaitu 66,44% pada tahun 2023. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kemampuan masyarakat dalam penyediaan air minum yang layak dan aman.
- e. Masih rendahnya cakupan ketersediaan bangunan pemerintahan dan fasilitas pendukungnya yang laik fungsi, yaitu 59,08 persen pada tahun 2023. Jumlah kebutuhan bangunan pemerintah sebanyak 86 unit, sedangkan jumlah bangunan yang telah

dibangun yaitu sebanyak 41 unit. Adapun jumlah kebutuhan fasilitas pendukung bangunan gedung pemerintah sebanyak 276 unit, sedangkan jumlah pembangunan fasilitas pendukung bangunan gedung pemerintah yang sudah dibangun sebanyak 183 unit.

- f. Masih banyaknya bangunan gedung yang belum memiliki Izin Memberikan Bangunan (IMB). Hal ini disebabkan oleh penerbitan IMB melalui implementasi SIM-BG belum optimal. Berdasarkan data tahun 2022, jumlah bangunan gedung yang sudah memiliki IMB yaitu sebanyak 44.336 unit.
- g. Rendahnya penataan bangunan dan lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya disebabkan oleh belum adanya identifikasi dan penetapan bangunan gedung cagar budaya yang dilestarikan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
- h. Masih rendahnya perwujudan pemanfaatan ruang, yaitu struktur ruang 8,33% dan pola ruang 36,54% pada tahun 2022. Hal ini disebabkan masih banyaknya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang belum menjadi dasar hukum pemanfaatan ruang.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

- a. Masih rendahnya rasio rumah layak huni. Berdasarkan data tahun 2023, rasio rumah layak huni adalah sebesar 0,2541.
- b. Masih adanya kawasan kumuh di Kabupaten Tasikmalaya. Berdasarkan data tahun 2022, jumlah kawasan kumuh tersebar di 37 desa dengan luas 227.05 Ha.
- c. Masih rendahnya cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU yaitu 52,18% pada tahun 2023. Hal ini disebabkan karena masih banyaknya Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) perumahan yang tidak terpelihara karena belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

5. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

- a. Adanya potensi gangguan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
- b. Masih terbatasnya jumlah SDM penegak perda dan perkara
- c. Tingginya Indeks Risiko Bencana yaitu sebesar 159,14 poin. Hal ini disebabkan oleh letak geografis di daerah rawan bencana gempa bumi, karakteristik geologi yang labil, dan hidrometeorologi yang rawan terjadinya banjir, longsor dan kekeringan.
- d. Rendahnya Indeks Ketahanan Daerah dalam penanggulangan bencana yaitu sebesar 0,58 poin. Nilai indeks ini menunjukkan bahwa Kabupaten Tasikmalaya memiliki ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana kategori sedang. Indeks ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana merupakan hasil penilaian terhadap kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana. Kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana meliputi aspek kebijakan dan kelembagaan, pendidikan dan pelatihan, logistik, kapasitas mitigasi, pencegahan, kesiapsiagaan dan penanganan darurat, dan kapasitas pemulihan. Nilai indeks ketahanan daerah yang belum memuaskan ini disebabkan oleh belum optimalnya pengembangan sistem informasi kebencanaan, pendidikan dan pelatihan serta logistik, belum optimalnya penanganan tematik kawasan rawan bencana, kurangnya peningkatan efektifitas pencegahan dan mitigasi bencana dan belum optimalnya kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana.
- e. Masih belum optimalnya cakupan pelayanan bencana kebakaran. Hal ini mengakibatkan masing lamanya tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK). Hal ini disebabkan oleh terbatasnya sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan SDM pemadam kebakaran yang terbatas.

6. Sosial

- a. Masih banyaknya masyarakat yang berpenghasilan rendah di bawah garis kemiskinan, yaitu Rp 347.917/kapita/bulan. Berdasarkan data tahun 2022, jumlah penduduk miskin di

Kabupaten Tasikmalaya mencapai 194 ribu penduduk dengan persentase 10,73%. Hal ini disebabkan oleh masih terbatasnya akses terhadap pekerjaan layak dan lapangan pekerjaan.

- b. Belum optimalnya layanan perlindungan dan jaminan sosial. Hal ini terlihat dari penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan miskin yang belum tepat sasaran, tepat waktu dan tepat kualitas yang disebabkan oleh belum validnya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai dasar penerima bantuan juga disebabkan oleh masih terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola Data DTKS di tingkat desa, dan rasio pendamping terhadap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) belum ideal. Rasio ideal berdasarkan pedoman PKH yaitu 1:250-300 KPM.
- c. Belum optimalnya perlindungan sosial bagi korban bencana. Hal ini disebabkan belum memadainya penyediaan sarana prasarana pelaksanaan penanggulangan pada masa tanggap darurat, terbatasnya *buffer stock* untuk penanggulangan bencana, belum tersedianya *shelter* kawasan di wilayah rawan bencana, dan terbatasnya SDM Taruna Siaga Bencana (Tagana) dan tenaga Kampung Siaga Bencana (KSB). Ideal jumlah SDM untuk Kampung Siaga Bencana adalah 5 orang per desa.
- d. Belum optimalnya layanan rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial. Hal ini disebabkan oleh banyaknya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tidak sebanding dengan kemampuan daerah. Pada tahun 2022, jumlah lanjut usia terlantar di luar panti yang berhak mendapat layanan sebanyak 8.300 orang dan anak terlantar sebanyak 355.035 orang (DTKS Juni 2022). Terbatasnya kemampuan daerah terlihat dari belum adanya panti rehabilitasi sosial milik pemerintah daerah sebagai penampungan sementara, masih terbatasnya jumlah rumah singgah/*shelter*/puskesmas yang memberikan layanan kedaruratan sesuai standar (*shelter* sebanyak 1 unit dan Puskesmas sebanyak 30 Desa dari 351 Desa)
- e. Masih belum optimalnya layanan kedaruratan. Hal ini disebabkan karena belum tersedianya rumah singgah/*shelter* dan masih terbatasnya kompetensi tenaga Potensi Sumber Kesejahteraan

Sosial (PSKS) yang bersertifikasi. Pada tahun 2022, dari 39 orang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang sudah bersertifikasi baru 15 orang, dari 6 orang pendamping rehabilitasi sosial baru 1 orang yang bersertifikat, dari 600 orang Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) belum ada yang memiliki sertifikat kompetensi, dari 52 orang Taruna Siaga Bencana (Tagana) baru 47 orang yang sudah bersertifikat.

2.3.1.2 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

- a. Masih rendahnya kompetensi angkatan kerja yang sesuai dengan pasar tenaga kerja. Berdasarkan data tahun 2023, tingkat pengangguran terbuka sebesar 3,89% dan tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 68,37%. Hal ini disebabkan karena masih belum optimalnya cakupan pelayanan balai latihan kerja.
- b. Terbatasnya lapangan pekerjaan baru karena rendahnya investasi perusahaan baru di Kabupaten Tasikmalaya.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- a. Belum optimalnya penerapan ketentuan kesetaraan gender terutama dalam partisipasi di bidang pendidikan, ekonomi, dan sosial karena pemahaman masyarakat terhadap penyeteraan gender belum menyeluruh.
- b. Masih rendahnya upaya pemberdayaan perempuan di bidang sosial, hukum, dan politik. Hal ini disebabkan karena pemberdayaan perempuan masih terfokus pada pengembangan pemberdayaan di bidang ekonomi dan sosial melalui lembaga peningkatan kualitas hidup perempuan dan lembaga peningkatan pemberdayaan perempuan, serta belum terstandarisasinya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yaitu Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA).
- c. Masih rendahnya capaian pemenuhan indikator Kabupaten Layak Anak, yaitu 579,36 poin. Hal ini disebabkan oleh belum terintegrasinya sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Kemudian belum tersedianya data program pemenuhan hak dan perlindungan anak serta partisipasi anak di tingkat

kecamatan dan desa, kurangnya jumlah SDM yang memiliki pengetahuan tentang Konvensi Hak Anak, terutama pada sektor layanan yang berhubungan langsung dengan pemenuhan hak dan perlindungan anak, dan belum tersedianya sarana prasarana bagi anak korban dan anak saksi (rumah aman).

- d. Belum terpenuhinya Klaster Hak Anak. Hal ini disebabkan karena belum optimalnya fasilitas informasi layak anak, tingginya persentase usia perkawinan pertama di bawah 18 (delapan belas) tahun, belum optimalnya lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak, dan belum terpenuhinya persentase sekolah ramah anak yaitu masih di bawah 25%.

3. Pangan

- a. Masih rendahnya keragaman konsumsi pangan masyarakat. Hal ini terlihat dari nilai Pola Pangan Harapan (PPH) yang masih rendah, yaitu 81 poin. Sedangkan kabupaten tetangga di Priangan Timur mempunyai skor PPH yang lebih baik, seperti Kabupaten Garut dengan 93 poin, Kabupaten Ciamis dengan 95 poin, dan Kabupaten Pangandaran dengan 82 poin. Hal ini disebabkan oleh rendahnya pemahaman masyarakat tentang keragaman pangan dan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan yang beragam, bergizi dan seimbang.
- b. Masih rendahnya ketahanan pangan daerah. Hal ini terlihat dari ranking Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Tasikmalaya di Provinsi Jawa Barat dan Nasional. IKP Kab Tasikmalaya Tahun 2022 sebesar 75,88 poin, menempati peringkat 23 dari 27 Kabupaten/Kota. Hal ini disebabkan oleh jumlah penduduk yang besar dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi yaitu 1,39% per tahun, mengakibatkan kebutuhan pangan terus meningkat. Pertumbuhan penduduk tidak sejalan dengan pertumbuhan produksi bahan pangan, sementara itu penduduk menuntut adanya ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup, harga terjangkau, dan tersedia setiap saat.
- c. Masih tingginya persentase pengeluaran pangan keluarga. Berdasarkan data BPS tahun 2022, dari total pendapatan rumah

tangga sekitar 45% dari penghasilan rumah tangga untuk pangan karena masih rendahnya pendapatan masyarakat. Hal ini disebabkan karena masih rendahnya pendapatan per kapita masyarakat Kabupaten Tasikmalaya.

- d. Masih adanya desa rawan pangan. Pada tahun 2022, desa rentan pangan sebanyak 2 desa dan desa agak rentan sebanyak 13 desa.

4. Lingkungan Hidup

- a. Masih belum optimalnya kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Tasikmalaya. Berdasarkan data tahun 2023, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Tasikmalaya yaitu sebesar 63,73 poin (kategori sedang) yang memerlukan perbaikan. Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) adalah indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. IKLH dihitung berdasarkan tiga indikator utama, yaitu: Indeks kualitas air (IKA), Indeks kualitas udara (IKU), Indeks kualitas tutupan lahan (IKTL)
- b. Rendahnya Indeks Kualitas Air (IKA) 65,00. Hal ini karena rendahnya kualitas mutu air sungai di wilayah Kabupaten Tasikmalaya. dari 28 sungai yang diuji, hanya 7 sungai yang memenuhi status mutu air, rata-rata status mutu air tercemar ringan dan belum tersedianya stasiun pengujian kualitas air secara real time
- c. Rendahnya Indeks Kualitas Udara (IKU) 88,62. Hal ini karena tingkat pencemaran udara di kawasan industri, transportasi perumahan dan perkantoran masih tinggi dan belum tersedianya pengujian kualitas udara secara real time
- d. Rendahnya Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) 36,97. Tutupan luas lahan, hutan lindung dan perkebunan masih rendah, dan kurangnya pengawasan yang intensif bagi usaha/kegiatan/ industri yang berpotensi mencemari lingkungan karena tidak adanya Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH)
- e. Masih rendahnya persentase sampah yang tertangani yaitu 9,84%. Hal ini disebabkan karena masih kurangnya sarana persampahan

(bank sampah, truk pengangkut sampah, gerobak sampah dan lainnya), rendahnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan, rendahnya pemilahan sampah di sumber, dan belum adanya tempat pengolahan sampah yang memadai TPST.

5. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- a. Masih rendahnya cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yaitu 89,59% tahun 2023. Hal ini disebabkan karena terbatasnya personil dan prasarana pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, terbatasnya akses masyarakat dalam pemenuhan dokumen kependudukan, dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil
- b. Belum optimalnya pemanfaatan data kependudukan
- c. Belum terpenuhinya persyaratan *Information Security Manajemen System* (ISO-27001). Hal ini disebabkan karena Perangkat Daerah belum mempunyai sertifikat *Information Security Manajemen System* (ISO-27001).

6. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- a. Masih belum meratanya tingkat kemandirian desa. Hal ini ditandai dengan nilai rata-rata IDM Kabupaten Tasikmalaya tahun 2023 sebesar 0,7464 dengan status: Maju
- b. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan desa. Hal ini disebabkan karena kurang optimalnya peran pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan desa dalam pemberdayaan masyarakat
- c. Belum terbangunnya kemitraan dalam pembangunan desa. Hal ini disebabkan karena terbatasnya kapasitas sumber daya aparatur desa.
- d. Belum optimalnya akuntabilitas tata kelola pemerintahan desa. Hal ini disebabkan karena belum terbatasnya kualitas SDM aparatur desa.

7. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- a. Masih belum optimalnya kepesertaan ber-KB. Hal ini terlihat dari capaian kepesertaan ber-KB tahun 2022 sebesar 68.48 % dari target. Hal ini disebabkan karena rendahnya kesadaran masyarakat dalam mewujudkan keluarga kecil, sehat dan sejahtera, belum memadainya akses infrastruktur terhadap Fasilitas Kesehatan Pelayanan KB, terbatasnya SDM lapangan KB, dan terbatasnya sarana prasana pengendalian penduduk dan KB.
- b. Masih belum optimalnya kualitas pembangunan keluarga. Hal ini terlihat dari rendahnya Indeks Pembangunan Keluarga/iBangga tahun 2022 yaitu sebesar 56,22 poin dari nilai 100 poin. Nilai iBangga ini terdiri: Aspek Kemandirian Keluarga 52,91, Aspek Ketentraman Keluarga 56,34 dan Aspek Kebahagiaan Keluarga 59,42.
- c. Masih tingginya angka kelahiran di Kabupaten Tasikmalaya. Hal ini terlihat dari nilai *Total Fertility Rate* Kabupaten Tasikmalaya = 2,25 dari nilai ideal sebesar 2,1. Total fertility rate (TFR) adalah ukuran kesuburan yang menunjukkan jumlah rata-rata anak yang dilahirkan oleh seorang wanita sepanjang hidupnya sepanjang usia reproduktifnya. Tingginya nilai TFR disebabkan antara lain; rendahnya kesadaran masyarakat dalam ber-KB, dan masih tingginya angka kebutuhan masyarakat dalam ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmeet need*).

8. Perhubungan

- a. Rendahnya persentase tingkat keselamatan jalan yaitu 80,81% pada tahun 2023. Hal ini disebabkan oleh rendahnya persentase kendaraan yang laik jalan, rendahnya ketersediaan sarana prasarana pelengkap jalan, rendahnya kualitas jalan, dan rendahnya kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas yang bertanggungjawab.

9. Komunikasi dan Informatika

- a. Rendahnya kualitas sistem pemerintahan berbasis elektronik. Hal ini terlihat dari rendahnya nilai Indeks Domain Tata Kelola SPBE, yaitu 1,8 poin yang disebabkan oleh rendahnya dukungan

infrastruktur teknologi, terbatasnya kualitas SDM, belum optimalnya pemanfaatan jaringan intra pemerintah daerah, dan belum optimalnya layanan publik berbasis elektronik yang terintegrasi dan berdaya guna.

10. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

- a. Masih belum optimalnya kualitas koperasi di Kabupaten Tasikmalaya. Hal ini terlihat dari rendahnya jumlah koperasi sehat dan jumlah koperasi aktif. Jumlah koperasi sehat sebanyak 4 dari 97 koperasi (4,12%). Hal ini disebabkan karena rendahnya kualitas manajemen koperasi. Sedangkan jumlah koperasi aktif yaitu sebanyak 101 dari 251 unit koperasi (40,2%). Menurut Permenkopukm nomor 25/per/m.kumkm/IX/2015 tentang revitalisasi koperasi, Koperasi aktif adalah koperasi yang dalam 3 tahun terakhir secara berturut turut mengadakan RAT dan melakukan kegiatan usaha untuk melayani anggota. Hal ini karena belum optimalnya manajemen koperasi meliputi kualitas pengurus dan dan atau partisipasi aktif anggota
- b. Rendahnya keunggulan dan daya saing UMKM. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya kualitas sumber daya manusia pelaku UMKM.
- c. Lambatnya pertumbuhan skala bisnis UMKM. Hal ini disebabkan karena belum optimalnya jumlah UMKM yang mendapatkan pelatihan bisnis yang memadai. Dari tahun 2021 s/d 2023, hanya 1.449 unit dari 90.328 unit UMKM yang mendapatkan pelatihan bisnis. Hal ini juga disebabkan oleh keterbatasan modal terbatas, dan masih banyaknya UMKM yang belum memenuhi kriteria bankable.
- d. Pengaruh kondisi VUCA (*Volatility, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity/Gejolak, Ketidakpastian, Kompleksitas, dan Ambiguitas*) terhadap UMKM.
- e. Belum optimalnya pemakaian digital marketing dan *marketplace* atau *e-commerce* untuk membantu pemasaran. Hal ini disebabkan karena terbatasnya wawasan dan pengetahuan serta skill pelaku UMKM, adanya kesenjangan digital pada sektor UMKM. Sampai Agustus 2023 hanya 258 unit usaha mikro yang telah

mendapatkan pembinaan dan pelatihan digital marketing dan *e-commers*.

11. Penanaman Modal

- a. Rendahnya realisasi investasi. Pada tahun 2023, realisasi investasi di Kabupaten Tasikmalaya sebesar Rp 446 Milyar. Nilai ini lebih rendah dibandingkan dengan Kabupaten Garut Rp 1,17 Trilyun. Hal ini disebabkan karena belum optimalnya promosi investasi, belum tersusunnya peraturan daerah Penanaman Modal, belum tersedianya peta potensi dan peluang investasi, dan belum optimalnya infrastruktur pendukung proses investasi.

12. Kepemudaan dan Olahraga

- a. Rendahnya kualitas daya saing pemuda dalam kepeloporan dan kewirausahaan. Hal ini terlihat dari jumlah pemuda pelopor yang mengikuti pengkaderan tidak lebih dari 15 orang per tahunnya. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya penyadaran, pengembangan dan pemberdayaan pemuda dalam kepeloporan dan kewirausahaan.
- b. Rendahnya tingkat prestasi olahraga. Berdasarkan ranking perolehan medali pada kegiatan multi event seperti Porprov, Popda, Peparda, Kabupaten Tasikmalaya tidak dapat bersaing untuk Menempati Posisi 5 Besar. Hal ini disebabkan karena rendahnya kualitas pembinaan cabang olahraga, tidak adanya pemusatan pelatihan atlet terutama untuk cabang olahraga yang potensial meraih juara, terbatasnya sarana prasarana serta pendukung lainnya untuk pembinaan cabang olahraga, belum adanya Sarana Olahraga/SOR yang sesuai dengan standar, kurang optimalnya keberlanjutan pembinaan atlet- atlet yang berprestasi, dan kurangnya pembinaan calon atlet usia dini (pembibitan atlet).

13. Statistik

- a. Belum optimalnya kualitas penyelenggaraan statistik sektoral. Hal ini terlihat dari nilai indeks pembangunan statistik sektoral sebesar 2,63 poin dari 5,0 poin dan mendapat predikat "Baik" atau tingkat kematangan "Terdefinisi".

- b. Masih belum optimalnya tata kelola data dan sistem yang mendukung pengelolaan data. Hal ini disebabkan karena belum optimalnya pembinaan kapasitas pengelola data statistic, belum terintegrasinya pengelolaan data sehingga tidak memenuhi kaidah interoperabilitas dan terbatasnya kompetensi pengelola data pada perangkat daerah.

14. Persandian

- a. Rendahnya cakupan tingkat keamanan informasi, yaitu 30%. Hal ini disebabkan karena terbatasnya kualitas sarana prasarana teknologi informasi, dan belum optimalnya penerapan tanda tangan elektronik di semua perangkat daerah. Berdasarkan Undang- undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik, seluruh pimpinan pemerintahan diharapkan dapat mengintegrasikan dan mengoptimasikan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam sistem manajemen dan proses kerja pemerintahan. Salah satu bentuk transformasi yang dilakukan adalah penerapan tanda tangan elektronik.

15. Kebudayaan

- a. Rendahnya persentase pelestarian warisan budaya yaitu 35,82% pada tahun 2023. Hal ini disebabkan karena belum optimalnya pengelolaan objek pemajuan kebudayaan, belum optimalnya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan daerah, belum adanya sumber daya manusia daerah penilai seni dan budaya daerah yang tersertifikasi, belum optimalnya koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah daerah dengan pelaku seni dalam pemanfaatan budaya, belum terbentuknya Dewan Kebudayaan dan Dewan Kesenian Daerah, belum adanya status atau pengakuan Warisan Budaya Tak Benda oleh Pemerintah Pusat yang diawali oleh Pemerintah Daerah melalui Penelitian dan belum adanya status atau pengakuan Cagar Budaya dan Museum oleh Pemerintah Pusat yang diawali oleh Pemerintah Daerah melalui Proses Analisis Tenaga Ahli.

16. Perpustakaan

- a. Masih rendahnya tingkat literasi masyarakat. Hal ini terlihat dari capaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) tahun 2022 yaitu 54.72 poin dari 100 poin. Nilai ini lebih rendah dibandingkan dengan Kota Tasikmalaya 79 poin, Kabupaten Ciamis 64.76 poin, Kabupaten Pangandaran 65.61 poin. Meskipun begitu nilai Kabupaten Tasikmalaya masih lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Garut 51.10 poin. Hal ini disebabkan karena rendahnya budaya membaca masyarakat sebagai akibat dari jumlah perpustakaan umum yang terbatas, jenis koleksi perpustakaan yang belum memadai, jumlah pengunjung perpustakaan yang masih sedikit (tahun 2022 sebanyak 1293 orang) dan jumlah tenaga pengelola perpustakaan yang terbatas.

17. Kearsipan

- a. Cakupan Penyelenggaraan kearsipan secara baku masih rendah, yaitu 13,55% (8/59) pada tahun 2023. Hal ini disebabkan karena masih kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang kearsipan, rendahnya perangkat daerah dalam penyediaan daftar arsip, belum optimalnya pelaksanaan penyusutan arsip oleh perangkat daerah dan belum terpenuhinya standarisasi depot arsip, dan terbatasnya jumlah arsiparis di perangkat daerah.

2.3.1.3 Urusan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

- a. Belum Optimalnya sarana prasarana perikanan. dari jumlah 92.000 Rumah Tangga Perikanan (RTP) Pembudidaya ikan hanya sedikit yang telah menggunakan sarana perikanan budidaya seperti kincir, e feeder, sarana penyaringan dll. Hal ini karena biaya distribusi kebutuhan saprodi mahal. lokasi pembudidaya ikan yang jauh dari pusat kota, mahalnya harga pakan. masih sedikit pembudidaya yang membuat pakan mandiri. Pada tahun 2022 Hanya ada 6 mesin pembuatan pakan (Bantuan Pusat), kurang terjangkau sarana produksi perikanan budidaya (kincir, e-feeder, sarana penyaring air, dll.). tingginya harga kincir (3jt dengan kapasitas kecil), e-feeder, sarana penyaring air, dll,

Belum optimalnya pangkalan pendaratan ikan. Dari 2 Pelabuhan, 1 tidak aktif (PPI Nusacimanuk), 1 aktif (PPI Pamayangsari) masih perlu penambahan kolam labuh dan sarana pendukung lainnya; Pembangunan pelabuhan kewenangan Provinsi, dan Kurangnya ketersediaan calon induk dan benih ikan unggul yang dihasilkan oleh Balai Benih Ikan. DPKPP sudah mengupayakan untuk menganggarkan pemenuhan sarana prasarana dan rehabilitasi kolam namun hingga saat ini belum mendapatkan anggaran

- b. Rendahnya kualitas SDM pelaku usaha perikanan. Hal ini karena pembudidaya ikan masih belum berorientasi pada profit, kurangnya regenerasi pembudidaya ikan dan kurangnya minat dari generasi muda untuk menekuni budidaya ikan. rata-rata usia pembudidaya ikan, dan kurangnya pelatihan teknis untuk pelaku usaha perikanan dan kurangnya benchmarking untuk pengembangan komoditas. tahun 2022 - 2023 tidak ada pelatihan
- c. Tingkat penguasaan teknologi perikanan yang masih kurang karena pelaku usaha perikanan kurang adaptif terhadap perkembangan teknologi perikanan dan kurangnya pelatihan teknologi digital untuk pelaku usaha perikanan
- d. Masih terbatasnya aksesibilitas terhadap permodalan dan akses pasar karena masih terbatasnya media promosi, ketergantungan pada jasa tengkulak dan terbatasnya kelembagaan pemasaran yang ada
- e. Dampak perubahan iklim dan bencana. Adanya kekeringan, banjir dan cuaca ekstrem
- f. Belum profesionalnya pengelolaan kelembagaan kelompok pembudidaya ikan dan nelayan serta kelompok pengolahan dan pemasar ikan karena kualitas pengelolaan kelembagaan kelompok pembudidaya ikan dan nelayan serta kelompok pengolahan dan pemasar ikan masih kurang
- g. Rendahnya tingkat konsumsi ikan. pada tahun 2022 Angka Konsumsi Ikan Kabupaten Tasikmalaya 37,07 kg/kapita/tahun lebih rendah dibanding Jawa Barat (38,2 kg/kapita/tahun) dan Nasional (56,48 kg/kapita/tahun)
- h. Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap gizi dan kebutuhan protein hewani khususnya ikan karena kurangnya

promosi gemar ikan dan kurangnya diversifikasi pengolahan hasil perikanan.

2. Pariwisata

Rendahnya jumlah wisatawan yang datang ke Kabupaten Tasikmalaya disebabkan oleh:

- a. Rendahnya kualitas pengelolaan destinasi wisata. Masih banyak destinasi wisata yang kurang diminati karena fasilitas tidak mendukung. Rendahnya kualitas sarana prasarana pendukung destinasi wisata. Kondisi Sapras dari 7 DTW Milik Pemda 50% Dalam Kondisi Tidak Layak
- b. Rendahnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata. SDM Pariwisata Pengelola DTW dan Desa Wisata Masih Rendah karena Rendahnya Pengetahuan pelaku usaha/pengelola/Masyarakat di Destinasi Wisata tentang Sapta Pesona. Pengelola yang Telah Memngikuti Pelatihan Kepariwisataan tidak Menularkan dan Menerapkan Ilmunya di DTW/ Desa Wisata yang Dikelolanya
- c. Belum Optimalnya Promosi Pariwisata. Kabupaten Tasikmalaya Belum Mempunyai Branding, Event Promosi Pariwisata Baru Hanya Sebatas Festival Hari Jadi Kabupaten dan Menggunakan Media Sosial yang Belum Konsisten dalam Pengelolaannya. Hal ini karena kurangnya Kualitas Sumber Daya Manusia yang kompeten dalam promosi potensi Wisata kabupaten Tasikmalaya. Masih Rendahnya SDM ASN Dalam Teknologi Informasi dan Dalam Mengelola Event dan kurangnya pelaksanaan promosi pariwisata yang terintegrasi dan melibatkan semua stakeholder. Belum ada event besar yang *iconic* yang dilakukan rutin tiap tahunnya (*Calendar of Events*) dan kurangnya kolaborasi antar *stake holder*
- d. Belum optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan potensi wisata. Berdasarkan Rencana Pengembangan Perwilayahan pada RIPPARKAB Dari 28 Kecamatan yang Memiliki Potensi Pariwisata, baru 12 Kecamatan yang Sudah Dikelola
- e. Masih banyak potensi wisata yang belum digarap. Dari 92 Desa Wisata yang telah di SK-Kan baru 10% Desa Wisata yang sudah dikelola dengan baik. Belum terjalinnya kemitraan dan kerjasama yang optimal dengan Instansi/lembaga Usaha Pariwisata

/Akademisi/Komunitas Pariwisata/ Media untuk pengembangan Pariwisata Kabupaten Tasikmalaya. Ekosistem Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif sudah terbentuk. Namun belum ada rencana aksi program yang jelas

- f. Potensi wisata yang sudah digarap belum dioptimalkan. Target Jumlah Kunjungan ke 7 Destinasi Wisata yang Dikelola Pemda Tidak Tercapai karena rendahnya kualitas SDM pariwisata yang ada, meliputi soft skill dan hardskill. Jumlah ASN sebagai Koordinator DTW hanya 4 orang untuk Mengelola 7 DTW. Ada Koordinator yang Merangkap Mengelola 2 DTW. Jumlah ini belum ideal.

3. Pertanian

Pada tahun 2023, persentase peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikulura tidak mencapai target. Dari target 1,05 persen, produksi hanya mencapai -1,02 persen. Hal ini disebabkan karena:

- a. Belum Optimalnya Produksi Pertanian. Hal ini karena biaya distribusi kebutuhan saprodi mahal, kelangkaan saprodi, sarana prasarana belum memadai, kurangnya pemakaian teknologi pertanian, degradasi lahan, dan menurunnya daya dukung lahan pertanian
- b. Dampak perubahan iklim dan bencana. Terjadinya perubahan iklim tersebut berdampak langsung pada pergeseran musim yang menyulitkan para petani menentukan masa tanam dan masa panen bagi tanaman mereka. Selain itu, fluktuasi suhu dan kelembapan udara yang semakin meningkat dapat menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan organisme pengganggu tanaman. perubahan iklim ekstrim berakibat kekeringan
- c. Alih fungsi lahan. Berdasarkan izin yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sampai dengan akhir tahun 2020 terdapat alih fungsi lahan pertanian seluas 29,04 ha. Pertumbuhan penduduk membutuhkan penyediaan infrastruktur yang merubah peruntukan lahan pertanian

- d. Keterbatasan kualitas, sarana dan prasarana SDM pertanian, Hal ini karena usia Petani rata-rata sudah berumur, kurangnya minat usia muda untuk menjadi petani, kurangnya petani yang berpendidikan tinggi, mindset masih petani subsisten, berorientasi pada kepuasan bukan profit, Keterbatasan Jumlah Penyuluh tidak sebanding dengan Jumlah Wilayah Binaan. Idealnya 1 Penyuluh memegang 1 Wilayah Binaan/Desa. Saat ini Jumlah Penyuluh 270 dan 351 Jumlah Wilayah Binaan, Kapasitas SDM Penyuluh yang masih kurang. Belum optimalnya pengetahuan terhadap komoditas pertanian. Belum Optimalnya Sarana dan Prasarana Pendukung Penyuluhan yang dimiliki oleh Penyuluh Pertanian. Banyak Penyuluh yang tidak dilengkapi pH Meter, Motor, Laptop dll dan Perlu adanya integrasi dari berbagai aplikasi yang dimiliki penyuluh, sehingga penyuluh lebih optimal dalam melakukan penyuluhannya
- e. Kesejahteraan petani rendah karena ketergantungan pada jasa tengkulak, petani tak punya banyak pilihan, tengkulak berperan membantu dalam modal awal tanam dan saat penjualan hasil tanam, lemah literasi keuangan, modal terbatas, profit margin kecil, luas lahan garapan sedikit, adanya fluktuasi harga panen tidak stabil, kurangnya added value produk pertanian dan terbatasnya petani yang memiliki lahan Garapan
- f. Belum Optimalnya/ pemasaran produk pertanian hal ini karena Ketidaksiapan Produk Pertanian, seperti kualitas dan kuantitas produk pertanian tidak sesuai kebutuhan pasar (tidak fit to market), ketersediaan produk yang masih musiman, rantai pemasaran yang panjang dan lemahnya posisi tawar petani dan Belum optimalnya infrastruktur pemasaran karena minimnya informasi jaringan pasar dan belum optimalnya penggunaan digital marketing.

4. Energi dan Sumber Daya Mineral

- a. Belum terpenuhinya fasilitasi pelayanan dalam pemanfaatan panas bumi secara langsung karena belum terbangunnya regulasi pemanfaatan panas bumi dan belum tersedianya sumber daya

pendukung untuk penerbitan rekomendasi pemanfaatan panas bumi secara langsung.

5. Perdagangan

- a. Masih belum optimalnya kualitas sarana prasarana perdagangan. Hal ini disebabkan karena terbatasnya revitalisasi pasar kabupaten dan kondisi pasar desa yang masih belum memadai. Berdasarkan data tahun 2020 terdapat 14 pasar desa aktif dalam kondisi baik (27,45%), 10 pasar desa aktif dalam kondisi layak (19,61%), 26 pasar desa aktif dalam kondisi rusak ringan dan sedang (50,98%) dan 1 pasar desa aktif dalam kondisi rusak berat pasca bencana yaitu pasar Desa Cikuya Kecamatan Culamega.
- b. Belum optimalnya penggunaan pasar online (*e-commerce*). Hal ini disebabkan karena terbatasnya kemampuan pelaku usaha perdagangan dalam pemanfaatan Teknologi Informasi, belum optimalnya jumlah pelaku usaha perdagangan yang mendapatkan pelatihan perdagangan online dan terbatasnya sarana peralatan yang dimiliki pelaku usaha perdagangan untuk berjualan online
- c. Rendahnya laju pertumbuhan ekspor UMKM Kabupaten Tasikmalaya karena rendahnya pengetahuan pelaku usaha tentang teknis perdagangan Luar Negeri, minimnya Informasi jaringan pasar, dan terbatasnya kemampuan pelaku usaha dalam penggunaan bahasa asing.

6. Perindustrian

- a. Masih rendahnya pertumbuhan sektor industri. Pada tahun 2022, terdapat dari 16.748 unit IKM (Industri Menengah 41 Unit Usaha), 175 unit merupakan unit IKM baru dengan nilai investasi sebesar Rp 680.088 juta
- b. Masih belum optimalnya kompetensi bisnis yang meliputi mindset dan skillset pelaku IKM. Dari jumlah tenaga kerja IKM pada tahun 2022 16.748 IKM, hanya 359 IKM yang mendapatkan pelatihan dan bimbingan teknis.

7. Transmigrasi

- a. Belum optimalnya pengelolaan transmigrasi. Hal ini disebabkan karena jumlah transmigran masih terbatas. Program transmigrasi yang telah dilakukan terakhir pada tahun 2018 hanya 2 KK yang berasal dari Kabupaten Tasikmalaya. Alokasi peserta transmigrasi ditetapkan oleh pemerintah pusat.
- b. Minat menjadi transmigran masih minim karena budaya dan mindset belum mendukung ketertarikan menjadi transmigran.

2.3.1.4 Urusan Penunjang

1. Sekretariat Daerah

- a. Belum optimalnya kualitas tata kelola pemerintahan di Kabupaten Tasikmalaya. Hal ini terlihat dari nilai Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya di tahun 2023 yaitu 71,22 atau kategori "B". Hal ini disebabkan karena pelaksanaan pengelolaan RB belum secara langsung dirasakan masyarakat dan belum optimalnya penajaman pelaksanaan program reformasi birokrasi pada pemerintah daerah dan perangkat daerah. Kualitas tata kelola pemerintahan juga ditentukan oleh nilai SAKIP. Nilai SAKIP Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2023 adalah 64,20 atau Kategori B. Hal ini disebabkan karena belum optimalnya penerapan manajemen kinerja sebagai upaya dalam mengimplementasi SAKIP, belum adanya koordinator antar komponen yang dijadikan komponen penilaian SAKIP, belum adanya penyesuaian aturan baru yang mengatur implementasi SAKIP di Kabupaten Tasikmalaya dan penyusunan laporan kinerja yang merupakan laporan pertanggungjawaban kinerja tahunan belum dilaporkan secara maksimal khususnya di Kecamatan.

2. Sekretariat DPRD

Belum terkelolanya penjangkaran aspirasi masyarakat secara optimal. Hal ini disebabkan karena keterbatasan infrastruktur teknologi dalam pengelolaan penjangkaran aspirasi masyarakat dan terbatasnya sumber daya aparatur dalam hal literasi teknologi informasi.

2.3.1.5 Urusan Pendukung

1. Perencanaan

- a. Belum adanya sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dan perencanaan pembangunan desa karena belum adanya regulasi yang mengatur sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dan desa
- b. Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah belum dilaksanakan secara optimal karena belum tersedianya sistem pengendalian dan evaluasi yang terintegrasi

2. Keuangan

- a. Masih rendahnya kemandirian keuangan daerah Kabupaten Tasikmalaya. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 193/PMK.07/ 2022 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah bahwa Kabupaten Tasikmalaya masuk dalam kategori rendah. Serta kemandirian keuangan daerah Kabupaten Tasikmalaya juga dalam kategori rendah yaitu kurang dari 25%. Kemandirian keuangan daerah dihitung dari penerimaan pendapatan asli daerah dibagi dengan pendapatan daerah, pada tahun 2020 kemandirian keuangan daerah sebesar 8,51%, Tahun 2021 sebesar 11,57% dan tahun 2022 sebesar 9,69 yang artinya penerimaan Kabupaten Tasikmalaya masih bergantung kepada transfer Pemerintah Pusat dan Provinsi.
- b. Belum Optimalnya kualitas pengelolaan keuangan daerah. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Kabupaten Tasikmalaya atas laporan keuangan tahun 2023 dalam kategori baik dengan nilai 70,144 namun masih jauh dibawah Kota Tasikmalaya yang mendapatkan nilai sebesar 85,589.
 - 1) Belum adanya pejabat yang memiliki sertifikat pengelola keuangan. Menindaklanjuti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pasal 150 menyatakan bahwa Pemerintah menyelenggarakan pengembangan kapasitas aparatur pengelola Keuangan Daerah dengan tujuan untuk memperbaiki kualitas pengelolaan Keuangan Daerah dan meningkatkan kompetensi secara berkelanjutan

- 2) Perubahan Regulasi dari Pemerintah Pusat/Provinsi yang dinamis Kebijakan terhadap pengelolaan keuangan yang terus mengalami perubahan
 - 3) Belum optimalnya pemahaman Pengelola Keuangan Perangkat Daerah dalam penyusunan Laporan Keuangan. Seringkali terdapat perubahan pejabat Pengelola Keuangan di setiap Perangkat Daerah
 - 4) Belum optimalnya pemahaman Pejabat Keuangan BLUD dalam penatausahaan dan penyusunan. Seringkali terdapat perubahan Pejabat Keuangan BLUD
 - 5) Sumber pendanaan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah tidak menjamin kepastian adanya sumber pendanaan tersebut dalam perencanaan keuangan daerah. Masih terbatasnya sumber pendanaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Tasikmalaya
 - 6) Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah. Teknologi Informasi yang digunakan dalam pengelolaan keuangan masih mengalami kendala sehingga menggunakan 2 sistem yaitu SIPD dan FMIS.
- c. Belum optimalnya Penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik daerah
- 1) Masih terdapat barang milik daerah berupa tanah dan kendaraan yang belum memiliki bukti kepemilikan yang sah. Terdapat 695 bidang tanah dan total kendaraan 3.196 unit, dari total bidang tanah dan kendaraan tersebut sebanyak 457 bidang tanah telah bersertifikat dan sebanyak 2.720 unit kendaraan telah memiliki bukti kepemilikan yang sah. Sehingga masih terdapat 238 bidang tanah yang belum bersertifikat dan 476 unit kendaraan yang belum memiliki bukti kepemilikan yang sah
 - 2) Masih terdapat pengurus barang di Perangkat Daerah yang belum sesuai dengan kriteria jabatan. Usia pengurus barang dominan yang akan pension
 - 3) Masih terdapat BMD yang idle belum dimanfaatkan dengan baik. 41 titik BMD milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang berada di Kota Tasikmalaya

- 4) Belum adanya kebijakan mengenai penghapusan BMD yang tidak diketahui keberadaanya. Jumlah BMD yang tidak diketahui keberadaanya
- d. Belum optimalnya pengelolaan pendapatan asli daerah. Efektivitas PAD yang mengalami penurunan selama 3 tahun terakhir, efektivitas PAD dihitung dari perbandingan antara target PAD dengan realisasi PAD. Pada Tahun 2020 efektivitas PAD sebesar 104,42% tahun 2021 sebesar 87,59% dan untuk tahun 2022 sebesar 85,46%
 - 1) Belum optimalnya data potensi pajak dan retribusi daerah. Belum dilakukan updating data potensi pajak dan retribusi daerah
 - 2) Belum memadainya sistem pengelolaan pajak dan retribusi daerah. terdapat 3 sistem pengelolaan pajak yang belum terintegrasi
 - 3) Pemuktahiran data NJOP PBB P2 belum seluruhnya dilaksanakan di wilayah Kabupaten Tasikmalaya. sampai dengan Tahun 2022 telah melakukan pemuktahiran pada 15 Kecamatan dan 129 Desa sehingga tersisa 24 Kecamatan dan 222 Desa
 - 4) Masih lemahnya penegakan hukum terhadap Wajib Pajak. Belum ada aturan yang mengikat
 - 5) Masih terbatasnya SDM, sarana dan prasana pendukung pelayanan pajak daerah. Belum adanya pejabat Penilai pajak, pemeriksa pajak dan juru sita.

3. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

- a. Masih rendahnya profesionalitas ASN. Tingkat profesional ASN yang ditandai dengan (Indeks Profesionalitas ASN tahun 2023 = 71,32 poin dari 100 poin dengan predikat sedang)
- b. Kompetensi ASN belum memenuhi standar. Hal ini disebabkan karena penempatan ASN belum sepenuhnya disesuaikan dengan hasil Assessment dan belum semua PNS memiliki kompetensi sesuai dengan standar kompetensi jabatan
- c. Penerapan sistem manajemen ASN yang belum optimal. Hal ini disebabkan karena pemetaan kompetensi / *assessment* belum

dilaksanakan untuk seluruh pegawai, pengembangan pegawai belum sepenuhnya menerapkan *talent management* yang merupakan pengembangan pegawai berdasarkan talenta yang dimiliki

- d. Belum terpenuhinya jabatan di setiap jenjang berdasarkan hasil analisis jabatan. Hal ini disebabkan karena kurangnya jumlah ASN dibandingkan dengan kebutuhan

4. Penelitian dan Pengembangan

- a. Belum optimalnya kualitas inovasi daerah. Hal ini terlihat dari nilai Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2023 (skor tahun 2023 sebesar 43,12 dari 100 poin dengan predikat Inovatif)
- b. Terbatasnya inovasi yang dihasilkan. Hal ini disebabkan karena masih terbatasnya PNS dan masyarakat yang tertarik untuk melahirkan inovasi, kurangnya insentif untuk inovasi, dan belum adanya ekosistem inovasi
- c. Inovasi yang dihasilkan belum memiliki dampak. Hal ini disebabkan karena karena inovasi belum dimanfaatkan secara optimal.
- d. Belum tersedianya basis data penelitian yang optimal. Hal ini disebabkan karena infrastruktur penelitian belum terbangun secara optimal dan belum optimalnya kerjasama dengan lembaga penelitian eksternal

5. Pengawasan

- a. Belum optimalnya sistem pengendalian internal pemerintahan. Hal ini terlihat dari kematangan SPIP yang masih level 3 pada tahun 2023. Hal ini disebabkan karena masih terbatasnya jumlah tenaga fungsional pemeriksa. Berdasarkan analisa kebutuhan jumlah jumlah tenaga fungsional yang dibutuhkan adalah 80 orang, sedangkan kondisi eksisting adalah 31 (auditor: 21 orang, PPUPD: 10 orang), dan SPIP belum menjadi prioritas di perangkat daerah.

- b. Belum maksimalnya kapabilitas APIP karena kompetensi fungsional pemeriksa belum memenuhi kebutuhan tuntutan pekerjaan.
- c. Masih sedikitnya pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM. Hal ini disebabkan belum optimalnya pemahaman tentang korupsi, rendahnya kapasitas sumber daya aparatur, dan kurangnya komitmen dari para pemangku kepentingan dalam membangun zona integritas.

Berdasarkan permasalahan pembangunan yang telah disebutkan, serta penelaahan isu global, isu regional dan hasil evaluasi RKPD tahun sebelumnya, maka dapat dirumuskan isu strategis daerah. Adapun Isu strategis di Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2025 terdapat 13 isu, yaitu:

1. Aksesibilitas dan Keterjangkauan Pelayanan Dasar yang Berkualitas;
2. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat;
3. Penanganan Kemiskinan;
4. Penanganan Pengangguran;
5. Penurunan Angka Stunting, AKI dan AKB;
6. Pemulihan Ekonomi Masyarakat;
7. Peningkatan Daya Saing Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Berbasis Komunitas;
8. Memperluas Jejaring Kerjasama dan Investasi di bidang Pertanian dan Kepariwisata;
9. Peningkatan Daya Saing Produk Pertanian di Pasar Lokal, Nasional, Regional dan Global;
10. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Layanan Infrastruktur Daerah;
11. Penataan Kawasan Ibu Kota Kabupaten Tasikmalaya;
12. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
13. Reformasi Birokrasi untuk Pemerintahan yang Baik dan Efektif Berbasis Teknologi Informasi;

Berikut adalah tabel permasalahan dengan isu strategis di Kabupaten Tasikmalaya:

Tabel 2.84
Permasalahan dan Isu Strategis
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025

Permasalahan Pembangunan RKPD Tahun 2025	Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025
1. Kemampuan literasi dan numerasi siswa dibawah kompetensi minimum.	Aksesibilitas dan Keterjangkauan Pelayanan Dasar yang Berkualitas
2. Belum tuntasnya pembangunan rumah sakit pemerintah di 4 lokasi (Karangnunggal, Ciawi, Manonjaya dan Cikatomas)	
1. Masih kurangnya tenaga kesehatan dalam menunjang Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat
2. Perlunya peningkatan kapasitas tenaga kesehatan	
3. Kurangnya fasilitas pelayanan kesehatan rujukan	
4. Belum optimalnya mutu pelayanan kesehatan	
5. Perlunya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pola hidup bersih dan sehat	
6. Masih rendahnya prestasi olahraga Kabupaten Tasikmalaya	
7. Sarana dan prasarana olahraga kurang memadai	
1. Data kemiskinan yang tersedia belum terintegrasi dan termutakhirkan	Penanganan Kemiskinan
2. Intervensi program dan kegiatan terhadap sasaran belum optimal	
1. Kompetensi angkatan kerja belum sesuai kebutuhan pasar kerja	Penangan Pengangguran
2. Sarana dan prasarana pelatihan tenaga kerja kurang memadai	
1. Belum optimalnya upaya pencegahan stunting (remaja minum tablet tambah darah, penyuluhan kesehatan terhadap calon pengantin, asupan gizi yang baik bagi ibu hamil/menyusui serta balita).	Penurunan Angka Stunting, AKI dan AKB
2. Masih rendahnya kesadaran ibu hamil dalam pemeriksaan kandungan.	
3. Perlunya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pola hidup bersih dan sehat.	

Permasalahan Pembangunan RKPD Tahun 2025	Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025
1. Masih tingginya inflasi	Pemulihan Ekonomi Masyarakat
2. Masih rendahnya daya saing produk usaha mikro	
3. Masih terbatasnya jumlah pelaku usaha mikro yang memiliki sertifikat produk	
4. Belum teralokasinya Pasar Singapura	
1. Kurangnya pemahaman pelaku pariwisata mengenai perilaku kepariwisataan (Sapta Pesona dan CHSE)	Peningkatan Daya Saing Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Berbasis Komunitas
2. Masih terbatasnya infrastruktur dan fasilitas pariwisata (destinasi wisata dan desa wisata)	
3. Belum optimalnya kerjasama dan jejaring ekonomi kreatif	
1. Belum adanya Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM)	Memperluas Jejaring Kerjasama dan Investasi di bidang Pertanian dan Kepariwisata
2. Masih terbatasnya dokumen dan media potensi investasi Kabupatn Tasikmalaya	
1. Terbatasnya produk pertanian yang mempunyai nilai tambah	Peningkatan Daya Saing Produk Pertanian di Pasar Lokal, Nasional, Regional dan Global
2. Terbatasnya lahan pertanian organik yang disertifikasi	
3. Masih terbatasnya infrastruktur pertanian dan perikanan	
1. Masih banyak ruas jalan dalam kondisi rusak	Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Layanan Infrastruktur Daerah
2. Belum memadainya pemenuhan penyediaan air baku untuk kebutuhan masyarakat yang bersumber dari daerah irigasi	
3. Masih banyak rumah tangga yang rawan sanitasi dan air bersih terutama di daerah dataran tinggi	
4. Belum optimalnya penanganan dan ketersediaan rumah layak huni	
5. Belum memadainya sarana dan prasarana persampahan	

Permasalahan Pembangunan RKPD Tahun 2025	Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025
6. Belum memadainya sarana dan prasarana lalu lintas	
1. Bangunan Fasilitas Publik sebagai sarana pelayanan kepada masyarakat belum memadai dan beberapa bangunan perkantoran yang menyelenggarakan pelayanan publik masih berada di wilayah Kota Tasikmalaya.	Penataan Kawasan Ibu Kota Kabupaten Tasikmalaya
1. Masih kurangnya kewaspadaan dini dan mitigasi bencana kebakaran dan non kebakaran.	Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
2. Masih kurangnya fasilitas pemadam kebakaran.	
1. Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi	Reformasi Birokrasi untuk Pemerintahan yang Baik dan Efektif Berbasis Teknologi Informasi
2. Belum optimalnya sarana dan prasarana untuk pelayanan perizinan	

Sumber: Bappelitbangda Kab. Tasikmalaya, 2024

2.4. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

SPM adalah jenis pelayanan dasar yang pada hakikatnya merupakan hak bagi setiap warga untuk memperoleh pelayanan, sehingga menjadi kewajiban pemerintah untuk mengadakannya. Dari sisi manajemen pemerintahan, bidang-bidang pelayanan dasar yang tercakup dalam SPM ini termasuk dalam penyelenggaraan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

Pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Adapun jenis pelayanan dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, meliputi: SPM Bidang Pendidikan, SPM Bidang Kesehatan, SPM Bidang Pekerjaan Umum, SPM Bidang Perumahan Rakyat, SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat, dan SPM Bidang Sosial.

Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya telah menerapkan keenam SPM tersebut. Adapun rincian penerapan masing-masing jenis pelayanan dasar melalui program perangkat daerah terkait disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.85
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program	Indikator Pencapaian	Target 2023	Capaian 2023	Perangkat Daerah
1	Bidang Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Kemampuan Literasi dan Numerasi			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Kemampuan Literasi Jenjang SD	56,98	62,5	
			Kemampuan Literasi Jenjang SMP	64,67	67,22	
			Kemampuan Numerasi Jenjang SD	43,61	53,65	
			Kemampuan Numerasi Jenjang SMP	64,05	61,4	
			Angka Partisipasi Sekolah			
			Usia 5-6 Tahun	100	83,59	
			Usia 7-15 Tahun	100	98,64	
			Usia 7-18 Kesetaraan	100	14,78	
			Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B	56,39	53,25	
			Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4	77,24	80,32	
			Iklim Inklusivitas, Keamanan, dan Kebinekaan			
			Iklim Inklusivitas Jenjang SD	59,63	59,89	
			Iklim Inklusivitas Jenjang SMP	57,42	56,33	
			Iklim Keamanan Jenjang SD	74,92	77,66	
			Iklim Keamanan Jenjang SMP	70,9	70,11	
			Iklim Kebinekaan Jenjang SD	71,75	74,93	
			Iklim Kebinekaan Jenjang SMP	66,9	71,85	
2	Bidang Kesehatan	Program Upaya Kesehatan Perorangan	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100	99,04	Dinas Kesehatan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program	Indikator Pencapaian	Target 2023	Capaian 2023	Perangkat Daerah
		(UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)				
			Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan Kesehatan	100	94,40	
			Jumlah bayi lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100	98,30	
			Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100	98,29	
			Jumlah warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100	90,17	
			Jumlah warga negara usia produktif (15 – 59 tahun) yang mendapatkan layanan kesehatan	100	63,23	
			Jumlah warga negara usia lanjut (60 tahun ke atas) yang mendapatkan layanan kesehatan	100	87,40	
			Jumlah warga penderita hipertensi yang mendapatkan layanan Kesehatan	100	81,79	
			Jumlah warga penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	100	83,40	
			Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	100	87,23	
			Jumlah warga terduga yang mendapatkan layanan Kesehatan	100	100,00	
			Jumlah warga negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia yang mendapatkan layanan kesehatan	100	70,00	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program	Indikator Pencapaian	Target 2023	Capaian 2023	Perangkat Daerah
3	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program pengelolaan dan pengembangan penyediaan sistem air minum	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100	100	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		Program pengelolaan dan pengembangan penyediaan sistem air limbah	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100	100	
4	Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Program Pengembangan Perumahan	Penyediaan & rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota	100	100	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
			Fasilitasi Penyediaan Rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah	100	100	
5	Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			Satuan Polisi Pamong Praja
			Warga Negara yang memperoleh pelayanan kerugian materiil	100	100	
			Warga Negara yang memperoleh pelayanan kerugian pelayanan pengobatan	100	100	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program	Indikator Pencapaian	Target 2023	Capaian 2023	Perangkat Daerah
			Standar operasional Prosedur Satpol PP	100	83,33	
			Standar sarana Prasarana Satpol PP	100	100	
			Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat	100	97,32	
			Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda Dan Perkada	100	100	
	Bidang Ketentaraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran			
			Layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi oleh Dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan	100	100	
			Layanan pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran (balakar, satlakar, dan atau komunitas masyarakat lainnya) yang dibentuk dan/ atau dibawah pembinaan dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan/perangkat daerah			
		Program tanggap dan penanggulangan bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana			Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Jumlah warga Kabupaten Tasikmalaya yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100	100	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program	Indikator Pencapaian	Target 2023	Capaian 2023	Perangkat Daerah
			Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana			
			Jumlah warga Kabupaten Tasikmalaya yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	100	
			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana0			
			Jumlah warga Kabupaten Tasikmalaya yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	100	
6	Bidang Sosial	1. Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di luar Panti Sosial			Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Bencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		2. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Terpenuhinya kebutuhan dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	100	100	
		3. Program Penanganan Bencana	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti			
			Rehabilitasi sosial dasar Anak Terlantar di luar Panti Sosial			
			Terpenuhinya kebutuha dasar anak terlantar di luar panti	100	100	
			Persentase anak (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti			

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program	Indikator Pencapaian	Target 2023	Capaian 2023	Perangkat Daerah
			Rehabilitasi sosial dasar Lanjut Usia Terlantar di luar Panti Sosial			
			Terpenuhinya kebutuhan dasar lanjut usia terlantar di luar panti	100	100	
			Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti			
			Rehab sosial dasar tuna sosial khusus Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial			
			Terpenuhinya kebutuhan dasar gelandangan pengemis di luar panti	100	100	
			Persentase % gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti			
			Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana di daerah Kabupaten/kota			
			Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial daerah kab/kota	100	100	
			Persentase (%) korban bencana alam dan social yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kab/kota			

Sumber: Laporan SPM Kabupaten Tasikmalaya, 2024

2.5. Capaian Inovasi Daerah

A. Latar Belakang

Berdasarkan Amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah daerah dapat melakukan inovasi dan Kepala Daerah melaporkan inovasi daerah yang akan dilaksanakan kepada Menteri.

Selain itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang inovasi daerah, untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing Daerah.

Sedangkan berdasarkan Permendagri Nomor 104 Tahun 2018 Tentang Penilaian Dan Pemberian Penghargaan Dan/Atau Insentif Inovasi Daerah. Atas dasar itulah ada sebuah kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk lebih memperhatikan bagaimana daerahnya dapat menciptakan lebih banyak inovasi.

Sampai saat ini, inovasi yang ada di Kabupaten Tasikmalaya sudah cukup banyak, akan tetapi masyarakat masih belum menyadari atau memahami apa itu inovasi. Hal tersebut bisa terlihat pada ajang *Innovation Government Award (IGA)* 2023, Kabupaten Tasikmalaya hanya mengirimkan 7 Inovasi. Selain itu, yang menjadi kendala untuk pendaftaran inovasi adalah administrasi yang harus dilengkapi oleh pemrakarsa (pengusul) inovasi, khususnya di masyarakat. Masyarakat yang mempunyai inovasi di daerahnya mempunyai beberapa kendala terkait pengadministrasian tentang inovasi tersebut.

Oleh karena itu Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya khususnya pada bidang Penelitian dan Pengembangan berinisiatif untuk memberi pengarahan, membantu dan menjembatani semua pemrakarsa (pengusul) inovasi dalam melengkapi administrasi inovasinya, sehingga inovasi di Kabupaten Tasikmalaya bisa terkoordinir. Selain itu Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya juga akan menjaring dan menampung inovasi yang ada di Kabupaten Tasikmalaya dengan cara membuat Database

Inovasi, sehingga Bappelitbangda memiliki seluruh data inovasi yang ada di Kabupaten Tasikmalaya.

B. Kebaruan (*Novelty*) dari Inovasi yang Dikembangkan

Kegiatan ini dilakukan untuk mengumpulkan inovasi yang nantinya akan dibuatkan database inovasi. Kegiatan ini akan difasilitasi dengan pembuatan dan pengembangan aplikasi (*website*) Sistem Informasi Inovasi Daerah (SIINIDA), sehingga pemerintah daerah atau masyarakat yang mempunyai inovasi bisa menginformasikan inovasinya tanpa harus datang ke tempat.

C. Kerangka Inovasi

Dalam rangka mendorong kompetisi positif antar perangkat daerah, kecamatan, desa, dan unsur pemerintah daerah lainnya juga masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, sehingga dapat mewujudkan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan pembangunan, guna tercapainya kesejahteraan rakyat, maka diperlukan pembangunan berbasis inovasi dan penelitian di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Untuk menampung semua inovasi yang ada di Kabupaten Tasikmalaya dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya:

1. Mengundang Perangkat Daerah, Kecamatan, Desa dan Masyarakat yang mempunyai inovasi;
2. Sosialisasi *Tasikmalaya Innovation Award* (TIA) ke seluruh kecamatan yang dihadiri oleh perwakilan dari masing-masing desa;
3. Kunjungan wilayah yang mempunyai inovasi;
4. Mengadakan Penghargaan Inovasi tingkat Kabupaten Tasikmalaya.

Tasikmalaya Innovation Award (TIA) merupakan lomba inovasi daerah tingkat Kabupaten yang dilakukan untuk Perangkat Daerah, Kecamatan, Desa, BumDes dan Masyarakat serta unsur pemerintah daerah lainnya. Tujuan adanya TIA ini untuk mendorong semangat Pemerintah Daerah dan Masyarakat untuk menciptakan inovasi, sehingga dapat mendukung peningkatan Pembangunan Daerah Berbasis Inovasi dan Penelitian, Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (LPPD), Indeks Inovasi Daerah (IID), Penghargaan Pembangunan Daerah tingkat Kabupaten/Kota, Penerapan *Good Governance*, juga berpartisipasi dalam *Inovation Goverment Award* (IGA).

Tabel 2.86
Perbandingan Skor Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023 dengan Kabupaten/Kota Lain di Provinsi Jawa Barat

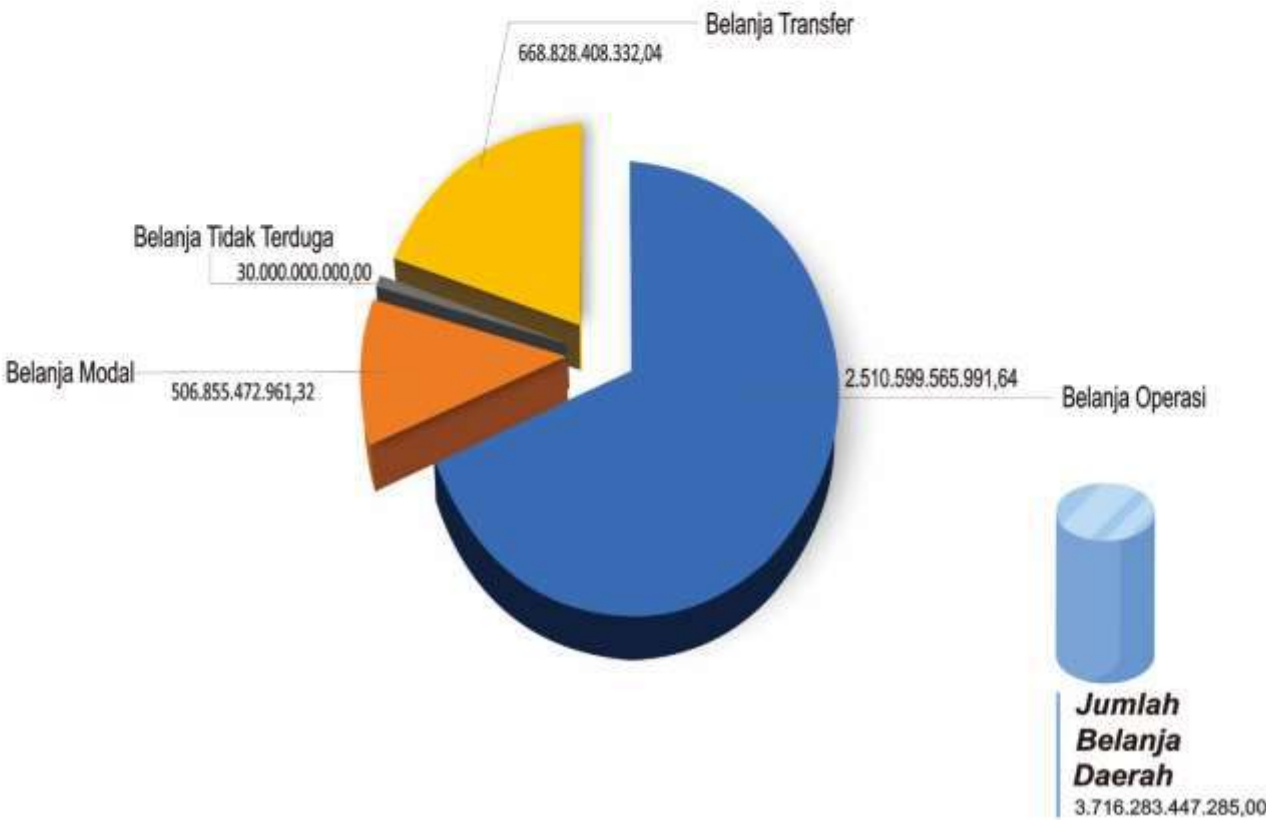
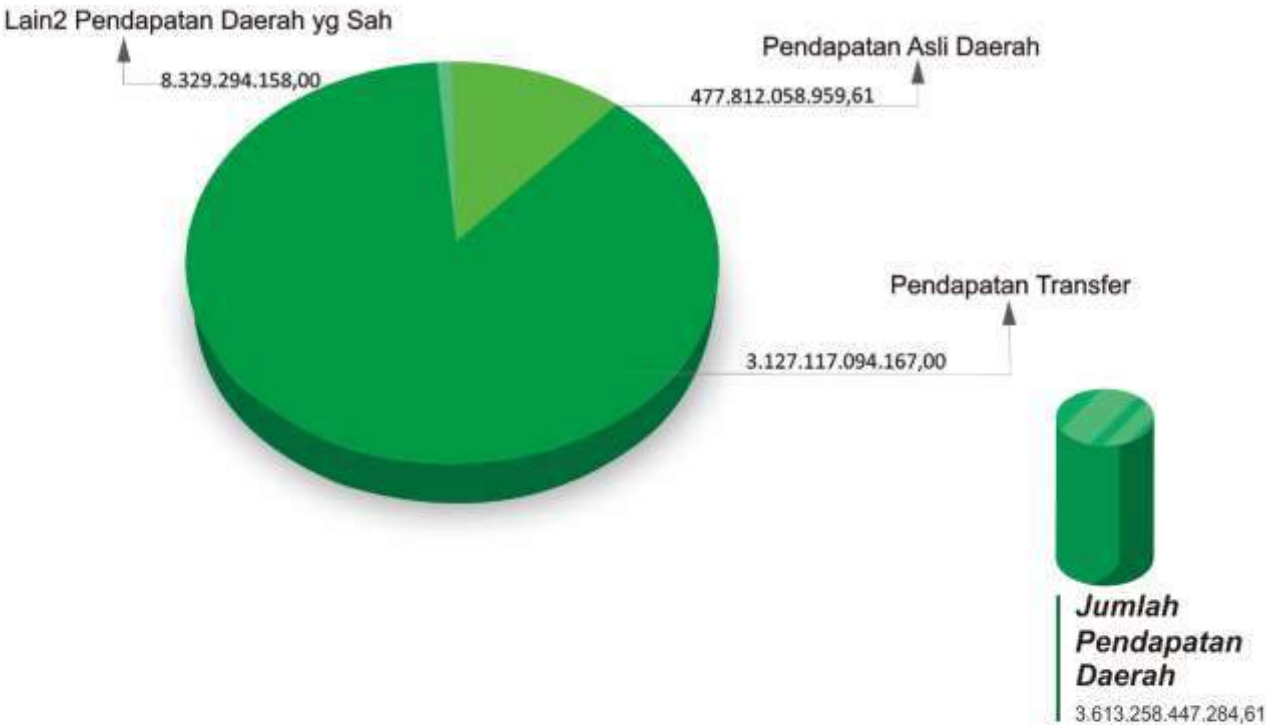
No	Peringkat Nasional	Kabupaten/Kota	Skor Indeks Inovasi	Keterangan
1	9	Kabupaten Bogor	80,93	Sangat Inovatif
2	3	Kota Bekasi	72,74	Sangat Inovatif
3	4	Kota Cimahi	70,99	Sangat Inovatif
4	11	Kota Sukabumi	65,74	Sangat Inovatif
5	41	Kabupaten Sumedang	60,06	Sangat Inovatif
6	33	Kota Bogor	56,82	Inovatif
7	68	Kabupaten Subang	55,48	Inovatif
8	95	Kabupaten Ciamis	52,49	Inovatif
9	103	Kabupaten Bekasi	51,64	Inovatif
10	105	Kabupaten Bandung	51,52	Inovatif
11	106	Kabupaten Majalengka	51,48	Inovatif
12	46	Kota Depok	51,12	Inovatif
13	52	Kota Bandung	49,14	Inovatif
14	144	Kabupaten Karawang	48,44	Inovatif
15	150	Kabupaten Indramayu	48,02	Inovatif
16	56	Kota Banjar	47,54	Inovatif
17	162	Kabupaten Cirebon	47,15	Inovatif
18	60	Kota Tasikmalaya	46,70	Inovatif
19	199	Kabupaten Sukabumi	44,76	Inovatif
20	204	Kabupaten Cianjur	44,35	Inovatif
21	216	Kabupaten Purwakarta	43,21	Inovatif
22	220	Kabupaten Tasikmalaya	43,12	Inovatif
23	224	Kabupaten Pangandaran	43,03	Inovatif
24	227	Kabupaten Garut	42,96	Inovatif
25	71	Kota Cirebon	42,46	Inovatif
26	260	Kabupaten Bandung Barat	39,07	Inovatif
27	284	Kabupaten Kuningan	36,30	Inovatif

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

BAB

3

**STRUKTUR ANGGARAN RKPD
KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2025**



BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka ekonomi dan keuangan daerah membahas kerangka ekonomi makro dan kerangka pendanaan. Kerangka ekonomi Kabupaten Tasikmalaya tahun 2025 menggambarkan kebijakan ekonomi berdasarkan proyeksi kondisi ekonomi makro tahun 2025 dengan menganalisis kondisi ekonomi agregat sampai tahun 2024.

Kerangka pendanaan daerah memuat arah kebijakan keuangan meliputi identifikasi sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial, perkiraan belanja, dan pembiayaan pembangunan Kabupaten Tasikmalaya tahun 2025. Kerangka pendanaan menjadi dasar kebijakan untuk mengalokasikan anggaran secara efektif dan efisien dengan menerapkan prinsip perencanaan anggaran berbasis sektor prioritas.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Tahun 2025 merupakan tahun kelima pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026. Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program/kegiatan dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah.

Program dan Kegiatan Pembangunan yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan pada tahun 2025 dirumuskan berdasarkan isu strategis daerah dengan mempertimbangkan dinamika perkembangan perekonomian terkini. Selain itu juga mengacu dan menyelaraskan dengan arahan dan kebijakan perencanaan peningkatan perekonomian Nasional dan Provinsi Jawa Barat.

Arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Tasikmalaya tahun 2025 ialah meningkatkan daya saing daerah dengan mendorong sektor pariwisata dan meningkatkan nilai tambah produk pertanian unggulan. Kebijakan ini dilaksanakan dengan prinsip ekonomi kerakyatan yang berkeadilan dengan memperhatikan tata ruang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Diharapkan dengan arah kebijakan ekonomi ini Kabupaten Tasikmalaya dapat mencapai

pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, memperluas lapangan kerja, mengurangi angka kemiskinan, mengurangi ketimpangan pendapatan, mengurangi tingkat pengangguran, dan membangkitkan daya saing agar semakin kompetitif.

Tujuan dari pembangunan ekonomi daerah tersebut beranjak dari kondisi perekonomian Kabupaten Tasikmalaya terkini yang berkaitan erat dengan kondisi ekonomi regional (Provinsi Jawa Barat), Nasional, dan global yang dianalisis pada uraian sub-Bab berikut.

3.1.1 Kondisi Pembangunan Ekonomi

3.1.1.1 Kondisi Perekonomian Nasional

Pada tahun 2023 perekonomian Indonesia tumbuh baik dan berdaya tahan terhadap dampak rambatan global. Perbaikan pertumbuhan ekonomi hingga triwulan III 2023 terus berlanjut terutama ditopang oleh permintaan domestik, di tengah melambatnya kinerja sektor eksternal sejalan dengan menurunnya pertumbuhan ekonomi dunia.

Di sisi permintaan domestik, konsumsi swasta tetap tumbuh kuat, termasuk konsumsi generasi muda, seiring dengan meningkatnya konsumsi di sektor jasa. Selain itu masih tingginya keyakinan konsumen, terjaganya daya beli seiring dengan inflasi yang rendah, dan stimulus kebijakan fiskal termasuk pemberian subsidi dan berbagai program bantuan sosial. Pertumbuhan investasi juga tetap baik didorong berlanjutnya penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN) dan investasi nonbangunan.

Sementara di sisi eksternal, pertumbuhan riil ekspor barang menurun seiring pelemahan permintaan dari negara mitra dagang utama, terutama Tiongkok, dan penurunan harga komoditas, sedangkan ekspor jasa tumbuh tinggi sejalan dengan kenaikan jumlah wisatawan mancanegara. Memasuki triwulan IV 2023, berbagai indikator terkini seperti penjualan eceran, indeks keyakinan konsumen, penjualan semen, dan Purchasing Manager's Index (PMI) yang berada pada zona ekspansi mengonfirmasi berlanjutnya pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Tetap baiknya pertumbuhan ekonomi juga tecermin pada kinerja lapangan usaha (LU) utama seperti industri pengolahan, pertambangan, konstruksi, dan LU yang terkait dengan jasa termasuk transportasi dan pergudangan, akomodasi dan makan minum, serta informasi dan telekomunikasi. Dengan perkembangan tersebut, Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan ekonomi dapat mencapai kisaran 4,5-5,3% pada 2023, dan akan meningkat menjadi 4,7-5,5% pada 2024 dan 4,8-5,6% pada 2025 (Tabel 3.1).

Tabel 3.1.
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2023-2025 (% , yoy)

Komponen	2022*	2023**			2023 ^p	2024 ^p	2025 ^p
		I	II	III			
Pertumbuhan Ekonomi	5,31	5,04	5,17	4,94	4,5 – 5,3	4,7 – 5,5	4,8 – 5,6
Konsumsi Rumah Tangga	4,93	4,54	5,22	5,06	4,5 – 5,3	4,6 – 5,4	4,6 – 5,4
Konsumsi Pemerintah	-4,51	3,34	10,57	-3,76	2,9 – 3,7	2,8 – 3,6	2,8 – 3,6
Investasi	3,87	2,11	4,63	5,77	4,1 – 4,9	5,0 – 5,8	5,2 – 6,0
Ekspor	16,28	11,94	-2,97	-4,26	-0,5 – 0,3	-0,4 – 0,4	6,1 – 6,91
Impor	14,75	3,69	-3,06	-6,18	-2,9 - -2,1	-1,1 - -0,3	7,1 – 7,9

Sumber: BPS, Proyeksi Bank Indonesia (2023)
Keterangan: ^pProyeksi BI, * = Angka Sementara, ** = Angka Sangat Sementara

Perbaikan ekonomi di sebagian besar wilayah diperkirakan berlanjut pada triwulan I 2024. Perbaikan ekonomi ditopang konsumsi swasta, terutama konsumsi rumah tangga, di sebagian besar wilayah. Peningkatan konsumsi rumah tecermin pada kuatnya penjualan ritel yang dipengaruhi oleh faktor musiman menjelang HBKN Idul fitri.

Konsumsi rumah tangga di sebagian besar wilayah diperkirakan tumbuh tinggi. Berlanjutnya perbaikan ekonomi daerah terkonfirmasi pada kinerja sebagian LU di sejumlah wilayah. Perbaikan konsumsi swasta di seluruh wilayah mendorong peningkatan kinerja LU Perdagangan di seluruh wilayah.

Meningkatnya konsumsi juga mendorong perbaikan kinerja LU Industri Pengolahan di wilayah Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Sementara itu, perbaikan kinerja net ekspor dan investasi yang terjadi di wilayah Sulampua mendorong kinerja LU Pertambangan dan LU

Industri Pengolahan di wilayah tersebut tetap tumbuh tinggi pada triwulan I 2024.

Kondisi perekonomian nasional merupakan agregat dari aktivitas perekonomian daerah. Pangsa perekonomian nasional didominasi oleh kegiatan ekonomi di pulau Jawa. Ibu Kota Negara DKI Jakarta merupakan pangsa perekonomian terbesar disusul kemudian oleh Jawa Timur dan Jawa Barat. Kondisi Perekonomian Jawa Barat diulas dalam Sub-Bab selanjutnya.

3.1.1.2 Kondisi Perekonomian Provinsi Jawa Barat

Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat pada triwulan IV 2023 lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya. Pada triwulan laporan, kinerja ekonomi Jawa Barat tumbuh 5,15% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat tumbuh sebesar 4,58% (yoy) (Grafik 1.1). Angka pertumbuhan ini lebih tinggi dari perekonomian nasional yang tumbuh sebesar 5,04% (yoy).

Kinerja pertumbuhan ekonomi didukung oleh permintaan domestik seiring dengan peningkatan aktivitas masyarakat pada masa libur natal dan tahun baru, dan kegiatan investasi. Dari sisi permintaan, kinerja ekonomi Jawa Barat pada triwulan IV 2023 berkontribusi oleh komponen konsumsi rumah tangga sejalan dengan mobilitas masyarakat yang tinggi termasuk untuk tujuan leisure.

Investasi mengalami pertumbuhan sebagaimana tercermin dari realisasi PMA/ PMDN di Jawa Barat yang melebihi target. Sedangkan peningkatan pengeluaran pemerintah terjadi sejalan dengan realisasi proyek strategis pemerintah, serta peningkatan belanja barang, jasa dan pegawai.

Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada triwulan IV 2023 bersumber dari sektor konstruksi sejalan dengan tingginya pembangunan infrastruktur di Jawa Barat, sektor perdagangan yang tumbuh didorong oleh daya beli masyarakat yang tetap terjaga serta sektor transportasi yang berkembang seiring meningkatnya permintaan akan transportasi publik.

Wilayah Jawa masih menjadi sumber pertumbuhan utama perekonomian nasional pada triwulan IV 2023 dengan sumbangan sebesar 56,56%. Sementara itu sumbangan perekonomian Jawa Barat

terhadap perekonomian Nasional sebesar 12,73%. Perekonomian Jawa Barat pada triwulan IV 2023 berkontribusi sebesar 22,5% terhadap perekonomian Jawa yang merupakan kontributor terbesar setelah DKI Jakarta dan Jawa Timur. Besarnya peranan ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi Jawa Barat turut menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi Jawa dan Nasional.



Gambar 3.1.
Pangsa Perekonomian Provinsi di Jawa terhadap Nasional
Tahun 2023

Sumber: BPS, 2024

Wilayah Jawa masih menjadi sumber pertumbuhan utama perekonomian nasional pada triwulan IV 2023 dengan sumbangan sebesar 56,56%. Sementara itu sumbangan perekonomian Jawa Barat terhadap perekonomian Nasional sebesar 12,73%. Perekonomian Jawa Barat pada triwulan IV 2023 berkontribusi sebesar 22,5% terhadap perekonomian Jawa yang merupakan kontributor terbesar setelah DKI Jakarta dan Jawa Timur. Besarnya peranan ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi Jawa Barat turut menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi Jawa dan Nasional.

Secara keseluruhan tahun 2023, Perekonomian Jawa Barat tumbuh 5,00% (yoy) lebih lambat dibandingkan tahun 2022 (5,45% yoy). Capaian angka pertumbuhan Jawa Barat merupakan tertinggi kedua di pulau Jawa dan sedikit lebih rendah dari nasional yang

sebesar 5,05% (yoy). Pertumbuhan ekonomi tahun 2023 didukung oleh peningkatan mobilitas masyarakat pasca pandemi termasuk antusiasme masyarakat menggunakan transportasi kereta cepat whoosh.

Dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi berkontribusi oleh peningkatan konsumsi rumah tangga, investasi, dan pengeluaran pemerintah. Dari sisi lapangan usaha, aktivitas ekonomi didukung oleh kinerja sektor industri pengolahan, sektor perdagangan besar dan eceran, serta sektor transportasi dan pergudangan. Sektor industri pengolahan tumbuh bersumber dari subsektor industri makanan minuman, kertas dan industri rekaman sedangkan, sektor perdagangan tumbuh didukung oleh permintaan domestik dan mobilitas masyarakat.

Berbagai upaya dan sinergi yang terus dilakukan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi domestik, antara lain melalui upaya menjaga dan meningkatkan investasi, pemanfaatan sumber pertumbuhan ekonomi baru yaitu melalui percepatan dan perluasan digitalisasi, pengembangan ekonomi syariah dan ekonomi hijau, dan memperbanyak penyelenggaraan event, serta optimalisasi infrastruktur konektivitas untuk meningkatkan pemerataan ekonomi.

Perekonomian Jawa Barat pada triwulan IV 2023 tumbuh lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya. Akselerasi tersebut ditopang oleh momentum siklikal HBKN natal dan tahun baru yang mendorong peningkatan permintaan konsumsi rumah tangga, tingginya realisasi fiskal akhir tahun, dan peningkatan investasi.

Hampir seluruh komponen utama dalam PDRB mengalami pertumbuhan positif kecuali perubahan inventori dan net ekspor yang masih berkontraksi. Konsumsi rumah tangga pada triwulan IV 2023 tercatat tumbuh positif meskipun melambat yakni sebesar 5,39% (yoy). Di sisi lain, konsumsi LNPRT, konsumsi pemerintah, dan investasi mengalami pertumbuhan positif. Sementara itu, komponen perubahan inventori dan net ekspor keduanya masih mengalami kontraksi (Gambar 3.2).

Komponen Permintaan	2020	2021				2021	2022				2022	2023				2023
		I	II	III	IV		I	II	III	IV		Ir)	IIr)	IIIr)	IV	
Konsumsi Rumah Tangga	-2,89	-2,57	5,63	0,04	2,52	1,33	3,05	5,89	5,03	4,73	4,67	4,60	5,53	5,83	5,39	5,34
Konsumsi LNPR	-4,08	-1,18	3,86	3,60	1,51	1,92	0,95	1,32	5,03	5,33	3,13	4,29	15,31	16,75	19,35	14,02
Konsumsi Pemerintah	-1,15	-10,70	6,25	5,14	2,49	2,07	3,20	-5,07	4,39	-5,55	-1,72	10,16	12,01	-5,08	7,75	5,65
PMTB	-8,34	1,72	10,87	7,38	6,34	6,47	-1,17	0,51	0,09	-0,60	0,29	2,98	7,08	8,40	12,39	7,73
Perubahan Inventori	-62,89	-92,70	-112,22	5,92	104,89	-152,21	3,77	-161,16	-114,91	-88,00	-116,44	2,54	-227,78	-7,36	-249,02	-19,65
Net Ekspor	60,54	45,05	41,96	13,89	46,55	34,59	30,21	15,10	15,84	10,01	17,61	10,11	1,40	-4,15	-15,52	-1,78
a. Ekspor	-6,48	14,42	28,92	23,49	25,94	23,12	17,38	13,53	10,62	3,91	11,10	4,96	11,94	14,58	17,82	12,38
b. Impor	-16,77	6,68	25,21	27,40	20,77	19,72	12,98	13,03	8,72	2,06	8,92	3,22	15,46	21,86	28,76	17,56
PDRB	-2,50	-0,80	6,20	3,51	6,21	3,74	5,57	5,62	6,03	4,61	5,45	5,01	5,25	4,58	5,15	5,00

Gambar 3.2.
Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Jawa Barat
Berdasarkan Permintaan (% yoy)
Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2024

Apabila dilihat dari andilnya terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada triwulan IV 2023, konsumsi rumah tangga menjadi komponen dengan andil terbesar yaitu 3,21%, kemudian diikuti oleh PMTB dengan kontribusi sebesar 2,76% dan konsumsi pemerintah yang memberikan kontribusi sebesar 0,47%. Pada triwulan IV 2023, komponen ekspor sebenarnya memberikan kontribusi yang cukup besar (8,35%), tetapi karena impor memberikan andil yang lebih besar dibandingkan ekspor sehingga menyebabkan komponen net ekspor justru memberikan andil negatif 1,80% (Gambar 3.3).

Komponen Permintaan	2020	2021				2021	2022				2022	2023				2023
		I	II	III	IV		I	II	III	IV		Ir)	IIr)	IIIr)	IV	
Konsumsi Rumah Tangga	-1,79	-1,61	3,42	0,02	1,55	0,82	1,87	3,56	2,97	2,82	2,81	2,76	3,35	3,41	3,21	3,19
Konsumsi LNPR	-0,03	-0,01	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,03	0,03	0,02	0,03	0,09	0,10	0,11	0,08
Konsumsi Pemerintah	-0,06	-0,31	0,31	0,25	0,17	0,10	0,08	-0,25	0,22	-0,37	-0,08	0,26	0,53	-0,25	0,47	0,25
PMTB	-2,05	0,40	2,45	1,69	1,49	1,50	0,28	0,12	0,02	-0,14	0,07	-0,69	1,59	1,89	2,76	1,75
Perubahan Inventori	-1,84	-2,67	-3,39	-0,04	-0,73	-1,70	0,01	0,56	0,83	1,18	0,65	0,01	-0,46	-0,01	0,38	-0,02
Net Ekspor	3,20	3,39	3,38	1,56	3,72	3,01	3,32	1,62	1,96	1,10	1,99	1,37	0,16	-0,56	-1,80	-0,22
a. Ekspor	-2,57	5,38	10,50	9,13	10,32	8,80	7,48	5,96	4,92	1,85	5,01	2,37	5,65	7,05	8,35	5,89
b. Impor	-5,77	1,99	7,12	7,56	6,61	5,79	4,16	4,34	2,96	0,74	3,03	1,10	5,51	7,61	10,15	6,15
PDRB	-2,50	-0,80	6,20	3,51	6,21	3,74	5,57	5,62	6,03	4,61	5,45	5,01	5,25	4,58	5,15	5,00

Gambar 3.3.
Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Jawa Barat
Berdasarkan Permintaan (% yoy)
Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2024

Aktivitas Ekonomi Jawa Barat merupakan agregasi dari aktivitas ekonomi di 27 Kabupaten dan Kota. Pertumbuhan atau kontraksi

ekonomi di sebuah daerah dapat mempengaruhi perekonomian provinsi Jawa Barat. Pertumbuhan PDRB Kabupaten/Kota pada tahun 2020-2023 disajikan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2.
Laju PDRB Jawa Barat Berdasarkan Kabupaten Kota (ADHK)
Tahun 2020 – 2023

Wilayah Jawa Barat	Laju PDRB Atas Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota (Persen)			
	2020	2021	2022	2023
Provinsi Jawa Barat	-2.52	3.74	5,45	5,00
Bogor	-1.76	3.55	5,25	5,19
Sukabumi	-0.92	3.75	5,12	5,17
Cianjur	-0.78	3.48	5,04	5,16
Bandung	-1.80	3.56	5,35	4,97
Garut	-1.26	3.58	5,08	4,94
Tasikmalaya	-0.98	3.43	4,70	4,69
Ciamis	-0.14	3.66	5,02	4,99
Kuningan	0.11	3.56	5,53	5,25
Cirebon	-1.08	2.47	4,09	4,85
Majalengka	0.89	4.75	6,63	6,15
Sumedang	-1.12	3.17	5,03	5,01
Indramayu	-1.58	0.58	2,88	9,76
Subang	-1.15	2.40	4,21	4,64
Purwakarta	-2.13	3.42	5,24	4,97
Karawang	-3.80	5.85	6,31	5,40
Bekasi	-3.39	3.62	5,30	5,32
Bandung Barat	-2.41	3.46	5,34	5,00
Pangandaran	-0.05	3.67	5,03	5,26
Kota Bogor	-0.41	3.76	5,65	5,10
Kota Sukabumi	-1.49	3.71	5,35	5,12
Kota Bandung	-2.28	3.76	5,41	5,07
Kota Cirebon	-0.98	3.04	5,10	5,01
Kota Bekasi	-2.58	3.22	4,96	5,43
Kota Depok	-1.92	3.76	5,24	5,05
Kota Cimahi	-2.26	4.19	5,92	5,19
Kota Tasikmalaya	-2.01	3.57	5,01	5,96
Kota Banjar	0.94	3.46	4,19	4,63

Sumber: BPS Jawa Barat, 2024

Pada Tabel tersebut terlihat laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tasikmalaya relatif tidak sepesat Kabupaten/Kota lainnya. Namun demikian di masa krisis akibat Pandemi Covid-19

Perekonomian Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2020 berkontraksi tidak terlalu dalam (-0,98) dibandingkan dengan yang dialami Kabupaten/Kota lain atau sedikit lebih baik dari rata-rata Provinsi Jawa Barat (-2,44). Pada 2022 Perekonomian Jawa Barat mengalami pertumbuhan 5,75 % sementara Kabupaten Tasikmalaya mengalami pertumbuhan 4,70%.

Selanjutnya pada 2022 pertumbuhan ekonomi Tasikmalaya mengalami pelambatan menjadi 4,9%. Deskripsi lebih rinci mengenai kondisi perekonomian Kabupaten Tasikmalaya dibahas pada Sub-Bab berikutnya.

3.1.1.3 Kondisi Perekonomian Kabupaten Tasikmalaya

Kondisi perekonomian daerah mempunyai peranan penting dalam mendukung laju pembangunan ekonomi. Keberhasilan pembangunan perekonomian Kabupaten Tasikmalaya ditentukan oleh berbagai indikator makro ekonomi meliputi:

- 1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
- 2. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)
- 3. Inflasi
- 4. Tingkat Kemiskinan
- 5. Tingkat Ketimpangan Ekonomi
- 6. Tingkat Pengangguran

Tabel 3.3
Target dan Capaian Indikator Makro Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2022-2025

No	Indikator Makro	Satuan	Target Tahun 2022	Capaian Tahun 2022	Target Tahun 2023	Capaian Tahun 2023	Target Tahun 2024	Target Tahun 2025
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	66,19	66,84	67,38	69,38	69,80	70,27
2	Persentase Penduduk Miskin	%	11,02	10,73	10,67	10,28	8,90 – 9,80	8,65 – 9,55
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6-7	4,17	4,17	3,89	3,48 – 3,88	3,42 – 3,73
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	1-3	4,70	4,50	4,69	4,70 – 5,12	4,66 – 5,16

No	Indikator Makro	Satuan	Target Tahun 2022	Capaian Tahun 2022	Target Tahun 2023	Capaian Tahun 2023	Target Tahun 2024	Target Tahun 2025
5	PDRB Per Kapita (ADHB)	Rp. Juta	22,38	22,38	24,11	24,17	25,99	26,40
6	Ketimpangan Gini Ratio	Poin	0,3-0,4	0,378	0,370	0,404	0,387 – 0,400	0,386 – 0,399

Sumber: - RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026
- BPS Kabupaten Tasikmalaya, 2024

Kondisi ekonomi daerah Kabupaten Tasikmalaya dalam kurun waktu lima tahun terakhir mengalami fluktuasi seiring dengan terjadinya perubahan kondisi sosial politik baik secara nasional maupun regional. Adanya pemilihan anggota DPR, DPRD, pemilihan Presiden, pemilihan kepala daerah, timbulnya berbagai bencana di tanah air mulai gempa bumi, tsunami, tanah longsor, banjir, gunung meletus dan yang paling terbaru adanya pandemi Covid-19 yang sangat berdampak terhadap perekonomian nasional maupun perekonomian daerah.

3.1.1.3.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB Kabupaten Tasikmalaya dari tahun 2019 dan sampai tahun 2023 mengalami pertumbuhan secara moderat. Di masa resesi ekonomi pada tahun 2020 pun indicator ekonomi Kabupaten Tasikmlaya atas dasar harga berlaku masih tercatat mengalami peningkatan. Tabel 3.6 mencatat PDRB Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2021 sebesar 25.179,48 Milyar Rupiah (ADHK), pada tahun 2023 terjadi sedikit peningkatan menjadi 27.559,15 milyar rupiah.

Tabel 3.4
PDRB Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2018-2023 (Milyar Rupiah)

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
PDRB Berlaku	37.310,23	37.443,45	39.285,64	42.659,50	46.097,96
PDRB Konstan	24.586,67	24.344,86	25.179,48	26.361,68	27.599,15

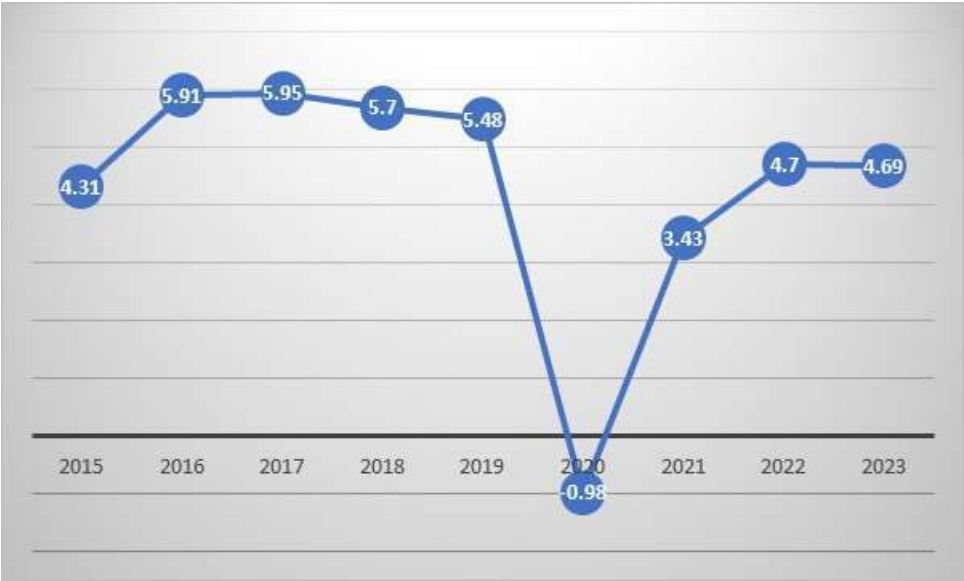
Sumber: BPS Jawa Barat, 26 Maret 2024

Persentase perubahan nilai PDRB dari tahun ke tahun menjadi indikator ekonomi makro selanjutnya yaitu Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE).

3.1.1.3.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB ADHK tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan disertai upaya-upaya perluasan dan keberpihakan kesempatan kerja kepada kelompok kurang mampu yang pada akhirnya mengurangi tingkat kemiskinan. Prospek ekonomi tersebut dapat tercapai dengan asumsi: (1) perekonomian dunia terus mengalami pemulihan, (2) tidak ada gejolak dan krisis ekonomi dunia baru yang terjadi, dan (3) berbagai kebijakan yang telah ditetapkan dalam agenda pembangunan dapat terlaksana.

Secara historis Laju Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tasikmalaya mengalami percepatan signifikan pada tahun 2015-2017. Selanjutnya pada periode 2018-2019 walaupun tetap tumbuh tetapi mengalami perlambatan. Pada masa pandemi covid-19 pada tahun 2020 ekonomi mengalami kontraksi sehingga terjadi pertumbuhan negative sebesar 0,98% (YoY). Seiring dengan bearishnya pandemic menjadi endemic, tahun 2021 dan 2022 perekonomian Kabupaten Tasikmalaya tumbuh kembali masing-masing 3,43% dan 4,7%.



Gambar 3.4.
Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi Kab. Tasikmalaya 2015-2023
Sumber: BPS, 2024

Untuk melihat struktur ekonomi Kabupaten Tasikmalaya, dapat dilihat dari Lapangan Usaha dominan. Diantaranya dapat melalui data statistic distribusi persentase PDRB Kabupaten Tasikmalaya. Tabel 3.6 merinci data historsi sebaran persentase PDRB Kabupaten Tasikmalaya selama satu dekade (2013-2023).

Tabel 3.5.
Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Tasikmalaya (ADHB %) Berdasarkan Lapangan Usaha 2013-2023

No	Lapangan Usaha/ Industry	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan perikanan	39.79	39.00	38.34	38.32	38.02	38.02	37.48	37.81	37.61	38.01	37.77
B	Pertambangan dan Penggalian	0.31	0.30	0.29	0.27	0.25	0.23	0.21	0.22	0.22	0.21	0.21
C	Industri Pengolahan	6.95	7.28	7.35	7.44	7.43	7.54	7.69	7.62	7.65	7.76	7.98
D	Pengaduan Listrik dan Gas	0.05	0.05	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
F	Konstruksi	7.76	7.78	7.84	7.74	7.89	8.04	8.18	7.75	8.25	8.11	7.74
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	20.97	20.74	20.49	20.26	19.74	19.17	19.35	19.18	18.19	18.31	18.46

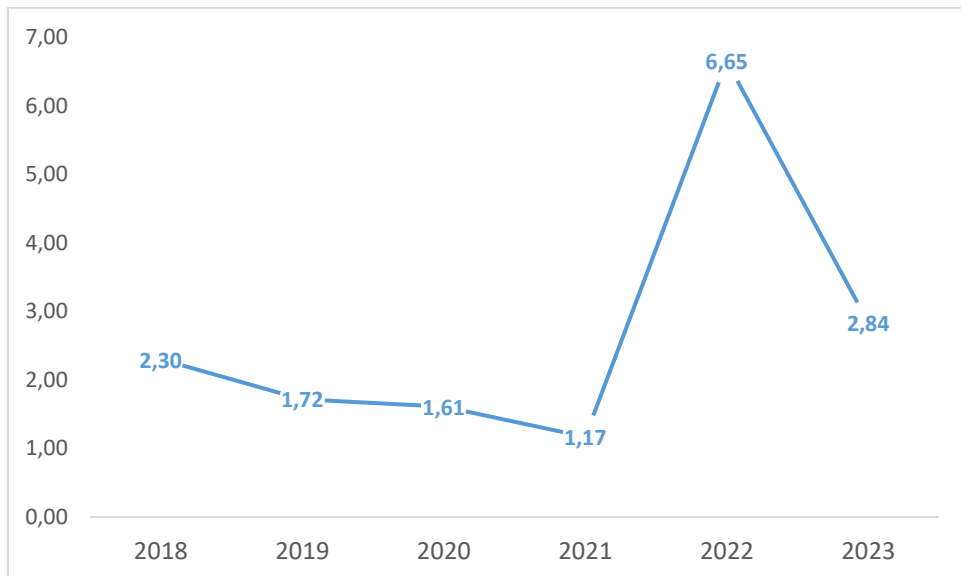
No	Lapangan Usaha/ Industry	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
H	Transportasi dan Pergudangan	3.73	3.83	4.30	4.30	4.33	4.29	4.22	4.22	4.11	4.16	4.57
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.35	1.30	1.27	1.25	1.30	1.33	1.38	1.43	1.39	1.47	1.49
J	Informasi dan Komunikasi	2.68	2.91	3.08	3.24	3.41	3.33	3.34	4.20	4.31	4.20	4.15
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2.93	2.93	3.03	3.08	3.10	3.11	3.01	3.06	3.15	3.21	3.26
L	Real Estate	1.36	1.34	1.30	1.24	1.27	1.29	1.31	1.32	1.40	1.38	1.38
M, N	Jasa Perusahaan	0.37	0.38	0.40	0.41	0.42	0.44	0.49	0.43	0.45	0.48	0.50
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	5.11	4.91	4.83	4.7	4.52	4.39	4.16	3.95	3.72	3.38	3.31
P	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	4.78	5.30	5.42	5.61	6.04	6.39	6.71	7.35	7.16	6.86	6.70
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.48	0.54	0.56	0.58	0.62	0.64	0.66	0.65	0.67	0.67	0.69
R, S, T, U	Jasa Lainnya/	1.38	1.39	1.44	1.47	1.59	1.70	1.72	1.70	1.64	1.71	1.71
Produk Domestik Bruto		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: BPS Kabupaten Tasikmalaya, 2024

3.1.1.3.3 Inflasi

Inflasi menggambarkan kondisi makro perekonomian suatu daerah. Karena Inflasi akan mempengaruhi daya beli masyarakat dan pola investasi. Inflasi yang tinggi akan menggerus nilai uang dari waktu ke waktu, sehingga daya beli masyarakat akan menurun, dan demikian halnya investasi. Hal tersebut akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Namun demikian inflasi yang terkendali merupakan indikasi adanya pertumbuhan ekonomi. Angka inflasi Kabupaten Tasikmalaya diperhitungkan sama dengan inflasi Kota Tasikmalaya, karena berada dalam satu radar perhitungan.

Secara umum inflasi di Kabupaten Tasikmalaya termasuk kriteria ringan atau *creeping inflation* karena kurang dari 10% setahun. Inflasi seperti ini wajar terjadi pada negara atau daerah berkembang yang selalu berada dalam proses pembangunan. Gambar 3.5 menggambarkan fluktuasi angka inflasi Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2018 – 2023:



Gambar 3.5
Inflasi Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2018-2023

Sumber : BPS Kabupaten Tasikmalaya, 2024

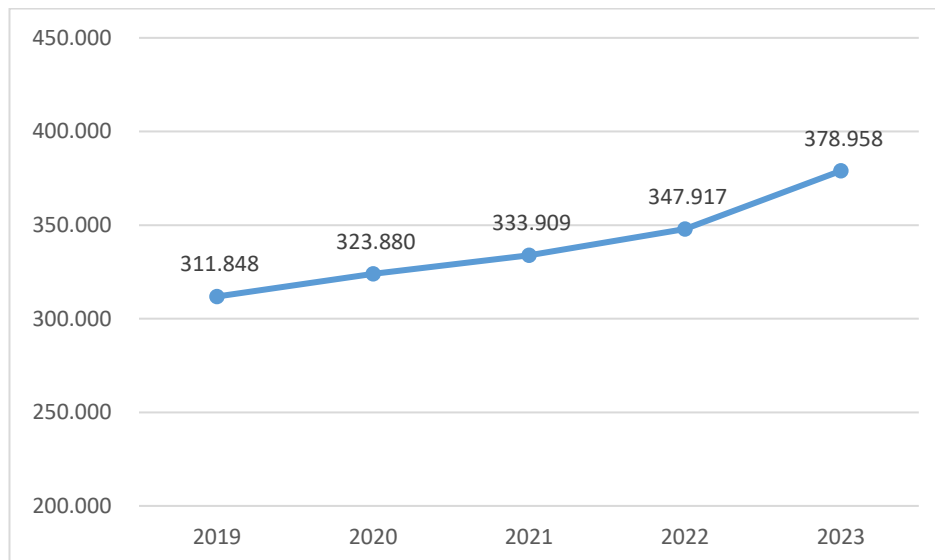
Pada Desember 2023, inflasi year on year (y-on-y) sebesar 2,84 persen) dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,54. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,04 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,05 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,04 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,05 persen; kelompok transportasi sebesar 0,52 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,10 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 1,52 persen.

Penjagaan tingkat inflasi melalui pengamanan ketersediaan pangan, penyederhanaan rantai distribusi, pengawasan harga komoditas dengan mengoptimalkan teknologi informasi, serta edukasi dan peningkatan literasi pengendalian harga kepada masyarakat menjadikan dinamika inflasi Kabupaten Tasikmalaya masih terjaga pada tingkat yang kondusif.

3.1.1.3.4 Kemiskinan

Seiring dengan inflasi atau kenaikan harga-harga secara umum di Kabupaten Tasikmalaya, garis kemiskinan dalam kurun 5 tahun

terakhir terus mengalami peningkatan dari Rp 311.848,00 pada tahun 2019 menjadi Rp378.958,00 pada tahun 2023.

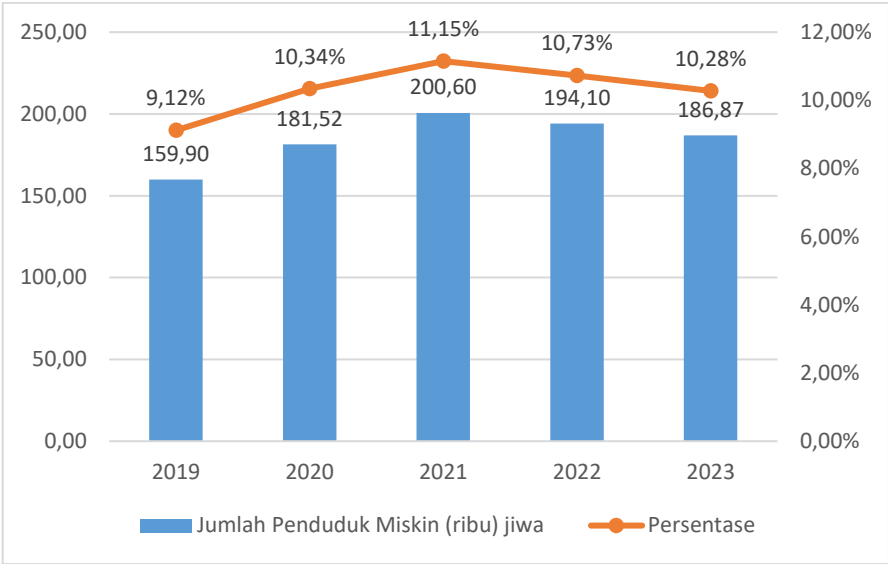


Gambar 3.6
Garis Kemiskinan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2023

Sumber : BPS Kabupaten Tasikmalaya, 2024

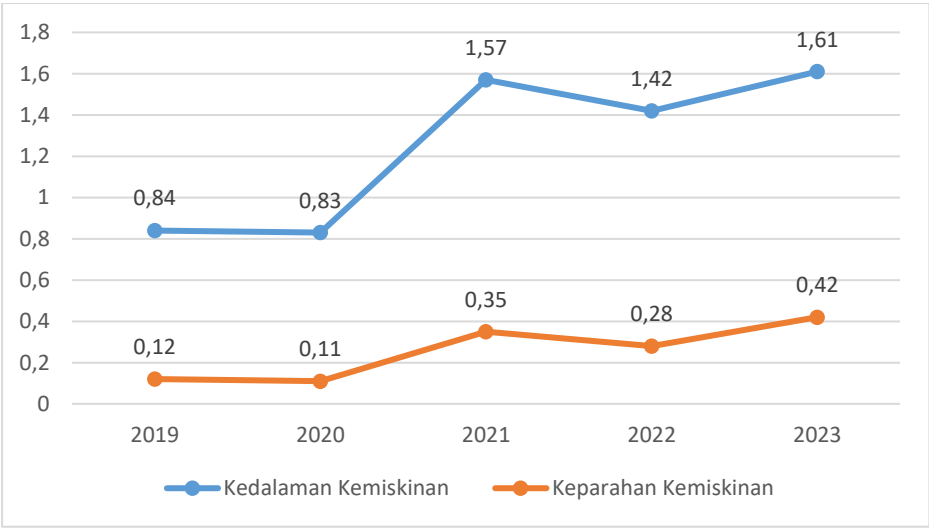
Dari grafik garis kemiskinan di atas dapat diproyeksikan penduduk dengan pendapatan perbulan perkapita di bawah garis kemiskinan termasuk kategori penduduk miskin. Di Kabupaten Tasikmalaya Jumlah penduduk miskin tahun 2023 sebanyak 186,87 ribu jiwa. Demikian juga dengan persentase penduduk miskin (sekalius jumlah penduduk miskin) mengalami penurunan dari 10,73% tahun 2022 menjadi 10,28% pada tahun 2023.

Persentase jumlah penduduk miskin pada tahun 2019 merupakan capaian terendah dalam kurun 4 tahun terakhir yaitu mencapai 9,12%. Hal ini menunjukkan pelaku pembangunan ekonomi baik pemerintah, swasta, dan masyarakat itu sendiri telah berhasil menekan jumlah kemiskinan. Namun demikian pandemi Covid-19 yang mengakibatkan kontraksi ekonomi menyebabkan jumlah dan persentase penduduk miskin bertambah pada tahun 2020 dan 2021 (Gambar 3.7)



Gambar 3.7
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2023
Sumber : BPS Kabupaten Tasikmalaya, 2024

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Tasikmalaya mengalami penurunan. Pada tahun 2023, PI tercatat mengalami penurunan dari 1,62 yang semula 1,42 pada tahun 2022. Demikian pula halnya dengan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami kenaikan dari 0,28 pada tahun 2022 menjadi 0,42 pada tahun 2023.



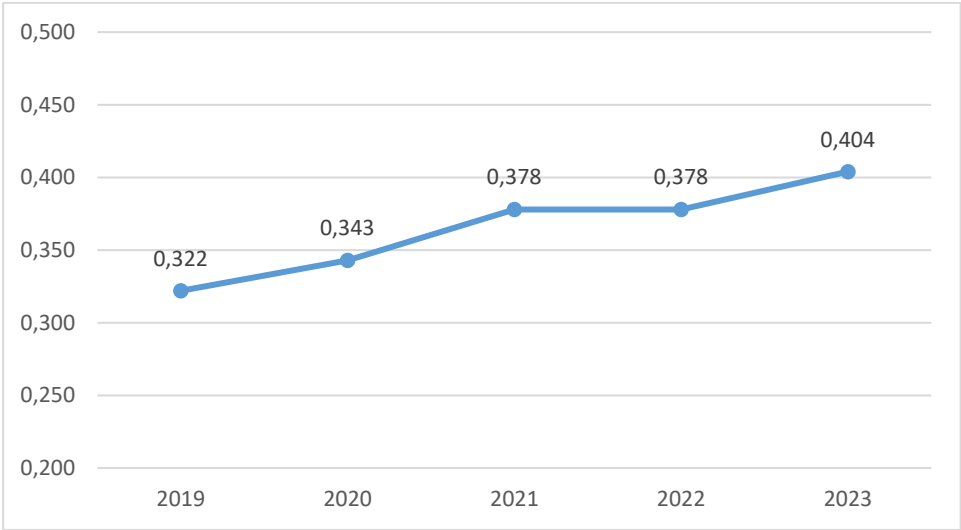
Gambar 3.8
Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2023
Sumber : BPS Kabupaten Tasikmalaya, 2024

3.1.1.3.5 Ketimpangan Ekonomi

Pembangunan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk dapat berlangsung dengan cepat, sehingga

tidak diimbangi dengan pemerataan. Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari seberapa besar ekonomi yang bertumbuh, tetapi juga seberapa besar pertumbuhan ekonomi tersebut dapat dinikmati oleh seluruh kelompok pendapatan penduduk secara merata. Salah satu indikator untuk mengukur ketimpangan pendapatan antar penduduk adalah indeks gini (*gini ratio*). Gini ratio di Indonesia diukur dengan menggunakan data pengeluaran sebagai proksi pendapatan yang bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Perubahan gini ratio sangat dipengaruhi oleh besarnya variasi perubahan pengeluaran antar kelompok penduduk. Apabila perubahan pengeluaran penduduk kelompok bawah lebih cepat dibandingkan dengan penduduk kelompok atas, maka ketimpangan pengeluaran akan membaik.

Kabupaten Tasikmalaya sampai dengan tahun 2032 masih berada pada kategori ketimpangan sedang karena dalam kurun 5 tahun terakhir selalu berada pada kisaran 0,3 - 0,4 sebagaimana digambarkan dalam Gini Ratio pada Gambar 3.9.



Gambar 3.9
Gini Ratio Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2023
Sumber : BPS Kabupaten Tasikmalaya, 2024

3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian
3.1.2.1 Tantangan dan Prospek Perekonomian Nasional

Pada Januari 2024, Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) memprediksi pertumbuhan ekonomi global tahun 2024 sebesar 2,7 persen, sementara untuk tahun 2025 sebesar

3 persen. Tantangan ekonomi global pada tahun 2024-2025 diprediksi akan melibatkan pengetatan kebijakan moneter sebagai respons terhadap inflasi yang tinggi, invasi Rusia ke Ukraina, dan dinamika geopolitik di Timur Tengah terkait konflik Israel-Palestina, serta dampak El Nino terkait perubahan iklim. Secara regional, pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan mengalami pelemahan terbesar di Amerika Utara, Eropa, Asia Tengah, dan Asia-Pasifik, terutama karena perlambatan pertumbuhan di China, menurut Bank Dunia. Meskipun sedikit perbaikan diharapkan di Amerika Latin dan Karibia dengan tingkat pertumbuhan yang rendah, peningkatan yang lebih signifikan diperkirakan terjadi di Timur Tengah dan Afrika.

Negara-negara berkembang diperkirakan akan menjadi yang paling terdampak dalam jangka menengah akibat lesunya perdagangan global dan kondisi keuangan yang ketat yang memberatkan pertumbuhan. Pertumbuhan ekonomi jangka pendek diproyeksikan tetap lemah, memberikan tekanan khususnya pada negara-negara berkembang, terutama yang terjebak dalam perangkap utang yang tinggi dan menghadapi keterbatasan akses terhadap pangan. Di sisi lain, potensi ledakan investasi dapat menjadi katalis untuk mengubah nasib negara-negara berkembang, membantu mempercepat transisi energi dan mencapai berbagai tujuan pembangunan.

Tantangan nasional bersumber dari dua aspek, yaitu inflasi, serta perdagangan dan investasi. Momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan akan bergantung pada faktor-faktor internal karena adanya estimasi perlambatan permintaan global di tahun 2024. Stabilitas inflasi domestik dan meredanya tekanan pasar keuangan di Indonesia membuka peluang untuk kebijakan moneter yang lebih longgar pada tahun 2024. Meskipun demikian, ketidakpastian terkait suku bunga global yang fluktuatif tetap menjadi faktor yang membuat Bank Indonesia berada dalam kewaspadaan. Diperkirakan Bank Indonesia akan menurunkan suku bunga sebesar 50-75 basis poin pada tahun 2024, bergantung pada kebijakan *dovish* yang diambil oleh *Federal Reserve* Amerika Serikat.

Tantangan juga bersumber dari sektor perdagangan dan investasi. Meskipun Indonesia berhasil mempertahankan surplus perdagangan, proyeksi harga komoditas yang tinggi, pertumbuhan permintaan domestik yang kuat, dan kinerja investasi yang tangguh dapat menyebabkan neraca transaksi berjalan tetap defisit sebesar 0,5 persen dari PDB pada tahun mendatang. Selain itu, konsumsi domestik menjadi faktor penting dalam dinamika ekonomi Indonesia. Evaluasi konsumsi domestik pasca kenaikan harga bahan bakar pada tahun 2022 menunjukkan pemulihan yang signifikan pada pertengahan tahun 2023. Stabilitas harga dan peningkatan impor barang konsumsi dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT) memfasilitasi pemulihan ini. Dengan mempertahankan stabilitas harga dan menanggulangi tantangan impor barang konsumsi, Indonesia dapat menjaga keberlanjutan pemulihan konsumsi domestik.

Terakhir, ketergantungan pada pasar ekspor untuk pertumbuhan ekonomi merupakan dinamika yang perlu diperhatikan. Meskipun Indonesia telah lama mengandalkan pasar ekspor sebagai pendorong pertumbuhan, penurunan harga komoditas telah memengaruhi *terms of trade*. Diversifikasi ekspor menjadi strategi yang semakin penting untuk mengurangi ketergantungan pada satu sektor. Perubahan paradigma ini akan memiliki dampak besar pada pertumbuhan ekonomi Indonesia, membuka jalan menuju keberlanjutan dan ketahanan ekonomi di masa depan.

3.1.2.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Jawa Barat

Tantangan ekonomi Jawa Barat bersumber dari belum meratanya investasi yang masuk ke Jawa Barat, karena masih terkonsentrasi di Jawa Barat bagian utara. Kemudian mayoritas kabupaten/kota di Jawa Barat terkategori memiliki kapasitas fiskal yang rendah, dimana porsi realisasi belanja yang bersifat produktif masih rendah, sehingga perlu kerangka kebijakan untuk mendorong produktivitas kabupaten/kota.

Tekanan inflasi di negara maju yang masih berlanjut, dan kebijakan moneter ketat diproyeksikan akan membebani aktivitas ekonomi di beberapa negara mitra dagang Jawa Barat, sehingga akan

menurunkan permintaan luar negeri atas produk industri manufaktur. Sebagai mana diketahui bahwa industri manufaktur adalah penyumbang terbesar PDRB Jawa Barat.

Perubahan iklim juga ikut andil dalam yang membuat sulitnya memprediksi cuaca ekstrem di beberapa wilayah Jawa Barat, sehingga menjadi penyebab utama inflasi pada komoditas pangan. Perubahan iklim juga menjadi tantangan bagi sektor pertanian sebagai salah satu penyumbang PDRB Jawa Barat dan penyerapan tenaga kerja.

Tantangan perekonomian Jawa Barat pada tahun 2025 meliputi:

1. Memelihara stabilitas kinerja perekonomian di tengah ketidakpastian perekonomian global;
2. Akselerasi produktivitas sektor kunci PDRB Jawa Barat melalui percepatan realisasi investasi;
3. Optimalisasi ekonomi digital dan industri yang berbasis *high tech*;
4. Penguatan konektivitas dan inklusivitas ekonomi Jawa Barat, diversifikasi ekonomi khususnya UMKM, IKM serta pariwisata;
5. Pencapaian kemandirian pangan berkelanjutan di tengah perubahan iklim; dan
6. Tenaga kerja yang terampil sesuai dengan perkembangan kebutuhan pasar tenaga kerja.

Memperhatikan kondisi saat ini serta tuntutan dan tantangan yang akan dihadapi ke depan maka proyeksi kinerja ekonomi tahun 2024 dan 2025. Nilai PDRB pada tahun 2024 ditargetkan untuk bertambah sekitar 14 persen dengan asumsi PDRB pada tahun 2023 mencapai 2.500 triliun rupiah, dan pada 2025 bertambah sekitar 4 persen dari tahun 2024. Proyeksi ini tidak terlepas dari kondisi industri pengolahan yang menyumbang lebih dari 40 persen dan perdagangan yang menyumbang lebih dari 14 persen terhadap PDRB Jawa Barat, masih tumbuh di atas 4 persen, dan peluang pertumbuhan lebih besar di masa depan seiring peningkatan teknologi, infrastruktur, dan tenaga kerja yang dapat mendorong produktivitas sektor tersebut.

Meskipun demikian, tantangan juga muncul dari sektor pertanian yang menyumbang sekitar 9 persen nilai PDRB Jawa Barat pada tahun 2023, dimana pertumbuhan sektor ini terlihat sangat

dipengaruhi oleh kondisi iklim dan cuaca. Pada kuartal III 2023, pertumbuhan sektor ini mencapai -1,90 persen, dimana pada kuartal ini adalah puncak fenomena el-nino yang telah menyebabkan kemarau berkepanjangan.

3.1.2.3 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah

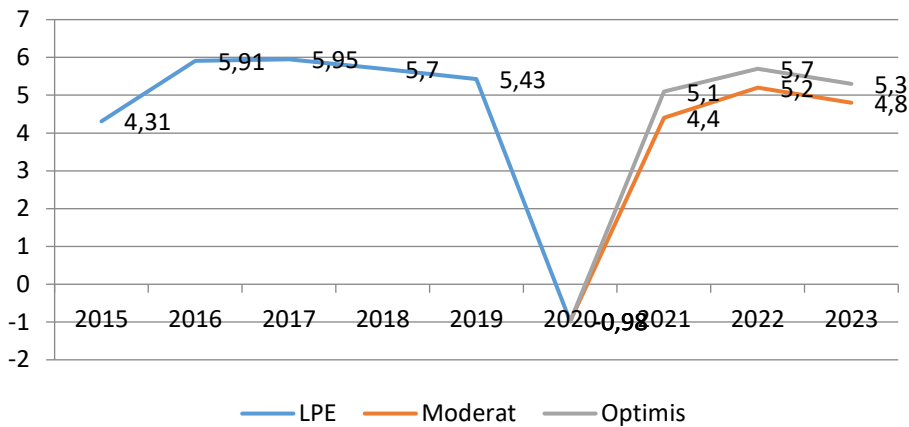
Tantangan pembangunan dalam menghadapi peradaban baru akibat pandemi Covid-19 menurut Bank Indonesia ada empat. **Pertama**, resiliensi, yaitu pentingnya upaya mempercepat pemulihan ekonomi dan mendorong perekonomian menjadi lebih kuat dan tangguh. **Kedua**, digitalisasi. Akselerasi ekonomi dan keuangan digital nasional, serta digitalisasi di berbagai bidang lainnya, adalah *gamechanger* untuk bangkit dari pandemi.

Ketiga, inklusi, yaitu akselerasi inklusi ekonomi dan keuangan, khususnya bagi UMKM dan sektor pertanian melalui klusterisasi, kewirausahaan, akses pembiayaan, dan digitalisasi. **Keempat**, ekonomi hijau (*green economy*).

Kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah Tahun 2024 menjelaskan prakiraan kondisi ekonomi makro pada tahun 2024 dan rancangan struktur keuangan pemerintah daerah dalam RKPD. Bappenas mensimulasikan asumsi ekonomi nasional yang diderivasi menjadi asumsi pertumbuhan ekonomi daerah pada tahun 2021 dan 2022.

Setelah terjadi kontraksi ekonomi pada tahun 2020 ditandai pertumbuhan ekonomi negative 0,98 persen, Kabupaten Tasikmalaya diasumsikan akan mengalami pertumbuhan ekonomi 4,4 sampai 5,1 persen pada tahun 2021.

Prospek Ekonomi Kabupaten Tasikmalaya disimulasikan dalam dua asumsi yaitu asumsi moderat dan asumsi optimis. Gambar 3.10 menggambarkan prospek ekonomi Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2022 dan 2023 dengan asumsi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021.



Gambar 3.10
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tasikmalaya 2015-2020 dan
Prospek Ekonomi Kabupaten Tasikmalaya 2022-2023

Sumber: Bappenas, 2024

Pada tahun 2022 PDRB Kabupaten Tasikmalaya ditargetkan tumbuh sebesar 5,2 sampai 5,7 persen dari tahun 2021. Dengan asumsi demikian maka belanja pemerintah daerah pada tahun 2022 diharapkan dapat memacu investasi, konsumsi masyarakat untuk tumbuh lebih baik. Begitupula insentif untuk menstimulasi ekspor komoditas pertanian dari Kabupaten Tasikmalaya diperlukan agar dapat meningkatkan PDRB. Oleh karena itu Kebijakan Keuangan Daerah sangat penting untuk mendukung arah perkembangan ekonomi yang ditargetkan.

Kebijakan di tahun 2023 diantaranya adalah dengan Peningkatan akses pasar UMKM melalui fasilitasi sertifikasi dan kurasi produk, serta mendorong interkoneksi dengan *local value chain* (LVC) maupun *global value chain* (GVC), termasuk penguatan fasilitasi promosi perdagangan. Selain itu, fasilitasi akses pembiayaan UMKM akan dilakukan untuk mendukung pemenuhan ketentuan pembiayaan inklusif, antara lain dengan mendorong pola pembiayaan UMKM melalui multiple channel untuk meningkatkan peran UMKM dalam ekspor dan substitusi impor serta fasilitasi temu bisnis (*business matching*).

Inklusi ekonomi dan keuangan termasuk UMKM dan transaksi ritel digital akan terus dipromosikan oleh pemerintah daerah. Hal ini dilakukan dengan bersinergi dengan Bank Indonesia. Dengan sinergi

ini diharapkan dapat (i) perluasan penggunaan, (ii) percepatan implementasi SNAP untuk koneksi layanan transaksi pembayaran oleh perbankan dengan fintech, (iii) peningkatan operasionalisasi dan perluasan kepesertaan dalam BI-FAST.

Selanjutnya Peran ekonomi dan keuangan syariah akan terus didorong sebagai sumber baru pertumbuhan ekonomi. Akselerasi implementasi ekosistem halal value chain, baik lokal maupun nasional, semakin diperluas baik dari aspek pelaku, kelembagaan, maupun infrastruktur pendukung. Dari sisi keuangan syariah, kebijakan pendalaman pasar uang syariah guna mendukung pembiayaan syariah ditempuh antara lain melalui pembentukan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah milik pemerintah daerah.

Dukungan peningkatan optimalisasi keuangan sosial syariah sebagai alternatif sumber pembiayaan sector unggulan ekonomi syariah tersebut terus didorong, terutama melalui wakaf produktif. Pembentukan Badan Wakaf Indonesia di Kabupaten Tasikmalaya diharapkan dapat memperkuat sinergi dengan berbagai pihak, baik di dalam wadah Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah (KNEKS) maupun dengan pondok pesantren, Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), asosiasi pengusaha, perbankan, para ulama, akademisi, dan masyarakat luas.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah adalah kebijakan yang akan ditempuh oleh pemerintah daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Kebijakan anggaran mendasarkan pendekatan kinerja dan berkomitmen untuk menerapkan transparansi dan akuntabilitas sehingga pemerintahan yang baik (*good governance*) dapat terwujud. Efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip pengelolaan keuangan yang dilakukan diantaranya dengan upaya optimalisasi anggaran untuk program prioritas sehingga dana yang terbatas dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kegiatan pembangunan yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pendapatan bersumber dari:

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
- 2) Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan) terdiri dari Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Insentif Daerah;
- 3) Transfer Pemerintah Provinsi yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak, dan Bantuan Keuangan;
- 4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi Pendapatan Hibah, dan Pendapatan Lainnya.

Untuk belanja daerah dialokasikan untuk:

- 1) Belanja Operasi yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial;
- 2) Belanja Modal (BM) yang terdiri dari BM Tanah, BM Peralatan dan Mesin, BM Gedung dan Bangunan, BM Jalan, BM Aset Tetap Lainnya, dan Belanja Aset Lainnya;
- 3) Belanja Tak Terduga.

Selanjutnya untuk penerima pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan dan Penerimaan kembali investasi pemerintah. Sedangkan pengeluaran pembiayaan terdiri dari Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah dan Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri.

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Penetapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) pada tanggal 5 Januari 2022 memberikan dampak yang signifikan kepada Pemerintah Daerah dalam pengelolaan keuangan termasuk didalamnya terkait kebijakan pendapatan daerah. Salah satu dari empat pilar utama dalam UU HKPD, yaitu pengembangan sistem pajak daerah guna mendukung alokasi sumber daya yang lebih efisien, mengarahkan Pemerintah Daerah untuk

segera melakukan harmonisasi kebijakan-kebijakan di daerah terutama dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah yang dapat mendorong penguatan sistem pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) diantaranya melalui restrukturisasi dan konsolidasi jenis PDRD, sumber pajak daerah baru, dan penyederhanaan jenis retribusi daerah. Untuk itu Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya bersama DPRD telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai dasar pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah oleh instansi pemungut pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Tasikmalaya. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah, peningkatan kapasitas daerah dalam pelayanan publik, serta terwujudnya kemandirian daerah yang bermuara pada kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Untuk itu perumusan kebijakan pendapatan daerah merupakan hal yang sangat penting sehingga apa yang direncanakan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan dan mendukung peningkatan pendapatan daerah termasuk dana perimbangan dalam rangka mendukung pembangunan daerah dengan optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber pendapatan dan aset-aset pemerintah daerah.

Perkembangan realisasi dan target Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya periode Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023, serta Proyeksi Tahun 2025 dan 2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.6
Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021–2026

No	Uraian	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	APBD Tahun 2024	Proyeksi Tahun 2025	Proyeksi Tahun 2026
1.	Pendapatan Asli Daerah	375.030.394.259,50	305.275.588.113,46	303.543.163.078,44	380.301.428.979,00	477.812.058.959,61	492.978.009.508,66
	a Pajak Daerah	75.360.502.247,00	94.355.650.449,00	98.217.317.174,00	107.710.575.000,00	177.892.353.807,00	185.786.971.497,35
	b Retribusi Daerah	5.150.543.572,00	5.563.282.922,00	5.815.257.303,00	237.767.764.373,00	261.936.615.546,61	269.794.714.013,01
	c Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	23.193.457.737,00	24.739.258.843,00	24.152.104.549,00	26.524.687.846,00	28.524.687.846,00	27.850.922.238,30
	d Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	271.325.890.703,50	180.617.395.899,46	175.358.484.052,44	8.298.401.760,00	9.458.401.760,00	9.545.401.760,00
2.	Pendapatan Transfer	2.676.601.440.691,00	2.829.876.900.161,00	2.892.478.911.300,00	3.059.759.174.494,00	3.127.117.094.167,00	3.125.320.579.725,30
	a. Transfer Pemerintah Pusat	2.468.959.174.520,00	2.551.215.838.278,00	2.559.217.498.010,00	2.850.317.361.294,00	2.975.409.220.780,00	2.972.605.132.617,55
	1) Dana Perimbangan	2.036.322.383.520,00	2.140.944.286.278,00	2.147.833.960.310,00	2.443.986.805.294,00	2.569.078.664.780,00	2.566.274.576.617,55
	a) Dana Transfer Umum	1.481.129.625.568,00	1.450.960.744.561,00	1.540.920.711.173,00	1.609.574.911.294,00	1.734.666.770.780,00	1.731.862.682.617,55
	(1) DBH	105.137.340.568,00	89.440.051.911,00	75.129.936.173,00	80.657.319.294,00	93.469.605.415,00	90.665.517.252,55
	(2) DAU	1.375.992.285.000,00	1.361.520.692.650,00	1.465.790.775.000,00	1.528.917.592.000,00	1.641.197.165.365,00	1.641.197.165.365,00
	b) Dana Transfer Khusus	555.192.757.952,00	689.983.541.717,00	606.913.249.137,00	834.411.894.000,00	834.411.894.000,00	834.411.894.000,00
	(1) DAK Fisik	122.403.568.111,00	124.462.742.555,00	135.153.932.017,00	210.035.030.000,00	210.035.030.000,00	210.035.030.000,00
	(2) DAK Non Fisik	432.789.189.841,00	565.520.799.162,00	471.759.317.120,00	624.376.864.000,00	624.376.864.000,00	624.376.864.000,00
	2) Dana Insentif Fiskal Daerah	29.749.130.000,00	-	11.645.735.000,00	8.790.487.000,00	8.790.487.000,00	8.790.487.000,00
	5) Dana Desa	402.887.661.000,00	410.271.552.000,00	399.737.802.700,00	397.540.069.000,00	397.540.069.000,00	397.540.069.000,00
	b. Transfer Antar Daerah	207.642.266.171,00	278.661.061.883,00	333.261.413.290,00	209.441.813.200,00	151.707.873.387,00	152.715.447.107,75

No	Uraian	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	APBD Tahun 2024	Proyeksi Tahun 2025	Proyeksi Tahun 2026
	1) Pendapatan Bagi Hasil	153.469.596.821,00	178.241.735.502,00	190.648.011.341,00	209.441.813.200,00	151.707.873.387,00	152.715.447.107,75
	2) Bantuan Keuangan	54.172.669.350,00	100.419.326.381,00	142.613.401.949,00	-	-	-
3.	Lain-lain Pendapatan Daerahyang Sah	189.937.724.968,00	15.350.305.144,00	9.367.230.145,00	6.019.500.000,00	8.329.294.158,00	8.329.294.158,00
	a. Hibah	4.486.194.500,00	15.091.990.992,00	9.367.230.145,00	6.019.500.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00
	Upland					8.029.294.158,00	8.029.294.158,00
	Total Pendapatan Daerah	3.241.569.559.918,50	3.150.502.793.418,46	3.205.389.304.523,44	3.446.080.103.473,00	3.613.258.447.284,61	3.626.627.883.391,96

Sumber: BPKPD Kabupaten Tasikmalaya, 2024

Memperhatikan kinerja pendapatan daerah sebagaimana tercantum pada tabel diatas, pada Tahun 2021-2023 menunjukkan bahwa realisasi pendapatan masih didominasi dari Pendapatan Transfer, akan tetapi secara bertahap Pajak Daerah terus mengalami peningkatan. Secara umum penetapan besaran target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah di Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, meliputi pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi yang mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah, yang selanjutnya ditetapkan dengan peraturan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel diatas, target Pendapatan Daerah tahun 2025 diasumsikan mengalami kenaikan sebesar 4,85% dibandingkan dengan target tahun 2024, kenaikan tersebut diasumsikan berasal dari peningkatan Pendapatan Asli Daerah sebesar 25,64% seiring dengan diberlakukannya kebijakan opsen pajak sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan kenaikan pada Pendapatan Transfer sebesar 2,20%. Kenaikan pada Pendapatan Transfer khususnya Dana Alokasi Umum (DAU) diproyeksikan sebesar 7,34% dari target 2024 dengan memperhatikan tren kenaikan dari tahun sebelumnya, serta mempertimbangkan kebijakan KEM PPKF Tahun Anggaran 2025 bahwa penentuan Pagu Indikatif Transfer Ke Daerah untuk Dana Alokasi Umum (DAU) diproyeksikan meningkat sebesar 6%-13% menjadi 454,7-481,5 triliun dengan fokus kebijakan melanjutkan kebijakan pengalokasian DAU sesuai dengan UU HKPD, diantaranya kebijakan hold harmless sampai dengan tahun 2027. Kebijakan mengikat terkait DAU SG terhadap penggunaannya, secara langsung mengurangi kewenangan Pemerintah Daerah dalam mengalokasikan DAU sesuai Belanja Prioritas Daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Hal tersebut diasumsikan terjadi setelah dilaksanakannya penyesuaian ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pendapatan Transfer meskipun secara alokasi meningkat khususnya Dana Alokasi Umum (DAU), tetapi menjadi terbatas karena adanya kebijakan yang mengatur penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) dari tidak ditentukan menjadi ditentukan, hal tersebut secara langsung mengurangi kewenangan Pemerintah Daerah dalam mengalokasikan DAU untuk Belanja Prioritas Daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Salah satu kebijakan terkait perpajakan daerah yang diatur dalam UU HKPD ini adalah adanya kebijakan opsen. Ada 2 jenis pajak daerah yang dikenai opsen yaitu Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Opsen memperluas sinergi pemungutan dan mempercepat penyaluran pajak yang sebelumnya dibagihasilkan. Opsen mulai diberlakukan mulai Tahun 2025, sehingga Tahun 2025 Pajak Daerah diasumsikan meningkat sebesar 65,16% dari target Tahun 2024.

Selain bertambahnya sumber pajak baru, implementasi UU HKPD mengamanatkan penyederhanaan jenis retribusi daerah yang mulai berlaku Tahun 2024. Terdapat 6 jenis Retribusi Daerah yang tidak dapat dipungut yaitu Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, Retribusi Terminal, Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi dan Retribusi Ijin Trayek. Terkait BLUD dalam arah kebijakan yang diatur dalam UU HKPD dijelaskan bahwa pendapatan yang diterima atas layanan BLUD yang selama ini ditetapkan sebagai bagian dari Lain-Lain PAD menjadi bagian dari penerimaan retribusi sesuai dengan layanan yang diberikan oleh BLUD, namun fleksibilitas pemanfaatan atas penerimaan pendapatan masih sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang BLUD, selain itu juga pemanfaatan asset daerah yang sebelumnya dicatatkan sebagai lain-lain PAD yang sah, menjadi bagian dari penerimaan retribusi.

Sehingga pada pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2024 terdapat penyesuaian terhadap belanja Pelayanan Kesehatan BLUD dan pemanfaatan asset yang semula pada kode rekening Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah berpindah ke Retribusi Daerah. Penyesuaian tersebut menyebabkan Retribusi Daerah meningkat dan Rekening Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah berkurang dibandingkan dengan

target dan realisasi Tahun 2023, selanjutnya berdasarkan tabel diatas pada Tahun 2025 Pendapatan Retribusi Daerah diasumsikan mengalami kenaikan sebesar 10,16% dari target 2024 yang berasal dari penyesuaian target Retribusi Daerah yang bersumber dari Retribusi Pelayanan Kesehatan pada BLUD (Rumah Sakit SMC dan Puskesmas). Selanjutnya Pendapatan Trasfer pada Tahun 2025 diasumsikan mengalami penurunan diantaranya dari sumber Dana Bagi Hasil pada Transfer Antar Daerah karena kebijakan Opsen telah berlaku serta dari pendapatan yang bersumber dana hibah pemerintah pusat yaitu Hibah Upland sehubungan dengan telah berakhirnya masa kerjasama pada Tahun 2024.

Arah Kebijakan Pendapatan Daerah dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah antara lain melalui optimalisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi, meningkatkan kontribusi penerimaan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD dan Optimalisasi penerimaan yang berasal dari bagi hasil pajak melalui kerjasama instansi vertikal dan daerah dalam menyerap basis pajak terkait.

Beberapa startegi yang akan dilakukan pada tahun 2025 untuk mewujudkan kebijakan tersebut antara lain:

1. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan wajib retribusi dan memperkuat basis pajak dan retribusi daerah yang ada;
2. Memperluas basis pajak daerah dan retribusi daerah melalui pendataan obyek dan wajib pajak yang belum terdata dan pendataan ulang terhadap obyek pajak dan wajib pajak yang mengalami perubahan;
3. Melakukan Penilaian Zona Nilai Tanah (ZNT) bertujuan untuk membentuk data nilai tanah yang lengkap dan detail secara digital dalam upaya meningkatkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
4. Optimalisasi kerjasama dengan berbagai pihak (instansi vertikal, BUMD, OPD terkait atau badan/perorangan) dalam pertukaran data, pengelolaan maupun pengawasan pajak daerah dan retribusi daerah.
5. Optimalisasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD)/Digitalisasi pajak dan retribusi daerah; serta
6. Peningkatan SDM Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Dari sisi Belanja Daerah, terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional sebagai pelaksanaan UU HKPD mendorong Pemerintah Daerah untuk menyelaraskan kebijakan fiskal Pusat dan Daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya dalam mengalokasikan Belanja Daerah selalu konsisten dalam mendukung Prioritas Pembangunan Nasional dan Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi guna menjaga kesinambungan pembangunan secara Nasional dan keterpaduan Kebijakan, Program dan Kegiatan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pengintegrasian Prioritas Nasional/Program Prioritas/Kegiatan Prioritas yang dilaksanakan berbasis kewilayahan. Dokumen kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2025 menjadi salah satu pedoman Pemerintah Daerah untuk menyusun Kebijakan Belanja Daerah pada Tahun 2025.

Selanjutnya Kebijakan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya yaitu melaksanakan prioritas pembangunan daerah yang fokus terhadap pencapaian target pelayanan publik dengan menganggarkan program, kegiatan dan subkegiatan yang menjadi kewenangan daerah untuk pencapaian sasaran pembangunan berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib dan belanja *mandatory spending* serta pemenuhan target Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Arah Kebijakan Belanja Daerah Tahun 2025 secara umum dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah melalui efektifitas dan efisiensi belanja untuk mencapai target program dan kegiatan, dengan tetap memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas layanan Pendidikan dengan mengalokasikan anggaran untuk fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah, yang diprioritaskan untuk peningkatan kualitas dan akses bidang pendidikan melalui pencapaian indikator SPM bidang pendidikan di Kabupaten Tasikmalaya;

2. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dilaksanakan diantaranya dengan persiapan proses tahapan pembangunan dan memperbaiki fasilitas dan pelayanan dasar kesehatan dan rujukan kesehatan serta penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang baik;
3. Pengalokasian belanja transfer kepada desa yang merupakan hak pemerintahan desa dipenuhi sesuai ketentuan perundangan, sebagai bagian dari upaya pemerataan ekonomi dan didorong lebih berkualitas dan sinergi dengan tujuan pembangunan Kabupaten Tasikmalaya;
4. Pemenuhan biaya belanja wajib dan mengikat untuk penunjang penyelenggaraan pemerintahan yang dianggarkan secara efektif dan efisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
5. Mengalokasikan anggaran infrastruktur untuk mendorong peningkatan perekonomian daerah dan tuntutan masyarakat serta persiapan pembangunan infrastruktur seperti penyusunan dokumen perencanaan sebagai upaya pembiayaan pembangunan infrastruktur dengan anggaran besar dapat bersumber dari anggaran pemerintah pusat dan provinsi ataupun dengan skema lain, termasuk implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2021 Tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan.
6. Pengalokasian anggaran pengembangan sarana dan prasarana untuk mendukung peningkatan investasi melalui kemudahan dan perbaikan pelayanan pengembangan aktivitas ekonomi serta fasilitasi pemberian modal usaha bagi koperasi dan UKM;
7. Pemenuhan anggaran untuk alokasi yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya seperti untuk peningkatan kapasitas SDM Aparatur dan peningkatan kapasitas APIP;
8. Pengalokasian belanja kepada organisasi/lembaga/instansi yang bersinergi membangun dan berkontribusi besar serta mendukung pencapaian tujuan pemerintahan dan pembangunan; dan
9. Pengalokasian belanja daerah dengan skala prioritas yang langsung menyentuh kepentingan dan kebutuhan masyarakat dengan mengoptimalkan belanja untuk kepentingan publik, melaksanakan

proper budgeting melalui analisis cost benefit dan tingkat efektifitas setiap program dan kegiatan serta melaksanakan *prudent spending*.

10. Belanja kebijakan earmarking atas penggunaan beberapa jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas pungutan dan linked benefit, salah satu jenis PDRD yang diarahkan penggunaannya PKB dan Opsen PKB yaitu minimal 10 persen penerimaannya untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan modal dan sarana transportasi umum dan alokasi dana Opsen PKB dan BBNKB dalam APBD Kabupaten/kota sebesar 2 persen untuk operasional layanan kesamsatan (*Cost Sharing*). Bentuk pelaksanaan kegiatannya antara lain optimalisasi intervensi penagihan terhadap kendaraan yang tidak melakukan daftar ulang (KTMDU).

Gambaran realisasi, target dan proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Periode tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.7.
Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 - 2026

No	Uraian	Jumlah (Dalam Ribuan Rupiah)					
		Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	APBD Tahun 2024	Proyeksi Tahun 2025	Proyeksi Tahun 2026
1.	Belanja Operasi	2.153.448.062.426,00	2.184.268.734.960,00	2.123.705.276.858,00	2.641.312.352.773,00	2.510.599.565.991,64	2.472.012.271.057,34
	a. Belanja Pegawai	1.351.143.258.118,00	1.306.693.637.113,00	1.283.757.183.417,00	1.456.640.637.568,00	1.526.053.165.236,85	1.487.465.870.302,55
	b. Belanja Barang dan Jasa	721.361.637.808,00	749.733.799.805,00	735.134.227.311,00	770.912.736.062,00	813.336.162.154,79	813.336.162.154,79
	c. Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-
	d. Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-
	e. Belanja Hibah	80.943.166.500,00	122.782.898.042,00	101.829.366.130,00	409.858.979.143,00	167.310.238.600,00	167.310.238.600,00
	f. Belanja Bantuan Sosial	-	5.058.400.000,00	2.984.500.000,00	3.900.000.000,00	3.900.000.000,00	3.900.000.000,00
2.	Belanja Modal	239.410.778.173,00	306.853.259.829,00	329.037.821.963,00	307.139.989.963,00	506.855.472.961,32	506.855.472.961,32
3.	Belanja Tidak Terduga	30.599.444.557,00	15.926.092.876,00	30.279.044.577,00	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00
4.	Belanja Transfer	740.060.465.000,00	664.301.485.000,00	661.560.573.700,00	664.155.448.126,00	668.828.408.332,04	674.585.139.373,30
	a. Belanja Bagi Hasil	8.074.504.000,00	8.847.620.000,00	9.413.659.000,00	14.133.579.126,00	18.421.539.332,04	24.178.270.373,30
	b. Belanja Bantuan Keuangan	731.985.961.000,00	655.453.865.000,00	652.146.914.700,00	650.021.869.000,00	650.406.869.000,00	650.406.869.000,00
Jumlah Belanja Daerah		3.163.518.750.156,00	3.171.349.572.665,00	3.144.582.717.098,00	3.642.607.790.862,00	3.716.283.447.285,00	3.683.452.883.391,96

Sumber: BPKPD Kabupaten Tasikmalaya, 2024

Pada tabel diatas, Belanja Daerah pada tahun 2025 berdasarkan hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah dan realisasi serta proyeksi pendapatan daerah selama 3 (tiga) tahun serta perkembangan terakhir, dan melihat target pendapatan daerah Tahun Anggaran 2025, maka Belanja Daerah pada Tahun Anggaran 2025 diasumsikan mengalami kenaikan sebesar 1,98%. Untuk belanja operasi diasumsikan mengalami penurunan sebesar 5,21% yang salah satunya disebabkan penurunan Belanja Hibah yang merupakan pengurangan dari Belanja Hibah Pilkada yang dilaksanakan pada 2024 serta berpindahnya koding belanj BOS ke Belanja Barang dan Jasa. Disisi lain pada Belanja Pegawai terdapat peningkatan sebesar 5,86% dibanding tahun 2024 diantaranya untuk memenuhi kebutuhan Tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Pada Belanja Modal diasumsikan mengalami kenaikan sebesar 39,40%, yang merupakan upaya dalam memenuhi *mandatory spending* belanja infrastruktur pelayanan publik secara bertahap, agar dapat memenuhi ketentuan minimal sebesar 40% sesuai aturan perundang-undangan yang harus dipenuhi paling lambat pada tahun 2027.

Selanjutnya Belanja Tidak Terduga (BTT) diasumsikan sama dengan tahun sebelumnya, sementara Belanja Transfer mengalami kenaikan sebesar 0,70% yang merupakan penyesuaian dari peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sumber pajak dan retribusi, sehingga Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi kepada Desa mengalami kenaikan.

3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019 Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Kebijakan anggaran untuk pembiayaan daerah dibagi atas dua bagian yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Rincian pembiayaan daerah ditunjukkan dalam tabel 3.8 berikut:

Tabel 3.8
Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 – 2026

No	Uraian	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Proyeksi Tahun 2024	Proyeksi Tahun 2025	Proyeksi Tahun 2026
1.	Penerimaan Pembiayaan	117.876.412.772,96	195.927.222.535,46	144.580.444.143,92	197.702.687.389,00	106.200.000.000,00	60.000.000.000,00
	a. SiLPA	117.876.412.772,96	195.927.222.535,46	144.580.444.143,92	137.702.687.389,00	106.200.000.000,00	60.000.000.000,00
	b. Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	60.000.000.000,00	-	-
2.	Pengeluaran Pembiayaan	-	30.499.999.145,00	56.000.000.000,00	1.175.000.000,00	3.175.000.000,00	3.175.000.000,00
	b. Penyertaan Modal Daerah	-	20.499.999.145,00	6.000.000.000,00	1.175.000.000,00	3.175.000.000,00	3.175.000.000,00
	c. Pembentukan Dana Cadangan	-	10.000.000.000,00	50.000.000.000,00			
		117.876.412.772,96	165.427.223.390,46	88.580.444.143,92	196.527.687.389,00	103.025.000.000,00	56.825.000.000,00

Sumber: BPKPD Kabupaten Tasikmalaya, 2024

Pembiayaan Daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah dalam menganggarkan SiLPA telah didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2024 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2025 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan sesuai peraturan perundang-undangan. Pada Tabel diatas untuk Tahun 2025 Penerimaan Pembiayaan diasumsikan hanya bersumber dari SiLPA Tahun 2024.

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

BAB 4

TEMA RKPD TAHUN 2025

“Pertumbuhan Ekonomi Melalui Peningkatan Daya Saing dan Inovasi Daerah”

9 PRIORITAS PEMBANGUNAN



01 Peningkatan Pelayanan Pendidikan



06 Peningkatan Infrastruktur dan Daya Saing Produk Pertanian dan Perikanan untuk Menunjang Ketahanan Pangan



02 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Daerah serta Penurunan Angka Prevalensi Stunting



07 Peningkatan Ekonomi Masyarakat melalui Pengembangan Sektor Unggulan Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro



03 Pembangunan Infrastruktur untuk Peningkatan Konektivitas Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi



08 Inovasi Pelayanan Publik



04 Mitigasi dan Penanggulangan Bencana



09 Peningkatan Kemandirian Desa



05 Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem

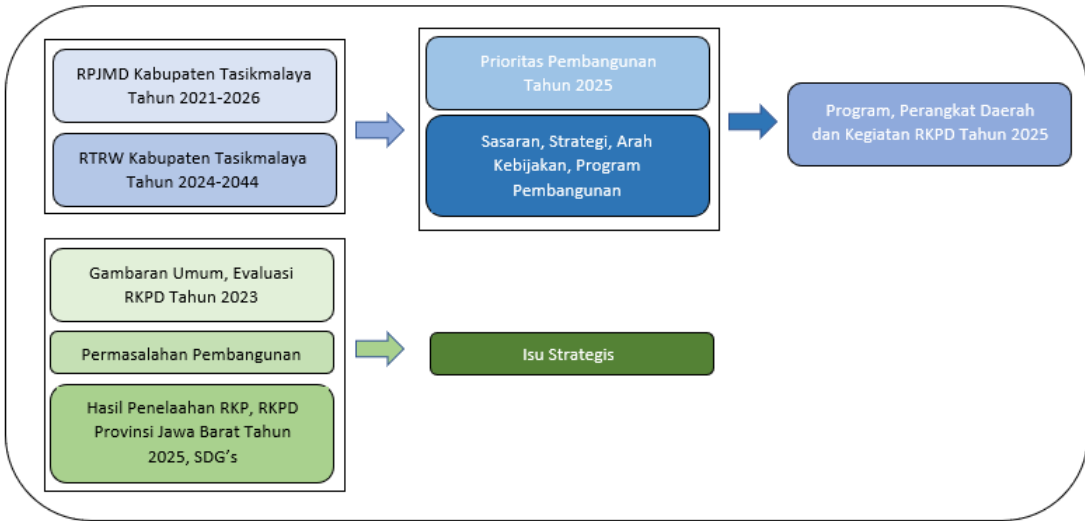
BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Sasaran dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 yang dirumuskan dalam rangka mencapai target janji Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya dan visi misi Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026. Prioritas pembangunan disusun memperhatikan hasil evaluasi kinerja Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023, capaian target pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026, proyeksi kerangka ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah, serta kondisi lingkungan strategis internal-eksternal, sebagaimana dibahas dalam bab sebelumnya.

Substansi prioritas pembangunan daerah dalam RKPD Tahun 2025 mendasarkan dan memperhatikan pada: (1) RTRW Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024-2044; (2) Tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026; (3) Hasil evaluasi kinerja RKPD Tahun 2023, RKPD Tahun 2024 Triwulan I; (4) Prioritas Nasional dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025; (5) Prioritas dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2025; (6) Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah beserta kerangka pendanaan pembangunan tahun 2025; dan (7) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs). Kerangka pikir perumusan sasaran dan prioritas

pembangunan daerah tahun 2025 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 4.1
Kerangka Pikir Perumusan Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025

Sumber: Hasil analisis Bappelitbangda Kab. Tasikmalaya, 2024

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025

4.1.1 Telaahan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025

Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. Pada 5 (lima) tahun pertama yaitu Tahun 2025-2029 menjadi tahapan yang penting dalam RPJPN Tahun 2025-2045 untuk meletakkan dasar-dasar transformasi menjadi basis tingkat pertumbuhan pada tahapan berikutnya serta menjadi pemicu untuk *engine of growth* yang baru yaitu: industri biru, industri kreatif, bioteknologi, hilirisasi sampai dengan produk akhir, dan industri hijau.

Sasaran visi pembangunan jangka menengah Tahun 2025-2029 adalah mewujudkan Indonesia sebagai negara nusantara berdaulat, maju, dan berkelanjutan yang tercermin dalam 5 (lima) sasaran visi yaitu pendapatan per kapita setara negara maju; kemiskinan menuju 0 (nol) persen dan ketimpangan berkurang; kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat; daya saing sumber daya manusia meningkat; serta intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

menurun menuju Net Zero Emission. Kelima sasaran visi ini memiliki target sebagai berikut.



Gambar 4.2

Target Sasaran Visi Indonesia Emas Menuju 2045

Sumber: Konsep Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2025-2029, 2024

Rencana pembangunan nasional tahun 2025-2029 dilaksanakan melalui 5 (lima) penguatan fondasi transformasi, sebagai berikut: **Transformasi Sosial** Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial; **Transformasi Ekonomi** Hilirisasi SDA serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja; **Transformasi Tata Kelola** Kelembagaan tepat fungsi dan kolaboratif, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, peningkatan integritas partai politik, dan pemberdayaan masyarakat sipil; **Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia** Memperkuat supremasi hukum dan stabilitas serta membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan dan ketangguhan diplomasi, dan **Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi** Memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan. Kelima fondasi transformasi tersebut diwujudkan melalui upaya transformatif super prioritas (*game changers*) sebagai berikut.



Gambar 4.3

Upaya Transformatif Super Prioritas (*Game Changers*)

Sumber: Konsep Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2025-2029, 2024

Arah pembangunan untuk wilayah pulau Jawa difokuskan pada tema pembangunan “Megalopolis Yang Unggul, Inovatif, Inklusif, Terintegrasi, Dan Berkelanjutan”. Tema pembangunan Provinsi Jawa Barat dikhususkan menjadi **“Pusat *Cutting-edge* industri, inovasi dan pendidikan STEAM bertaraf global, serta penumpu ketahanan pangan nasional”**. Tema tersebut memberikan makna bahwa fokus intervensi kewilayahan dan sarana prasarana di pulau Jawa pada tahun 2025 adalah:

1. Peningkatan produktivitas padi, hortikultura, peternakan, dan tanaman pangan lainnya guna mendukung ketahanan pangan daerah dan nasional, terutama di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur;
2. Pengembangan industrialisasi perikanan modern, terutama di DKI Jakarta dan Jawa Timur;
3. Penurunan logistic cost guna meningkatkan comparative advantage investasi di Jawa, antara lain melalui: lanjutan pembangunan Jalan Tol Trans Jawa, lanjutan pembangunan

- Pelabuhan Patimban, serta optimalisasi dan peningkatan layanan pelabuhan hub utama Jawa (Tanjungpriok dan Tanjungperak);
4. Pengelolaan urban governance pada WM Jakarta, WM Bandung, WM Semarang, dan WM Surabaya, termasuk pengembangan infrastruktur persampahan dan sanitasi, perumahan dan permukiman perkotaan), guna mewujudkan kawasan perkotaan sebagai pusat aglomerasi ekonomi yang efisien dan unggul;
 5. Pengembangan perguruan tinggi riset STEAM bertaraf internasional, guna mewujudkan Jawa sebagai salah satu global brain hub;
 6. Peningkatan ketahanan bencana melalui pendekatan hybrid (green, gray, dan social infrastructure terutama pada kawasan perkotaan di pesisir utara Jawa yang didera multiancamn bencana: abrasi, rob, penurunan tanah, banjir).

Dalam rangka menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2025, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut.



Gambar 4.4
Prioritas Nasional Tahun 2025
Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2024

RKP Tahun 2025 menjadi fondasi strategis untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Hal ini menjadi penting karena Indonesia hingga saat ini masih mengalami tantangan multi dimensi yang

membutuhkan penanganan secara holistik dengan melibatkan kolaborasi lintas sektor untuk menanganinya. Tantangan multi dimensi ini meliputi sektor kesehatan, perlindungan sosial, pendidikan, keluarga dan gender, Energi, IKN, Digital, IPTEK dan inovasi, serta Agama dan Kebudayaan sebagaimana ditunjukkan oleh gambar berikut.



Gambar 4.5
Tantangan Multi Dimensi RKP 2025
Sumber: Kementerian Bappenas, 2024

Berdasarkan dari permasalahan dan tantangan tersebut, tema RKP 2025 adalah **“Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**. Tema pembangunan difokuskan pada 3 (tiga) hal, yaitu: SDM Berkualitas, Infrastruktur Berkualitas, serta Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan.

Sumber Daya Manusia (SDM) Berkualitas mewujudkan SDM berdaya saing dan produktif dengan memfokuskan melalui transformasi sosial, yaitu Penetapan Wajib Belajar 13 Tahun; Restrukturisasi Tenaga Guru dan Kesehatan; Penetapan Pelayanan Primer dan Penuntasan Stunting; Penetapan Penggunaan Regsosek dan Pemanfaatannya untuk Perlindungan Sosial Adaptif; Peningkatan Partisipasi Pendidikan Tinggi dan Lulusan STEAM Berkualitas; Pendidikan dan Pelatihan Vokasi yang Berbasis Kebutuhan dan Dual-System. Selain memfokuskan pada transformasi sosial, SDM berdaya saing dan produktif memfokuskan pula pada Ketahanan Sosial Budaya

dan Ekologi melalui Penetapan Kebijakan Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa (sebagai contoh: budi pekerti).

Infrastruktur Berkualitas mewujudkan Infrastruktur untuk Peningkatan Produktivitas melalui transformasi ekonomi, yaitu: Penetapan hub laut dan hub udara untuk integrasi infrastruktur konektivitas dengan kawasan pertumbuhan ekonomi; Penguatan infrastruktur digital; Pengembangan infrastruktur transisi energi; Percepatan infrastruktur IKN. Selain itu, melalui ketahanan sosial budaya dan ekologi, yaitu penetapan reformasi pengelolaan sampah dari hulu ke hilir.

Ekonomi inklusif dan berkelanjutan mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan, dan penciptaan produk ramah lingkungan melalui ekonomi inklusif dan berkelanjutan, yaitu Penguatan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN); Pengembangan skema graduasi bansos; Peningkatan lingkungan inklusif terhadap anak, lansia, penyandang disabilitas, perempuan, dan penduduk rentan lainnya; Peningkatan keterampilan bekerja dan berwirausaha sepanjang hayat; Peningkatan partisipasi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya sebagai angkatan kerja; Percepatan investasi dan ekspor non migas produk olahan; Peningkatan produksi industri pengolahan; Dukungan regulasi penciptaan iklim investasi yang kondusif; Penyediaan infrastruktur untuk mendukung transisi energi.

4.1.2 Telaahan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2025

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 diarahkan untuk mewujudkan visi RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025, yaitu **“Dengan Iman dan Takwa, Provinsi Jawa Barat Termaju di Indonesia”**. Selain itu juga sebagai awal atau fondasi dari RPJPD Tahun 2025-2045 dengan Visi Termaju, Berdaya Saing Dunia dan Berkelanjutan, dengan semangat tersebut maka diharapkan keberlanjutan visi tersebut dapat terwujud. Adapun tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 yang

sekaligus menjadi tujuan dan sasaran pembangunan Jawa Barat pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. **Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing** diarahkan untuk menjawab isu strategis kualitas dan daya saing sumber daya manusia. Tujuan tersebut memiliki 5 (lima) sasaran, meliputi: (1) Meningkatnya akses Pendidikan Masyarakat; (2) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat; (3) Meningkatnya taraf hidup masyarakat; (4) Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pembangunan pemuda, dan (5) Terkendalinya pertumbuhan dan distribusi penduduk;
2. **Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan** merupakan respon atas isu strategis daerah pembangunan ekonomi berkualitas dan berkelanjutan. Tujuan kedua dilaksanakan dengan 4 (empat) sasaran, yaitu: (1) Meningkatnya pertumbuhan sektor perindustrian dan perdagangan; (2) Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, kelautan perikanan, dan ketahanan pangan; (3) Meningkatnya sektor penyediaan akomodasi makan dan minum. (4) Meningkatnya nilai investasi dan kualitas usaha yang disertai dengan meningkatnya daya saing dan penempatan tenaga kerja.
3. **Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Wilayah yang didukung Infrastruktur Berkualitas dan Lingkungan yang Berkelanjutan** memiliki keterhubungan dengan isu strategis daerah pemerataan pembangunan wilayah yang didukung infrastruktur berkualitas dan lingkungan yang berkelanjutan. Tujuan ketiga memiliki 6 (enam) sasaran strategis, yaitu (1) Meningkatnya konektivitas antarwilayah dan pelayanan infrastruktur guna mendukung perekonomian dan meminimalkan kantong kemiskinan; dan (2) Meningkatnya kualitas infrastuktur, (3) Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman, (4) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, (5) Meningkatnya pembangunan rendah karbon dan menurunnya risiko bencana, serta (6) meningkatnya pemerataan pembangunan di wilayah perdesaan.

4. **Tercapainya demokrasi dan birokrasi yang berkualitas dan didukung oleh inovasi daerah** memiliki keterkaitan dengan isu strategis reformasi birokrasi dan inovasi daerah. Tujuan ini diturunkan kedalam 3 (tiga) sasaran strategis, yaitu: (1) Meningkatnya kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi, (2) Meningkatnya kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan daerah; dan (3) Meningkatnya penerapan inovasi daerah dalam pembangunan.

4.1.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025

RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 merupakan tahun kelima dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026. Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 yaitu:

**“DENGAN SEMANGAT GOTONG ROYONG, MEWUJUDKAN
KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI, BERDAYA
SAING, DAN SEJAHTERA”**

Pernyataan visi pembangunan daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 dimaknai sebagai berikut:

Gotong Royong

Semangat gotong royong merupakan karakter dan kepribadian masyarakat Indonesia. Kata gotong-royong merupakan istilah Indonesia untuk bekerja bersama-sama (kebersamaan), kesatuan, kerukunan dan kekeluargaan untuk mencapai suatu hasil yang didambakan. Istilah dalam bahasa sunda gotong-royong yaitu Sabilulungan yang artinya "saling tolong", kita mengenal istilah atau pribahasa dalam bahasa sunda “Ka cai jadi saleuwi, ka darat jadi salebak” yang mempunyai makna selalu kompak dalam satu visi bersama-sama untuk mencapai satu tujuan/gotong-royong.

Tolong menolong dalam islam lebih dikenal sebagai istilah ta’awun, Allah menciptakan makhluk hidup dalam keadaan bersuku-suku, berkelompok-kelompok, berlatar belakang beda satu sama lain dan

memiliki ciri khas yang berbeda dengan yang lainnya. Maka dengan demikian, makhluk hidup khususnya manusia bukan makhluk hidup yang mampu hidup sendiri dan apatis. Tolong menolong (Ta'awun) dalam al-Qur'an disebut beberapa kali, diantaranya yaitu Al-Maidah:2, Al-Anfal:27, Al-Anfal:73, Al-Kahfi:19, Al-Imron:110 dan juga beberapa ayat lainnya.

Kebersamaan yang merupakan sikap kerendahan hati, melayani, dan kesamaan pikiran antar manusia. Masyarakat saling menghargai sehingga menumbuhkan suasana nyaman dan aman. Sehingga aspek gotong royong dalam visi RPJMD Kabupaten Tasikmalaya merupakan langkah yang diambil untuk memupuk rasa kekeluargaan dan toleransi terhadap perbedaan di unsur masyarakat dan pemerintah sehingga bisa saling hidup berdampingan dengan untuk mencapai tujuan bersama.

Religius/Islami

Religius Islami berasal dari dua kata "Religius" dan "Islami". Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), religius adalah bersifat religi; bersifat keagamaan; yang bersangkutan-paut dengan religi. Religi merupakan kata serapan dari kata religion (bahasa Inggris) yang berasal dari bahasa latin religio yang berarti obligation/bond (kewajiban), reverence (menghormati, memuja, mentakzimkan), dan berakar dari kata religare yang artinya to bind (mengikat). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), religi dipadankan dengan agama yang berarti ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Berdasarkan pengertian tersebut di atas, religius bisa diartikan sebagai sikap hidup yang berlandaskan pada nilai-nilai agama sebagai manifestasi dari keterikatan, kewajiban, dan pemujaan terhadap Tuhan yang Maha Esa.

Islami dalam KBBI adalah bersifat ke-Islam-an. Secara etimologis (asal-usul kata, lughawi) kata "Islam" berasal dari kata aslama yang berakar dari kata salama. Ditinjau dari segi bahasanya yang dikaitkan

dengan asal katanya, Islam memiliki beberapa pengertian, diantaranya adalah : 1) ‘Salm’ (السَّلم) yang berarti damai; 2) Berasal dari kata ‘aslama’ (أَسْلَمَ) yang berarti menyerahkan diri, tunduk, patuh dan taat terhadap “Sang Khaliq”; 3) Saliim’ (سَلِيمٌ) yang berarti bersih dan suci; 4) Salam’ (سَلَامٌ) yang berarti selamat dan sejahtera. Islam merupakan agama yang kehadirannya ditengah kehidupan masyarakat mampu mewujudkan kedamaian dan kasih sayang bagi manusia maupun semesta (Rahmatan lil ‘alamin).

Jika diintegrasikan dalam satu frasa, Religius/Islami merupakan aktualisasi sikap dan praktik hidup yang berlandaskan pada nilai-nilai keislaman seperti keadilan, kesetaraan (equality), toleransi, kejujuran, kepedulian terhadap alam serta perlindungan terhadap kaum miskin dan rentan. Aspek Religius/Islami dalam visi RPJMD Kabupaten Tasikmalaya merupakan manifestasi universalitas keislaman sebagai ruh dalam cara berpikir, bersikap dan bertindak aparat pemerintah, penyelenggaraan pembangunan daerah dan tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di berbagai bidang. Manifestasi religius-Islami akan diwujudkan dalam kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan (al-hukma), peradaban dalam hubungan antar warga (al-nubuwwah), kemakmuran dan keunggulan dalam bidang pertanian berbasis perdesaan, serta kebijakan yang melindungi dan memberi rasa aman bagi seluruh warga.

Berdaya Saing

Berdaya saing bermakna kemampuan atau kesanggupan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ditandai dengan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat, efektivitas pemerintahan, dan kualitas infrastruktur daerah.

Berdaya saing turut menentukan mampu bertahan atau tidaknya dalam berbagai bidang. Kegiatan yang dilakukan atas dasar nilai efisiensi dan efektivitas sehingga menciptakan kegiatan dengan produktivitas yang tinggi sehingga produk yang dihasilkan dapat

bersaing di tingkat lokal, regional dan nasional bahkan internasional. Seperti kondisi masyarakat Tasikmalaya yang memiliki keunggulan kompetitif dan modal sosial yang baik dalam proses pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Sejahtera

Sejahtera merupakan proses kehidupan masyarakat yang aman, tentram, damai, adil dan makmur. Dalam istilah umum, sejahtera menunjuk ke keadaan yang baik, kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai. Dalam islam kita mengenal dengan istilah baldatun Thoyibatun warobbun Ghofur didefinisikan sebagai negara yang baik dan mendapat ampunan Allah SWT, dalam proses transformasi sosial, baldatun Thoyibatun warobbun Ghofur adalah sebagai sebagai tujuan akhir, lahirnya suatu masyarakat yang penuh dengan kedamaian, kemakmuran dan keadilan, masyarakat yang sempurna spiritual ataupun material.

Dalam ekonomi, sejahtera dihubungkan dengan keuntungan benda. Sejahtera memiliki arti khusus resmi atau teknikal (lihat ekonomi kesejahteraan), seperti dalam istilah fungsi kesejahteraan sosial. Dalam kebijakan sosial, kesejahteraan sosial menunjuk ke jangkauan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Visi pembangunan daerah RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 sebagaimana dijelaskan di atas, dijabarkan ke dalam 4 (empat) misi yaitu:

- 1. Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing, berkepribadian dan berakhlakul karimah.**

Menciptakan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya yang agamis, berkarakter/berahlaq mulia, sehat, cerdas, berbudaya ilmu pengetahuan dan teknologi dan memiliki spirit untuk maju dan berkompetisi.

- 2. Mewujudkan pemerintahan yang melayani, bersih, dan professional.**

Penyelenggaraan pemerintahan yang dilandasi spirit *shiddiq, tablig, amanah* dan *fathonah* guna menciptakan sosok Kabupaten Tasikmalaya yang bermutu, akuntabel, dan terpercaya dalam melayani masyarakat yang ditandai dengan profesionalisme aparatur, efektivitas, menguatnya partisipasi dan kepuasan publik.

3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan pariwisata.

Menciptakan Kabupaten Tasikmalaya yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan merata berbasis ekonomi pertanian dan keunggulan pariwisata yang terintegrasi dan mampu menarik wisatawan.

4. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dalam upaya mendorong pengembangan wilayah, dunia usaha dan penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan kerjasama skala Lokal, Nasional, Regional, dan Global.

Menciptakan Daerah Kabupaten Tasikmalaya memiliki kemampuan untuk menarik investasi daerah, menyerap tenaga kerja melalui pengembangan kerjasama skala Lokal, Nasional, Regional, dan Global sehingga menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Keempat misi RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 tersebut didukung dengan 4 (empat) tujuan dengan 4 (empat) indikator tujuan dan 8 (delapan) sasaran dengan 14 (empat belas) indikator sasaran, sebagaimana tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja Tahun 2023	Target Kinerja	
						Tahun 2024	Tahun 2025
Misi 1 : Meningkatkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing, Berkepribadian Dan Berakhlakul Karimah.							
T.1 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Kabupaten Tasikmalaya		I.T.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	68,45	69,38	69,80	70,27
	S.1. Meningkatkan derajat pendidikan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya	I.S.1 Indeks Pendidikan	Poin	60,74	61,62	62,13	62,73
	S.2 Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	I.S.2 Indeks Kesehatan	Poin	76,85	82,88	83	83,58
	S.3 Meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial, Rehabilitasi Sosial dan Pemberdayaan sosial	1.S.3 Persentase Pelayanan Kesejahteraan Sosial	%	68,04	68,22	68,61	68,65
	S.4. Meningkatkan pelestarian dan Pengembangan kebudayaan lokal	I.S4. Persentase Pemajuan Kebudayaan	%	23,68	35,82	39,22	39,32
	S.5 Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.	I.S.5 Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	86,64	87,47	87,50	87,82
		I.S.6 Indikator Kabupaten Layak Anak	Skor	499,60 (Menuju Pratama)	575 (Menuju Madya)*	595 (Menuju Madya)	615 (Menuju Madya)
Misi 2 : Mewujudkan Pemerintahan yang Melayani, Bersih, dan Profesional.							
T.2 Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	S.6 Meningkatkan koordinasi, akuntabilitas, dan profesionalitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah	I.T.2 Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	58,95 (CC)	71,22 (BB)	71,25 (B)	71,30 (BB)
		I.S.7 Nilai LPPD	Skor	3,55 (Sedang)	3,38* (Sedang)	3,40 (Sedang)	3,42 (Tinggi)
		I.S.8 Nilai SAKIP	Skor	63,41 (B)	64,20 (B)	64,25 (B)	64,30 (B)
		I.S.9 Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	81,00	81,72	81,75 (Baik)	81,80 (Baik)

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja Tahun 2023	Target Kinerja	
						Tahun 2024	Tahun 2025
		I.S.10 Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Poin	78,019	70,144	79	70,50
		I.S.11 Indeks Profesionalitas ASN	Poin	55,85	71,32	71,80	72,30
		I.S.12 Indeks Inovasi Daerah	Skor	50,42 (Inovatif)	43,12 (Inovatif)	51 (Inovatif)	52 (Inovatif)
Misi 3 : Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Penguatan Desa Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi							
T.3 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis sektor- sektor unggulan		I.T.3 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%	4,70	4,69	4,50	4,80
	S.7 Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan daya saing sektor pertanian, perikanan, KUMKM, Perindustrian, perdagangan dan pariwisata berbasis pedesaan	I.S.13 PDRB Per Kapita	%	22,38	24,17	25,99	26,40
Misi 4 : Mewujudkan Iklim Investasi Yang Kondusif Dalam Upaya Mendorong Pengembangan Wilayah, Dunia Usaha Dan Penciptaan Lapangan Kerja Melalui Pengembangan Kerjasama Skala Lokal, Nasional, Regional, Dan Global.							
T.4 Meningkatkan investasi daerah		I.T.4 Persentase Peningkatan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	Rp Juta	7.883,46*	8.841,08	8.365,99	8.533,31
	S.8 Meningkatnya Realisasi Investasi Kabupaten Tasikmalaya	I.S.14 Pertumbuhan Realisasi Investasi	%	23,60	1,11	4	5

Sumber: Hasil analisis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, 2024

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025

4.2.1 Telaahan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025

Prioritas Pembangunan Nasional (PN) merupakan agenda pembangunan yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2025-2029 dan ditetapkan pada RKP Tahun 2025 sebagai pelaksanaan kerangka tema dan arah kebijakan pembangunan. Prioritas pembangunan nasional pada RKP Tahun 2025 meliputi:

1. Prioritas Nasional/PN 1, yaitu Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM), dengan sasaran PN 1 yaitu mendorong Indeks Demokrasi Indonesia.
2. Prioritas Nasional/PN 2, yaitu Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru, dengan sasaran PN 2 yaitu mendorong: (a) *Asia Power Index (Military Capability)*; (b) *Asia Power Index (Diplomatic Influence)*; (c) Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya; (d) Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (PoU); (e) Indeks Ketahanan Energi; (f) Kapasitas tampungan air; (g) Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan; (h) Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman; (i) Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global; (j) Indeks Ekonomi Hijau; (k) Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer; (l) Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah; (m) Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati; (n) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup; dan (o) Persentase Penurunan Emisi GRK Tahunan dan Kumulatif.
3. Prioritas Nasional/PN 3, yaitu Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi, dengan sasaran PN 3 yaitu mendorong: (a) Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah; (b) Rasio Kewirausahaan; (c) Rasio Volume Usaha

Koperasi terhadap PDB; (d) Rasio PDB Pariwisata; (e) Devisa Pariwisata; (f) Proporsi PDB Ekonomi Kreatif; (g) Aset Perbankan/PDB; (h) Aset Dana Pensiun/PDB; (i) Aset Asuransi/PDB; (j) Kapitalisasi Pasar Modal/PDB; (h) Aset Dana Pensiun/PDB; (k) Total Kredit/PDB; (k) Total Kredit/PDB; dan (l) Inklusi Keuangan.

4. Prioritas Nasional/PN 4, yaitu Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas, dengan Sasaran PN 4, yaitu Matematika, Sains), Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas, Harapan lama sekolah; (b) Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi; (c) Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi; (d) Tingkat Penguasaan Iptek: Pengeluaran Iptek dan Inovasi dan Peringkat Indeks Inovasi Global; (e) Tingkat Pengangguran Terbuka; (f) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan; (g) Usia Harapan Hidup; (h) Kesehatan Ibu dan Anak: Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup) dan Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita; (i) Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk); (j) Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional; (k) Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK); dan (l) Indeks Ketimpangan Gender (IKG).
5. Prioritas Nasional/PN 5 yaitu, Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri, dengan Sasaran PN 5, yaitu mendorong: (a) Rasio PDB Industri Pengolahan; (b) Pembentukan Modal Tetap Bruto; (c) Ekspor Barang dan Jasa; dan (d) Biaya Logistik.
6. Prioritas Nasional/PN 6, yaitu Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan, dengan Sasaran PN 6, yaitu mendorong: (a) Terbangunnya sistem perlindungan sosial yang

adaptif bagi seluruh penduduk; (b) Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan; (c) Persentase penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal; (d) Proporsi kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap nasional; (e) Persentase desa mandiri; dan (f) Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan.

7. Prioritas Nasional/PN 7, yaitu Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan, dengan Sasaran PN 7 yaitu mendorong: (a) Return on Asset (ROA) BUMN; (b) Indeks Integritas Nasional; (c) Indeks Materi Hukum; (d) Indeks Pelayanan Publik; (e) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; (f) Indeks Persepsi Korupsi; (g) Indeks Pembangunan Hukum; (h) Rasio Perpajakan terhadap PDB; dan (i) Tingkat Inflasi.
8. Prioritas Nasional/PN 8, yaitu Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur, dengan Sasaran PN 8, yaitu mendorong: (a) Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK); (b) Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB); dan (c) Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana Relatif terhadap PDB.

4.2.2 Telaahan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2025

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Perumusan isu strategis Provinsi Jawa Barat tahun 2025 disusun berdasarkan gambaran umum hasil evaluasi pelaksanaan dan permasalahan pembangunan tahun 2023, serta hasil penelaahan terhadap kebijakan strategis nasional.

Isu strategis pembangunan Provinsi Jawa Barat tahun 2025 meliputi:

1. Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia

Peningkatan kualitas manusia menjadi hal yang penting agar masyarakat Provinsi Jawa Barat dengan penduduk terbanyak di Indonesia, mampu bersaing secara global. Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Barat tahun 2022 baru mencapai 73,12, sedangkan target pada tahun 2025 yaitu 74,39, sehingga memerlukan upaya peningkatan diantaranya pada aspek kualitas pendidikan dan kualitas kesehatan.

Kualitas pendidikan Provinsi Jawa Barat ditunjukkan oleh Angka Rata-Rata Lama Sekolah pada tahun 2022 yaitu 8,78 tahun, sedangkan Angka Harapan Lama Sekolah yaitu 12,82 tahun. Permasalahan utama pendidikan ditandai dengan belum optimalnya upaya peningkatan kualitas dan aksesibilitas pendidikan menengah dan khusus, serta pendidikan informal dan inklusi.

Adapun kualitas pelayanan kesehatan Provinsi Jawa Barat ditunjukkan oleh Angka Umum Harapan Hidup mencapai 73,52 tahun, Rasio Kematian Bayi yaitu 3,54 per 1000 kelahiran, Rasio Kematian Ibumasih mencapai 83,57 per 100.000 kelahiran, dan Angka Prevalensi Stunting pada tahun 2022 yaitu 20,2 persen dengan target pada tahun 2025 yaitu 12,93 persen. Permasalahan utama kualitas sumber daya manusia Provinsi Jawa Barat pada aspek kesehatan diantaranya adalah belum optimalnya upaya peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan yang menjangkau seluruh wilayah dan masyarakat, serta percepatan penurunan stunting dan penanganan AIDS, Tuberculosis, dan Malaria.

Permasalahan lain terkait kualitas sumber daya manusia Provinsi Jawa Barat juga terdapat pada belum optimalnya upaya peningkatan kualitas dan perlindungan perempuan dan anak yang ditunjukkan oleh Indeks Pemberdayaan Gender Provinsi Jawa Barat pada tahun 2022 baru mencapai 71,22 persen, dengan target pada tahun 2025 yaitu 71,75 persen. Permasalahan

lainnya adalah belum optimalnya peningkatan ketahanan keluarga dan keluarga berencana, serta upaya pengendalian pertumbuhan dan distribusi penduduk. Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Jawa Barat pada tahun 2022 mencapai 1,42 Persen, dengan target pada tahun 2025 yaitu 1,42 persen.

2. Pembangunan Ekonomi Berkualitas dan Berkelanjutan

Tantangan yang dihadapi Provinsi Jawa Barat dalam mencapai pembangunan ekonomi berkelanjutan diantaranya adalah masihtingginya angka kemiskinan, pengangguran terbuka dan ketimpangan pendapatan.

Persentase penduduk miskin Provinsi Jawa Barat pada tahun 2022 mencapai 7,98 persen, dengan target pada tahun 2025 yaitu 7,13 persen. Upaya penanggulangan kemiskinan di Provinsi Jawa Barat tidak hanya dilaksanakan untuk menurunkan jumlah penduduk miskin, tetapi juga menyelesaikan akar permasalahan kemiskinan. Kemiskinan di Jawa Barat lebih banyak terjadi di perdesaan dibandingkan dengan perkotaan. Hal ini disebabkan oleh rendahnya akses pelayanan dasar, akses ekonomi dan infrastruktur serta pola hidup masyarakat di desa termasuk penurunan volume perdagangan hasil-hasil pertanian.

Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Jawa Barat pada tahun 2022 masih mencapai 8,31 persen, dengan target pada tahun 2025 yaitu 7,88 persen. Faktor pemicu angka pengangguran tinggi di Provinsi Jawa Barat adalah keterbatasan kesempatan kerja baru, tidak adanya link and match antara kompetensi yang dimiliki tenaga kerja dengan pasar kerja, dan kurangnya minat pencari kerja untuk usaha mandiri. Untuk diperlukan Provinsi Jawa Barat perlu melaksanakan optimalisasi dalam peningkatan daya saing dan penempatan tenaga kerja.

Adapun ketimpangan pendapatan Provinsi Jawa Barat masih tinggi ditunjukkan oleh Indeks Gini pada tahun 2022 mencapai 0,412 poin, dengan target pada tahun 2025 yaitu 0,383 poin. Untuk itu, dalam rangka mengatasi tantangan

pembangunan ekonomi berkelanjutan, Provinsi Jawa Barat perlu melaksanakan berbagai upaya melalui peningkatan pertumbuhan pada sektor perindustrian dan perdagangan, sektor pertanian, kelautan dan perikanan, pariwisata berkelas dunia dan ekonomi kreatif, serta peningkatan ketahanan pangan daerah.

3. Pemerataan Pembangunan Wilayah yang didukung Infrastruktur

Isu pemerataan pembangunan wilayah dan infrastruktur dasar dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan menjadi tantangan cukup besar bagi Provinsi Jawa Barat. Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat masih mengalami kendala terkait mobilitas dan kemudahan aksesibilitas menuju sentra ekonomi walaupun tingkat konektivitas antar wilayah pada tahun 2023 sudah mencapai 59,62 persen, namun hal ini belum dapat diimbangi dengan kualitas dari infrastruktur tersebut sehingga masih diperlukan upaya lebih untuk mencapai target tahun 2025 yaitu 60 persen. Kesenjangan ekonomi antar wilayah kabupaten/kota, dan ketimpangan antara kawasan jalur Utara, Tengah dan Selatan di Jawa Barat, serta ketergantungan terhadap sektor industri pengolahan ditunjukkan melalui capaian Indeks Williamson Provinsi Jawa Barat tahun 2022 sebesar 0,670 poin, dengan target tahun 2025 yaitu 0,666 poin.

Akar masalah kemiskinan salah satunya adalah belum optimalnya pembangunan infrastruktur dasar. Untuk itu, pemerataan pembangunan wilayah dan infrastruktur dasar diantaranya dilaksanakan melalui peningkatan konektivitas antar wilayah dan pelayanan infrastruktur untuk mendukung perekonomian dan meminimalkan kantong kemiskinan. Permasalahan pembangunan infrastruktur dasar di wilayah Jawa Barat meliputi belum optimalnya pembangunan infrastruktur jalan, air bersih dan sistem drainase, serta infrastruktur listrik dan telekomunikasi. Selain itu, permasalahan juga terdapat pada

belum optimalnya pembangunan infrastruktur pengelolaan air limbah domestik dan limbah industri, pelayanan persampahan serta belum terpenuhinya standar PSU dalam penyediaan perumahan.

Tantangan terbesar pemerataan pembangunan wilayah dan infrastruktur dasar serta infrastruktur lainnya, adalah daya dukung dan daya tampung lingkungan yang perlu tetap dipertahankan. Kualitas lingkungan hidup Jawa Barat ditunjukkan oleh Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 64,77 poin pada tahun 2023, dengan target pada tahun 2025 yaitu 67 poin. Permasalahan utama kualitas lingkungan hidup Jawa Barat masih ditandai dengan belum optimalnya upaya pengendalian pencemaran air, termasuk air laut, pencemaran udara, serta pengendalian perubahan tutupan lahan. Selain itu, masih perlu didorong upaya pembangunan rendah karbon dan peningkatan ketahanan daerah.

4. Peningkatan Kehidupan Berdemokrasi serta Reformasi Birokrasi dan Inovasi Daerah

Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Provinsi Jawa Barat ditunjukkan dengan Indeks Reformasi Birokrasi dengan predikat A pada tahun 2022. Permasalahan utama reformasi birokrasi adalah masih perlunya upaya peningkatan penataan dan penguatan organisasi, deregulasi peraturan perundang-undangan daerah dan kebijakan lainnya serta penegakan hukum, penerapan tata kelola pemerintahan berbasis digital serta budaya birokrasi dengan ASN yang profesional, penataan sistem manajemen SDM aparatur, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Adapun penerapan inovasi daerah dalam pembangunan di Jawa Barat ditunjukkan dengan Indeks Inovasi Daerah pada tahun 2022 memperoleh predikat Sangat Inovatif.

Dengan mempertimbangkan isu strategis pembangunan, serta merujuk pada Tema RPJPD V (2023-2025), yaitu “Mencapai Keunggulan Masyarakat Jawa Barat di Segala Bidang”, serta

Tema RPD Provinsi Jawa Barat 2024-2026, yaitu “Meningkatkan Kemandirian Masyarakat Jawa Barat”, maka Tema Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 adalah:

**“PEMERATAAN PEMBANGUNAN UNTUK MENDUKUNG
MASYARAKAT JAWA BARAT”**

Tema tersebut memiliki makna bahwa pemerataan pembangunan untuk mendukung kemandirian Jawa Barat diarahkan pada keberlanjutan fokus pembangunan pada tahun sebelumnya dengan lebih meningkatkan intensitas dan memperluas cakupan khususnya pada daerah-daerah yang belum optimal dalam mendapatkan pelayanan namun memiliki nilai strategis yang tinggi. Hal ini bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan peningkatan keunggulan masyarakat Jawa Barat.

Adapun Pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2025 meliputi:

- 1 **Prioritas 1**, yaitu Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Inovasi, Peningkatan Kapasitas UMKM, Petani, Nelayan dan Budidaya untuk Membuka Lapangan Kerja Seluas-luasnya
- 2 **Prioritas 2**, yaitu Reformasi Sistem Pendidikan, Pemajuan Kebudayaan, Pendidikan Agama dan Kehidupan Beragama;
- 3 **Prioritas 3**, yaitu Penguatan Sistem Kesehatan Daerah;
- 4 **Prioritas 4**, yaitu Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanganan Risiko Bencana;
- 5 **Prioritas 5**, yaitu Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Gerakan Membangun Desa;
- 6 **Prioritas 6**, yaitu Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.

Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2024 disusun berdasarkan arah kebijakan pada RPD Provinsi Jawa Barat 2024-2026 untuk tahun 2025, permasalahan dan isu strategis pembangunan tahun 2025, serta mempertimbangkan pokok-pokok pikiran DPRD tahun 2025. Prioritas Pembangunan

Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2025 juga ditetapkan untuk mendukung prioritas pembangunan nasional tahun 2025.

4.2.3 Isu Strategis, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya

4.2.3.1. Isu Strategis

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.

Perumusan isu strategis Kabupaten Tasikmalaya tahun 2025 disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan sampai dengan tahun 2023, arah kebijakan dari RPJMD, dan arah kebijakan RKP serta RKPD Provinsi Jawa Barat, dengan memperhatikan dinamika isu strategis global dan nasional. Proses penyusunan isu strategis pembangunan daerah tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.2
Perumusan Isu Strategis Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025

Arah Kebijakan RKP 2025	Isu Strategis Pembangunan Jawa Barat Tahun 2025	Permasalahan Pembangunan RKPD Tahun 2025	Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025
SDM Berdaya Saing dan Produktif	Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Kemampuan literasi dan numerasi siswa dibawah kompetensi minimum.	Aksesibilitas dan Keterjangkauan Pelayanan Dasar yang Berkualitas
		Belum tuntasnya pembangunan rumah sakit pemerintah di 4 lokasi (Karangnunggal, Ciawi, Manonjaya dan Cikatomas)	
		Masih kurangnya tenaga kesehatan dalam menunjang Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat
		Perlunya peningkatan kapasitas tenaga kesehatan	
		Kurangnya fasilitas pelayanan kesehatan rujukan	
		Belum optimalnya mutu pelayanan kesehatan	
		Perlunya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pola hidup bersih dan sehat	
		Masih rendahnya prestasi olahraga Kabupaten Tasikmalaya	

Arah Kebijakan RKP 2025	Isu Strategis Pembangunan Jawa Barat Tahun 2025	Permasalahan Pembangunan RKPD Tahun 2025	Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025
		Sarana dan prasarana olahraga kurang memadai	Penanganan Kemiskinan
		Data kemiskinan yang tersedia belum terintegrasi dan termutakhirkan	
		Intervensi program dan kegiatan terhadap sasaran belum optimal	
		Kompetensi angkatan kerja belum sesuai kebutuhan pasar kerja	Penangan Pengangguran
		Sarana dan prasarana pelatihan tenaga kerja kurang memadai	
		Belum optimalnya upaya pencegahan stunting (remaja minum tablet tambah darah, penyuluhan kesehatan terhadap calon pengantin, asupan gizi yang baik bagi ibu hamil/menyusui serta balita).	Penurunan Angka Stunting, AKI dan AKB
		Masih rendahnya kesadaran ibu hamil dalam pemeriksaan kandungan.	
		Perlunya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pola hidup bersih dan sehat.	
		Masih tingginya inflasi	Pemulihan Ekonomi Masyarakat

Arah Kebijakan RKP 2025	Isu Strategis Pembangunan Jawa Barat Tahun 2025	Permasalahan Pembangunan RKPD Tahun 2025	Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025
2. Pertumbuhan Ekonomi yang Menciptakan Lapangan Kerja Berkualitas, Menurunkan Ketimpangan dan Penciptaan Produk Ramah Lingkungan	Pembangunan Ekonomi Berkualitas dan Berkelanjutan	Masih rendahnya daya saing produk usaha mikro	
		Masih terbatasnya jumlah pelaku usaha mikro yang memiliki sertifikat produk	
		Belum teralokasinya Pasar Singaparna	
		Kurangnya pemahaman pelaku pariwisata mengenai perilaku kepariwisataan (Sapta Pesona dan CHSE)	Peningkatan Daya Saing Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Berbasis Komunitas
		Masih terbatasnya infrastruktur dan fasilitas pariwisata (destinasi wisata dan desa wisata)	
		Belum optimalnya kerjasama dan jejaring ekonomi kreatif	
		Belum adanya Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM)	Memperluas Jejaring Kerjasama dan Investasi di bidang Pertanian dan Kepariwisata
		Masih terbatasnya dokumen dan media potensi investasi Kabupatn Tasikmalaya	
		Terbatasnya produk pertanian yang mempunyai nilai tambah	

Arah Kebijakan RKP 2025	Isu Strategis Pembangunan Jawa Barat Tahun 2025	Permasalahan Pembangunan RKPD Tahun 2025	Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025
		Terbatasnya lahan pertanian organik yang disertifikasi	Peningkatan Daya Saing Produk Pertanian di Pasar Lokal, Nasional, Regional dan Global
		Masih terbatasnya infrastruktur pertanian dan perikanan	
Infrastruktur untuk peningkatan produktivitas	Pemerataan Pembangunan Wilayah yang didukung Infrastruktur Berkualitas dan Lingkungan yang Berkelanjutan	Masih banyak ruas jalan dalam kondisi rusak	Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Layanan Infrastruktur Daerah
		Belum memadainya pemenuhan penyediaan air baku untuk kebutuhan masyarakat yang bersumber dari daerah irigasi	
		Masih banyak rumah tangga yang rawan sanitasi dan air bersih terutama di daerah dataran tinggi	
		Belum optimalnya penanganan dan ketersediaan rumah layak huni	
		Belum memadainya sarana dan prasarana persampahan	
		Belum memadainya sarana dan prasarana lalu lintas	

Arah Kebijakan RKP 2025	Isu Strategis Pembangunan Jawa Barat Tahun 2025	Permasalahan Pembangunan RKPD Tahun 2025	Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025
		Bangunan Fasilitas Publik sebagai sarana pelayanan kepada masyarakat belum memadai dan beberapa bangunan perkantoran yang menyelenggarakan pelayanan publik masih berada di wilayah Kota Tasikmalaya.	Penataan Kawasan Ibu Kota Kabupaten Tasikmalaya
		Masih kurangnya kewaspadaan dini dan mitigasi bencana kebakaran dan non kebakaran.	Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
		Masih kurangnya fasilitas pemadam kebakaran.	
SDM Berdaya Saing dan Produktif	Reformasi Birokrasi dan Inovasi Daerah	Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi	Reformasi Birokrasi untuk Pemerintahan yang Baik dan Efektif Berbasis Teknologi Informasi
		Belum optimalnya sarana dan prasarana untuk pelayanan perizinan	

Sumber: Hasil analisis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Tahun 2024

Berdasarkan hasil perumusan sebagaimana Tabel 4.3 di atas, maka ditetapkan isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 yaitu:

1. Aksesibilitas dan keterjangkauan pelayanan dasar yang berkualitas

Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pasal 3 disebutkan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri atas Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan Sosial.

Keenam Pelayanan Dasar tersebut merupakan hal wajib yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah supaya penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dari keenam pelayanan dasar tersebut dapat terwujud secara baik sesuai dengan standar yang diharapkan. Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan suatu ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.

Akses terhadap pendidikan, kesehatan, perumahan, air minum, dan sanitasi, adalah fundamental dalam memastikan kesejahteraan dan kualitas hidup bagi semua penduduk Kabupaten Tasikmalaya dan semua penduduk Indonesia. Pelayanan dasar ini juga memastikan bahwa Kabupaten Tasikmalaya memiliki angkatan kerja yang sehat dan terdidik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan produktivitas.

Namun demikian, akses dan kualitas pelayanan dasar antar daerah dan kelompok masyarakat menjadi penghambat bagi pertumbuhan Kabupaten Tasikmalaya. Di sektor pendidikan, kurangnya tenaga pendidik ASN adalah persoalan signifikan, jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Jawa Barat, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Jawa Barat berada di posisi ke 2 (dua) terendah. Tentunya hal tersebut membutuhkan peningkatan upaya yang intensif. Oleh karena itu

pembangunan pendidikan di Kabupaten Tasikmalaya harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan di masa depan.

Di sektor kesehatan, masih banyak rumah sakit pemerintah dan swasta belum memenuhi standar minimum. Masih banyak rumah tangga berpendapat rendah belum memiliki rumah yang memadai, dan ketiadaan akses air minum dan sanitasi di banyak tempat berpengaruh pada tingginya angka penyakit menular dan stunting.

Permasalahan dalam pemenuhan layanan dasar meliputi kurangnya akses pada layanan dasar; khususnya di antara masyarakat marginal; kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia; tidak meratanya distribusi sarana dan prasarana; kurangnya pendekatan baru dan inovatif dalam penyelenggaraan layanan; serta rendahnya koordinasi lintas sektor.

2. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat

Kesehatan menjadi prasyarat manusia untuk tumbuh, berkembang dan berperan dalam pembangunan secara optimal. Oleh karena itu, derajat kesehatan masyarakat menjadi aspek yang sangat penting untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan. Apalagi pada saat ini sedang terjadi pandemi covid sehingga tantangan untuk meningkatkan derajat kesehatan semakin berat. Pada saat pandemi ini, seluruh sumberdaya kesehatan sedang berfokus ke pandemi, dan karena kekhawatiran masyarakat sehingga penderita penyakit kronis tidak mendapatkan penanganan yang optimal sehingga dikhawatirkan dapat berimplikasi terhadap penurunan derajat kesehatan masyarakat.

Pembangunan bidang kesehatan, tidak hanya berfokus terhadap pembangunan dan pengembangan prasarana dan sarana kesehatan untuk tujuan kuratif semata, tetapi juga yang sifatnya preventif, termasuk Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya pun telah melaksanakannya, tetapi derajat kesehatan

masyarakat belum dapat optimal. Upaya preventif yang telah dilakukan, diantaranya pemberian tambahan asupan gizi, terutama kepada bayi dan balita yang membutuhkan, peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengonsumsi makanan dengan gizi seimbang maupun gerakan masyarakat hidup sehat (GERMAS). Belum optimalnya derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya ini, ditunjukkan dengan Usia Harapan Hidup (UHH) pada tahun 2021 sebesar 69,67 dan pada tahun 2022 meningkat menjadi Seharusnya UHH tersebut masih terus untuk ditingkatkan secara optimal, melalui pembangunan bidang kesehatan secara terintegrasi, baik dari sisi preventif maupun kuratif serta didukung peran aktif seluruh pemangku kepentingan pembangunan.

3. Penanganan Kemiskinan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, salah satunya, ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya telah menunjukkan perkembangan dari tahun ke tahun. Angka kemiskinan menunjukkan kecenderungan yang semakin menurun dan pada tahun 2019 sebesar 9,12%. Namun demikian, akibat dampak pandemi covid-19, angka kemiskinan Kabupaten Tasikmalaya tahun 2020 meningkat menjadi 10,34% dan tahun 2021 menjadi 11,15%, meskipun pada tahun 2022 menurun kembali menjadi 10,73%. Dengan indikator tersebut, masih dirasakan bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya belum optimal. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya seluruh pemangku kepentingan yang terintegrasi untuk lebih mengoptimalkan tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut. Bila dicermati lebih detail maka beberapa hal yang membuktikan tingkat kesejahteraan yang belum optimal tersebut, yaitu: Penanganan kemiskinan belum optimal, jumlah warga miskin (DTKS) tahun 2020 sebesar 181.282 rumah tangga.

Angka kemiskinan Kabupaten Tasikmalaya belum optimal menurun karena sasaran pengentasan kemiskinan sudah

menyentuh kemiskinan struktural, sehingga upaya pengentasan kemiskinan semakin berat. Hal ini merupakan fenomena yang sering dihadapi di berbagai daerah, ketika angka kemiskinan semakin menurun maka diperlukan upaya yang harus semakin konsisten dan konvergen.

Isu kemiskinan juga menjadi fokus dan tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimana pun; menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan; menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia; serta menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata; meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua serta mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan.

4. Penanganan Pengangguran

Pada awal tahun 2020 hingga saat ini, terjadi pandemi covid maka akan berimplikasi semakin meningkatnya jumlah warga miskin, karena terjadinya kontraksi ekonomi. Di lain pihak, masih belum optimalnya penurunan angka kemiskinan maupun jumlah warga miskin karena partisipasi angkatan kerja yang masih rendah. Semakin tinggi partisipasi angkatan kerja maka jumlah angkatan kerja akan semakin tinggi, sehingga jumlah orang yang berkesempatan bekerja meningkatkan dan pada gilirannya akan berdampak bagi penurunan TPT maupun penurunan angka kemiskinan dan jumlah warga miskin. Oleh karena itu, menjadi tantangan bersama ke depan, agar kebijakan pembangunan dapat lebih terintegrasi dan konvergen bagi upaya pengentasan kemiskinan.

5. Penurunan angka stunting, AKI dan AKB

Masalah gizi masyarakat masih menjadi kendala yang di hadapi Kabupaten Tasikmalaya. Persoalan stunting atau gagal tumbuh pada balita akibat kekurangan gizi, menjadi tantangan yang belum terpecahkan hingga saat ini. Bahkan, di tahun 2019 lalu, Kabupaten Tasikmalaya masuk dalam salah satu

kabupaten/kota dengan angka stunting cukup tinggi yakni di angka 33,8%.

Dari data Bulan Penimbangan Balita (BPB) Agustus 2020 kemarin, angka prevalensi yang melebihi target nasional di atas 20%, sedikitnya ada 32 kecamatan dan 159 desa dengan angka stunting cukup tinggi. Lima desa tertinggi persoalan stunting di antaranya, Desa Sukamulya Kecamatan Singaparna 47,8%, Desa Sukamulih Kecamatan Sariwangi 46,4%, Desa Sirnagalih Kecamatan Cigalontang 46,2%, Desa Kertaraharja Kecamatan Taraju 41,4% dan Desa Jayaratu Kecamatan Sariwangi 40%.

Persoalan stunting itu pun menjadi tantangan pada tahun 2021 memang menjadi tahun yang berat. Sebab dampak masa pandemi Covid-19 cukup menghantam sektor ekonomi masyarakat. Hingga hal ini berpengaruh pada pemenuhan gizi seimbang bagi keluarga.

Selanjutnya, belum optimalnya derajat kesehatan di Kabupaten Tasikmalaya, dikarenakan beberapa hal, yaitu: a) Masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI), tahun 2021 AKI masih bernilai 157 per 100.000 kelahiran hidup; b) Masih tingginya Angka Kematian Bayi (AKB), tahun 2020 AKB masih bernilai 6 per 1.000 kelahiran hidup; dan c). Kondisi rawan pangan, ditunjukkan dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH) sebesar 80,25.

Masih tingginya AKI Kabupaten Tasikmalaya disebabkan masih belum optimalnya kesadaran masyarakat, terutama keluarga ibu hamil, pentingnya pemeriksaan kehamilan secara rutin, terutama ibu hamil yang memiliki risiko tinggi. Prasarana sarana kesehatan, khususnya persalinan, harus terus ditingkatkan dan diupayakan merata, sehingga pelayanan kesehatan, terutama bagi ibu hamil dan ibu melahirkan, dapat diandalkan serta memiliki akses yang mudah dijangkau. Kongruen dengan AKI dan tingginya AKB menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran masyarakat serta penyediaan prasarana sarana kesehatan, terutama bagi bayi dan balita, harus terus ditingkatkan ketersediaannya sehingga mudah diakses. Angka kesakitan juga masih cukup tinggi yang disebabkan oleh penyakit

menular dan tidak menular. Angka ini akan semakin tinggi dengan adanya pandemi Covid-19.

6. Pemulihan Ekonomi Masyarakat

Resesi ekonomi dampak Covid-19 tentu berdampak pada peningkatan kemiskinan di Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan data dari BPS Kabupaten Tasikmalaya angka kemiskinan di Kabupaten Tasikmalaya tahun 2021 meningkat menjadi 11,15% (200,6 ribu jiwa) dibandingkan dengan tahun 2020 yang berjumlah 10,34% atau 181,52 ribu jiwa. Dari sisi penerimaan pemerintah daerah Kabupaten Tasikmalaya, trend rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2020 (5 tahun) yaitu sebesar 2,99% dengan Rincian pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Sebesar 17,43%, Dana Perimbangan negatif (0,86%) dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 11,05%. Kondisi pandemi menyebabkan proyeksi penerimaan tahun-tahun selanjutnya semakin sulit diprediksi disertai dengan tingkat ketidakpastian yang tinggi, sehingga sangat berpengaruh signifikan terhadap penyusunan perencanaan program dan kegiatan pembangunan periode 2021-2026.

Pemulihan ekonomi menjadi domain dalam berbagai aspek pembangunan pasca pandemi Covid-19. Terkait hal tersebut, maka diperlukan adanya komitmen yang kuat dari berbagai pemangku kepentingan untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan meningkatkan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin yang terdampak pandemi Covid-19. Pengembangan UMKM, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan menghadirkan investasi.

7. Peningkatan daya saing kepariwisataan dan ekonomi kreatif berbasis komunitas

Kabupaten Tasikmalaya mempunyai luas wilayah sebesar 270.677,66 hektar terdiri dari 39 kecamatan dan 351 desa. Dari seluruh luasan wilayah administrasi hampir di seluruh Kecamatan wilayah Kabupaten Tasikmalaya terdapat potensi daya tarik wisata terutama wisata alam serta Kabupaten Tasikmalaya merupakan salah satu penghasil utama berbagai

produk pertanian di Jawa Barat, dan memiliki potensi lain dalam bidang kerajinan tangan.

Dengan potensi (keunggulan komparatif) yang dimiliki Kabupaten Tasikmalaya, seharusnya perekonomian dapat berkembang optimal, dengan memanfaatkan berbagai sektor, terutama dengan mengembangkan UMKM, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Tingkat kunjungan wisatawan mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2021 yaitu sebanyak 5.540.036 orang. Namun, beberapa hal yang menyebabkan belum berkembangnya daya saing, dilihat dari berbagai aspek penyebab, meliputi: a); Pertumbuhan investasi yang sangat rendah hanya , nilai investasi tahun 2021 hanya sebesar Rp8.599.700.000.000; c) Pengembangan ekonomi kreatif belum optimal, pertumbuhan ekonomi kreatif tahun 2021 masih terbatas; d) Masih terbatasnya intensitas event budaya yang diselenggarakan, penyelenggaraan event budaya tahun 2021 masih sangat terbatas dan belum berskala besar.

UMKM di Indonesia ikut menyumbang pertumbuhan ekonomi dengan pencapaian sebesar 60%. Apalagi di masa pandemi Covid-19 seperti sekarang ini. UMKM bisa menjadi salah satu harapan untuk mengurangi adanya jumlah pengangguran di Indonesia, sekaligus semakin membuka luas adanya lapangan pekerjaan baru.

Tingkat kunjungan wisatawan ke Kabupaten Tasikmalaya belum optimal, apalagi dengan adanya pandemi Covid-19, sektor pariwisata mengalami dampak yang sangat signifikan. Upaya pembangunan sektor pariwisata telah berjalan, terutama dengan pengembangan destinasi wisata dan prasarana sarana pendukung pariwisata, namun upaya tersebut harus terus dilakukan. Memperbesar aksesibilitas masuk dan keluar Kabupaten Tasikmalaya melalui berbagai moda transportasi telah dilakukan. Upaya pengembangan sektor pariwisata harus terus dilakukan, terutama dengan mengembangkan kolaborasi antar pemangku kepentingan maupun antar daerah. Upaya lain yang telah dilakukan dan akan dilanjutkan adalah

pengembangan daya tarik Kabupaten Tasikmalaya melalui revitalisasi obyek wisata.

Pengembangan ekonomi kreatif belum optimal di Kabupaten Tasikmalaya. Hal ini membutuhkan kolaborasi berbagai pemangku kepentingan, sehingga potensi yang telah tumbuh dan berkembang di Kabupaten Tasikmalaya dapat disinergikan untuk pengembangan ekonomi kreatif. Realisasi investasi Kabupaten Tasikmalaya memburuk dari tahun ke tahun, tahun 2021 jumlah investor penanam modal dalam negeri hanya sebanyak 1.427 investor disbanding tahun 2020 sebanyak 424 investor penanam modal dalam negeri. Permasalahan investasi adalah pada belum optimalnya kecepatan pelayanan perijinan, promosi investasi yang belum optimal, jaminan keamanan dan kenyamanan investasi, informasi peluang investasi yang belum optimal, didukung dengan pelayanan birokrasi yang belum efisien dan penggunaan teknologi belum optimal.

8. Memperluas jejaring kerjasama dan investasi di bidang pertanian dan kepariwisataan

Kabupaten Tasikmalaya memiliki wilayah yang didominasi oleh lahan pertanian yaitu dari luas wilayah 270.677,66 Ha, lahan pertanian memiliki luas sebanyak 241.518 Ha, sedangkan sisanya sebanyak 29.364 Ha merupakan lahan non-pertanian. Kondisi wilayah seperti ini membuat perekonomian Kabupaten Tasikmalaya didominasi oleh sektor pertanian. Dengan banyaknya potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Tasikmalaya dalam bidang pertanian yang salah satunya sebagai penghasil kelapa tertinggi ke-1 di Jawa Barat dengan 28.017 ton di tahun 2018 serta Kabupaten Tasikmalaya merupakan salah satu produsen pangan utama (beras) di Jawa Barat yaitu nomor 9 dengan produksi 451.232 ton di Tahun 2020.

Berdasarkan data terakhir dari Perkembangan Ekonomi Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021, dari nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar Rp39.285,64 Milyar, sektor Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan menyumbang Rp8.440,7 Milyar atau sekitar 33,52%. Kontribusi kedua didapatkan dari Sektor Perdagangan Besar dan Eceran sebesar Rp4.810,24 Milyar

(19,10%), dan kontribusi ketiga dari Sektor Konstruksi sebesar Rp2.249,90 Milyar (8,94%). Meskipun sektor pertanian memberikan kontribusi terbesar terhadap perekonomian Kabupaten Tasikmalaya, tetapi trendnya terus menurun dari tahun ke tahun dan diperparah dengan kondisi perekonomian dunia yang sedang tidak baik akibat Covid-19.

Dalam rangka mendukung pengembangan ekonomi daerah berdasarkan potensi daerah Kabupaten Tasikmalaya yaitu pertanian, harus dilaksanakan pengolahan yang diarahkan untuk mewujudkan tumbuhnya usaha yang dapat meningkatkan nilai tambah dan harga yang wajar di tingkat petani, sehingga petani dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya. Untuk mendukung itu maka harus dilakukan hal-hal sebagai berikut : (1) peningkatan mutu produk dan pengolahan komoditas pertanian menjadi bahan setengah jadi, (2) peningkatan harga komoditi hasil pertanian dan pembagian keuntungan (*profit sharing*) yang proporsional bagi petani, (3) penumbuhkan unit-unit pengolahan dan pemasaran hasil pertanian yang dikelola oleh kelompok tani/gabungan kelompok tani atau asosiasi tanaman pertanian, (4) peningkatan efisiensi biaya pengolahan dan pemasaran serta memperpendek mata rantai pemasaran.

9. Peningkatan daya saing produk pertanian di pasar lokal, nasional, regional dan global

Pertanian memiliki peranan yang sangat strategis dalam kehidupan kita. Sektor pertanian telah terbukti memiliki peranan penting bagi pembangunan perekonomian suatu bangsa. Hal ini didasarkan pada kontribusi sektor pertanian yang tidak hanya berperan dalam pembentukan PDRB, penciptaan kesempatan kerja, dan peningkatan pendapatan masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan sektor pertanian sudah selayaknya dijadikan sebagai suatu sektor ekonomi yang sejajar dengan sektor lainnya. Sektor ini tidak lagi hanya berperan sebagai aktor pembantu apalagi figuran bagi pembangunan nasional, tetapi harus menjadi pemeran utama yang sejajar dengan sektor unggulan lainnya

Daya saing didefinisikan sebagai kemampuan suatu sektor, industri atau perusahaan untuk bersaing dengan sukses untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan didalam lingkungan global selama biaya imbangnya lebih rendah dari penerimaan sumber daya yang digunakan. Peran pemerintah dalam meningkatkan daya saing pertanian harus mengarah pada penciptaan iklim usaha yang kondusif sehingga mampu merangsang investor baik domestik maupun asing. Hal ini dapat dilakukan dengan menjamin keamanan dan dukungan infrastruktur penunjang lainnya seperti infrastruktur publik (jalan, sarana dan prasarana produksi lainnya, air, listrik dan infrastruktur penelitian yang mendukung investasi. Iklim yang kondusif di bidang pertanian juga tidak terlepas dari sisi pemerintahan kebijakan-kebijakan pelayanan seperti prosedur perizininan dan prosedur investasi harus dilakukan dengan tiga prinsip dasar cepat, mudah, dan murah.

10. Peningkatan kuantitas dan kualitas layanan infrastruktur daerah

Pembangunan infrastruktur, utamanya di daerah, akan membuka akses baru atau semakin mempermudah akses yang sudah ada untuk menjangkau wilayah tersebut. Kemudahan akses tersebut nantinya dapat meningkatkan aktivitas ekonomi di suatu wilayah. Dalam proses pembangunan, tentu dibutuhkan keterlibatan tenaga manusia sebagai faktor utama pendukung pembangunan. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur yang dilakukan secara masif dan merata akan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Pembangunan infrastruktur juga menjadi prioritas dalam RPJMN periode 2020-2024 yang akan difokuskan pada tiga kerangka utama (Infrastruktur Pelayanan Dasar, Infrastruktur Ekonomi, dan Infrastruktur Perkotaan) yang ditopang dengan pembangunan energi dan ketenagalistrikan serta pelaksanaan transformasi digital. Pembangunan infrastruktur untuk pelayanan dasar diprioritaskan untuk memastikan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia dalam rangka mengurangi ketimpangan antar wilayah. Cakupan infrastruktur pelayanan

dasar yang akan dibangun antara lain penyediaan hunian layak yang ditopang dengan sistem penyediaan air minum dan sanitasi, peningkatan layanan jaringan on grid dan off grid untuk akses ketenagalistrikan, penyediaan layanan telekomunikasi dan internet untuk fasilitas umum (fasum), pengembangan sistem keselamatan lalu lintas, penyediaan pelayanan transportasi perintis (darat, laut dan udara) serta pembangunan waduk multi-purpose dan irigasi.

Di sisi lain, pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan ekonomi berfokus pada pembangunan sarana dan prasarana transportasi, ketenagalistrikan dan energi, teknologi informatika dengan kapasitas besar dan berkecepatan tinggi untuk pengoperasian Big Data, Internet of Things (IoT) maupun artificial intelligence (AI). Pembangunan infrastruktur pada periode ini juga akan memberikan penekanan pada pengarusutamaan ketangguhan bencana, kesetaraan gender, tata kelola pemerintahan yang baik, pembangunan berkelanjutan, serta modal dan sosial budaya. Melalui kerangka pembangunan infrastruktur tersebut, tujuan pembangunan nasional menuju negara yang makmur dan sejahtera diharapkan dapat terwujud.

Tantangan pengembangan wilayah di Kabupaten Tasikmalaya adalah aksesibilitas dan konektifitas antarwilayah dalam rangka mengembangkan dan mengoptimalkan potensi perekonomian Kabupaten Tasikmalaya dalam untuk mewujudkan kualitas infrastruktur wilayah berbasis tata ruang yang berkelanjutan dan untuk mendukung perkembangan wilayah serta pengembangan investasi di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya, perlu dibangun infrastruktur strategis terutama sarana jalan. “Beberapa infrastruktur strategis di wilayah Kabupaten Tasikmalaya telah direncanakan akan dibangun, meliputi infrastruktur strategis nasional dan regional yaitu meliputi pembangunan tol Cileunyi, Garut, Tasikmalaya (Cigatas). Pembangunan di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya seperti rencana pembangunan jalan Tinewati-Cintaraja, pembangunan jalan lingkaran utara-selatan Kab. Tasikmalaya,

penyelesaian gedung sarana olahraga, gedung perkantoran pemerintah, rencana pembangunan pasar dan terminal Singaparna, pembangunan Rumah Sakit serta pembangunan TPA Kabupaten Tasikmalaya.

11. Penataan kawasan Ibu Kota Kabupaten Tasikmalaya

Pengertian Tata Ruang menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 2 adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. Sedangkan pengertian kota, ditinjau dari segi geografis menurut Bintarto (1989), kota dapat diartikan suatu sistem jaringan kehidupan manusia, ditandai dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan diwarnai dengan strata sosial ekonomi yang heterogen dan coraknya yang materialistis atau dapat pula diartikan sebagai bentang budaya yang ditimbulkan oleh unsur-unsur alam dan non alami dengan gejala-gejala pemusatan penduduk yang cukup besar dengan corak kehidupan yang bersifat heterogen dan materialistis dibandingkan dengan daerah di bawahnya.

Dalam Pasal 1 sub 10 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dinyatakan bahwa kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya telah mencanangkan bahwa pembangunan dilaksanakan secara terencana, komprehensif, terpadu, terarah, bertahap, dan berkelanjutan dengan mengembangkan tata ruang dalam suatu tata lingkungan yang dinamis serta tetap memelihara kelestarian lingkungan hidup. Pembangunan perkotaan, merupakan bagian dari pembangunan berlandaskan keseimbangan antara berbagai kepentingan, yaitu keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Kota Singaparna yang merupakan Ibu Kota Kabupaten Tasikmalaya sebagai pusat perekonomian wilayah memiliki peran yang sangat besar bagi pembangunan, dimana konstribusinya terhadap pemenuhan kebutuhan hidup warganya melahirkan berbagai permasalahan. Jumlah penduduk yang terus

bertambah dan dikaitkan dengan implikasinya pada ruang kota, bagi para pakar dan pemerhati lingkungan sangatlah menakutkan. Apalagi ada banyak kejadian terutama di negara berkembang, kota-kota tersebut berkembang tanpa pengendalian. Jumlah penduduk terus bertambah, ruang kota semakin padat dan berkualitas rendah, lalu lintas semrawut, penghijauan sangat kurang, terjadi banjir dan sebagainya.

Selain akan terjadi kepadatan dan ketidak teraturan bangunan, akan berdampak buruk juga pada sisi lainnya, antara lain, (1) kepadatan bangunan dengan tata letak yang tidak teratur, (2) tidak adanya ruang terbuka hijau sebagai daerah resapan hujan dan pengurang polusi udara, (3) akses jalan yang sulit dilewati oleh kendaraan besar (mobil) pada pemukiman padat penduduk, (4) kecilnya jalan akses menuju daerah tertentu karena banyak dijadikan pemukiman, (5) akses untuk mendapatkan air bersih dan air minum sulit didapat, (6) tidak adanya drainase yang baik dapat menyebabkan banjir pada saat musim penghujan, (7) kepadatan penduduk membuat banyak sampah rumah tangga menumpuk, (8) banyak penyakit yang timbul karena lingkungan yang tidak bersih, (9) buruknya instalasi kelistrikan di daerah tersebut, (10) banyaknya kejadian kebakaran yang terjadi di permukiman padat karena hubungan arus pendek listrik, (11) banyaknya sungai atau drainase yang tercemar oleh limbah rumah tangga.

Uraian di atas dapat dipahami bahwa akan banyak dampak buruk yang ditimbulkan akibat tidak adanya perencanaan penataan dalam sebuah wilayah permukiman, terlebih lagi pada permukiman padat dengan jumlah penduduk yang padat pula. Dalam hal ini perlu adanya intervensi dari pemerintah untuk melakukan pengawasan dalam setiap pembangunan di wilayahnya. Meskipun pada umumnya kota telah dilengkapi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), bahkan dengan perencanaan yang lebih detail dalam bentuk Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTR) serta perencanaannya yang kedalamannya sudah sampai pada Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) dan *Zoning Regulation*.

12. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Isu lingkungan hidup dan peningkatan ketahanan bencana dan iklim sendiri merupakan salah satu prioritas dalam RPJMN yang perlu didukung pelaksanaannya oleh seluruh daerah yang ada di Indonesia. Wilayah Indonesia terletak di daerah iklim tropis dengan dua musim yaitu panas dan hujan dengan ciri-ciri adanya perubahan cuaca, suhu dan arah angin yang cukup ekstrim. Kondisi iklim seperti ini digabungkan dengan kondisi topografi permukaan dan batuan yang relatif beragam, baik secara fisik maupun kimiawi, menghasilkan kondisi tanah yang subur. Sebaliknya, kondisi itu dapat menimbulkan beberapa akibat buruk bagi manusia seperti terjadinya bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, kebakaran hutan dan kekeringan. Seiring dengan berkembangnya waktu dan meningkatnya aktivitas manusia, kerusakan lingkungan hidup cenderung semakin parah dan memicu meningkatnya jumlah kejadian dan intensitas bencana hidrometeorologi (banjir, tanah longsor dan kekeringan) yang terjadi secara silih berganti di banyak daerah di Indonesia.

Meskipun pembangunan di Indonesia telah dirancang dan didesain sedemikian rupa dengan dampak lingkungan yang minimal, proses pembangunan tetap menimbulkan dampak kerusakan lingkungan dan ekosistem. Pembangunan yang selama ini bertumpu pada eksploitasi sumber daya alam (terutama dalam skala besar) menyebabkan hilangnya daya dukung sumber daya ini terhadap kehidupan masyarakat. Dari tahun ke tahun sumber daya hutan di Indonesia semakin berkurang, sementara itu pengusahaan sumber daya mineral juga mengakibatkan kerusakan ekosistem yang secara fisik sering menyebabkan peningkatan risiko bencana.

Pada sisi lain laju pembangunan mengakibatkan peningkatan akses masyarakat terhadap ilmu dan teknologi. Namun, karena kurang tepatnya kebijakan penerapan teknologi, sering terjadi kegagalan teknologi yang berakibat fatal seperti kecelakaan transportasi, industri dan terjadinya wabah penyakit akibat mobilisasi manusia yang semakin tinggi. Potensi bencana

lain yang tidak kalah seriusnya adalah faktor keragaman demografi di Indonesia.

Kabupaten Tasikmalaya menempati posisi kedua kerawanan bencana secara nasional, sebanyak 39 kecamatan yang ada di Kabupaten Tasikmalaya memiliki kerawanan menengah hingga tinggi bencana alam, terutama pergerakan tanah dan longsor dari 10 potensi bencana alam 1. Banjir, 2. Banjir Bandang, 3. Cuaca Ekstrim, 4. Gelombang Ekstrim dan Abrasi, 5. Gempa bumi, 6. Kebakaran Hutan dan Lahan, 7. Kekeringan, 8. Letusan Gunung api, 9. Tanah Longsor dan 10. Tsunami.

13. Reformasi Birokrasi untuk Pemerintahan yang Baik dan Efektif Berbasis Teknologi Informasi

Kondisi birokrasi Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya di era reformasi saat ini bisa dikatakan belum menunjukkan arah perkembangan yang baik, untuk melaksanakan fungsi birokrasi secara tepat, cepat, dan konsisten guna mewujudkan birokrasi yang akuntabel dan baik, maka pemerintah telah merumuskan sebuah peraturan untuk menjadi landasan dalam pelaksanaan reformasi biroksi di Indonesia, yaitu Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2011 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Indonesia 2010-2025.

Reformasi Birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur.

Melalui reformasi birokrasi dilakukan penataan terhadap system penyelenggaraan pemerintah dimana yang tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga reformasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuan reformasi birokrasi adalah untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Adapun misi Kabupaten Tasikmalaya dalam mewujudkan reformasi birokrasi yaitu Mewujudkan pemerintahan yang melayani, bersih, dan profesional.

4.2.3.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah untuk mencapai sasaran, selanjutnya Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Berdasarkan 13 (tiga belas) isu strategis, serta tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 yang telah diuraikan sebelumnya, maka ditetapkan strategi dan arah kebijakan sebagai upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 mengacu kepada strategi dan arah kebijakan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026. Adapun strategi dan arah kebijakan yang dipilih untuk pencapaian target sasaran pembangunan tahun 2025 disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 4.3
Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
Visi: Dengan Semangat Gotong Royong, Mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya yang Religius/Islami, Berdaya Saing, dan Sejahtera.					
Misi 1 : Meningkatkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing, Berkepribadian Dan Berakhlakul Karimah.					
T.1 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Kabupaten Tasikmalaya	S.1. Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya	I.1 Indeks Pendidikan	Meningkatkan Aksesibilitas, Mutu dan Manajemen Pendidikan Dasar	1	Pemenuhan standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan melalui peningkatan ketersediaan dan kapasitas tenaga pendidik dan kependidikan profesional termasuk yang berstatus non-PNS serta peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan.
				2	Pengembangan layanan pendidikan dasar yang merata di seluruh unit pendidikan
				3	Pemberian beasiswa dan bantuan pendidikan
				4	Inovasi layanan pendidikan berbasis teknologi informatika
				5	Rintisan fasilitasi layanan pendidikan inklusif
				6	Pengintegrasian nilai-nilai keagamaan, kebangsaan, pendidikan karakter, dan kearifan lokal di satuan pendidikan dasar
	S.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	I.2 Indeks Kesehatan	Meningkatkan Aksesibilitas, Mutu dan Layanan Kesehatan	1	Pemenuhan standar pelayanan kesehatan melalui peningkatan ketersediaan dan kapasitas tenaga kesehatan profesional serta kualitas sarana prasarana kesehatan
				2	Peningkatan kualitas manajemen RSUD SMC dan Rintisan Pembangunan RSUD Cikatomas, Ciawi, Karangnunggal, dan Manonjaya

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
				3	Peningkatan kualitas layanan kesehatan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama
				4	Percepatan vaksinasi COVID-19 sesuai target nasional (100%)
				5	Pembinaan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam kepesertaan jaminan kesehatan
				6	Optimalisasi SIGESIT 119, Layanan Cepat Tanggap Darurat Kesehatan
			Penguatan upaya promotif dan preventif serta pemberdayaan masyarakat	1	Penerapan Pola Hidup Bersih dan Sehat
				2	Peningkatan disiplin protokol kesehatan dalam setiap kegiatan
				3	Penguatan peran serta institusi masyarakat dalam upaya promotif dan preventif
				4	Peningkatan budaya olahraga rekreasi dan olahraga prestasi
			Meningkatkan pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi	1	Peningkatan cakupan penggunaan alat kontrasepsi pada Pasangan Usia Subur
				2	Peningkatan promosi dan edukasi tentang Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga dan Keluarga Berencana)
	S.3 Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial, Rehabilitasi Sosial dan Pemberdayaan sosial	1.3. Persentase Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Pemenuhan kebutuhan dasar dan pemberdayaan ekonomi berbasis keluarga	1	Pemenuhan perlindungan dan jaminan sosial bagi keluarga miskin dan kelompok rentan serta rehabilitasi sosial dasar bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
				2	Pemberdayaan keluarga miskin melalui pengembangan program usaha bersama berbasis keluarga
				3	Peningkatan peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam pelayanan kesejahteraan sosial

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
				4	Optimalisasi Unit Pelayanan Cepat Penanggulangan Kemiskinan (UPCPK) di seluruh kecamatan (Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi dan Masalah Sosial)
				5	Bea siswa bagi mahasiswa berprestasi dari keluarga miskin
	S.4. Meningkatnya pelestarian dan pengembangan kebudayaan lokal	I.4 Persentase Pemajuan Kebudayaan	Meningkatkan pelestarian seni dan budaya lokal	1	Meningkatkan kualitas dan revitalisasi budaya lokal dalam kegiatan produktif bagi pembangunan daerah
	S.5 Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.	I.5 Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Pengarusutamaan gender dalam pembangunan	1	Pemberdayaan perempuan melalui peningkatan peran perempuan dalam kegiatan pembangunan
		I.6 Indikator Kabupaten Layak Anak	Peningkatan perlindungan dan pemenuhan hak anak	1	Perlindungan anak dari kasus kekerasan dan peningkatan layanan kualitas hidup anak
				2	Pengembangan dan pelembagaan Desa Layak Anak
Misi 2 : Mewujudkan Pemerintahan yang Melayani, Bersih, dan Profesional.					
T.2 Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	S.6 Meningkatnya koordinasi, akuntabilitas, dan profesionalitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah	I.7 Nilai LPPD	Peningkatan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang meliputi capaian kinerja makro dan capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.	1	Akselerasi persiapan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Tasikmalaya Selatan
				2	Peningkatan fasilitasi pembinaan Mental Spiritual kepada masyarakat termasuk : - Peningkatan dukungan kesejahteraan santri, ajengan/guru ngaji, dan marbot mesjid - Penguatan kegiatan keagamaan, mesjid, majelis taklim, madrasah, dan pondok pesantren - Penyediaan Kartu Sakti Santri - Penguatan peran DKM sebagai pusat pemberdayaan umat

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
					• Fasilitasi sertifikasi gratis tanah wakaf • Penyelenggaraan festival keislaman
				3	Peningkatan koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pendirian dan pengelolaan BUMD seperti : • Pembentukan dan pengembangan induk perusahaan daerah (<i>Holding Company</i>) • Pembentukan dan Pengembangan Bank/BPR Syariah • Optimalisasi manajemen BUMD • Pembentukan dewan ekonomi syariah Kabupaten Tasikmalaya
				4	Penguatan partisipasi publik melalui pengembangan komunikasi kepala daerah dengan masyarakat dalam forum rembug warga dan halaqah pembangunan daerah bersama para ulama dan tokoh masyarakat
				5	Meningkatkan fasilitasi dan harmonisasi kemitraan eksekutif-legislatif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
				6	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
				7	Penguatan peran kelembagaan masyarakat di skala lingkungan dalam kegiatan ketentraman dan ketertiban umum
				8	Penguatan wawasan kebangsaan, bela negara, toleransi, keharmonisan, dan kerukunan umat beragama
		I.8 Nilai SAKIP	Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	1	Penataan dan penguatan organisasi, dan tata laksana perangkat daerah
				2	Peningkatan pengawasan, evaluasi, dan pengukuran kinerja

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
				3	Peningkatan kualitas perencanaan yang sinergis, akuntabel, dan partisipatif
				4	Percepatan pembangunan daerah melalui sinergitas dan sinkronisasi perencanaan pemerintah kabupaten dan pemerintah desa
		I.9 Indeks Kepuasan Masyarakat	Peningkatan kualitas layanan publik	1	Peningkatan kualitas layanan publik yang cepat, mudah dan murah berbasis teknologi informasi
		I.10 Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah	1	Optimalisasi ketepatan alokasi dan distribusi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk peningkatan kesejahteraan rakyat dann pemenuhan pelayanan dasar
				2	Optimalisasi pemanfaatan aset daerah
				3	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
		I.11 Indeks Profesionalitas ASN	Meningkatkan kualitas manajemen ASN	1	Implementasi Sistem Merit
				2	Peningkatan kapasitas, disiplin, kinerja, dan kesejahteraan aparatur
		I.12 Indeks Inovasi Daerah	Memfasilitasi dan mendorong tumbuhnya inovasi daerah	1	Apresiasi inovasi daerah melalui lomba penyelenggaraan inovasi daerah
				2	Adopsi dan promosi inovasi daerah
				3	Peningkatan kerjasama dengan lembaga penelitian dan pengembangan
Misi 3 : Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Penguatan Desa Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Pertanian Dan Pariwisata.					
T.3 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis sektor-sektor unggulan	S.7 Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan daya saing sektor pertanian, perikanan, KUMKM, Perindustrian,	I.13 PDRB Per Kapita	Peningkatan produksi dan nilai tambah produk pertanian	1	Pengembangan kualitas dan regenerasi SDM pertanian
				2	Pembangunan dan pengembangan prasarana sarana pertanian
				3	Pengembangan kawasan pertanian berkelanjutan
				4	Peningkatan produksi dan produktifitas pertanian dan peternakan
				5	Pengembangan komoditas unggulan pertanian

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
	perdagangan dan pariwisata berbasis perdesaan			6	Pengembangan potensi, diversifikasi, modernisasi dan industrialisasi produk pertanian terstandar dalam upaya menembus pasar nasional dan internasional
				7	Asuransi petani
			Peningkatan diversifikasi dan pengolahan pangan	1	Peningkatan ketersediaan dan distribusi pangan
				2	Peningkatan keamanan pangan
				3	Penganekaragaman konsumsi pangan
			Peningkatan produksi dan nilai tambah produk perikanan	1	Pengembangan kualitas dan regenerasi SDM perikanan
				2	Pengembangan prasarana dan sarana perikanan
				3	Peningkatan produksi dan produktifitas perikanan
				4	Pengembangan olahan dan pemasaran produk perikanan
				5	Asuransi nelayan
			Pengembangan usaha mikro dan koperasi	1	Fasilitasi Wirausaha di perdesaan
				2	Penguatan kapasitas dan fasilitasi kemudahan akses permodalan bagi pelaku usaha pertanian, koperasi, usaha mikro serta ekonomi kreatif
				3	Fasilitasi sertifikasi produk usaha mikro (PIRT, HAKI, dan Label Halal)
				4	Penguatan SDM dan kelembagaan koperasi
					Peningkatan kewirausahaan pemuda
			Meningkatnya kelancaran distribusi arus barang dan jasa secara aman dan terkendali	1	Peningkatan volume perdagangan melalui pembangunan pasar, pasar digital, dan peningkatan kualitas pasar rakyat yang sehat dan bersih
				2	Peningkatan promosi perdagangan dan kemudahan prosedur ekspor
				3	Penyediaan data barang kebutuhan pokok dan barang penting di pasar
				4	Perlindungan Konsumen melalui Penyelenggaraan Metrologi Legal

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
			Menumbuhkan sektor industri kecil dan menengah berbasis komoditas unggulan daerah	1	Penguatan IKM melalui fasilitasi kemitraan, legalitas usaha dan peningkatan sarana produksi
				2	Pembangunan kawasan industri terpadu dalam memanfaatkan momentum pembangunan jalan tol Bandung-Tasik-Cilacap
				3	Pembangunan Tasik Industrial Park di Tasikmalaya Selatan
			Peningkatan pariwisata lokal berbasis desa dan kawasan	1	Pengembangan dan peningkatan daya saing destinasi wisata desa berbasis komunitas dengan memperhatikan pemuliaan lingkungan
				2	Pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung destinasi wisata
				3	Peningkatan SDM kepariwisataan
				4	Pengembangan pemasaran pariwisata melalui sistem digital
				5	Pengembangan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal
			Penguatan peran dan partisipasi masyarakat dan desa dalam pengelolaan dan pengembangan ekonomi lokal	1	Peningkatan Akuntabilitas Pemerintahan Desa
				2	Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan potensi desa
				3	Pengembangan BUMDes sebagai upaya meningkatkan perekonomian desa
				4	Peningkatan kapasitas pemerintah desa, badan permusyawaratan desa, dan RT/RW
			Misi 4 : Mewujudkan Iklim Investasi Yang Kondusif Dalam Upaya Mendorong Pengembangan Usaha dan Penciptaan Lapangan Kerja Melalui Pengembangan Kerjasama Skala Lokal, Nasional, Regional, Dan Global.		
T.4 Meningkatkan investasi daerah	S.8 Meningkatnya Realisasi Investasi Kabupaten Tasikmalaya	I.14 Pertumbuhan Realisasi Investasi	Menciptakan iklim yang kondusif untuk mendorong investasi	1	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) dan Pengembangan Peta Digital Potensi Investasi
				2	Pemberian insentif penanaman modal

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
				3	Pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal melalui Penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik
				4	Peningkatan promosi dan pengendalian penanaman modal
			Mencetak tenaga kerja unggul berdaya saing	1	Peningkatan kapasitas tenaga kerja lokal yang unggul dan Fasilitasi pelatihan kerja sesuai dengan kebutuhan pasar dan mendukung ekonomi daerah melalui Sistem Pelatihan Mobile Training Unit Harian (MATUH)
				2	Peningkatan prasarana dan sarana balai latihan kerja
				3	Peningkatan kesempatan kerja melalui fasilitasi bursa kerja dan padat karya
				4	Perlindungan dan pendampingan ketenagakerjaan
			Memantapkan penyediaan infrastruktur konektivitas antar wilayah	1	Penataan infrastruktur kawasan ibu kota pemerintahan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan investasi daerah
				2	Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur yang mendukung pengembangan sentra produksi pertanian, pusat perdagangan, dan destinasi pariwisata
				3	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang
			Meningkatkan penataan perumahan dan kawasan pemukiman yang sehat dan berkelanjutan	1	Pembangunan Rumah Layak Huni dan Penataan Kawasan Perumahan dan Permukiman
				2	Penguatan sistem sanitasi lingkungan wilayah Kabupaten
				3	Peningkatan Drainase Perkotaan dan Lingkungan
				4	Peningkatan Sarana dan Prasarana Persampahan
				5	Pengembangan dan pemeliharaan sumber daya air baku dan air minum untuk mendukung kebutuhan masyarakat
			Memantapkan sistem transportasi antar wilayah	1	Meningkatkan sarana prasarana dan pelayanan di bidang perhubungan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
			guna peningkatan mobilitas orang dan barang antar wilayah	2	Meningkatkan cakupan penerangan jalan umum (Tasik Caang)
			Peningkatan tatakelola lingkungan hidup dan ketahanan bencana	1	Pengembangan Tempat Pengelolaan Sampah <i>Reduce Reuse Recycle</i> (TPS3R)
				2	Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pembangunan berwawasan lingkungan dengan memperhatikan kelestarian kualitas air, udara, dan tutupan lahan
				5	Meningkatkan ketangguhan daerah terhadap bencana

Sumber: Bappelitbangda Kab. Tasikmalaya, 2024

Arah kebijakan merupakan keputusan dari *stakeholder* sebagai pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Dan berdasarkan Arah Kebijakan yang diuraikan sebelumnya, maka tema atau fokus pembangunan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya untuk Tahun 2025 adalah:

“Pertumbuhan Ekonomi melalui Peningkatan Daya Saing dan Inovasi Daerah”

4.2.4. Prioritas Pembangunan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025

Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 disusun berdasarkan isu strategis serta memuat janji Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya, yang tertuang dalam prioritas pembangunan dan arah kebijakan RPJMD Tahun 2021-2026, sehingga keterkaitan prioritas pembangunan daerah dalam RKPD Tahun 2025 dengan arah kebijakan RPJMD untuk Tahun 2025 sangat erat. Terdapat 9 (sembilan) prioritas pembangunan daerah Kabupaten Tasikmalaya pada Tahun 2025 meliputi:

1. **Prioritas 1**, yaitu Peningkatan Pelayanan Pendidikan
2. **Prioritas 2**, yaitu Peningkatan Pelayanan Kesehatan Daerah serta Penurunan Angka Prevalensi Stunting
3. **Prioritas 3**, yaitu Pembangunan Infrastruktur untuk Peningkatan Konektivitas Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi
4. **Prioritas 4**, yaitu Mitigasi dan Penanggulangan Bencana
5. **Prioritas 5**, yaitu Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem
6. **Prioritas 6**, yaitu Peningkatan Infrastruktur dan Daya Saing Produk Pertanian dan Perikanan untuk Menunjang Ketahanan Pangan
7. **Prioritas 7**, yaitu Peningkatan Ekonomi Masyarakat melalui Pengembangan Sektor Unggulan Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
8. **Prioritas 8**, yaitu Inovasi Pelayanan Publik
9. **Prioritas 9**, yaitu Peningkatan Kemandirian Desa

Adapun 9 (sembilan) prioritas pembangunan daerah Kabupaten Tasikmalaya pada Tahun 2025 beserta fokusnya yaitu:

1. Peningkatan Pelayanan Pendidikan



Gambar 4.6
Fokus Dalam Prioritas Daerah “Peningkatan Pelayanan Pendidikan”

Sumber: Bappelitbangda Kab. Tasikmalaya, 2024

2. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Daerah serta Penurunan Angka Prevalensi Stunting



Gambar 4.7
Fokus Dalam Prioritas Daerah “Peningkatan Pelayanan Kesehatan Daerah serta Penurunan Angka Prevalensi Stunting”

Sumber: Bappelitbangda Kab. Tasikmalaya, 2024

3. Pembangunan Infrastruktur untuk Peningkatan Konektivitas Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi



Gambar 4.8
Fokus Dalam Prioritas Daerah “Pembangunan Infrastruktur untuk Peningkatan Konektivitas Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi”

Sumber: Bappelitbangda Kab. Tasikmalaya, 2024

4. Mitigasi dan Penanggulangan Bencana



Gambar 4.9
Fokus Dalam Prioritas Daerah “Mitigasi dan Penanggulangan Bencana”

Sumber: Bappelitbangda Kab. Tasikmalaya, 2024

5. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem



Gambar 4.10
Fokus Dalam Prioritas Daerah “Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem”

Sumber: Bappelitbangda Kab. Tasikmalaya, 2024

6. Peningkatan Infrastruktur dan Daya Saing Produk Pertanian dan Perikanan untuk Menunjang Ketahanan Pangan



Gambar 4.11
Fokus Dalam Prioritas Daerah “Peningkatan Infrastruktur dan Daya Saing Produk Pertanian dan Perikanan untuk Menunjang Ketahanan Pangan”

Sumber: Bappelitbangda Kab. Tasikmalaya, 2024

7. Peningkatan Ekonomi Masyarakat melalui Pengembangan Sektor Unggulan Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro

Prioritas 7: Peningkatan Ekonomi Masyarakat melalui Pengembangan Sektor Unggulan Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro



Gambar 4.12
Fokus Dalam Prioritas Daerah “Peningkatan Ekonomi Masyarakat melalui Pengembangan Sektor Unggulan Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro”

Sumber: Bappelitbangda Kab. Tasikmalaya, 2024

8. Inovasi Pelayanan Publik

Prioritas 8 : Inovasi Pelayanan Publik



Gambar 4.13
Fokus dalam Prioritas Daerah “Inovasi Pelayanan Publik”

Sumber: Bappelitbangda Kab. Tasikmalaya, 2024

9. Peningkatan Kemandirian Desa



Gambar 4.14
Fokus dalam Prioritas Daerah “Peningkatan Kemandirian Desa”

Sumber: Bappelitbangda Kab. Tasikmalaya, 2024

Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 disusun berdasarkan arah kebijakan pada RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026, permasalahan dan isu strategis pembangunan tahun 2025, serta mempertimbangkan pokok-pokok pikiran DPRD Tahun 2025. Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2021-2026, permasalahan pembangunan dan isu strategis dituangkan pada tabel berikut.

Tabel 4.4
Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Permasalahan Pembangunan, Isu Strategis dan Arah Kebijakan
RPJMD Tahun 2021-2026

Permasalahan Pembangunan RKPD Tahun 2025	Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025	Arah Kebijakan RKP 2025	Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2021-2026	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025
1. Kemampuan literasi dan numerasi siswa dibawah kompetensi minimum. 2. Belum tuntasnya pembangunan rumah sakit pemerintah di 4 lokasi (Karangnunggal, Ciawi, Manonjaya dan Cikatomas)	- Aksesibilitas dan Keterjangkauan Pelayanan Dasar yang Berkualitas	SDM Berdaya Saing dan Produktif	Pemenuhan standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan melalui peningkatan ketersediaan dan kapasitas tenaga pendidik dan kependidikan profesional termasuk yang berstatus non-PNS serta peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan.	P1. Peningkatan Pelayanan Pendidikan P2. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Daerah serta Penurunan Angka Prevalensi Stunting P5. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem
			Pengembangan layanan pendidikan dasar yang merata di seluruh unit pendidikan	
			Pemberian beasiswa dan bantuan pendidikan	
			Inovasi layanan pendidikan berbasis teknologi informatika	
			Rintisan fasilitasi layanan pendidikan inklusif	

Permasalahan Pembangunan RKPD Tahun 2025	Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025	Arah Kebijakan RKP 2025	Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2021-2026	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025
			Pengintegrasian nilai-nilai keagamaan, kebangsaan, pendidikan karakter, dan kearifan lokal di satuan pendidikan dasar	
1. Masih kurangnya tenaga kesehatan dalam menunjang Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat		Pemenuhan standar pelayanan kesehatan melalui peningkatan ketersediaan dan kapasitas tenaga kesehatan profesional serta kualitas sarana prasarana kesehatan	
2. Perlunya peningkatan kapasitas tenaga kesehatan			Peningkatan kualitas manajemen RSUD SMC dan Rintisan Pembangunan RSUD Cikatomas, Ciawi, Karangnunggal, dan Manonjaya	
3. Kurangnya fasilitas pelayanan kesehatan rujukan			Peningkatan kualitas layanan kesehatan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama	
4. Belum optimalnya mutu pelayanan kesehatan			Pembinaan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam kepesertaan jaminan kesehatan	
5. Perlunya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pola hidup bersih dan sehat				
6. Masih rendahnya prestasi olahraga Kabupaten Tasikmalaya				
7. Sarana dan prasarana olahraga kurang memadai				

Permasalahan Pembangunan RKPD Tahun 2025	Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025	Arah Kebijakan RKP 2025	Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2021-2026	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025
1. Data kemiskinan yang tersedia belum terintegrasi dan termutakhirkan 2. Intervensi program dan kegiatan terhadap sasaran belum optimal	Penanganan Kemiskinan		Optimalisasi SIGESIT 119, Layanan Cepat Tanggap Darurat Kesehatan	
			Optimalisasi SIGESIT 119, Layanan Cepat Tanggap Darurat Kesehatan	
			Pemenuhan perlindungan dan jaminan sosial bagi keluarga miskin dan kelompok rentan serta rehabilitasi sosial dasar bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	
			Pemberdayaan keluarga miskin melalui pengembangan program usaha bersama berbasis keluarga	
			Peningkatan peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam pelayanan kesejahteraan sosial	
			Optimalisasi Unit Pelayanan Cepat Penanggulangan Kemiskinan (UPCPK) di seluruh kecamatan (Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi dan Masalah Sosial)	

Permasalahan Pembangunan RKPD Tahun 2025	Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025	Arah Kebijakan RKP 2025	Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2021-2026	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025
			Beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dari keluarga miskin	
1. Kompetensi angkatan kerja belum sesuai kebutuhan pasar kerja 2. Sarana dan prasarana pelatihan tenaga kerja kurang memadai	Penangan Pengangguran		Peningkatan kapasitas tenaga kerja lokal yang unggul dan Fasilitas pelatihan kerja sesuai dengan kebutuhan pasar dan mendukung ekonomi daerah melalui Sistem Pelatihan Mobile Training Unit Harian (MATUH)	
			Peningkatan prasarana dan sarana balai latihan kerja	
			Peningkatan kesempatan kerja melalui fasilitasi bursa kerja dan padat karya	
			Perlindungan dan pendampingan ketenagakerjaan	
1. Belum optimalnya upaya pencegahan stunting (remaja minum tablet tambah darah, penyuluhan kesehatan terhadap calon pengantin, asupan gizi yang baik bagi ibu hamil/menyusui serta balita). 2. Masih rendahnya kesadaran ibu hamil dalam	Penurunan Angka Stunting, AKI dan AKB		Peningkatan cakupan penggunaan alat kontrasepsi pada Pasangan Usia Subur	
			Peningkatan promosi dan edukasi tentang Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga dan Keluarga Berencana)	

Permasalahan Pembangunan RKPD Tahun 2025	Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025	Arah Kebijakan RKP 2025	Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2021-2026	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025
pemeriksaan kandungan. 3. Perlunya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pola hidup bersih dan sehat.			Penerapan Pola Hidup Bersih dan Sehat Peningkatan disiplin protokol kesehatan dalam setiap kegiatan Penguatan peran serta institusi masyarakat dalam upaya promotif dan preventif Peningkatan budaya olahraga rekreasi dan olahraga prestasi	
1. Masih tingginya inflasi 2. Masih rendahnya daya saing produk usaha mikro 3. Masih terbatasnya jumlah pelaku usaha mikro yang memiliki sertifikat produk 4. Belum teralokasinya Pasar Singaparna	Pemulihan Masyarakat Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi yang Menciptakan Lapangan Kerja Berkualitas, Menurunkan Ketimpangan dan Penciptaan Produk Ramah Lingkungan	Pengembangan kualitas dan regenerasi SDM pertanian Pembangunan dan pengembangan prasarana sarana pertanian Pengembangan kawasan pertanian berkelanjutan Peningkatan produksi dan produktifitas pertanian dan peternakan Pengembangan komoditas unggulan pertanian Pengembangan potensi, diversifikasi, modernisasi dan industrialisasi produk pertanian terstandar dalam	P7. Peningkatan Ekonomi Masyarakat melalui Pengembangan Sektor Unggulan Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro P9. Peningkatan Kemandirian Desa
1. Kurangnya pemahaman pelaku pariwisata mengenai perilaku kepariwisataan (Sapta Pesona dan CHSE) 2. Masih terbatasnya infrastruktur dan fasilitas pariwisata (destinasi wisata	Peningkatan Daya Saing Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Berbasis Komunitas			

Permasalahan Pembangunan RKPD Tahun 2025	Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025	Arah Kebijakan RKP 2025	Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2021-2026	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025
dan desa wisata) 3. Belum optimalnya kerjasama dan jejaring ekonomi kreatif			upaya menembus pasar nasional dan internasional	
			Asuransi petani	
1. Belum adanya Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) 2. Masih terbatasnya dokumen dan media potensi investasi Kabupatn Tasikmalaya	Memperluas Jejaring Kerjasama dan Investasi di bidang Pertanian dan Kepariwisata		Peningkatan ketersediaan dan distribusi pangan	
			Peningkatan keamanan pangan	
1. Terbatasnya produk pertanian yang mempunyai nilai tambah 2. Terbatasnya lahan pertanian organik yang disertifikasi 3. Masih terbatasnya infrastruktur pertanian dan perikanan	Peningkatan Daya Saing Produk Pertanian di Pasar Lokal, Nasional, Regional dan Global		Penganekaragaman konsumsi pangan	
			Pengembangan kualitas dan regenerasi SDM perikanan	
			Pengembangan prasarana dan sarana perikanan	
1. Masih banyak ruas jalan dalam kondisi rusak 2. Belum memadainya pemenuhan penyediaan air baku untuk kebutuhan masyarakat yang bersumber	Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Layanan Infrastruktur Daerah	Infrastruktur untuk peningkatan produktivitas	Peningkatan produksi dan produktifitas perikanan	P3. Pembangunan Infrastruktur untuk Peningkatan Konektivitas Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi
			Pengembangan olahan dan pemasaran produk perikanan	P6. Peningkatan Infrastruktur
			Asuransi nelayan	

Permasalahan Pembangunan RKPD Tahun 2025	Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025	Arah Kebijakan RKP 2025	Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2021-2026	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025
dari daerah irigasi 3. Masih banyak rumah tangga yang rawan sanitasi dan air bersih terutama di daerah dataran tinggi 4. Belum optimalnya penanganan dan ketersediaan rumah layak huni 5. Belum memadainya sarana dan prasarana persampahan 6. Belum memadainya sarana dan prasarana lalu lintas			Fasilitasi Wirausaha di perdesaan Penguatan kapasitas dan fasilitasi kemudahan akses permodalan bagi pelaku usaha pertanian, koperasi, usaha mikro serta ekonomi kreatif Fasilitasi sertifikasi produk usaha mikro (PIRT, HAKI, dan Label Halal) Penguatan SDM dan kelembagaan koperasi Peningkatan kewirausahaan pemuda Peningkatan volume perdagangan melalui pembangunan pasar, pasar digital, dan peningkatan kualitas pasar rakyat yang sehat dan bersih Perlindungan Konsumen melalui Penyelenggaraan Metrologi Legal Penguatan IKM melalui fasilitasi kemitraan, legalitas usaha dan peningkatan sarana produksi	dan Daya Saing Produk Pertanian dan Perikanan untuk Menunjang Ketahanan Pangan P4. Mitigasi dan Penanggulangan Bencana

Permasalahan Pembangunan RKPD Tahun 2025	Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025	Arah Kebijakan RKP 2025	Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2021-2026	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025
			Pembangunan kawasan industri terpadu dalam memanfaatkan momentum pembangunan jalan tol Bandung-Tasik-Cilacap Pembangunan Tasik Industrial Park di Tasikmalaya Selatan Pengembangan dan peningkatan daya saing destinasi wisata desa berbasis komunitas dengan memperhatikan pemuliaan lingkungan Pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung destinasi wisata Peningkatan SDM kepariwisataan Pengembangan pemasaran pariwisata melalui sistem digital Pengembangan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal Peningkatan Akuntabilitas Pemerintahan Desa	

Permasalahan Pembangunan RKPD Tahun 2025	Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025	Arah Kebijakan RKP 2025	Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2021-2026	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025
			Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan potensi desa Pengembangan BUMDes sebagai upaya meningkatkan perekonomian desa Peningkatan kapasitas pemerintah desa, badan permusyawaratan desa, dan RT/RW	
1. Bangunan Fasilitas Publik sebagai sarana pelayanan kepada masyarakat belum memadai dan beberapa bangunan perkantoran yang menyelenggarakan pelayanan publik masih berada di wilayah Kota Tasikmalaya.	Penataan Kawasan Ibu Kota Kabupaten Tasikmalaya		Akselerasi persiapan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Tasikmalaya Selatan	
1. Masih kurangnya kewaspadaan dini dan mitigasi bencana kebakaran dan non kebakaran. 2. Masih kurangnya fasilitas pemadam kebakaran.	Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana		Meningkatkan ketangguhan daerah terhadap bencana	
1. Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi 2. Belum optimalnya sarana	Reformasi Birokrasi untuk Pemerintahan yang Baik dan Efektif Berbasis Teknologi Informasi	SDM Berdaya Saing dan Produktif	Peningkatan promosi perdagangan dan kemudahan prosedur ekspor	P8. Inovasi Pelayanan Publik

Permasalahan Pembangunan RKPD Tahun 2025	Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025	Arah Kebijakan RKP 2025	Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2021-2026	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025
dan prasarana untuk pelayanan perizinan			Penyediaan data barang kebutuhan pokok dan barang penting di pasar	

Sumber: Bappelitbangda Kab. Tasikmalaya, 2024

4.2.4.1. Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025 dengan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Pokok-pokok pikiran DPRD dalam kerangka penyusunan RKPD Tahun 2025 berisi saran dan pendapat DPRD yang merupakan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Pentingnya pokok-pokok pikiran ini adalah untuk memastikan aspirasi masyarakat yang ditampung anggota DPRD dapat menjadi rencana kerja pemerintah daerah di tahun yang akan datang.

Tujuan disusunnya pokok-pokok pikiran DPRD adalah sebagai berikut:

- 1. Memberikan bahan, arahan sekaligus masukan kepada Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dalam menyusun dokumen RKPD tahun anggaran 2025;
- 2. Mengarahkan penyusunan kebijakan dan program pembangunan sesuai dengan RPJPD dan RPJMD;
- 3. Mewujudkan aspirasi masyarakat Kabupaten Tasikmalaya dalam pelaksanaan pembangunan melalui fungsi representasi DPRD Kabupaten Tasikmalaya; dan
- 4. Mendukung terwujudnya tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya yang lebih baik.

Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025 dengan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Tahun 2025 disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.5
Keterkaitan Pokok-Pokok Pikiran DPRD dengan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025

Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Prioritas Pembangunan Daerah
Permasalahan Pendidikan: 1. Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarama PAUD, SKB/PKBM, SD dan SMP 2. Pengadaan perlengkapan siswa PAUD, SKB/PKBM, SD dan SMP Kurang mampu 3. Pengadaan perlengkapan sekolah PAUD, SKB/PKBM, SD dan SMP Kurang mampu	P1 Peningkatan Pelayanan Pendidikan

Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Prioritas Pembangunan Daerah
4. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	
Permasalahan Kebudayaan Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	P1 Peningkatan Pelayanan Pendidikan
Permasalahan Kesehatan 1. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas Pembantu 2. Pemberian Makanan Tambahan untuk Balita Gizi Kurang dan Ibu Hamil KEK	P2 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Daerah serta Penurunan Angka Prevalensi Stunting
Permasalahan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1. Rehabilitasi Jaringan Irigasi 2. Pemeliharaan Berkala Jalan 3. Pembangunan/Pemeliharaan Berkala Jembatan 4. Rekonstruksi Jalan 5. Pembangunan/Perluasan/ Peningkatan SPAM 6. MCK Komunal 7. Septictank Individu 8. Pembangunan TPA/TPST/TPS3R	P3 Pembangunan Infrastruktur untuk Peningkatan Konektivitas Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi
Permasalahan Lingkungan Hidup Peningkatan Kapasitas Masyarakat dan Pengelolaan Persampahan	P3 Pembangunan Infrastruktur untuk Peningkatan Konektivitas Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi
Permasalahan Perhubungan Fasilitasi Perhubungan (PJU, Rambu-rambu Guardrail, Warning Light dan Marka Jalan)	P3 Pembangunan Infrastruktur untuk Peningkatan Konektivitas Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi
Permasalahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 1. Rumah korban bencana 2. Rumah tidak layak huni	P4 Mitigasi dan Penanggulangan Bencana
Permasalahan Pangan 1. Pengadaan Cadangan Pangan Masyarakat/Lumbung Pangan Masyarakat 2. Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat	P6 Peningkatan Infrastruktur dan Daya Saing Produk Pertanian dan Perikanan untuk Menunjang Ketahanan Pangan
Permasalahan Pertanian 1. Pembangunan/Rehabilitasi Embung 2. Pengembangan/Rehabilitasi Dam Parit 3. Pengembangan/Rehabilitasi Irigasi Air Tanah (Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier/Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal)	P6 Peningkatan Infrastruktur dan Daya Saing Produk Pertanian dan Perikanan untuk Menunjang Ketahanan Pangan

Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Prioritas Pembangunan Daerah
4. Pengembangan/Rehabilitasi Irigasi Perpipaan 5. Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Pertanian 6. Pengembangan Ayam Buras 7. Pengembangan Ayam Ras Petelur 8. Pengembangan Perbibitan Ternak Itik 9. Pengembangan Hijauan Pakan Ternak (HPT) 10. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluh Pertanian 11. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Petani	
Permasalahan Kelautan dan Perikanan 1. Peningkatan Kapasitas Nelayan Kecil 2. Peningkatan Kapsitas Pembudidaya Ikan Peningkatan Kapasitas Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan	P6 Peningkatan Infrastruktur dan Daya Saing Produk Pertanian dan Perikanan untuk Menunjang Ketahanan Pangan
Permasalahan Pariwisata 1. Penguatan Promosi Pariwasata Baik Melalui Media Cetaj, Elektronik ata Media lainnya 2. Peningkatan Kapasitas SDM Pelaku Ekonomi Kreatif 3. Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Desa Wisata 4. Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Destinasi Wisata 5. Pengadaan Sarana/Fasilitas Penunjang Destinasi Wisata (Fasilitas Kebersiham, Fasilitas Mitigasi Bencana Alam, Keamanan & Keselamatan) 6. Fasilitas Peningkatan Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata 7. Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata melalui Event 8. Penyediaan Data Kepariwisataan	P7 Peningkatan Ekonomi Masyarakat melalui Pengembangan Sektor Unggulan Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
Permasalahan Kepemudaan dan Olahraga 1. Pemberdayaan Wirausaha Pemuda 2. Pembangunan/Rehabilitasi serta Pengadaaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi dan Olahraga Prestasi 3. Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Olahraga	P7 Peningkatan Ekonomi Masyarakat melalui Pengembangan Sektor Unggulan Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
Permasalahan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 1. Fasilitas Sertifikasi PIRT, Fasilitas Merek Dagang (HAKI), Sertifikat Halal	P7 Peningkatan Ekonomi Masyarakat melalui Pengembangan Sektor Unggulan Pariwisata,

Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Prioritas Pembangunan Daerah
2. Pembinaan dan Pelatihan Koperasi 3. Peningkatan Kapasitas Pelaku UMKM 4. Pendampingan dan Fasilitasi UMKM 5. Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Koperasi 6. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Koperasi	Ekonomi Kreatif, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
Permasalahan Kesatuan Bangsa dan Politik 1. Peningkatan Pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Bangsa 2. Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik 3. Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penyalahgunaan Minuman Keras dan Narkotika 4. Fasilitas Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan	P8 Inovasi Pelayanan Publik

Sumber: Hasil analisis Bappelitbangda Kab. Tasikmalaya, 2024

4.2.4.2. Penjabaran Prioritas Pembangunan ke Dalam Program Pembangunan Daerah

Penjabaran prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2025 ke dalam program prioritas dan program pembangunan daerah, disertai indikator kinerja program, pagu anggaran dan perangkat daerah penanggungjawab sebagaimana disajikan pada tabel 4.6 berikut.

Tabel 4.6

Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah, Program Prioritas, Pagu Anggaran dan Perangkat Daerah Penanggungjawab

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran (RPJMD)	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2025	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Target 2025	Pagu	Perangkat Daerah
1	P.1 Peningkatan pelayanan pendidikan	S.1 Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya	I.1 Indeks Pendidikan	62,73 poin	Program Pengelolaan Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	100%	601.366.051.836	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100%		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	100%		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran (RPJMD)	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2025	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Target 2025	Pagu	Perangkat Daerah
					Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Persentase Pendidik Kualifikasi S1 dan Bersertifikat Pendidik	59,18%	16.500.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Persentase pendidikan dasar, paud dan PNF yang diselenggarakan oleh masyarakat yang memiliki izin	100%	467.500.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		S.4. Meningkatnya pelestarian dan Pengembangan kebudayaan lokal	I.4 Persentase Pemajuan Kebudayaan	39,32%	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase adat budaya yang terfasilitasi	32%	700.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase sanggar seni yang dibina	45%	1.900.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase cagar budaya yang dikelola	46,50%	300.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			TOTAL ANGGARAN						
2	P.2 Peningkatan pelayanan kesehatan daerah serta penurunan angka	S.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	I.2 Indeks Kesehatan	83,58	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase standar pelayanan kesehatan (SPM) yang mencapai 100% (12 standar pelayanan)	83,30%	259.094.420.518	Dinas Kesehatan

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran (RPJMD)	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2025	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Target 2025	Pagu	Perangkat Daerah
	prevalensi stunting.								
						Rasio Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Poliklinik per satuan penduduk (1 : 30.000)	1/64910		
						Rasio Rumah Sakit per satuan Penduduk	5,11		
						Prevalensi stunting(pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita	13%		
					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rasio Tenaga Medis per satuan penduduk	0,14 skor	3.864.168.585	Dinas Kesehatan

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran (RPJMD)	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2025	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Target 2025	Pagu	Perangkat Daerah
					Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase Cakupan pembinaan dan pengawasan sarana kefarmasian terdaftar	100%	1.200.703.297	Dinas Kesehatan
					Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase pelaksanaan gerakan masyarakat sehat	65%	2.928.100.000	Dinas Kesehatan
					Program Pengendalian Penduduk	Prosentase Pemakaian Kontrasepsi (CPR)	69,50%	1.352.500.000	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Jumlah Pemakaian Kontrasepsi Modern/mCPR (Metoda Contraceptive Prevalency Rate)	72 dokumen	15.752.975.000	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran (RPJMD)	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2025	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Target 2025	Pagu	Perangkat Daerah
					Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)	21 tahun	2.692.365.700	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase wirausaha muda	21,09%	6.770.000.000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
						Persentase Organisasi Pemuda yang aktif	25%		Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
					Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan	21,25%	516.500.000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
					Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Cakupan Pembinaan Olahraga	47,36%	13.454.000.000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran (RPJMD)	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2025	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Target 2025	Pagu	Perangkat Daerah
						Cakupan Pembinaan Atlet Muda	40%		Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
						Cakupan Pelatih yang Bersertifikat	33,33%		Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
TOTAL ANGGARAN								307.625.733.100	
	P.3 Pembangunan infrastruktur untuk peningkatan konektivitas pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.	S.8 Meningkatnya Realisasi Investasi Kabupaten Tasikmalaya	I.14 Pertumbuhan Realisasi Investasi	5%	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Kenaikan Jumlah Investor	5%	455.000.000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
					Program Promosi Penanaman Modal	Cakupan promosi potensi unggulan daerah dalam 1 tahun	6 pameran	750.000.000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran (RPJMD)	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2025	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Target 2025	Pagu	Perangkat Daerah
					Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase pelaku usaha yang taat LKPM	18%	695.000.000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
					Program Pelayanan Penanaman Modal	Jumlah Pelayanan Perizinan dan non Perizinan secara terpadu satu pintu	55 jenis izin	420.000.000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
					Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan kompetensi	1.200 orang	8.700.000.000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
					Program Penempatan Tenaga Kerja	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan	3.409 orang	12.117.836.636	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran (RPJMD)	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2025	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Target 2025	Pagu	Perangkat Daerah
					Program Perencanaan Tenaga Kerja	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja	1 dokumen	200.000.000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
					Program Hubungan Industrial	Persentase kasus HI yang diselesaikan	100%	650.000.000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
					Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Jumlah transmigran yang telah difasilitasi pembinaannya	40 orang	765.000.000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
					Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Penyediaan Sarana dan Prasarana Translok	2 paket	100.000.000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran (RPJMD)	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2025	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Target 2025	Pagu	Perangkat Daerah
					Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Cakupan Areal Daerah Irigasi (<1000 Ha) yang Terlayani	41.141,24 Ha	23.700.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
					Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Penduduk Berakses Air Minum Dengan Jaringan Perpipaan	20,96%	17.020.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
						Persentase Penduduk Berakses Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan	46,46%		

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran (RPJMD)	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2025	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Target 2025	Pagu	Perangkat Daerah
					Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase Ketersediaan Infrastruktur TPS3R	41,03%	4.485.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
						Persentase Ketersediaan Infrastruktur TPA	75%		
					Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Rumah Tinggal Dengan Pengelolaan Skala Setempat	45,97%	21.955.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
						Persentase Rumah Tinggal Dengan Pengelolaan Skala Terpusat	4,76%		

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran (RPJMD)	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2025	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Target 2025	Pagu	Perangkat Daerah
					Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Ketersediaan Bangunan Pemerintahan yang Layak Difungsikan	65,12%	9.805.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
					Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Persentase Ketersediaan fasilitas Pendukung Bangunan Pemerintahan	73,19%	11.470.063.000	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
					Program Penyelenggaraan Jalan	Perentase Panjang Jalan dalam Kondisi baik	55,47%	125.041.083.000	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran (RPJMD)	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2025	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Target 2025	Pagu	Perangkat Daerah
					Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Realisasi RTRW pada Struktur Ruang	46,15%	1.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
					Program Pengembangan Perumahan	Persentase Penanganan Rumah Terkena Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100%	300.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
					Program Kawasan Permukiman	Persentase Rumah Layak Huni Dikawasan Kumuh	9,88%	1.300.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran (RPJMD)	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2025	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Target 2025	Pagu	Perangkat Daerah
					Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Rumah Layak Huni Diluar Kawasan Kumuh	81,18%	1.870.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
					Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Peningkatan Jumlah Rumah yang terfasilitasi PSU	1,30%	425.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
					Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase penyelarasan dokumen perencanaan pembangunan dengan pengelolaan LH	100%	150.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran (RPJMD)	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2025	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Target 2025	Pagu	Perangkat Daerah
					Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase lokasi titik pantau air dan udara yang mempunyai kriteria minimal baik	75%	1.497.903.000	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
					Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase luas lahan RTH	0,80%	200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
					Program Pengelolaan Persampahan	Kapasitas sampah yang terkelola di sumber	172030 Kubik	2.968.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran (RPJMD)	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2025	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Target 2025	Pagu	Perangkat Daerah
					Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Fasilitas Perhubungan yang memadai	41,11%	3.752.011.800	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
TOTAL ANGGARAN								251.791.897.436	
	P.4 Mitigasi dan penanggulangan bencana.	S.8 Meningkatnya Realisasi Investasi Kabupaten Tasikmalaya	I.14 Pertumbuhan Realisasi Investasi	5%	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Penanggulangan Bencana	100%	3.004.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
					Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	100%	400.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran (RPJMD)	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2025	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Target 2025	Pagu	Perangkat Daerah
					Program Penanganan Bencana	Cakupan penanganan korban bencana alam dan bencana sosial pada saat dan setelah masa tanggap darurat bencana daerah	100%	2.240.000.000	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
TOTAL ANGGARAN								5.644.000.000	
	P.5 Percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem.	S.3 Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial, Rehabilitasi Sosial dan Pemberdayaan sosial	I.3 Persentase Pelayanan Kesejahteraan Sosial	68,65%	Program Pemberdayaan Sosial	Cakupan Pekerja Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial dan Relawan Sosial yang mengikuti peningkatan kapasitas	1.121 Orang	1.690.000.000	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran (RPJMD)	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2025	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Target 2025	Pagu	Perangkat Daerah
					Program Rehabilitasi Sosial	Persentase anak terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas terlantar, dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	100%	4.460.000.000	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Cakupan keluarga miskin dan rentan miskin yang menerima bantuan sosial untuk perlindungan dan jaminan sosial	67,40%	5.412.000.000	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Cakupan pengelolaan kawasan makam pahlawan HZ. Mustofa dalam 1 tahun	1	80.000.000	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran (RPJMD)	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2025	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Target 2025	Pagu	Perangkat Daerah
		S.5 Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.	I.5 Indeks Pembangunan Gender (IPG)	87,82 poin	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Cakupan kegiatan responsif gender pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat Kabupaten/Kota	2 Dokumen	1.370.000.000	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
						Cakupan perangkat daerah dan lembaga swasta yang mengikuti sosialisasi pelaksanaan PUG melalui PPRG kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen		
					Program Perlindungan Perempuan	Cakupan layanan bagi korban kekerasan perempuan	102 Orang	370.000.000	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran (RPJMD)	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2025	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Target 2025	Pagu	Perangkat Daerah
					Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Cakupan layanan peningkatan kualitas keluarga kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1.625.000.000	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			I.6 Indikator Kabupaten Layak Anak	Skor 615 (Menuju Madya)	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Cakupan Pemenuhan Hak Anak pada Pemerintah Non Pemerintah dan Dunia Usaha	111 Dokumen	2.450.000.000	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					Program Perlindungan Khusus Anak	Cakupan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Kabupaten/Kota	2 Dokumen	400.000.000	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
TOTAL ANGGARAN								17.857.000.000	

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran (RPJMD)	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2025	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Target 2025	Pagu	Perangkat Daerah
	P.6 Peningkatan infrastruktur dan daya saing produk pertanian dan perikanan untuk menunjang ketahanan pangan.	S.7 Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan daya saing sektor pertanian, perikanan, KUMKM, Perindustrian, perdagangan dan pariwisata berbasis pedesaan	I.13 PDRB Per Kapita	Rp 26,40 Juta/Orang	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase kelompok tani yang dilakukan monitoring dalam pemanfaatan sarana pertanian	39 kecamatan	3.934.814.628	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
					Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Prosentase Prasarana pertanian dengan kondisi baik (JUT, embung, RPH, dll)	215 Ha	12.400.000.000	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
					Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Prosentase Prasarana pertanian dengan kondisi baik (Keswan dan Veteriner)	9 paket	225.000.000	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran (RPJMD)	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2025	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Target 2025	Pagu	Perangkat Daerah
					Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Terkendalinya Bencana Pertanian dan Tertanggulangnya bencana pertanian	2 paket	82.475.000	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
					Program Penyuluhan Pertanian	Cakupan Bina Kelompok Tani dan terlaksananya penyuluhan pertanian	250 kelompok	10.496.032.777	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
					Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Persentase Ketersediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	1 unit	500.000.000	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
					Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Prosentase ketahanan pangan masyarakat	90 ton	1.766.350.382	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
					Program Pengawasan Keamanan Pangan	Prosentase keamanan pangan masyarakat	18 kecamatan	288.768.750	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran (RPJMD)	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2025	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Target 2025	Pagu	Perangkat Daerah
					Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi perikanan tangkap	1.870,88 tom	2.650.000.000	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
					Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Prosentase legalitas usaha perikanan budidaya		2.814.446.606	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
					Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Prosentase tanda daftar usaha pengolah hasil perikanan		800.000.000	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
TOTAL ANGGARAN								35.957.888.143	
	P.7 Peningkatan ekonomi masyarakat melalui pengembangan sektor unggulan pariwisata, ekonomi kreatif, perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro.	S.7 Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan daya saing sektor pertanian, perikanan, KUMKM, Perindustrian, perdagangan dan pariwisata	I.13 PDRB Per Kapita	Rp 26,40 Juta/Orang	Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	Persentase Koperasi Sehat	53,14%	700.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran (RPJMD)	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2025	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Target 2025	Pagu	Perangkat Daerah
		berbasis pedesaan							
					Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase Koperasi Aktif	100%	550.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
					Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	persentase koperasi yang dibina	100%	800.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran (RPJMD)	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2025	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Target 2025	Pagu	Perangkat Daerah
					Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkh)	Persentase Usaha mikro Formal	37,70%	4.511.945.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
					Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Presentase sarana perdagangan yang mendukung aktifitas perdagangan	100%	26.950.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
					Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase Kenaikan Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat (Kepokmas)	1%	2.600.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
					Program Pengembangan Ekspor	Persentase Kenaikan Ekspor bersih Produk Kabupaten Tasikmalaya	2%	850.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran (RPJMD)	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2025	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Target 2025	Pagu	Perangkat Daerah
					Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase peningkatan jumlah alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang di tera dan tera ulang	5%	100.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
					Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Jumlah Pelaku Usaha Perdagangan formal	1613 unit usaha	400.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
					Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase Peningkatan Jumlah Indutri Kecil dan Menengah	1,70%	1.475.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
					Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase IKM Formal	4,30%	110.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran (RPJMD)	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2025	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Target 2025	Pagu	Perangkat Daerah
					Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Terfasilitasinya pelayanan sistem informasi Industri	200 IKM	332.750.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
					Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah Pendapatan Retribusi Sektor Pariwisata	##### #	3.832.522.000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
						Tingkat hunian akomodasi	11%		Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
					Program Pemasaran Pariwisata	Persentase Pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara	20%	4.150.000.000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
						Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten Tasikmalaya	3%		Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran (RPJMD)	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2025	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Target 2025	Pagu	Perangkat Daerah
					Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase Produk/ Karya Ekraf terdaftar HAKI	4,49%	175.000.000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
					Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang disertifikasi	3,13%	1.775.000.000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
TOTAL ANGGARAN								49.312.217.000	

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran (RPJMD)	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2025	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Target 2025	Pagu	Perangkat Daerah
	P.8 Inovasi pelayanan publik.	S.6 Meningkatnya koordinasi, akuntabilitas, dan profesionalitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah	I.7 Nilai LPPD	Skor 3,42 (Sedang)	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	100%	32.000.000.000	Sekretariat Daerah
					Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase perpustakaan yang dikelola dengan baik	100%	749.321.000	Sekretariat Daerah
					Program Pengelolaan Arsip	Persentase Perangkat Daerah yang telah melaksanakan Pengelolaan Arsip	100%	242.000.000	Sekretariat Daerah
					Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Pemenuhan Kebijakan Koordinasi dan Evaluasi Bidang Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat	100%	54.918.221.126	Sekretariat Daerah

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran (RPJMD)	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2025	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Target 2025	Pagu	Perangkat Daerah
					Program Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase Pemenuhan Kebijakan Koordinasi dan Evaluasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan	100%	3.581.060.750	Sekretariat Daerah
					Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Meningkatnya kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	100%	18.180.667.800	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
					Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Cakupan peningkatan peran partai politik dan pendidikan politik di Kabupaten Tasikmalaya	100%	69.192.883.867	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran (RPJMD)	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2025	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Target 2025	Pagu	Perangkat Daerah
					Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Meningkatnya Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100%	18.732.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
					Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Meningkatnya Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	100%	5.378.400.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
					Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Cakupan pemahaman ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	100%	2.350.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
					Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	100%	2.799.312.466	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran (RPJMD)	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2025	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Target 2025	Pagu	Perangkat Daerah
					Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Indeks Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,7 poin	1.376.000.000	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
			I.8 Nilai SAKIP	Skor 64,30 (BB)	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian program dalam RKPD terhadap RPJMD	100%	2.610.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
					Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dalam Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (RENJA/RENSTRA) terhadap Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RKPD/RPJMD/RPJPD) lingkup Koordinasi Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%	2.209.250.324	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran (RPJMD)	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2025	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Target 2025	Pagu	Perangkat Daerah
						Persentase kesesuaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dalam Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (RENJA/RENSTRA) terhadap Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RKPD/RPJMD/RPJPD) lingkup Koordinasi Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA)	100%		Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
						Persentase kesesuaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dalam Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (RENJA/RENSTRA) terhadap Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RKPD/RPJMD/RPJPD) lingkup Koordinasi Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100%		Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran (RPJMD)	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2025	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Target 2025	Pagu	Perangkat Daerah
					Program Penyelenggaraan Pengawasan	Cakupan Penyelenggaraan Pengawasan	100%	3.754.998.000	Inspektorat Daerah
					Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Cakupan Pengendalian Intern Pemerintah	100%	1.699.500.000	Inspektorat Daerah
			I. 9 Indeks Kepuasan Masyarakat	81,80 poin (baik)	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	89%	10.739.363.300	Satuan Polisi Pamong Praja
					Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Cakupan Kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	100%	500.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
					Program Pendaftaran Penduduk	Perekaman KTP Elektronik	98,40%	3.371.183.500	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
						Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	90%		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran (RPJMD)	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2025	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Target 2025	Pagu	Perangkat Daerah
					Program Pencatatan Sipil	Kepemilikan Akta Kelahiran	99%	425.073.800	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
						Penerbitan Akta Kematian	96%		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data Kependudukan berdasarkan Perjanjian Kerjasama	85%	60.940.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Persentase Fasilitasi Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD	96%	20.641.345.359	Sekretariat DPRD
			I.10 Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	70,5 poin	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	773.153.342.530	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
					Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang telah dilengkapi dengan Dokumen Bukti Kepemilikan	89%	2.767.400.000	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran (RPJMD)	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2025	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Target 2025	Pagu	Perangkat Daerah
					Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pengelolaan Pajak Daerah	100%	13.600.950.000	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
			I.11 Indeks Profesionalitas ASN	72,30 poin	Program Kepegawaian Daerah	Indeks Sistem Merit (3 aspek penilaian)	96,5 poin	3.087.999.269	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
						Indeks Sistem Merit (2 aspek penilaian)	132,5 poin		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
						Indeks Sistem Merit (3 aspek penilaian)	128,5 poin		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
					Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	18 JP/Orang/Tahun	3.552.901.996	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran (RPJMD)	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2025	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Target 2025	Pagu	Perangkat Daerah
			I.12 Indeks Inovasi Daerah	Skor 55 (inovatif)	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase implementasi rencana kelitbangan	100%	1.377.900.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	TOTAL ANGGARAN							1.053.052.015.087	
	P.9 Peningkatan kemandirian desa.	S.7 Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan daya saing sektor pertanian, perikanan, KUMKM, Perindustrian, perdagangan dan pariwisata berbasis pedesaan	I.13 PDRB Per Kapita	Rp 26,40 Juta/Orang	Program Penataan Desa	Cakupan Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Desa	100%	300.000.000	Dinas Perberdayaan Masyarakat dan Desa
					Program Administrasi Pemerintahan Desa	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang baik	351 desa	10.708.224.488	Dinas Perberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran (RPJMD)	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2025	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Target 2025	Pagu	Perangkat Daerah
					Program Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Desa yang Aktif	467 lembaga	5.000.000.000	Dinas Perberdayaan Masyarakat dan Desa
TOTAL ANGGARAN								16.008.224.488	
TOTAL ANGGARAN KESELURUHAN								2.358.482.527.90	

Sumber: Hasil analisis Bappelitbangda Kab. Tasikmalaya, 2024

4.2.5. Kebijakan Pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs)

Pembangunan yang bijak bagi masyarakat adalah pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development) adalah pembangunan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup orang di seluruh dunia, baik dari generasi sekarang maupun yang akan datang, tanpa mengeksploitasi penggunaan sumberdaya alam yang melebihi kapasitas dan daya dukung bumi. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu: (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; dan (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional dan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Dukungan program Kabupaten Tasikmalaya tahun 2024 terhadap pencapaian SDG's tersaji dalam tabel 4.6 berikut.

Tabel 4.7
Program Dukungan terhadap Pencapaian SDG's Tahun 2025

No.	Pengarusutamaan (<i>Mainstreaming</i>)	Program
1	TANPA KEMISKINAN (MENGAKHIRI KEMISKINAN DALAM SEGALA BENTUK DIMANAPUN)	Program Pemberdayaan Sosial
1.1	Pada tahun 2030, mengentaskan kemiskinan ekstrim bagi semua orang yang saat ini berpendapatan kurang dari 1,25 dolar Amerika per hari.	Program Rehabilitasi Sosial
1.2	Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
1.3	Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan	Program Perlindungan Perempuan
1.4	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro	Program Peningkatan Kualitas Keluarga
1.5	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana	
2	TANPA KELAPARAN (MENGHILANGKAN KEPALARAN, MENCAPAI KETAHANAN PANGAN DAN GIZI YANG BAIK, SERTA MENINGKATKAN PERTANIAN BERKELANJUTAN)	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan
2.2	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5	

No.	Pengarusutamaan (<i>Mainstreaming</i>)	Program
	tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula	
2.4	Pada tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan	
2.a	Meningkatkan investasi, termasuk melalui kerjasama internasional yang kuat, dalam infrastruktur pedesaan, layanan kajian dan perluasan pertanian, pengembangan teknologi dan bank gen untuk tanaman dan ternak, untuk meningkatkan kapasitas produktif pertanian di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang	
2.c	Mengadopsi langkah-langkah untuk menjamin berfungsinya pasar komoditas pangan serta turunannya dengan tepat, dan memfasilitasi pada waktu yang tepat akses terhadap informasi pasar, termasuk informasi cadangan pangan, untuk membantu membatasi volatilitas harga pangan yang ekstrim	
3	KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA (MENJAMIN KEHIDUPAN YANG SEHAT DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SELURUH PENDUDUK SEMUA USIA)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
3.1	Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
3.2	Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1.000	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

No.	Pengarusutamaan (<i>Mainstreaming</i>)	Program
3.3	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya	
3.4	Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan	
3.5	Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkoba dan penggunaan alkohol yang membahayakan	
3.6	Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional	
3.7	Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional	
3.8	Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang	
3.a	Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat	
3.b	Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk	

No.	Pengarusutamaan (<i>Mainstreaming</i>)	Program
	menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.	
3.c	Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.	
4	PENDIDIKAN BERKUALITAS (MENJAMIN PENDIDIKAN YANG INKLUSIF DAN MERATA SERTA MENINGKATKAN KESEMPATAN BELAJAR SEPANJANG HAYAT UNTUK SEMUA	Program Pengelolaan Pendidikan
4.1	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
4.2	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan prasekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar	
4.3	Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas	
4.4	Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan	
4.5	Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan	

No.	Pengarusutamaan (<i>Mainstreaming</i>)	Program
	kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan	
4.6	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi	
4.c	Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.	
5	KESETARAAN GENDER (MENCAPAI KESETARAAN GENDER DAN MEMBERDAYAKAN PEREMPUAN)	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
5.2	Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.	
5.5	Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat	
5.6	Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil revidi dari konferensi-konferensi tersebut.	
5.b	Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan	

No.	Pengarusutamaan (<i>Mainstreaming</i>)	Program
6	AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK (MENJAMIN KETEREDIAAN SERTA PENGELOLAAN AIR BERSIH DAN SANITASI YANG BERKELANJUTAN UNTUK SEMUA)	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
6.1	Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
6.2	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar sembarangan di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan	
6.3	Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global	
6.4	Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air	
7	ENERGI BERSIH DAN TERJANGKAU (MENJAMIN AKSES ENERGI YANG TERJANGKAU, ANDAL, BERKELANJUTAN DAN MODERN UNTUK SEMUA)	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan
7.1	Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern	
8	PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI (MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, KESEMPATAN KERJA YANG PRODUKTIF DAN MENYELURUH, SERTA PEKERJAAN YANG LAYAK UNTUK SEMUA)	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

No.	Pengarusutamaan (<i>Mainstreaming</i>)	Program
8.1	Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi
8.2	Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian
8.5	Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
8.6	Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan	Program Penempatan Tenaga Kerja
8.9	Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)
8.10	Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.	Program Pengembangan UMKM
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
9	INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR (MEMBANGUN INFRASTRUKTUR YANG TANGGUH, MENINGKATKAN INDUSTRI INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, SERTA MENDORONG INOVASI)	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
9.1	Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting

No.	Pengarusutamaan (<i>Mainstreaming</i>)	Program
9.2	Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang	Program Pengembangan Ekspor Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota Program Hubungan Industrial Program Penataan Bangunan Gedung Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya Program Penyelenggaraan Jalan
10	BERKURANGNYA KESENJANGAN (MENGURANGI KESENJANGAN INTRA-DAN ANTAR NEGARA)	Program Penataan Desa
10.1	Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional	Program Peningkatan Kerjasama Desa
10.2	Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya	Program Administrasi Pemerintahan Desa
10.3	Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif,	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan,

No.	Pengarusutamaan (<i>Mainstreaming</i>)	Program
	dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut	Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat
10.4	Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar	
11	KOTA DAN PEMUKIMAN BERKELANJUTAN (MENJADIKAN KOTA DAN PEMUKIMAN INKLUSIF, AMAN, TANGGUH DAN BERKELANJUTAN)	Program Pengembangan Perumahan
11.1	Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.	Program Kawasan Permukiman
11.3	Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh
11.4	Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
11.5	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relative terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
11.6	Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
11.7	Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas	
11.b	Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber	

No.	Pengarusutamaan (<i>Mainstreaming</i>)	Program
	daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030	
11.c	Memberikan dukungan kepada negara-negara kurang berkembang, melalui bantuan keuangan dan teknis, dalam membangun bangunan yang berkelanjutan dan tangguh, dengan memanfaatkan bahan lokal.	
12	KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB (MENJAMIN POLA PRODUKSI DAN KONSUMSI YANG BERKELANJUTAN)	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
12.3	Pada tahun 2030, mengurangi hingga setengahnya limbah pangan per kapita global di tingkat ritel dan konsumen dan mengurangi kehilangan makanan sepanjang rantai produksi dan pasokan termasuk kehilangan saat pasca panen.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)
12.4	Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.	
12.5	Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.	
12.6	Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka.	

No.	Pengarusutamaan (<i>Mainstreaming</i>)	Program
12.8	Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.	
12.b	Mengembangkan dan menerapkan perangkat untuk memantau dampak pembangunan berkelanjutan terhadap pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	
13	PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM (MENGAMBIL TINDAKAN CEPAT UNTUK MENGATASI PERUBAHAN IKLIM DAN DAMPAKNYA)	Program Penanggulangan Bencana
13.1	Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran
		Program Penanganan Bencana
16	PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH (MENGUATKAN MASYARAKAT YANG INKLUSIF DAN DAMAI UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN, MENYEDIAKAN AKSES KEADILAN UNTUK SEMUA, DAN MEMBANGUN KELEMBAGAAN YANG EFEKTIF, AKUNTABEL, DAN INKLUSIF DI SEMUA TINGKAT)	Program Penyelenggaraan Pengawasan
16.1	Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
16.2	Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyalahgunaan terhadap anak.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi
16.3	Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua.	Program Pencatatan Sipil

No.	Pengarusutamaan (<i>Mainstreaming</i>)	Program
16.5	Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD
16.6	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
16.7	Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
16.9	Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
16.10	Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.	
16.b	Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan.	
17	KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN (MENGUATKAN SARANA PELAKSANAAN DAN MEREVITALISASI KEMITRAAN GLOBAL UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN)	Program Penyelenggaraan Statistik Sektor
17.1	Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
17.17	Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.	
17.18	Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan	

No.	Pengarusutamaan (<i>Mainstreaming</i>)	Program
	karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional	
17.19	Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.	

Sumber: Bappelitbangda Kab. Tasikmalaya, 2024

4.2.6. Kebijakan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Dengan dilaksanakannya Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 100 tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan, kita berharap dengan dilaksanakannya peraturan ini maka akan meningkatkan mutu pelayanan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang diundangkan pada tanggal 24 Desember 2021 ditetapkan dengan pertimbangan bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang penerapan standar pelayanan minimal sudah tidak sesuai dengan dinamika kebutuhan penerapan standar pelayanan minimal sehingga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Standar pelayanan minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Penyelenggaraan pelayanan dasar merupakan bagian dari pelaksanaan urusan wajib pemerintah daerah. SPM diposisikan untuk menjawab hal-hal penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam penyediaan pelayanan dasar yang bermuara pada penciptaan kesejahteraan rakyat, karena kesejahteraan rakyat merupakan tujuan bernegara yang dijamin oleh konstitusi.

Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari pemerintah daerah sesuai dengan indikator-indikator yang ditetapkan oleh pemerintah. Sebagaimana telah diatur dalam peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Republik Indonesia nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal ditambah pula dengan peraturan terkait masing-masing kementerian, maka pemerintah daerah melalui perangkat daerah harus menerapkan SPM secara efektif.

Saat ini SPM urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri dari pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta sosial dengan berbagai indikatornya.

Tabel 4.8
Program Dukungan terhadap Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2025

No	SPM Bidang	Jenis Pelayanan Dasar		Program
1.	SPM Pendidikan	1	Pendidikan Anak Usia Dini	Program Pengelolaan Pendidikan
		2	Pendidikan Dasar	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
		3	Pendidikan Kesetaraan	
2.	SPM Kesehatan	1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
		3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
		4	Pelayanan kesehatan balita	
		5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	

No	SPM Bidang	Jenis Pelayanan Dasar		Program
		6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	
		7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	
		8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	
		9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	
		10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	
		11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	
		12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human immunodeficiency virus)	
3.	SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
		2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
4.	SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten/kota	Program Pengembangan Perumahan Program Kawasan Permukiman Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman
		2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi Program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Kumuh

No	SPM Bidang	Jenis Pelayanan Dasar		Program
5.	SPM Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan masyarakat	1	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
		2	Pelayanan informasi rawan bencana	Program Penanggulangan Bencana
		3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran
		4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Program Penanganan Bencana
		5.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	
6	SPM Sosial	1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Program Pemberdayaan Sosial
		2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Program Rehabilitasi Sosial
		3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
		4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	
		5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota	

Sumber: Bappelitbangda Kab. Tasikmalaya, 2024

4.3. Sinkronisasi dan Keterkaitan Antara Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya dengan Prioritas Provinsi Jawa Barat dan Prioritas Nasional Tahun 2025

Prioritas Pembangunan Nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 merupakan salah satu acuan dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Tasikmalaya dalam menyusun RKPD Tahun 2025, sehingga keterkaitan indikator sasaran pembangunan daerah dalam RKPD Tahun 2025 dengan sasaran Prioritas Nasional (PN) RKP Tahun 2025; Tingkat keterkaitan indikator sasaran pembangunan daerah RKPD Tahun 2025 dengan sasaran PN RKP Tahun 2025; Keselarasan prioritas pembangunan daerah dalam RKPD Tahun 2025 dengan PN RKP Tahun 2025; serta Tingkat keselarasan prioritas pembangunan daerah dengan PN RKP Tahun 2025, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.9
Keterkaitan Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2025 dengan
Indikator Sasaran Prioritas Nasional pada RKPD Tahun 2025

Prioritas Pembangunan Nasional	Sasaran Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Kab. Tasikmalaya	Indikator Sasaran Prioritas Kab. Tasikmalaya	Target 2025	PD Penanggungjawab
PN 1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	Indeks Demokrasi Indonesia	PD 8 : Inovasi pelayanan publik.	Nilai LPPD	Skor 3,42 (Sedang)	BAKESBANGPOL
PN 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negeradan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Asia Power Index (Military Capability)	PD 8 : Inovasi pelayanan publik.	Nilai LPPD	Skor 3,42 (Sedang)	SATPOL PP BAKESBANGPOL
	Asia Power Index (Diplomatic Influence)				
	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya				
	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (PoU)	PD 6 : Peningkatan infrastruktur dan daya saing produk pertanian dan perikanan untuk menunjang ketahanan pangan.	PDRB Per Kapita	Rp 29,14 Juta/Orang	DKPPP
	Indeks Ketahanan Energi				-

Prioritas Pembangunan Nasional	Sasaran Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Kab. Tasikmalaya	Indikator Sasaran Prioritas Kab. Tasikmalaya	Target 2025	PD Penanggungjawab
	Kapasitas tampungan air (m3/kapita)	PD 3 : Pembangunan infrastruktur untuk peningkatan konektivitas pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.	Pertumbuhan Realisasi Investasi	5%	DPUTRPPLH
	Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan (%)				
	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)				
	Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global				DPMPTSP
	Indeks Ekonomi Hijau				DPUTRPPLH
	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer				
	Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (%)				
	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati				
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup				

Prioritas Pembangunan Nasional	Sasaran Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Kab. Tasikmalaya	Indikator Sasaran Prioritas Kab. Tasikmalaya	Target 2025	PD Penanggungjawab
	Persentase Penurunan Emisi GRK - Tahunan (%) - Kumulatif (%)				
PN 3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah (%)	PD 7 : Peningkatan ekonomi masyarakat melalui pengembangan sektor unggulan pariwisata, ekonomi kreatif, perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro.	PDRB Per Kapita	Rp 29,14 Juta/Orang	DISKOPERINDAG
	Rasio Kewirausahaan (%)				
	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDB (%)				
	Rasio PDB Pariwisata (%)				
	Devisa Pariwisata (miliar USD)				DISPARPORA
	Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%)				
	Aset Perbankan/PDB (%)				
	Aset Dana Pensiun/PDB (%)				
	Aset Asuransi/PDB (%)				DISKOPERINDAG

Prioritas Pembangunan Nasional	Sasaran Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Kab. Tasikmalaya	Indikator Sasaran Prioritas Kab. Tasikmalaya	Target 2025	PD Penanggungjawab
	Kapitalisasi Pasar Modal/PDB (%)				
	Total Kredit/PDB (%)				
	Inklusi Keuangan (%)				
PN 4. Memperkuat Pembangunan Sumber DayaManusia (SDM), Sains,Teknologi, Pendidikan,Kesehatan, Prestasi Olahraga,Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan,Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	Rata-rata nilai PISA i. Membaca ii. Matematika iii. Sains	PD 1 : Peningkatan pelayanan pendidikan	Indeks Pendidikan	60,62 poin	DISDIKBUD
	Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas (tahun)				
	Harapan lama sekolah (tahun)				
	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi (%)				

Prioritas Pembangunan Nasional	Sasaran Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Kab. Tasikmalaya	Indikator Sasaran Prioritas Kab. Tasikmalaya	Target 2025	PD Penanggungjawab
	Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)				
	Pengeluaran Iptek dan Inovasi	PD 8: Inovasi pelayanan publik.	Indeks Inovasi Daerah	Skor 55 (inovatif)	BAPPELITBANGDA
	(% PDB				
	Peringkat Indeks Inovasi Global				
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	PD 3 : Pembangunan infrastruktur untuk peningkatan konektivitas pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.	Pertumbuhan Realisasi Investasi	5%	DPMPTSP
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)				
	Usia Harapan Hidup (tahun)	PD 2 : Peningkatan pelayanan kesehatan daerah serta penurunan angka prevelansi stunting	Indeks Kesehatan	77,45	DINKES
	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)				
	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)				
	Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)				

Prioritas Pembangunan Nasional	Sasaran Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Kab. Tasikmalaya	Indikator Sasaran Prioritas Kab. Tasikmalaya	Target 2025	PD Penanggungjawab
	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)				
	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)				DINSOS P3
	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	PD 5 : Percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	86,02 poin	DINSOS P3
PN 5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Rasio PDB Industri Pengolahan (%)	PD 7 : Peningkatan ekonomi masyarakat melalui pengembangan sektor unggulan pariwisata, ekonomi kreatif, perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro.	PDRB Per Kapita	Rp 29,14 Juta/Orang	DISKOPERINDAG
	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDB)				
	Ekspor Barang dan Jasa (% PDB)				
	Biaya Logistik (% PDB)				
PN 6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan	Terbangunnya sistem perlindungan sosial yang		Persentase Pelayanan Kesejahteraan Sosial	68,08%	DINSOS P3

Prioritas Pembangunan Nasional	Sasaran Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Kab. Tasikmalaya	Indikator Sasaran Prioritas Kab. Tasikmalaya	Target 2025	PD Penanggungjawab
Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	adaptif bagi seluruh penduduk (%)	PD 5 : Percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem.'			
	Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan (%)	PD 3 : Pembangunan infrastruktur untuk peningkatan konektivitas pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.	Pertumbuhan Realisasi Investasi	5%	DPMPTSP
	Persentase penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal (%)				
	Proporsi kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap nasional (%)	PD 7 : Peningkatan ekonomi masyarakat melalui pengembangan sektor unggulan pariwisata, ekonomi kreatif, perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro.	PDRB Per Kapita	Rp 29,14 Juta/Orang	DISKOPERINDAG DISPARPORA
	Persentase desa mandiri (%)	PD 9 : Peningkatan kemandirian desa.	PDRB Per Kapita	Rp 29,14 Juta/Orang	DPMD
	Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan (%)	PD 3 : Pembangunan infrastruktur untuk peningkatan konektivitas pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.	Pertumbuhan Realisasi Investasi	5%	DPUTRPPLH
PN 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi,serta Memperkuat	Return on Asset (ROA) BUMN (%)	PD 8: Inovasi pelayanan publik.	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	70,5 poin	BPKPD

Prioritas Pembangunan Nasional	Sasaran Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Kab. Tasikmalaya	Indikator Sasaran Prioritas Kab. Tasikmalaya	Target 2025	PD Penanggungjawab
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Indeks Integritas Nasional		Indeks Profesionalitas ASN	61 poin	BKPSDM
	Indeks Materi Hukum				
	Indeks Pelayanan Publik		Indeks Kepuasan Masyarakat	80,30 poin (baik)	SEMUA PD
	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		Nilai LPPD	Skor 3,42 (Sedang)	DISKOMINFO
	Indeks Persepsi Korupsi		Nilai SAKIP	Skor 71 (BB)	INSPEKTORAT
	Indeks Pembangunan Hukum				
	Rasio Perpajakan terhadap PDB (%)		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	70,5 poin	BPKPD
	Tingkat Inflasi (%)	PD 7 : Peningkatan ekonomi masyarakat melalui pengembangan sektor unggulan pariwisata, ekonomi kreatif, perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro.	PDRB Per Kapita	Rp 29,14 Juta/Orang	DISKOPERINDAG
PN 8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	PD 1 : Peningkatan pelayanan pendidikan	Persentase Pemajuan Kebudayaan	22,82%	DISDIKBUD

Prioritas Pembangunan Nasional	Sasaran Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Kab. Tasikmalaya	Indikator Sasaran Prioritas Kab. Tasikmalaya	Target 2025	PD Penanggungjawab
Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	PD 8 : Inovasi pelayanan publik.	Nilai LPPD	Skor 3,42 (Sedang)	SATPOL PP
	Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana Relatif terhadap PDB (%)	PD 4 : Mitigasi dan penanggulangan bencana.	Pertumbuhan Realisasi Investasi	5%	BPBD

Sumber: Hasil analisis Bappelitbangda Kab. Tasikmalaya, 2024

Tabel 4.10
Keterkaitan Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2025 dengan
Indikator Sasaran Prioritas Nasional pada RKPD Tahun 2025

Sasaran Prioritas Pembangunan Jawa Barat	Indikator Sasaran Pembangunan Jawa Barat	Sasaran Prioritas Pembangunan Kab Tasikmalaya	Indikator Sasaran Prioritas Kota Kab. Tasikmalaya
P1. Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Peningkatan Kapasitas UMKM, Petani, Nelayan dan Budidaya untuk Membuka Lapangan Kerja Seluas-luasnya		P 7 : Peningkatan ekonomi masyarakat melalui pengembangan sektor unggulan pariwisata, ekonomi kreatif, perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro	

Sasaran Prioritas Pembangunan Jawa Barat	Indikator Sasaran Pembangunan Jawa Barat	Sasaran Prioritas Pembangunan Kab Tasikmalaya	Indikator Sasaran Prioritas Kota Kab. Tasikmalaya
Meningkatnya pertumbuhan sektor perindustrian dan perdagangan	1. Laju Pertumbuhan Sektor Industri (%) 2. Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan (%)	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan daya saing sektor pertanian, perikanan, KUMKM, Perindustrian, perdagangan dan pariwisata berbasis pedesaan	PDRB Per Kapita
		P.6 Peningkatan infrastruktur dan daya saing produk pertanian dan perikanan untuk menunjang ketahanan pangan.	
Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, dan ketahanan pangan	1. Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (%) 2. Nilai Tukar Petani (NTP) (Poin) 3. Skor Pola Pangan Harapan (Poin)	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan daya saing sektor pertanian, perikanan, KUMKM, Perindustrian, perdagangan dan pariwisata berbasis pedesaan	PDRB Per Kapita
Meningkatnya pertumbuhan sektor penyediaan akomodasi makan dan minum	Laju Pertumbuhan Sektor Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan daya saing sektor pertanian, perikanan, KUMKM, Perindustrian, perdagangan dan pariwisata berbasis pedesaan	PDRB Per Kapita
Meningkatnya nilai investasi dan kualitas usaha yang disertai dengan meningkatnya daya saing dan penempatan tenaga kerja	1. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) ADHB (Triliun Rupiah)	P 7 : Peningkatan ekonomi masyarakat melalui pengembangan sektor unggulan pariwisata, ekonomi kreatif, perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro	
	2. Proporsi Kredit UMKM terhadap Total	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan daya saing sektor pertanian, perikanan, KUMKM, Perindustrian,	PDRB Per Kapita

Sasaran Prioritas Pembangunan Jawa Barat	Indikator Sasaran Pembangunan Jawa Barat	Sasaran Prioritas Pembangunan Kab Tasikmalaya	Indikator Sasaran Prioritas Kota Kab. Tasikmalaya
		perdagangan dan pariwisata berbasis pedesaan	
		P.3 Pembangunan infrastruktur untuk peningkatan konektivitas pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.	
	Kredit (%) 3. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	Meningkatnya Realisasi Investasi Kabupaten Tasikmalaya	Pertumbuhan Realisasi Investasi
P2. Reformasi Sistem Pendidikan, Pemajuan Kebudayaan, Pendidikan Agama dan Kehidupan Beragama		P.1 Peningkatan pelayanan pendidikan	
Meningkatnya akses pendidikan masyarakat	1. Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun) 2. Harapan Lama Sekolah (Tahun)	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya	Indeks Pendidikan
		P.5 Percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem.	
Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta pembangunan pemuda	1. Indeks Pemberdayaan Gender	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)
	2. Indeks Perlindungan Anak	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.	Indikator Kabupaten Layak Anak
	3. Indeks Pembangunan Pemuda	Meningkatnya Kualitas dan Perlindungan Perempuan dan Anak	Indeks Pembangunan Gender
		P.2 Peningkatan pelayanan kesehatan daerah serta penurunan angka	
Terkendalinya pertumbuhan dan distribusi penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan

Sasaran Prioritas Pembangunan Jawa Barat	Indikator Sasaran Pembangunan Jawa Barat	Sasaran Prioritas Pembangunan Kab Tasikmalaya	Indikator Sasaran Prioritas Kota Kab. Tasikmalaya
P3. Penguatan Sistem Kesehatan Daerah			
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (Tahun)		
Meningkatnya upaya percepatan penurunan stunting	Prevalensi <i>Stunting</i> (%)		
P4. Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana		P 7 : Peningkatan ekonomi masyarakat melalui pengembangan sektor unggulan pariwisata, ekonomi kreatif, perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro	
Meningkatnya taraf hidup masyarakat	Pengeluaran Per Kapita (Rp 000)	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan daya saing sektor pertanian, perikanan, KUMKM, Perindustrian, perdagangan dan pariwisata berbasis pedesaan	PDRB Per Kapita
		P.4 Mitigasi dan penanggulangan bencana.	
Meningkatnya pembangunan rendah karbon dan menurunnya risiko bencana	Indeks Risiko Bencana (Poin)	Meningkatnya Realisasi Investasi Kabupaten Tasikmalaya	Pertumbuhan Realisasi Investasi
P5. Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa		P.3 Pembangunan infrastruktur untuk peningkatan konektivitas pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.	
Meningkatnya konektivitas antarwilayah dan pelayanan infrastruktur	Tingkat Konektivitas (%)	Meningkatnya Realisasi Investasi Kabupaten Tasikmalaya	Pertumbuhan Realisasi Investasi
Meningkatnya kualitas infrastruktur	Indeks Kualitas Infrastruktur (Poin)		

Sasaran Prioritas Pembangunan Jawa Barat	Indikator Sasaran Pembangunan Jawa Barat	Sasaran Prioritas Pembangunan Kab Tasikmalaya	Indikator Sasaran Prioritas Kota Kab. Tasikmalaya
Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman	Persentase rumah tangga hunian layak (%)		
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin)		
Meningkatnya pembangunan rendah karbon dan menurunnya risiko bencana	Tingkat Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (%)		
		P.9 Peningkatan kemandirian desa.	
Meningkatnya pemerataan pembangunan di wilayah Pedesaan	Indeks Desa Membangun (Poin)	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan daya saing sektor pertanian, perikanan, KUMKM, Perindustrian, perdagangan dan pariwisata berbasis pedesaan	PDRB Per Kapita
P6. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah		P.8 Inovasi pelayanan publik.	
Meningkatnya kebebasan, kesetaraan dan kapasitas lembaga demokrasi	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Jawa Barat	Meningkatnya koordinasi, akuntabilitas, dan profesionalitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah	Nilai LPPD
Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi (Poin)		Nilai SAKIP
	Indeks Inovasi Daerah (Poin)		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)
			Indeks Profesionalitas ASN
			Indeks Inovasi Daerah

Sumber: Hasil analisis Bappelitbangda Kab. Tasikmalaya, 2024

Tabel 4.11
Dukungan Program Prioritas Daerah terhadap Prioritas Nasional Tahun 2025

No	Prioritas Nasional	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran
1	2	3	4	5
1	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Cakupan pemahaman ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	2.350.000.000
		<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</i>	<i>Jumlah dokumen/laporan</i>	2.350.000.000
			<i>Jumlah orang</i>	
			<i>Jumlah Keluarga</i>	
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	100.000.000
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1.050.000.000
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1.100.000.000
		Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	100.000.000

No	Prioritas Nasional	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran
		Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	-
		Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	-
		Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	-
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tindak Lanjut Gangguan Trantibum serta Pelanggaran Perda dan Perkada	10.739.363.300,00
		<i>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase Anggota Satpol PP dan Satlinmas yang kompeten Persentase Gangguan Trantibum yang Dapat Diselesaikan</i>	<i>10.289.363.300,00</i>
		Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	50.000.000,00
		Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3.000.000.000,00
		Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	711.900.000,00
		Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	1.625.818.000,00

No	Prioritas Nasional	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran
		Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	100.000.000,00
		Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja	45.000.000,00
		Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	3.197.645.300,00
		Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	360.000.000,00
		Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani jumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	15.000.000,00
		Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	1.184.000.000,00
		<i>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/ Wali Kota</i>	<i>Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakan</i>	<i>200.000.000,00</i>
		Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	50.000.000,00

No	Prioritas Nasional	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran
		Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	75.000.000,00
		Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	75.000.000,00
		<i>Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota</i>	<i>Rasio PPNS terhadap Kasus yang Ditangani</i>	<i>250.000.000,00</i>
		Pembentukan Sekretariat PPNS	Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS	50.000.000,00
		Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	150.000.000,00
		Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	50.000.000,00
JUMLAH				13.089.363.300,00
2	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Ketersediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	500.000.000
		<i>Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Tersedianya lumbung pangan</i>	<i>500.000.000</i>
		Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia	500.000.000
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Prosentase ketahanan pangan masyarakat	1.766.350.382

No	Prioritas Nasional	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran
	Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	<i>Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan</i>	<i>Terpantaunya stok pasokan pangan</i>	259.406.250
		Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	10.000.000
		Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	219.406.250
		Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	30.000.000
		<i>Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota</i>	<i>Tersedianya cadangan pangan</i>	752.456.250
		Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	752.456.250
		<i>Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi</i>	<i>Tercapainya target konsumsi pangan</i>	754.487.882
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	754.487.882
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Prosentase keamanan pangan masyarakat	288.768.750
		<i>Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Terlaksananya pengawasan kewanaman pangan</i>	288.768.750
		Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	55.125.000

No	Prioritas Nasional	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran
		Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	173.643.750
		Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	60.000.000
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi perikanan tangkap	2.650.000.000
		<i>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah ikan tangkap</i>	<i>1.600.000.000</i>
		Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	100.000.000
		Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	1.500.000.000
		<i>Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah Nelayan Kecil</i>	<i>700.000.000</i>
		Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	400.000.000
		Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	300.000.000
		<i>Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)</i>	<i>Operasional TPI</i>	<i>350.000.000</i>
		Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	350.000.000
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Prosentase legalitas usaha perikanan budidaya, pembinaan pembudi daya ikan kelompok kecil, ,	2.814.446.606

No	Prioritas Nasional	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran
			tanda daftar pembudi daya ikan kecil dan Produksi perikanan budi daya	
		<i>Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil</i>	<i>Fasilitas pembudidaya ikan</i>	300.000.000
		Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	200.000.000
		Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	100.000.000
		<i>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan</i>	<i>Tersedianya pengelola pembudidaya ikan</i>	2.514.446.606
		Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000
		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.314.446.606
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Prosentase tanda daftar usaha pengolah hasil perikanan dan Produksi pengolahan hasil usaha perikanan	800.000.000
		<i>Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota</i>	-	800.000.000
		Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	500.000.000

No	Prioritas Nasional	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran
		Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	300.000.000
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase kelompok tani yang dilakukan monitoring dalam pemanfaatan sarana pertanian	3.934.814.628
		<i>Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</i>	<i>Kelompok tani yang terawasi</i>	<i>1.086.821.875</i>
		Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1.000.000.000
		Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	86.821.875
		<i>Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	-	<i>32.992.753</i>
		Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah HPT, Bahan Pakan/Pakan yang Beredar	32.992.753
		<i>Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain</i>	<i>Tersedianya bibit dan hijau pakan</i>	<i>2.815.000.000</i>
		Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	25.000.000
		Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	2.790.000.000
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Prosentase Prasarana pertanian dengan kondisi baik (JUT, embung, RPH, dll)	12.400.000.000

No	Prioritas Nasional	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran
		<i>Pengembangan Prasarana Pertanian</i>	<i>Prosentase Produksi Pertanian</i>	150.000.000
		Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	150.000.000
		<i>Pembangunan Prasarana Pertanian</i>	<i>Jumlah prasarana pertanian terbangun Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Rumah Potong Hewan</i>	12.150.000.000
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	250.000.000
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	5.000.000.000
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	200.000.000
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	5.000.000.000
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	1.650.000.000
		Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	50.000.000
		<i>Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Tersedianya sumbe bibit dan rumpun galur</i>	100.000.000

No	Prioritas Nasional	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran
		Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan	100.000.000
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Prosentase Prasarana pertanian dengan kondisi baik (Keswan dan Veteriner)	225.000.000
		<i>Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Terjanimnya kesehatan hewan</i>	25.000.000
		Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	25.000.000
		<i>Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Pelayanan Jasa Laboratorium kesehatan hewan</i>	75.000.000
		Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	50.000.000
		Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	25.000.000
		<i>Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner</i>	<i>Terlaksananya pengawasan masyarakat veteriner</i>	125.000.000
		Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	25.000.000
		Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik	100.000.000
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Terkendalinya Bencana Pertanian dan Tertanggulangnya bencana pertanian	82.475.000
		<i>Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota</i>	<i>Tertanggulangnya bencana pertanian</i>	82.475.000

No	Prioritas Nasional	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran
		Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	82.475.000
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Cakupan Bina Kelompok Tani dan Terlaksananya penyuluhan pertanian	10.496.032.777
		<i>Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</i>	<i>Terlaksananya penyuluhan pertanian</i>	10.496.032.777
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1.560.361.459
		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	6.517.428.750
		Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	2.173.582.284
		Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	24.160.284
		Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani	Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk	220.500.000
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Penanganan Rumah Terkena Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	300.000.000
		<i>Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Laporan Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program yang terdata/ akan ditangani</i>	<i>125.000.000</i>
		Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	50.000.000
		Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	25.000.000

No	Prioritas Nasional	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran
		Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	25.000.000
		Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	25.000.000
		<i>Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah Laporan Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota</i>	25.000.000
		Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	25.000.000
		<i>Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota yang tertangani</i>	150.000.000
		Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	150.000.000
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Rumah Layak Huni Dikawasan Kumuh	1.300.000.000
		<i>Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman</i>	<i>Jumlah Laporan Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman</i>	200.000.000
		Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	200.000.000
		<i>Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha</i>	<i>Jumlah Laporan Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha</i>	100.000.000

No	Prioritas Nasional	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran
		Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina	50.000.000
		Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	50.000.000
		<i>Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha</i>	<i>Jumlah Rumah Layak Huni Dikawasan Kumuh</i>	<i>1.000.000.000</i>
		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	1.000.000.000
		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Rumah Layak Huni Diluar Kawasan Kumuh	1.870.000.000
		<i>Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Rumah Layak Huni Diluar Kawasan Kumuh</i>	<i>1.870.000.000</i>
		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	1.870.000.000
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Peningkatan Jumlah Rumah yang terfasilitasi PSU	425.000.000
		<i>Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan</i>	<i>Jumlah Rumah yang Telah Terfasilitasi PSU</i>	<i>425.000.000</i>
		Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	250.000.000
		Sosialisasi standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU	Jumlah pelaku pembangunan yang tersosialisasikan standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU	50.000.000

No	Prioritas Nasional	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran
		Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	125.000.000
		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penyelarasan dokumen perencanaan pembangunan dengan pengelolaan LH	150.000.000
		<i>Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Dokumen Yang Tersusun</i>	<i>150.000.000</i>
		Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	150.000.000
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase lokasi titik pantau air dan udara yang mempunyai kriteria minimal baik	1.497.903.000
		<i>Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah laporan kualitas lingkungan hidup daerah</i>	<i>1.497.903.000</i>
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1.497.903.000
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase luas lahan RTH	200.000.000
		<i>Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota</i>	<i>Luas lahan RTH yang dikembangkan</i>	<i>200.000.000</i>
		Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	200.000.000
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Kapasitas sampah yang terkelola di sumber	2.968.000.000
		<i>Pengelolaan Sampah</i>	<i>Persentase ketersediaan infrastruktur persampahan yang sesuai kebutuhan daerah</i>	<i>2.968.000.000</i>

No	Prioritas Nasional	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran
		Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	300.000.000
		Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	2.668.000.000
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Penanggulangan Bencana	3.004.000.000,00
		<i>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota</i>	<i>Persentase Tingkat Pemenuhan Pelayanan Informasi Rawan Bencana</i>	<i>100.000.000,00</i>
		Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	100.000.000,00
		<i>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</i>	<i>Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana</i>	<i>2.254.000.000,00</i>
		Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	90.000.000,00
		Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	300.000.000,00

No	Prioritas Nasional	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran
		Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	1.764.000.000,00
		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	100.000.000,00
		<i>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</i>	Jumlah laporan dalam pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	650.000.000,00
		Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	550.000.000,00
		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100.000.000,00
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan non kebakaran	400.000.000,00
		<i>Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota</i>	400.000.000,00
		Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000,00

No	Prioritas Nasional	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran
		Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	250.000.000,00
		Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	50.000.000,00
JUMLAH				48.072.791.143,00
3	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi Sehat	700.000.000
		<i>Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah Koperasi Sehat</i>	<i>700.000.000</i>
		Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	600.000.000
		Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	100.000.000
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi Aktif	550.000.000
		<i>Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah Koperasi Aktif</i>	<i>550.000.000</i>
		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	550.000.000

No	Prioritas Nasional	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	persentase koperasi yang dibina	800.000.000
		<i>Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Koperasi yang dibina</i>	<i>800.000.000</i>
		Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	100.000.000
		Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	600.000.000
		Pemulihan Usaha Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang dipulihkan usahanya	100.000.000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha mikro Formal	4.511.945.000
		<i>Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan</i>	<i>Jumlah Usaha Mikro Formal</i>	<i>4.511.945.000</i>
		Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	150.000.000
		Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	2.342.655.000
		Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	1.469.290.000

No	Prioritas Nasional	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran
		Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	550.000.000
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Pertumbuhan wirausaha baru	10.100.000.000
		<i>Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil</i>	<i>Jumlah Wira Usaha Baru</i>	<i>10.100.000.000</i>
		Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	100.000.000
		Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	10.000.000.000
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Tingkat hunian akomodasi Jumlah Pendapatan Retribusi Sektor Pariwisata	3.832.522.000
		<i>Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah Daya Tarik Wisata yang dilakukan pengembangan pengelolaan</i>	<i>50.000.000</i>
		Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota	50.000.000
		<i>Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah pengembangan pengelolaan destinasi pariwisata yang telah dilaksanakan</i>	<i>3.607.522.000</i>
		Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	2.637.522.000
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	970.000.000

No	Prioritas Nasional	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran
		<i>Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota</i>	<i>175.000.000</i>
		Kesediaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata di Kabupaten/Kota	Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha	100.000.000
		Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)	Jumlah Industri/Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Tingkat Menengah Tinggi)	75.000.000
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara	4.150.000.000
		<i>Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri</i> <i>Jumlah Wisatawan mancanegara</i>	<i>4.150.000.000</i>
		Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	600.000.000
		Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	550.000.000
		Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	2.500.000.000
		Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	500.000.000
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Produk/ Karya Ekraf terdaftar HAKI Persentase Peningkatan Keanekaragaman Produk Ekonomi Kreatif	175.000.000

No	Prioritas Nasional	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran
		<i>Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif</i>	<i>Jumlah fasilitasi yang diberikan dalam rangka mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif</i>	175.000.000
		Pengembangan Sistem Pemasaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif	100.000.000
		Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual	Jumlah kegiatan / orang yang mendapat fasilitasi penguatan kekayaan intelektual	75.000.000
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang disertifikasi	1.775.000.000
		<i>Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar</i>	<i>Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang menerima Pembekalan Peningkatan Kapasitas Tingkat Dasar</i>	1.175.000.000
		Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	625.000.000
		Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	250.000.000
		Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	300.000.000
		<i>Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif</i>	<i>Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang diberikan fasilitasi pengembangan kapasitas</i>	600.000.000
		Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	200.000.000
		Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	Jumlah Laporan Hasil Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	200.000.000

No	Prioritas Nasional	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran
		Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang difasilitasi Sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif	200.000.000
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Pemenuhan Kebijakan Koordinasi dan Evaluasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan	3.581.060.750,00
		<i>Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</i>	<i>Persentase Terkait Kebijakan Perekonomian</i>	<i>1.380.000.000,00</i>
		Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	330.000.000,00
		Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	637.500.000,00
		Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	137.500.000,00
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	275.000.000,00
		<i>Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</i>	<i>Persentase Pelaksanaan dan Evaluasi Terkait Pembangunan Daerah</i>	<i>725.485.750,00</i>
		Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	295.935.750,00
		Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	248.050.000,00
		Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	181.500.000,00
		<i>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</i>	<i>Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</i>	<i>1.400.575.000,00</i>
		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	990.000.000,00
		Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	245.575.000,00

No	Prioritas Nasional	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran
		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	165.000.000,00
		<i>Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam</i>	<i>Persentase Sumberdaya alam yang telah terdata</i>	<i>75.000.000,00</i>
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	75.000.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Cakupan Areal Daerah Irigasi (<1000 Ha) yang Terlayani	23.700.000.000
		<i>Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Luas Baku Daerah Irigasi yang Terlayani</i>	<i>23.700.000.000</i>
		Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	300.000.000
		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	22.650.000.000
		Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	150.000.000
		Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	600.000.000
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Penduduk Berakses Air Minum Dengan Jaringan Perpipaan Persentase penduduk berakses air minum bukan jaringan perpipaan	17.020.000.000

No	Prioritas Nasional	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran
		<i>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah penduduk yang telah mendapatkan akses air minum yang aman</i>	<i>17.020.000.000</i>
		Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun	100.000.000
		Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	500.000.000
		Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa	Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	50.000.000
		Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	14.870.000.000
		Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	1.500.000.000
		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Ketersediaan Infrastruktur TPS3R Persentase Ketersediaan Infrastruktur TPA	4.485.000.000
		<i>Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah Infrastruktur TPS3R dan Infrastruktur TPA yang telah terbangun</i>	<i>4.485.000.000</i>
		Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun	4.485.000.000
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tinggal dengan pengelolaan sekala setempat Persentase rumah tinggal dengan pengelolaan sekala terpusat	21.955.000.000
		<i>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah rumah tinggal yang telah berakses sanitasi</i>	<i>21.955.000.000</i>

No	Prioritas Nasional	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran
		Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun	4.570.000.000
		Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun	9.285.000.000
		Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	8.100.000.000
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Genangan di wilayah Perkotaan yang tertangani	100.000.000
		<i>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah Genangan di wilayah Perkotaan yang tertangani</i>	<i>100.000.000</i>
		Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara	100.000.000
		Optimalisasai Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Dioptimalisasi	-
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Ketersediaan Bangunan Pemerintahan yang Layak Difungsikan	9.805.000.000
		<i>Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/ Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung</i>	<i>Jumlah Bangunan pemerintahan yang telah dibangun</i>	<i>9.805.000.000</i>
		Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota yang Diubahsuaikan	6.705.000.000
		Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/ Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	2.200.000.000

No	Prioritas Nasional	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran
		Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		
		Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	200.000.000
		Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	500.000.000
		Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	200.000.000
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Ketersediaan fasilitas Pendukung Bangunan Pemerintahan	11.470.063.000
		<i>Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah fasilitas bangunan dan lingkungannya yang telah dibangun</i>	<i>11.470.063.000</i>
		Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	11.470.063.000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Perentase Panjang Jalan dalam Kondisi baik	125.041.083.000
		<i>Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota</i>	<i>Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik</i>	<i>125.041.083.000</i>
		Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola	1.000.000.000

No	Prioritas Nasional	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	1.000.000.000
		Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	39.000.000.000
		Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	56.446.558.000
		Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	17.794.525.000
		Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya	100.000.000
		Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	3.150.000.000
		Pemeliharaan Berkala Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala	3.450.000.000
		Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	1.500.000.000
		Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	-
		Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	1.600.000.000
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Kegiatan Pengembangan Jasa Konstruksi	100.000.000
		<i>Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi</i>	<i>Jumlah Tenaga Terampil Konstruksi yang telah mendapatkan Pelatihan dan Fasilitasi Sertifikasi</i>	<i>100.000.000</i>
		Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	100.000.000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Realisasi RTRW pada Pola Ruang Realisasi RTRW pada Struktur Ruang	1.000.000.000
		<i>Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah dokumen RTRW dan RDTR yang telah tersusun</i>	<i>300.000.000</i>

No	Prioritas Nasional	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran
		Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	150.000.000
		Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang	Jumlah publikasi informasi penataan ruang	100.000.000
		Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota	50.000.000
		<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota</i>	-	600.000.000
		Penyusunan Peta Dasar	Jumlah data SHP Peta Dasar	200.000.000
		Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	400.000.000
		<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Luas lahan yang telah dikeluarkan Informasi Peruntukan Ruang (IPR)-nya</i>	100.000.000
		Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	100.000.000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Kinerja Lalu Lintas di Kabupaten Persentase Fasilitas Perhubungan yang memadai Prosentase kendaraan bermotor wajib uji dalam keadaan layak jalan Rasio Konektivitas Kabupaten/kota Survey kepuasan masyarakat layanan publik bidang perhubungan	3.752.011.800
		<i>Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota</i>	<i>jumlah dokumen NA dan rencana induk jaringan llaj</i>	379.221.800
		Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	279.221.800
		Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	100.000.000

No	Prioritas Nasional	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran
		<i>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota</i>	<i>Prosentase penyediaan / pemeliharaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/ kota</i>	500.000.000
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota yang Tersedia	400.000.000
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	100.000.000
		<i>Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C</i>	<i>prosentase pengelolaan terminal penumpang tipe C</i>	670.400.000
		Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun	-
		Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)	240.000.000
		Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Kebutuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe C yang terpenuhi.	430.400.000
		<i>Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir</i>	<i>Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan izin Penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan Kabupaten Kota</i>	229.480.000
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/ Kota	229.480.000
		<i>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</i>	-	80.000.000
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	80.000.000
		<i>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota</i>	<i>Cakupan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota</i>	1.452.160.000

No	Prioritas Nasional	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran
		Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	953.480.000
		Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	498.680.000
		<i>Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota</i>	<i>prosentase pengawasan pelaksanaan rekomendasi andalalin</i>	86.150.000
		Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi	86.150.000
		<i>Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan</i>	-	30.000.000
		Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	30.000.000
		<i>Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	-	80.000.000
		Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	80.000.000
		<i>Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	-	108.200.000
		Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	108.200.000

No	Prioritas Nasional	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran
		<i>Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	-	136.400.000
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	36.400.000
		Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	100.000.000
JUMLAH				248.603.685.550
4	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Pretasi Olahraga, Kesetaraan Gender serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	601.366.051.836
		<i>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</i>	<i>Angka Partisipasi Kasar (APK) SD</i> <i>Angka Partisipasi Murni (APM) SD</i>	307.733.478.636
		Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1.000.000.000

No	Prioritas Nasional	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran
		Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1.574.538.000
		Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	4.657.080.000
		Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	7.881.828.000
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	10.747.228.000
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4.103.125.000
		Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1.632.388.000
		Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	21.499.999.936
		Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	6.805.259.000
		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1.000.000.000
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	500.000.000
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	750.000.000
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	142.494.500.000
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	250.000.000
		Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	1.000.000.000

No	Prioritas Nasional	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran
		Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	500.000.000
		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1.000.000.000
		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	500.000.000
		Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	800.000.000
		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	2.650.000.000
		Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	24.249.692.000
		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3.259.173.200
		Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	750.000.000
		Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	750.000.000
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	46.766.413.500
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	20.612.254.000
		<i>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</i>	<i>Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP Angka Partisipasi Murni (APM) SMP</i>	<i>191.134.183.200</i>
		Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	2.262.280.000

No	Prioritas Nasional	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran
		Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	2.442.880.000
		Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	3.930.850.000
		Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	3.980.000.000
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	2.934.361.000
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	24.660.979.600
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1.510.016.000
		Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1.453.508.700
		Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2.010.713.600
		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1.468.936.000
		Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	15.125.000.000
		Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	3.837.896.400
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1.000.000.000
		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1.000.000.000
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100.000.000

No	Prioritas Nasional	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	600.000.000
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	71.428.200.000
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	200.000.000
		Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	200.000.000
		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	500.000.000
		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	500.000.000
		Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	1.000.000.000
		Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	16.092.000.000
		Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	200.000.000
		Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	150.000.000
		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1.900.000.000
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3.200.266.600
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	27.446.295.300

No	Prioritas Nasional	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran
		<i>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</i>	<i>Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD</i>	81.705.400.000
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	5.000.000.000
		Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	7.000.000.000
		Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	5.000.000.000
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1.000.000.000
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	2.500.000.000
		Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	27.305.400.000
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	100.000.000
		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	500.000.000
		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1.000.000.000
		Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	5.000.000.000
		Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	8.600.000.000
		Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1.000.000.000
		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	2.000.000.000
		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	200.000.000

No	Prioritas Nasional	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	8.000.000.000
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	7.500.000.000
		<i>Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan</i>	<i>Persentase satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi</i>	<i>20.792.990.000</i>
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1.000.000.000
		Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/ Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	8.099.320.000
		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1.000.000.000
		Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	3.000.000.000
		Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	2.193.670.000
		Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	-
		Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	500.000.000
		Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	2.500.000.000
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	2.500.000.000
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Pendidik Kualifikasi S1 dan Bersertifikat Pendidik	16.500.000.000
		<i>Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan</i>	<i>Jumlah pendidik dan Tenaga Kependidikan</i>	<i>16.500.000.000</i>

No	Prioritas Nasional	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran
		Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	500.000.000
		Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	16.000.000.000
		PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase pendidikan dasar, paud DAM PNF yang diselenggarakan oleh masyarakat yang memiliki izin	467.500.000
		<i>Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat</i>	<i>Jumlah pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat yang memiliki izin</i>	<i>233.750.000</i>
		Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	233.750.000
		<i>Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat</i>	<i>Jumlah PAUD dan PNF yang diselenggarakan oleh masyarakat yang memiliki izin</i>	<i>233.750.000</i>
		Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	233.750.000
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase standar pelayanan kesehatan (SPM) yang mencapai 100% (12 standar pelayanan)	259.094.420.518
			Rasio Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Poliklinik per satuan penduduk (1 : 30.000)	
			Rasio Rumah Sakit per satuan Penduduk	

No	Prioritas Nasional	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran
			Prevalensi stunting(pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita	
		<i>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Presentase Pemenuhan Obat Esensial di Pelayanan Dasar</i>	50.053.250.000
			<i>Prosentase Fasilitas Kesehatan Puskesmas dan Rumah Sakit yang terakreditasi sesuai standar nasional</i>	
		Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1.296.300.000
		Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	5.600.000.000
		Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	450.000.000
		Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	1.200.000.000
		Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	5.472.263.000
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	500.000.000
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	4.200.000.000
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	6.300.000.000

No	Prioritas Nasional	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	200.000.000
		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	18.634.687.000
		Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	75.000.000
		Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	6.000.000.000
		Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	125.000.000
		<i>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Persentase pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular</i>	208.905.070.518
			<i>Persentase pelaksanaan kegiatan yang mendukung ketercapaian Setandar Pelayanan Minimal (SPM)</i>	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4.600.000.000
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100.000.000
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	599.230.100
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.050.000.000

No	Prioritas Nasional	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	30.000.000
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	362.906.000
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3.030.000.000
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	50.000.000
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.612.880.000
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	50.000.000
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	3.059.888.000
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	160.000.000
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	131.700.000
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	13.473.060.000
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	30.000.000
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1.450.600.000

No	Prioritas Nasional	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran
		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	265.379.000
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	141.060.000
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	62.700.000
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	6.377.173.000
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	166.814.635.718
		Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	30.000.000
		Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	12.500.000
		Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	200.000.000
		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	806.393.700
		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	76.360.000
		Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	3.800.000.000

No	Prioritas Nasional	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran
		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	30.000.000
		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	30.000.000
		Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	199.760.000
		Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	268.845.000
		<i>Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan</i>	<i>50.000.000</i>
		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	50.000.000
		<i>Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Persentase Fasyankes Pemerintah dan Non Pemerintah yang bekerjasama dalam jejaring rujukan</i>	86.100.000
			<i>Persentase Fasyankes Pemerintah dan Non Pemerintah Yang Dilakukan Pembinaan Tata Kelola dan Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan</i>	
			<i>Persentase Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya</i>	
		Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	86.100.000
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rasio Tenaga Medis per satuan penduduk	3.864.168.585
		<i>Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Persentase ijin praktek tenaga kesehatan yang di keluarkan</i>	<i>50.000.000</i>

No	Prioritas Nasional	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran
		Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	50.000.000
		<i>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah 9 jenis ketenagaan sesuai dengan standar di fasilitas pelayanan kesehatan</i>	1.264.162.685
		Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.264.162.685
		<i>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya</i>	2.550.005.900
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	2.550.005.900
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Cakupan pembinaan dan pengawasan sarana kefarmasian terdaftar	1.200.703.297
		<i>Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)</i>	<i>Jumlah Sarana Kefarmasian (Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)), yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan serta tindak lanjut perizinan</i>	86.730.000
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	86.730.000
		<i>Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga</i>	<i>Jumlah Industri PKRT yang mendapatkan Pelatihan Sertifikasi PKRT dalam rangka pengawasan produksi dan peredaran PKRT</i>	390.150.000

No	Prioritas Nasional	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	390.150.000
		<i>Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga</i>	<i>Persentase Industri Pangan Skala Rumah Tangga terdaftar yang mengikuti pelatihan Sertifikasi Penyuluhan Keamanan Pangan (SPKP)</i>	235.062.000
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	235.062.000
		<i>Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)</i>	<i>Jumlah pelaku usaha penerima sertifikat laik higiene dan sanitasi (SLHS) tempat pengelolaan makanan (TPM)</i>	106.120.800
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	106.120.800
		<i>Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan</i>	<i>Jumlah penjual makanan jajanan, Sentra Makanan jajanan dan pelaku usaha makanan minuman yang mendapatkan pembinaan</i>	200.601.497

No	Prioritas Nasional	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	200.601.497
		<i>Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga</i>	<i>Persentase industri rumah tangga terdaftar yang diperiksa Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman</i>	182.039.000
		Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	182.039.000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase pelaksanaan gerakan masyarakat sehat	2.928.100.000
		<i>Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah unsur masyarakat yang dilibatkan dalam pemberdayaan masyarakat</i>	28.100.000
		Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	28.100.000
		<i>Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah dokumen pelaksanaan sehat dalam rangka promotif dan preventif</i>	1.000.000.000
		Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1.000.000.000
		<i>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah UKBM yang mengikuti Bintek dan Supervisi pengembangan dan pelaksanaan UKBM</i>	1.900.000.000

No	Prioritas Nasional	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran
		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1.900.000.000
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Organisasi Pemuda yang aktif Persentase wirausaha muda;	6.770.000.000
		<i>Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/ Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah Pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda</i> <i>Jumlah Pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan</i>	5.150.000.000
		Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota	200.000.000
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	1.300.000.000
		Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	Jumlah yang menerima penghargaan pemuda	750.000.000
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	200.000.000

No	Prioritas Nasional	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	200.000.000
		Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	2.500.000.000
		<i>Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Persentase Organisasi Kepemudaan yang diberikan pengembangan dan pembinaan sesuai dengan perencanaan</i>	<i>1.620.000.000</i>
		Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	1.620.000.000
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Cakupan Pembinaan Olahraga Cakupan Pembinaan Atlet Muda Cakupan Pelatih yang Bersertifikat	13.454.000.000
		<i>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah pelatih olahraga yang memiliki kompetensi di satuan-satuan pendidikan Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga yang disediakan</i>	<i>4.304.000.000</i>
		Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	4.304.000.000
		<i>Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah</i>	<i>1.500.000.000</i>
		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/ Kota	900.000.000

No	Prioritas Nasional	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran
		Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	600.000.000
		<i>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi</i>	<i>Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi sesuai dengan kebutuhan</i>	<i>1.000.000.000</i>
		Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Jumlah penerima Penghargaan olahraga	300.000.000
		Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)	700.000.000
		<i>Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga</i>	<i>Persentase Organisasi Olahraga yang diberikan pengembangan dan pembinaan sesuai dengan perencanaan</i>	<i>6.450.000.000</i>
		Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	6.450.000.000
		<i>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi</i>	<i>Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi sesuai dengan kebutuhan</i>	<i>200.000.000</i>
		Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	200.000.000
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan	516.500.000

No	Prioritas Nasional	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran
		<i>Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan</i>	<i>Persentase Organisasi Kepramukaan yang diberikan pengembangan dan pembinaan sesuai dengan perencanaan</i>	516.500.000
		Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	516.500.000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Cakupan Kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	500.000.000,00
		<i>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase kelengkapan metadata statistik sektoral</i>	500.000.000,00
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	150.000.000,00
		Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	350.000.000,00
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	1.377.900.000,00
		<i>Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</i>	148.500.000,00
		Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	148.500.000,00
		<i>Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</i>	750.000.000,00
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	100.000.000,00
		Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	650.000.000,00

No	Prioritas Nasional	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran
		<i>Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</i>	<i>100.000.000,00</i>
		Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	100.000.000,00
		<i>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengembangan Inovasi dan Teknologi</i>	<i>379.400.000,00</i>
		Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	279.400.000,00
		Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	100.000.000,00
		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Tersusunnya dokumen perencanaan tenaga kerja	200.000.000
		<i>Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)</i>	<i>Jumlah Dokumen rencana Tenaga Kerja</i>	<i>200.000.000</i>
		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	200.000.000
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Jumlah pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan kompetensi	8.700.000.000
		<i>Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi</i>	<i>Jumlah pencari kerja yang dilatih</i>	<i>8.650.000.000</i>
		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	8.400.000.000
		Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	250.000.000
		<i>Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta</i>	<i>Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina</i>	<i>50.000.000</i>

No	Prioritas Nasional	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran
		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	50.000.000
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan	12.117.836.636
		<i>Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah pembuatan layanan kartu AK1 bagi pencari kerja Terlaksananya pelayanan pembuatan kartu tanda bukti pencari kerja (AK.1)</i>	<i>12.117.836.636</i>
		Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	500.000.000
		Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	11.617.836.636
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Kasus HI yang diselesaikan	650.000.000
		<i>Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan Persentase kasus HI yang diselesaikan</i>	<i>650.000.000</i>
		Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	200.000.000
		Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	250.000.000
		Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	200.000.000

No	Prioritas Nasional	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Cakupan perangkat daerah dan lembaga swasta yang mengikuti sosialisasi pelaksanaan PUG melalui PPRG kewenangan Kabupaten/Kota Cakupan kegiatan responsif gender pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat Kabupaten/Kota	1.370.000.000
		<i>Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah Instansi Pemerintah yang mengikuti koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG</i>	<i>550.000.000</i>
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	300.000.000
		Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Kab/Kota	250.000.000
		<i>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang perempuan tingkat Kabupaten/ Kota yang mendapatkan pelatihan</i>	<i>650.000.000</i>
		Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/ Kota	650.000.000
		<i>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah lembaga layanan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan/ fasilitas dari Pemerintah Daerah</i>	<i>170.000.000</i>
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	170.000.000

No	Prioritas Nasional	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Cakupan Layanan Bagi korban kekerasan perempuan	370.000.000
		<i>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yang telah terstandardisasi</i>	<i>200.000.000</i>
		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/ Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	200.000.000
		<i>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Cakupan sumber daya manusia penanganan korban kekerasan terhadap perempuan</i>	<i>170.000.000</i>
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	170.000.000
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Cakupan Layanan Peningkatan kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	1.625.000.000
		<i>Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yang telah terstandardisasi</i>	<i>725.000.000</i>
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	450.000.000
		Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	275.000.000

No	Prioritas Nasional	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran
		<i>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Cakupan sumber daya lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga</i>	550.000.000
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	550.000.000
		<i>Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Pusat Layanan Bagi Keluarga dalam Meningkatkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Kabupaten/ Kota yang disediakan</i>	350.000.000
		Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	350.000.000
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Cakupan Pemenuhan Hak anak pada Pemerintah Non Pemerintah dan Dunia Usaha	2.450.000.000
		<i>Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah pelembagaan Desa Layak Anak</i>	750.000.000
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	400.000.000

No	Prioritas Nasional	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	350.000.000
		<i>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	<i>Cakupan Layanan Peningkatan Kualitas Hiup anak</i>	1.700.000.000
		Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	0	800.000.000
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	250.000.000
		Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	300.000.000
		Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	350.000.000
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Cakupan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Kabupaten/Kota	1.352.500.000
		<i>Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</i>	<i>Cakupan koordinasi layanan perlindungan khusus anak tingkat Kabupaten/Kota</i>	541.000.000
		Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	270.500.000

No	Prioritas Nasional	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran
		Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	270.500.000
		<i>Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Cakupan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang dimanfaatkan untuk perencanaan dan pengelolaan pembangunan</i>	811.500.000
		Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	270.500.000
		Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk	270.500.000
		Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	270.500.000
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Jumlah Pemakaian Kontrasepsi Modern/mCPR (Metoda Contraceptive Prevalency Rate)	15.752.975.000
		<i>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal</i>	<i>Jumlah stakeholder/ pemangku kepentingan dan mitra kerja yang berperan serta aktif dalam program KKBPK</i>	1.771.750.000
		Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	800.000.000

No	Prioritas Nasional	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran
		Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	270.500.000
		Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	270.500.000
		Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	270.500.000
		Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	160.250.000
		<i>Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/ PLKB)</i>	<i>jumlah PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di bidang pengendalian penduduk</i>	3.279.975.000
		Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	479.975.000
		Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	2.800.000.000
		<i>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah kesertaan ber KB</i>	7.343.750.000

No	Prioritas Nasional	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran
		Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	325.625.000
		Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	3.357.500.000
		Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	2.365.250.000
		Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	213.375.000
		Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	325.625.000
		Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	270.500.000
		Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Pengelola dan Petugas yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	325.625.000
		Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	160.250.000
		<i>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</i>	<i>Jumlah Kelompok Kegiatan yang melakukan advokasi pelayanan dan pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga</i>	<i>3.357.500.000</i>

No	Prioritas Nasional	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran
		Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	3.357.500.000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)	2.692.365.700
		<i>Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</i>	<i>Jumlah kader ketahanan/kesejahteraan keluarga yang dibina</i>	<i>2.421.865.700</i>
		Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	215.375.000
		Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	820.096.250
		Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	270.500.000
		Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	805.644.450

No	Prioritas Nasional	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran
		Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)		
		Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	160.250.000
		Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	150.000.000
		<i>Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</i>	<i>Jumlah kader ketahanan/kesejahteraan keluarga yang dibina</i>	<i>270.500.000</i>
		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	270.500.000
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase perpustakaan yang terkelola dengan baik	749.321.000,00
		<i>Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Persentase Pengelolaan perpustakaan tingkat daerah kabupaten/kota</i>	<i>154.880.000,00</i>
		Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar	60.500.000,00

No	Prioritas Nasional	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran
			Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	
		Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	33.880.000,00
		Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	60.500.000,00
		<i>Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat</i>	<i>594.441.000,00</i>
		Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	352.441.000,00
		Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	242.000.000,00
JUMLAH				956.069.342.572,00
5	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Industri Kecil dan Menengah	1.475.000.000
		<i>Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Industri Kecil dan menengah</i>	<i>1.475.000.000</i>
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	200.000.000

No	Prioritas Nasional	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	475.000.000
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	800.000.000
		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase IKM Formal	110.000.000
		<i>Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah IKM Formal</i>	<i>110.000.000</i>
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	110.000.000
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Terfasilitasinya pelayanan sistem informasi Industri	332.750.000
		<i>Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah data dan informasi IKM</i>	<i>332.750.000</i>
		Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	332.750.000

No	Prioritas Nasional	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Sarana Perdagangan yang Mendukung Aktivitas Perdagangan	26.950.000.000
		<i>Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</i>	<i>Tersedianya Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan</i>	26.800.000.000
		Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	26.500.000.000
		Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	300.000.000
		<i>Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya</i>	<i>Tersusunnya dokumen hasil pembinaan dan pengendalian kepada pengelola sarana distribusi perdagangan</i>	150.000.000
		Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	150.000.000
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Kenaikan Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat (Kepokmas)	2.600.000.000
		<i>Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/ Kota</i>	<i>Termonitoring, Terevaluasi dan terlaporkannya harga kebutuhan pokok masyarakat (Kepokmas)</i>	2.600.000.000
		Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	100.000.000
		Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	2.500.000.000
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Kenaikan Ekspor bersih Produk Kabupaten Tasikmalaya	850.000.000

No	Prioritas Nasional	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran
		<i>Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>jumlah event Promosi dagang produk ekspor yang diikuti</i>	850.000.000
		Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	600.000.000
		Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	250.000.000
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Peningkatan Jumlah Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang Ditera dan Ditera Ulang	100.000.000
		<i>Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan</i>	<i>Jumlah Pelayanan tera dan tera ulang</i>	100.000.000
		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	50.000.000
		Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	50.000.000
		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Jumlah Pelaku Usaha Perdagangan formal	400.000.000
		<i>Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</i>	<i>Jumlah Pelaku usaha yang melakukan pemasaran produk dalam negeri melalu kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi</i>	400.000.000
		Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	200.000.000
		Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan	200.000.000

No	Prioritas Nasional	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran
			dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase kenaikan jumlah Investor	455.000.000
		<i>Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah fasilitas/ insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/ Kota yang bisa diberikan kepada investor</i>	<i>55.000.000</i>
		Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	55.000.000
		<i>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota</i>	<i>400.000.000</i>
		Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	200.000.000
		Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	200.000.000
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Cakupan promosi potensi unggulan daerah dalam 1 tahun	750.000.000
		<i>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah kegiatan promosi penanaman moda</i>	<i>750.000.000</i>
		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pelaku usaha yang taat LKPM	750.000.000
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Jumlah pelaku usaha yang taat LKPM Jumlah pelaku usaha yang taat LKPM	420.000.000

No	Prioritas Nasional	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran
		<i>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Persentase Pelayanan Perizinan dan non Perizinan secara terpadu satu pintu</i>	420.000.000
		Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	300.000.000
		Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	120.000.000
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase pelaku usaha yang taat LKPM	695.000.000
		<i>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah pelaku usaha yang taat LKPM</i> <i>Jumlah pelaku usaha yang taat LKPM</i>	695.000.000
		Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	220.000.000
		Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	275.000.000
		Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi	200.000.000

No	Prioritas Nasional	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran
			Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	
JUMLAH				35.137.750.000
6	Membangun dari Desa dan Dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Cakupan Pekerja Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial dan Relawan Sosial yang mengikuti peningkatan kapasitas	1.690.000.000
		<i>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah penguatan dan pengembangan SDM PSKS</i>	<i>1.690.000.000</i>
		Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	750.000.000
		Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	650.000.000
		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	100.000.000
		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	90.000.000
		Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	100.000.000

No	Prioritas Nasional	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase anak terlan-tar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas terlantar, dan gelandangan pengemis yang terpe-nuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	4.460.000.000
		<i>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</i>	<i>Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau</i>	<i>3.510.000.000</i>
		Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	2.210.000.000
		Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	1.050.000.000
		Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	80.000.000
		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	70.000.000
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	100.000.000
		<i>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</i>	<i>Jumlah PPKS di Luar Panti Sosial yang menerima layanan data dan pengaduan, layanan rujukan, layanan kedaruratan dan layanan reunifikasi keluarga</i>	<i>950.000.000</i>
		Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	100.000.000

No	Prioritas Nasional	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran
		Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	200.000.000
		Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	175.000.000
		Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	75.000.000
		Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	100.000.000
		Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	150.000.000
		Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	150.000.000
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Cakupan keluarga miskin dan rentan miskin yang menerima bantuan sosial untuk perlindungan dan jaminan sosial	5.412.000.000
		<i>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah masyarakat miskin dan rentan miskin dalam data terpadu yang difasilitasi untuk menerima bantuan sosial</i>	<i>5.412.000.000</i>
		Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	1.900.000.000
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	200.000.000

No	Prioritas Nasional	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran
		Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	3.082.000.000
		Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	230.000.000
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Cakupan penanganan korban bencana alam dan bencana sosial pada saat dan setelah masa tanggap darurat bencana daerah	2.240.000.000
		<i>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah korban bencana yang menerima bantuan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah</i>	1.410.000.000
		Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	600.000.000
		Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	490.000.000
		Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	320.000.000
		<i>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah pekerja sosial profesional/ tenaga kesejahteraan sosial dan / atau relawan sosial yang tersedia</i>	830.000.000
		Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	80.000.000

No	Prioritas Nasional	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran
		Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	750.000.000
		PROGRAM PENATAAN DESA	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang baik	300.000.000,00
		<i>Penyelenggaraan Penataan Desa</i>	<i>Jumlah Desa yang melakukan penataan status desa</i>	<i>300.000.000,00</i>
		Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	100.000.000,00
		Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	200.000.000,00
		PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Cakupan Fasilitasi Kerjasama Desa	450.000.000,00
		<i>Fasilitasi Kerja Sama antar Desa</i>	<i>Jumlah Desa yang melakukan penataan status desa</i>	<i>450.000.000,00</i>
		Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	450.000.000,00
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Fasilitasi Kerjasama Desa	10.708.224.488,00
		<i>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</i>	<i>Jumlah Desa yang melakukan penataan status desa</i>	<i>10.708.224.488,00</i>
		Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	150.000.000,00
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	250.000.000,00
		Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	9.021.294.488,00

No	Prioritas Nasional	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran
		Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	200.000.000,00
		Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	184.430.000,00
		Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	80.000.000,00
		Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	122.500.000,00
		Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	300.000.000,00
		Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	200.000.000,00
		Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	200.000.000,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Jumlah Lembaga Desa yang Aktif	5.000.000.000,00
		<i>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Lembaga Desa yang mendapatkan pembinaan</i>	<i>5.000.000.000,00</i>
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna),	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2.800.000.000,00

No	Prioritas Nasional	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran
		Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		
		Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	150.000.000,00
		Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	550.000.000,00
		Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1.500.000.000,00
		PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah transmigran yang telah difasilitasi pembinaannya	765.000.000
		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah transmigran yang telah memiliki sertifikat pelatihan	765.000.000
		Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	400.000.000
		Pelatihan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	365.000.000
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Penyediaan sarana dan prasarana Translok	100.000.000
		<i>Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian</i>	<i>Penyediaan Sarana dan Prasarana Translok</i>	<i>100.000.000</i>
		Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	100.000.000

No	Prioritas Nasional	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran
JUMLAH				31.125.224.488
7	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Pemenuhan Kebijakan Koordinasi dan Evaluasi Bidang Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat	54.918.221.126,00
		<i>Administrasi Tata Pemerintahan</i>	<i>Persentase Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah yang tersusun</i>	<i>1.646.882.458,00</i>
		Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	130.999.000,00
		Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	750.000.000,00
		Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	765.883.458,00
		<i>Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</i>	<i>Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</i>	<i>51.048.179.668,00</i>
		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	50.775.929.668,00
		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	181.500.000,00
		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	90.750.000,00

No	Prioritas Nasional	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran
		<i>Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</i>	<i>Persentase Pemenuhan Kebijakan dan Peraturan di Kabupaten Tasikmalaya</i>	403.293.000,00
		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	403.293.000,00
		Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	1.001.800.000,00
		Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	326.700.000,00
		<i>Fasilitasi Kerja Sama Daerah</i>	<i>Persentase Kerjasama Pemerintah Daerah yang dilaksanakan</i>	491.366.000,00
		Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	205.415.000,00
		Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	285.951.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	2.799.312.466
		<i>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Cakupan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota</i>	2.799.312.466
		Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	760.000.000
		Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	999.997.878
		Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	100.000.000

No	Prioritas Nasional	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran
		Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	687.975.263
		Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	251.339.325
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Indeks Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi	1.376.000.000
		<i>Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Indeks Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi</i>	<i>1.376.000.000</i>
		Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan	685.000.000
		Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	100.000.000
		Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	254.000.000
		Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas	50.000.000
		Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	287.000.000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase perangkat daerah yang memiliki pola hubungan komunikasi	219.036.600
		<i>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Cakupan Jumlah SKPD terlayani penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi</i>	<i>219.036.600</i>

No	Prioritas Nasional	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran
		Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	219.036.600
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Cakupan Penyelenggaraan Pengawasan	3.754.998.000,00
		<i>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</i>	<i>Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal</i>	<i>3.466.798.000,00</i>
		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	299.898.000,00
		Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	260.500.000,00
		Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	80.500.000,00
		Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	192.500.000,00
		Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	1.780.900.000,00
		Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	852.500.000,00
		<i>Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</i>	<i>Cakupan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu</i>	<i>288.200.000,00</i>
		Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	110.000.000,00
		Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	178.200.000,00
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Cakupan pengendalian intern pemerintah	1.699.500.000,00
		<i>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan</i>	<i>Cakupan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan</i>	<i>448.800.000,00</i>
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	302.500.000,00

No	Prioritas Nasional	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	146.300.000,00
		<i>Pendampingan dan Asistensi</i>	<i>Cakupan pendampingan asistensi</i>	<i>1.250.700.000,00</i>
		Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	338.700.000,00
		Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	409.500.000,00
		Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	402.500.000,00
		Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	100.000.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah	773.153.342.530,00
		<i>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</i>	<i>Persentase Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</i>	<i>2.323.356.000,00</i>
		Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	104.500.000,00
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	104.500.000,00
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	80.000.000,00
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	80.000.000,00
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	72.500.000,00

No	Prioritas Nasional	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	76.000.000,00
		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	220.000.000,00
		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	220.000.000,00
		Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	386.770.000,00
		Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	586.394.000,00
		Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	392.692.000,00
		<i>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</i>	<i>Persentase Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</i>	<i>622.000.000,00</i>
		Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	55.000.000,00
		Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	57.000.000,00
		Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	220.000.000,00
		Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai	110.000.000,00

No	Prioritas Nasional	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran
		Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	
		Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	180.000.000,00
		<i>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</i>	<i>Persentase Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</i>	<i>1.092.000.000,00</i>
		Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	173.000.000,00
		Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	121.000.000,00
		Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	172.000.000,00
		Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	234.000.000,00
		Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	110.000.000,00

No	Prioritas Nasional	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran
		Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	98.000.000,00
		Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	92.000.000,00
		Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	92.000.000,00
		<i>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</i>	<i>Persentase Fasilitasi Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</i>	<i>769.115.986.530,00</i>
		Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	720.596.737.300,00
		Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	34.604.859.391,00
		Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	13.914.389.839,00
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Barang Milik Daerah yang telah dilengkapi dengan Dokumen Bukti Kepemilikan	2.767.400.000,00
		<i>Pengelolaan Barang Milik Daerah</i>	<i>Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah</i>	<i>2.767.400.000,00</i>
		Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	140.000.000,00
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	60.000.000,00
		Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	768.700.000,00
		Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1.388.700.000,00

No	Prioritas Nasional	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran
		Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	285.000.000,00
		Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	125.000.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Pengelolaan Pajak Daerah	13.600.950.000,00
		<i>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</i>	<i>Persentase Pengelolaan Pajak Daerah</i>	<i>13.600.950.000,00</i>
		Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	241.000.000,00
		Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	143.960.000,00
		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	742.790.000,00
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	2.353.000.000,00
		Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1.125.000.000,00
		Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	300.000.000,00
		Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	4.820.000.000,00
		Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	875.000.000,00

No	Prioritas Nasional	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran
		Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	125.000.000,00
		Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	1.400.000.000,00
		Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	1.175.200.000,00
		Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	300.000.000,00
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Perekaman KTP Elektronik Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	3.371.183.500,00
		<i>Penataan Pendaftaran Penduduk</i>	<i>Tingkat pemenuhan kebutuhan penataan pendaftaran penduduk</i>	<i>503.880.000,00</i>
		Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	503.880.000,00
		<i>Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</i>	<i>Jumlah layanan penerbitan pendaftaran penduduk</i>	<i>2.867.303.500,00</i>
		Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	2.867.303.500,00
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Kepemilikan akta kelahiran penerbitan akta kematian	425.073.800,00
		<i>Pelayanan Pencatatan Sipil</i>	<i>Tingkat Pemenuhan kebutuhan pelayanan pencatatan sipil</i>	<i>70.000.000,00</i>

No	Prioritas Nasional	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran
		Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	70.000.000,00
		<i>Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</i>	<i>Jumlah layanan pencatatan sipil</i>	355.073.800,00
		Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	355.073.800,00
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	60.940.000,00
		<i>Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</i>	<i>Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan data oleh PD pengguna</i>	60.940.000,00
		Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	25.800.000,00
		Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	35.140.000,00
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian program dalam RKPD terhadap RPJMD	2.610.000.000,00
		<i>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</i>	<i>Jumlah dokumen perencanaan dan pendanaan pembangunan Daerah</i>	1.840.000.000,00
		Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	100.000.000,00
		Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	250.000.000,00
		Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	200.000.000,00

No	Prioritas Nasional	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran
		Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	750.000.000,00
		Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	90.000.000,00
		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	450.000.000,00
		<i>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</i>	-	150.000.000,00
		Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	150.000.000,00
		<i>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</i>	<i>Jumlah Laporan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</i>	500.000.000,00
		Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	300.000.000,00
		Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	200.000.000,00
		<i>Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah</i>	-	120.000.000,00
		Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	120.000.000,00

No	Prioritas Nasional	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dalam Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (RENJA/RENSTRA) terhadap Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RKPD/RPJMD/RPJPD)	2.209.250.324,00
		<i>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</i>	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</i>	<i>865.500.324,00</i>
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	310.500.324,00
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	25.000.000,00
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	30.000.000,00
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	450.000.000,00
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	20.000.000,00
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	30.000.000,00

No	Prioritas Nasional	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran
		<i>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</i>	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA)</i>	665.500.000,00
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	287.000.000,00
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	19.000.000,00
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	29.000.000,00
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	286.500.000,00
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	17.000.000,00
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	27.000.000,00
		<i>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</i>	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</i>	678.250.000,00
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	295.000.000,00

No	Prioritas Nasional	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	25.000.000,00
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	27.500.000,00
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	278.250.000,00
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	25.000.000,00
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	27.500.000,00
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks Sistem Merit (2 aspek penilaian) Aspek Pengembangan Karir + Aspek Mutasi dan Promosi Indeks Sistem Merit (3 aspek penilaian) Aspek Perencanaan Kebutuhan + Aspek Pengadaan + Aspek Sistem Informasi Indeks Sistem Merit (3 aspek penilaian) Aspek Manajemen Kinerja + Aspek Penggajian, Penghargaan dan Disiplin + Aspek Perlindungan dan Pelayanan	3.087.999.269,00
		<i>Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</i>	<i>Indeks Sistem Merit (3 aspek penilaian) : Aspek Perencanaan Kebutuhan + Aspek Pengadaan + Aspek</i>	<i>1.494.999.689,00</i>

No	Prioritas Nasional	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran
			<i>Sistem Informasi Rasio Pegawai Fungsional</i>	
		Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	990.000.000,00
		Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	55.000.000,00
		Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	449.999.689,00
		<i>Mutasi dan Promosi ASN</i>	<i>Nilai Sistem Merit Aspek Mutasi dan Promosi ASN Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi</i>	<i>543.000.000,00</i>
		Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	123.000.000,00
		Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	120.000.000,00
		Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	300.000.000,00
		<i>Pengembangan Kompetensi ASN</i>	<i>Nilai Sistem Merit Aspek Pengembangan Karir Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS Tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)</i>	<i>390.000.000,00</i>
		Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	225.000.000,00
		Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	165.000.000,00
		<i>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</i>	<i>Indeks Sistem Merit (3 aspek penilaian) : Aspek Manajemen Kinerja + Aspek Penggajian, Penghargaan dan Disiplin + Aspek Perlindungan dan Pelayanan</i>	<i>659.999.580,00</i>

No	Prioritas Nasional	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran
		Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	100.000.000,00
		Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	484.999.580,00
		Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	75.000.000,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	3.552.901.996,00
		<i>Pengembangan Kompetensi Teknis</i>	<i>Persentase ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis</i>	<i>1.450.000.000,00</i>
		Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	150.000.000,00
		Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	700.000.000,00
		Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	600.000.000,00

No	Prioritas Nasional	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran
		<i>Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</i>	<i>Persentase ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</i>	2.102.901.996,00
		Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	2.102.901.996,00
JUMLAH				869.606.109.611,00
8	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase adat budaya yang terfasilitasi	700.000.000,00
		<i>Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah ritual adat istiadat yang difasilitasi</i>	500.000.000,00
		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	350.000.000,00
		Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	150.000.000,00
		<i>Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah event kebudayaan yang digelar</i>	200.000.000,00
		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	200.000.000,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase sanggar seni yang dibina	1.900.000.000,00
		<i>Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah lingkung/ sanggar seni</i>	1.900.000.000,00
		Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	200.000.000,00

No	Prioritas Nasional	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran
		Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1.700.000.000,00
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase cagar budaya yang dikelola	300.000.000,00
		<i>Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah cagar budaya</i>	<i>300.000.000,00</i>
		Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	100.000.000,00
		Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	200.000.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Perangkat Daerah yang telah melaksanakan Pengelolaan Arsip	242.000.000,00
		<i>Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Persentase Perangkat Daerah yang telah mengelola kearsipan</i>	<i>181.500.000,00</i>
		Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	60.500.000,00
		Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	60.500.000,00
		Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/ Kota	60.500.000,00
		<i>Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/ Kota</i>		<i>60.500.000,00</i>
		Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	60.500.000,00
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Pemenuhan Kebijakan Koordinasi dan Evaluasi Bidang Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat	54.918.221.126,00
		<i>Administrasi Tata Pemerintahan</i>	<i>Persentase Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah yang tersusun</i>	<i>1.646.882.458,00</i>

No	Prioritas Nasional	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran
		Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	130.999.000,00
		Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	750.000.000,00
		Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	765.883.458,00
		<i>Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</i>	<i>Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</i>	<i>51.048.179.668,00</i>
		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	50.775.929.668,00
		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	181.500.000,00
		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	90.750.000,00
		<i>Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</i>	<i>Persentase Pemenuhan Kebijakan dan Peraturan di Kabupaten Tasikmalaya</i>	<i>403.293.000,00</i>
		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	403.293.000,00
		Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	1.001.800.000,00

No	Prioritas Nasional	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran
		Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	326.700.000,00
		<i>Fasilitasi Kerja Sama Daerah</i>	<i>Persentase Kerjasama Pemerintah Daerah yang dilaksanakan</i>	<i>491.366.000,00</i>
		Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	205.415.000,00
		Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	285.951.000,00
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Cakupan peningkatan peran partai politik dan pendidikan politik di Kabupaten Tasikmalaya	69.192.883.867
		<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</i>	<i>Jumlah dokumen</i>	<i>69.192.883.867</i>
		Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	574.554.900

No	Prioritas Nasional	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran
		Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	1.148.300.000
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	5.675.120.000
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	61.794.908.967
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Meningkatnya Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	18.732.000.000
		<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</i>	<i>Jumlah dokumen/laporan</i>	<i>18.732.000.000</i>

No	Prioritas Nasional	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	17.532.000.000
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1.000.000.000
		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	200.000.000
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Meningkatnya Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	5.378.400.000
		<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</i>	<i>Jumlah dokumen/laporan</i>	<i>5.378.400.000</i>
		Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	5.000.000

No	Prioritas Nasional	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	5.173.400.000
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	200.000.000
		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	-
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Meningkatnya Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konfl	18.180.667.800
		<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</i>	<i>Jumlah dokumen/laporan</i>	<i>18.180.667.800</i>

No	Prioritas Nasional	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	700.000.000
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	16.580.668.000
		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	149.999.800
		Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	750.000.000
JUMLAH				169.544.172.793

Sumber: Hasil analisis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Tasikmalaya Tahun 2024

4.4. Rencana Inovasi Daerah Tahun 2025

Berdasarkan Amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah daerah dapat melakukan inovasi dan Kepala Daerah melaporkan inovasi daerah yang akan dilaksanakan kepada Menteri.

Selain itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang inovasi daerah, untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing Daerah.

Sedangkan berdasarkan Permendagri Nomor 104 Tahun 2018 Tentang Penilaian Dan Pemberian Penghargaan Dan/Atau Insentif Inovasi Daerah. Pada tahun 2025, inovasi daerah merupakan salah satu prioritas pembangunan daerah di Kabupaten Tasikmalaya yaitu program Inovasi Pelayanan Publik.

Bentuk Inovasi Daerah yaitu tata kelola pemerintahan daerah (inovasi pelayanan publik) dan inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Kriteria inovasi daerah sebagai berikut:

1. Mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi
2. Memberi manfaat bagi Daerah dan/atau masyarakat
3. Tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
4. Merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan
5. Dapat direplikasi

Tabel 4.12
Rencana Inovasi Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025

No	Nama Inovasi	Pemrakarsa/Pengusul
1	Sistem Informasi Inovasi Daerah (SIINIDA)	Bappelitbangda
2	PELUKAN (Perlindungan Perempuan Dan Anak)	Dinas Sosial
3	Melayani Daring Administrasi Kepndudukan Dan Pencatatan Sipil (MEDAR KACAPI)	Disdukcapil
4	Pelaksanaan Pelayanan Keliling Melalui Koordinasi Lintas Opd Terkait	
5	Pelaksanaan Perekaman & Percetakan KTP-el (PERCET KTP-el)	
6	Pelayanan Integrasi Perekaman Antar Kecamatan (intan)	
7	Perekaman KTP-el Ke Sekolah Dan Pesantren (sweet 17)	
8	Pelayanan Dokumen Kependudukan Terpadu (PDKT)	Dinas Penanaman Modal
9	SILANDAK ONLINE (SISTEM PELAPORAN DATA KETENAGAKERJAAN OLEH PERUSAHAAN SECARA ONLINE)	
10	Inovasi Tabel "CAMAT BANTING BATA" (Cara Mengetahui CepAT Berat Badan TINGgi Badan BalITA)	Kecamatan Jamanis
11	Inovasi GEDE KAWANI PENTING (GERakan DEdikasi Kelompok WANita TaNI Dalam PENurunan Angka StunTING)	
12	Agrowisata Borosole	Desa Madiasari
13	Ternak, Tani Dan Wisata (tertawa)	DESA SIRNAGALIH
14	Wisata Religi Makan Sembah Dalem Jiwa Manggala	Desa Sukamaju
15	Wisata Air Terjun Curugedus	Desa Sukamaju
16	Wisata Pemancingan Embung Desa	Desa Sukamaju
17	Sirkuit Bukit Sicerah	Desa Wakap
18	Kolam Renang Desa Wakap	Desa Wakap
19	Pengelolaan Pakan Ternak Sapi Perah Bernutrisi Tinggi	Bumdes Cakrabuana Guranteng
20	Penanaman Jagung Hibrida Merah Menjadi Pakan Tenak	KELOMPOK TANI WALUYA III
21	Taman Wisata Cibeureum	
22	Wisata Desa Home Stay	
23	Sekolah Ibu	LPM-P
24	ULTRAMEN BIRU PUSKESMAS SUKAHENING (Ultrasonografi Mobile Dan Skrining Ibu Hamil Resiko Tinggi Di Posyandu)	UPTD Puskesmas Sukahening
25	-SMART- Satuan Tugas Bersama Rangger Anti Stunting	
26	Terowongan Dan Irigasi Pasir Ipis	P3A Sanghiang Sakti
27	Pasar Buhun	POKDARWIS SELAWANGI
28	Simpakar-RS (Sistem Informasi Manajemen Dan PelayanAn KesehatAn TeRpadu Rumah Sakit)	RSUD Singaparna Medika Citrautama
29	(sanggap Stunting) Pemodelan Desa Tanggap Stunting	STIKes Respati

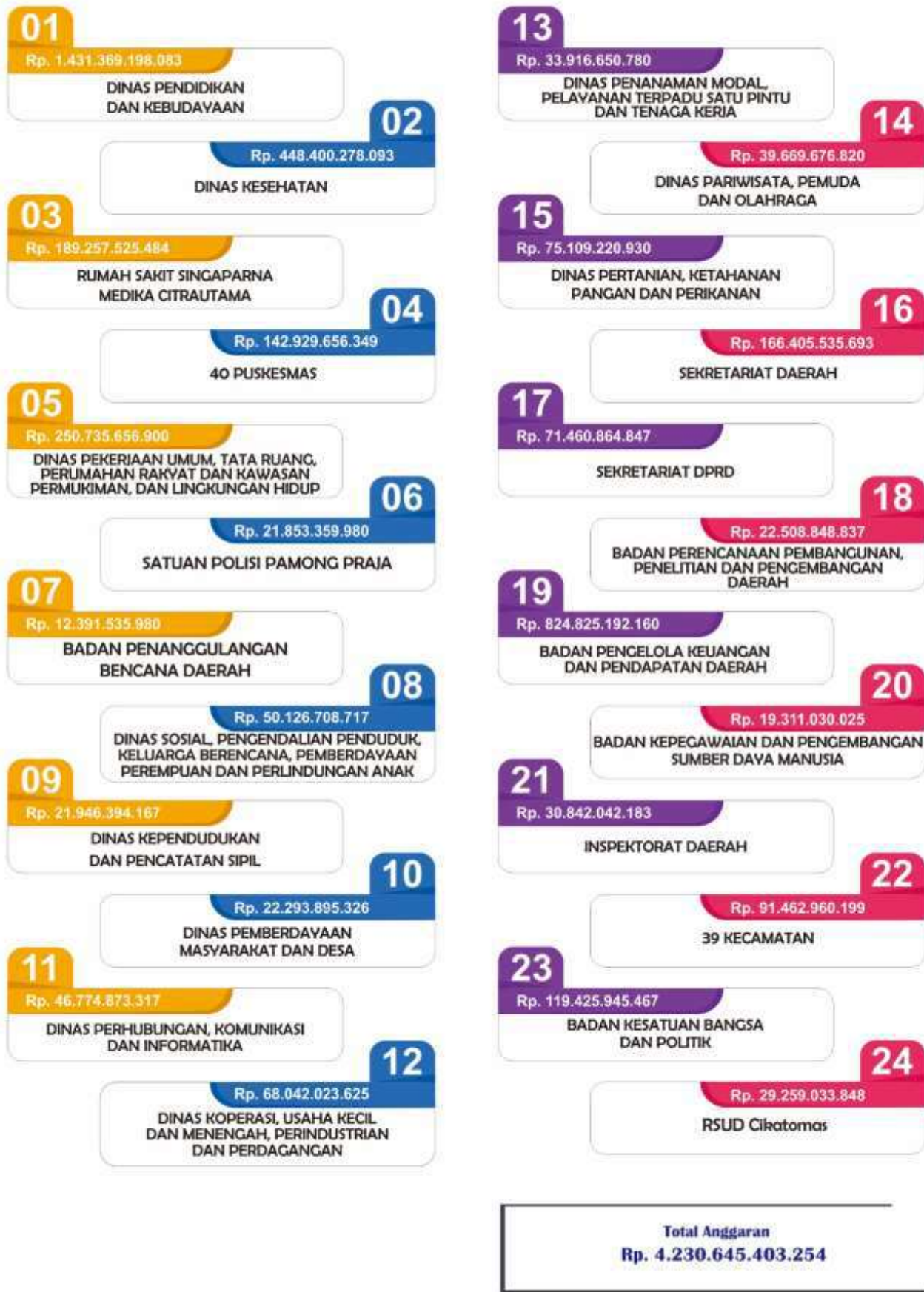
No	Nama Inovasi	Pemrakarsa/Pengusul
30	Tepung RASTTLE (Beras, Tempe, Tolo, Dan Lele) Formula Untuk Pemulihan Status Gizi Balita Stunting	
31	AMAN BANJIR (AMBAR)	STT YBS Internasional
32	SADESA (Satu Pintu Administrasi Desa) â€“ SISTEM MANAJEMEN ADMINISTRASI DESA	
33	TANTRAM - Pemantauan Lahan Sawah Untuk Meningkatkan Produktifitas Tanam Padi Berbasis IoT	
34	Smart Scarecrow, Otomatisasi Pengusiran Hama Tanaman Menggunakan Smart System Controller Up And Down Berbasis IoT.	Universitas Cipasung Tasikmalaya
35	Guru Tamu Istimewa Implementasi Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) Dan Stunting Education	TK Atraktif Sahara
36	Budidaya Lebah Nyiruan Di Sekitar Rumah	Ade Hermawan
37	Jago Peuyeum (goyeum)	Anton Nurdiana
38	Pembuatan Kursi Dari Bambu Hitam	Ikin
39	Depot Air Minum	Nana Suryana
40	Jajapin.com	Sandi Arianto
41	Foto Siluet Ukir Kayu	Sansan Maulus
42	Gula Aren Semut Simanis	Sulaeman
43	Rumah Sampah Berbasis Sekolah (RSBS)	Wawan Widarmanto, S.Ag.
44	Pembinaan Rutin Seratus Guru (BIRU SERU)	
45	Parung Desa Jagung	Wildan Apipudin

Sumber: Hasil analisis Bappelitbangda Kab. Tasikmalaya, 2024

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB 5

REKAPITULASI RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025



BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

DAERAH

5.1. Rencana Program Prioritas Daerah

Program dan kegiatan yang tertuang di dalam RKPD Tahun 2025 dilaksanakan secara terpadu berdasarkan urusan/kewenangan baik urusan wajib maupun urusan pilihan serta fungsi penunjang dan fungsi lainnya, dengan dukungan pendanaan bersifat indikatif yang kemudian dikelompokkan ke dalam prioritas pembangunan daerah dan sasaran pembangunan daerah. Rekapitulasi pagu anggaran pendanaan indikatif rencana program dan kegiatan tahun 2025 menurut prioritas pembangunan daerah dan sasaran pembangunan disajikan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 5.1

Rekapitulasi Program Prioritas Pembangunan Daerah beserta Sasaran Pembangunan dan Pagu Indikatif

Prioritas Pembangunan	Sasaran (RPJMD)	Program Perangkat Daerah	Pagu
PP.1 Peningkatan pelayanan pendidikan			621.233.551.836
	S.1 Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya	Program Pengelolaan Pendidikan	601.366.051.836
		Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	16.500.000.000
		Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	467.500.000
	S.4. Meningkatnya pelestarian dan Pengembangan kebudayaan lokal	Program Pengembangan Kebudayaan	700.000.000
		Program Pengembangan Kesenian Tradisional	1.900.000.000
		Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	300.000.000
PP.2 Peningkatan pelayanan kesehatan daerah serta penurunan angka prevalensi stunting			307.625.733.100

Prioritas Pembangunan	Sasaran (RPJMD)	Program Perangkat Daerah	Pagu
	S.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	259.094.420.518
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	3.864.168.585
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	1.200.703.297
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	2.928.100.000
		Program Pengendalian Penduduk	1.352.500.000
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	15.752.975.000
		Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	2.692.365.700
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	6.770.000.000
		Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	516.500.000
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	13.454.000.000
PP.3 Pembangunan infrastruktur untuk peningkatan konektivitas pusat-pusat pertumbuhan ekonomi			251.791.897.436
	S.8 Meningkatnya Realisasi Investasi Kabupaten Tasikmalaya	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	455.000.000
		Program Promosi Penanaman Modal	750.000.000
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	695.000.000

Prioritas Pembangunan	Sasaran (RPJMD)	Program Perangkat Daerah	Pagu
		Program Pelayanan Penanaman Modal	420.000.000
		Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	8.700.000.000
		Program Penempatan Tenaga Kerja	12.117.836.636
		Program Perencanaan Tenaga Kerja	200.000.000
		Program Hubungan Industrial	650.000.000
		Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	765.000.000
		Program Pengembangan Kawasan Transmigran	100.000.000
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	23.700.000.000
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	17.020.000.000
		Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	4.485.000.000
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	21.955.000.000
		Program Penataan Bangunan Gedung	9.805.000.000
		Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	11.470.063.000
		Program Penyelenggaraan Jalan	125.041.083.000
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.000.000.000
		Program Pengembangan Perumahan	300.000.000
		Program Kawasan Permukiman	1.300.000.000
		Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	1.870.000.000
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas (PSU)	425.000.000
		Program Perencanaan Lingkungan Hidup	150.000.000

Prioritas Pembangunan	Sasaran (RPJMD)	Program Perangkat Daerah	Pagu
		Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.497.903.000
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	200.000.000
		Program Pengelolaan Persampahan	2.968.000.000
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	3.752.011.800
PP.4 Mitigasi dan penanggulangan bencana			5.644.000.000
	S.8 Meningkatnya Realisasi Investasi Kabupaten Tasikmalaya	Program Penanggulangan Bencana	3.004.000.000
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	400.000.000
		Program Penanganan Bencana	2.240.000.000
PP.5 Percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem			17.857.000.000
	S.3 Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial, Rehabilitasi Sosial dan Pemberdayaan sosial	Program Pemberdayaan Sosial	1.690.000.000
		Program Rehabilitasi Sosial	4.460.000.000
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	5.412.000.000
		Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	80.000.000
	S.5 Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	1.370.000.000
		Program Perlindungan Perempuan	370.000.000
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	1.625.000.000

Prioritas Pembangunan	Sasaran (RPJMD)	Program Perangkat Daerah	Pagu
		Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	2.450.000.000
		Program Perlindungan Khusus Anak	400.000.000
PP.6 Peningkatan infrastruktur dan daya saing produk pertanian dan perikanan untuk menunjang ketahanan pangan			35.957.888.143
	S.7 Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan daya saing sektor pertanian, perikanan, KUMKM, Perindustrian, perdagangan dan pariwisata berbasis pedesaan	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	3.934.814.628
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	12.400.000.000
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	225.000.000
		Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	82.475.000
		Program Penyuluhan Pertanian	10.496.032.777
		Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	500.000.000
		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1.766.350.382
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	288.768.750
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	2.650.000.000
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	2.814.446.606

Prioritas Pembangunan	Sasaran (RPJMD)	Program Perangkat Daerah	Pagu
		Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	800.000.000
PP.7 Peningkatan ekonomi masyarakat melalui pengembangan sektor unggulan pariwisata, ekonomi kreatif, perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro			49.312.217.000
	S.7 Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan daya saing sektor pertanian, perikanan, KUMKM, Perindustrian, perdagangan dan pariwisata berbasis pedesaan	Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	700.000.000
		Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	550.000.000
		Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	800.000.000
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	4.511.945.000
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	26.950.000.000
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	2.600.000.000
		Program Pengembangan Ekspor	850.000.000
		Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	100.000.000
		Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	400.000.000
		Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	1.475.000.000
		Program Pengendalian Izin Usaha Industri	110.000.000
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	332.750.000
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	3.832.522.000

Prioritas Pembangunan	Sasaran (RPJMD)	Program Perangkat Daerah	Pagu
		Program Pemasaran Pariwisata	4.150.000.000
		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	175.000.000
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	1.775.000.000
PP.8 Inovasi pelayanan publik			1.053.052.015.087
	S.6 Meningkatkan koordinasi, akuntabilitas, dan profesionalitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	32.000.000.000
		Program Pembinaan Perpustakaan	749.321.000
		Program Pengelolaan Arsip	242.000.000
		Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	54.918.221.126
		Program Perekonomian Dan Pembangunan	3.581.060.750
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	18.180.667.800
		Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	69.192.883.867
		Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	18.732.000.000
		Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	5.378.400.000
		Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	2.350.000.000
		Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	10.739.363.300

Prioritas Pembangunan	Sasaran (RPJMD)	Program Perangkat Daerah	Pagu
		Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	2.799.312.466
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	1.376.000.000
		Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	2.610.000.000
		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	2.209.250.324
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	3.754.998.000
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	1.699.500.000
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	500.000.000
		Program Pendaftaran Penduduk	3.371.183.500
		Program Pencatatan Sipil	425.073.800
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	60.940.000
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	20.641.345.359
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	773.153.342.530
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	2.767.400.000
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	13.600.950.000
		Program Kepegawaian Daerah	3.087.999.269

Prioritas Pembangunan	Sasaran (RPJMD)	Program Perangkat Daerah	Pagu
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.552.901.996
		Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	1.377.900.000
PP.9 Peningkatan kemandirian desa			16.008.224.488
	S.7 Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan daya saing sektor pertanian, perikanan, KUMKM, Perindustrian, perdagangan dan pariwisata berbasis pedesaan	Program Penataan Desa	300.000.000
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	10.708.224.488
		Program Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	5.000.000.000

Sumber: Bappelitbangda Kab. Tasikmalaya, 2024

5.2. Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Rencana Kerja yang memuat Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dituangkan dalam bab V ini merupakan formulasi dari rangkaian pembahasan substansi program dan kegiatan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya. Mengenai penyajian matriks rencana program dan kegiatan yang digunakan dalam bab V ini mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana tertuang dalam Matriks RKPD Kabupaten Tasikmalaya

Tahun 2025 Per Bidang Urusan Pemerintahan dan Perangkat Daerah
(terlampir).

Tabel 5.2
Rancangan Akhir Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025

Kode Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1.01.2.22.0.00.02.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	122	1,431,369,198,083
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	74	448.400.278.093
1.02.0.00.0.00.01.0001	Rumah Sakit Singaparna Medika Citrautama	3	189,257,525,484
1.02.0.00.0.00.01.0002	Puskesmas Cipatujah	17	5,806,348,000
1.02.0.00.0.00.01.0003	Puskesmas Karangnunggal	17	5,446,560,000
1.02.0.00.0.00.01.0004	Puskesmas Cikalong	17	4,644,566,530
1.02.0.00.0.00.01.0005	Puskesmas Cikatomas	16	4,341,197,000
1.02.0.00.0.00.01.0006	Puskesmas Pancatengah	17	3,507,717,023
1.02.0.00.0.00.01.0007	Puskesmas Cibalong	17	2,218,361,359
1.02.0.00.0.00.01.0008	Puskesmas Parungponteng	17	2,786,742,100
1.02.0.00.0.00.01.0009	Puskesmas Bantarkalong	17	2,991,954,346
1.02.0.00.0.00.01.0010	Puskesmas Bojongasih	13	1,581,772,582
1.02.0.00.0.00.01.0011	Puskesmas Culamega	17	2,234,468,302
1.02.0.00.0.00.01.0012	Puskesmas Bojonggambir	17	3,867,834,555
1.02.0.00.0.00.01.0013	Puskesmas Sodonghilir	17	5,290,773,134
1.02.0.00.0.00.01.0014	Puskesmas Taraju	17	3,451,073,257
1.02.0.00.0.00.01.0015	Puskesmas Salawu	17	5,498,487,634
1.02.0.00.0.00.01.0016	Puskesmas Puspahiang	17	3,441,439,206
1.02.0.00.0.00.01.0017	Puskesmas Tanjungjaya	22	3,656,189,998
1.02.0.00.0.00.01.0018	Puskesmas Sukaraja	17	4,183,060,041
1.02.0.00.0.00.01.0019	Puskesmas Salopa	17	4,762,179,034

Kode Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1.02.0.00.0.00.01.0020	Puskesmas Jatiwaras	17	4,108,928,109
1.02.0.00.0.00.01.0021	Puskesmas Cineam	17	3,144,721,867
1.02.0.00.0.00.01.0022	Puskesmas Manonjaya	17	5,438,663,796
1.02.0.00.0.00.01.0023	Puskesmas Gunungtanjung	17	2,548,021,088
1.02.0.00.0.00.01.0024	Puskesmas Singaparna	17	2,612,035,161
1.02.0.00.0.00.01.0025	Puskesmas Tinewati	18	2,901,325,761
1.02.0.00.0.00.01.0026	Puskesmas Sukarame	17	3,290,472,296
1.02.0.00.0.00.01.0027	Puskesmas Mangunreja	17	2,595,672,942
1.02.0.00.0.00.01.0028	Puskesmas Cigalontang	17	5,849,491,900
1.02.0.00.0.00.01.0029	Puskesmas Leuwisari	17	2,427,825,000
1.02.0.00.0.00.01.0030	Puskesmas Karangjaya	17	1,258,403,751
1.02.0.00.0.00.01.0031	Puskesmas Sariwangi	16	2,934,692,944
1.02.0.00.0.00.01.0032	Puskesmas Cisaruni	17	2,281,349,494
1.02.0.00.0.00.01.0033	Puskesmas Sukaratu	17	4,320,873,471
1.02.0.00.0.00.01.0034	Puskesmas Cisayong	17	3,849,109,458
1.02.0.00.0.00.01.0035	Puskesmas Sukahening	15	2,288,822,649
1.02.0.00.0.00.01.0036	Puskesmas Rajapolah	15	5,051,678,407
1.02.0.00.0.00.01.0037	Puskesmas Jamanis	16	2,953,457,400
1.02.0.00.0.00.01.0038	Puskesmas Ciawi	17	5,280,905,192
1.02.0.00.0.00.01.0039	Puskesmas Kadipaten	17	2,710,320,348
1.02.0.00.0.00.01.0040	Puskesmas Pagerageung	16	2,842,811,014
1.02.0.00.0.00.01.0041	Puskesmas Sukaresik	17	2,859,111,181
1.02.0.00.0.00.01.0042	Rumah Sakit Umum Daerah Cikatomas	5	29,259,033,848

Kode Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1.03.1.04.2.11.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup	86	250,735,656,900
1.05.0.00.0.00.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	36	21,853,359,980
1.05.0.00.0.00.02.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	26	12,391,535,059
1.06.2.14.2.08.01.0000	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	92	50,126,708,717
2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	28	21,946,394,167
2.13.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	33	22,293,895,326
2.15.2.16.2.21.01.0000	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	64	46,774,873,317
2.17.3.31.3.30.01.0000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	46	68,042,023,625
2.18.2.07.3.32.01.0000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	34	33,916,650,780
3.26.2.19.0.00.01.0000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	47	39,669,676,820
3.27.2.09.3.25.01.0000	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	67	75,109,220,930
4.01.2.23.2.24.01.0000	Sekretariat Daerah	75	166,405,535,693
4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	52	71,460,864,847
5.01.5.05.2.20.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	60	22,508,848,837
5.02.0.00.0.00.01.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	69	824,825,192,160

Kode Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	29	19,311,030,025
6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat Daerah	35	30,842,042,183
7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Cibalong	29	2,248,149,410
7.01.0.00.0.00.02.0000	Kecamatan Parungponteng	23	2,488,399,867
7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Jatiwaras	19	2,351,081,346
7.01.0.00.0.00.04.0000	Kecamatan Salopa	20	2,169,826,054
7.01.0.00.0.00.05.0000	Kecamatan Tanjungjaya	15	1,798,734,458
7.01.0.00.0.00.06.0000	Kecamatan Puspahiang	16	2,177,246,165
7.01.0.00.0.00.07.0000	Kecamatan Sukaraja	21	2,358,426,000
7.01.0.00.0.00.09.0000	Kecamatan Salawu	17	2,301,377,042
7.01.0.00.0.00.09.0000	Kecamatan Karangnunggal	30	2,749,012,585
7.01.0.00.0.00.10.0000	Kecamatan Bantarkalong	27	2,363,514,866
7.01.0.00.0.00.11.0000	Kecamatan Cipatujah	18	2,514,257,925
7.01.0.00.0.00.12.0000	Kecamatan Cikatomas	29	2,262,595,468
7.01.0.00.0.00.13.0000	Kecamatan Taraju	19	2,390,822,601
7.01.0.00.0.00.14.0000	Kecamatan Pancatengah	28	2,422,703,555
7.01.0.00.0.00.15.0000	Kecamatan Cikalong	28	2,523,763,727
7.01.0.00.0.00.16.0000	Kecamatan Sodonghilir	17	2,448,226,253
7.01.0.00.0.00.17.0000	Kecamatan Kadipaten	19	2,326,604,696
7.01.0.00.0.00.18.0000	Kecamatan Pagerageung	18	2,493,387,957
7.01.0.00.0.00.19.0000	Kecamatan Jamanis	17	2,094,376,378
7.01.0.00.0.00.20.0000	Kecamatan Rajapolah	16	2,126,298,000
7.01.0.00.0.00.21.0000	Kecamatan Ciawi	20	2,580,916,546
7.01.0.00.0.00.22.0000	Kecamatan Cineam	16	2,070,777,340

Kode Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
7.01.0.00.0.00.23.0000	Kecamatan Manonjaya	16	2,675,756,426
7.01.0.00.0.00.24.0000	Kecamatan Bojonggambir	28	2,310.619.000
7.01.0.00.0.00.25.0000	Kecamatan Cisayong	17	2,865,762,436
7.01.0.00.0.00.26.0000	Kecamatan Sariwangi	18	2,205,281,464
7.01.0.00.0.00.27.0000	Kecamatan Singaparna	22	2,486.341.612
7.01.0.00.0.00.28.0000	Kecamatan Sukarame	24	2,328,174,472
7.01.0.00.0.00.29.0000	Kecamatan Sukahening	24	2,346,848.243
7.01.0.00.0.00.30.0000	Kecamatan Sukaratu	20	2,662.079.025
7.01.0.00.0.00.31.0000	Kecamatan Cigalontang	16	2,549,282,424
7.01.0.00.0.00.32.0000	Kecamatan Leuwisari	23	2.022,877,546
7.01.0.00.0.00.33.0000	Kecamatan Padakembang	16	2,341,620,039
7.01.0.00.0.00.34.0000	Kecamatan Gunungtanjung	16	2,055,224,724
7.01.0.00.0.00.35.0000	Kecamatan Karangjaya	17	2,102,738,626
7.01.0.00.0.00.36.0000	Kecamatan Culamega	17	2,285,299,232
7.01.0.00.0.00.37.0000	Kecamatan Sukaresik	29	2,356,097,590
7.01.0.00.0.00.38.0000	Kecamatan Mangunreja	20	2,245,282,204
7.01.0.00.0.00.39.0000	Kecamatan Bojongasih	32	2,363,931,023
8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	43	119,425,945,467
TOTAL		2.617	4,230,645,403,254

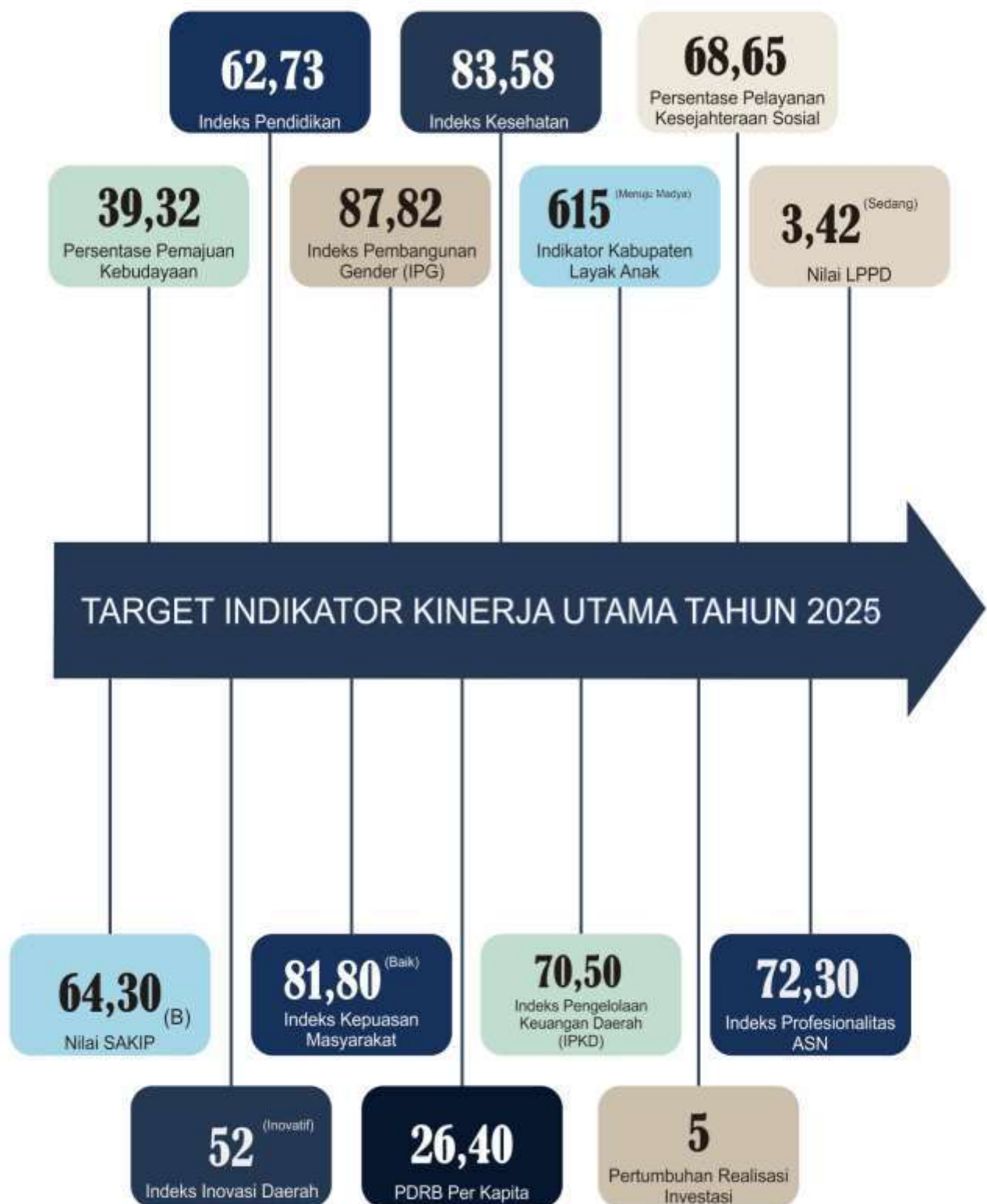
Sumber : Bappelitbangda Kab. Tasikmalaya, 2024

Keterangan : Data berdasarkan Usulan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025 dari seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Tasikmalaya yang bersumber dari berbagai sumber dana termasuk Bantuan Keuangan Provinsi dan Dana Alokasi Khusus (DAK)

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

BAB

6



BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Kinerja Penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 berdasar pada hasil capaian kinerja tahun 2023 dan memperhatikan lingkungan strategis yang terjadi saat ini. Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah meliputi indikator kinerja utama daerah yang menggambarkan kinerja kepala daerah, indikator kinerja utama perangkat daerah yang menggambarkan kinerja kepala perangkat daerah, dan indikator kinerja penyelenggara pemerintah daerah yang menggambarkan kinerja seluruh perangkat daerah.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan dari pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah serta pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK). Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan pada akhir pelaksanaan. Hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, yang menyatakan bahwa kinerja diukur dengan indikator yang tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Untuk menggambarkan kemajuan pembangunan daerah Kabupaten Tasikmalaya digunakan Indikator Makro Pembangunan yang terdiri dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Angka Kemiskinan, Angka Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Per Kapita, dan Ketimpangan Pendapatan (*Gini Ratio*). Target atau proyeksi indikator kinerja makro penyelenggaraan daerah Kabupaten Tasikmalaya tahun 2025 tercantum pada tabel 6.1.

Tabel 6.1
Proyeksi Indikator Makro Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023-2025

No	Indikator Makro	Satuan	Kondisi Awal 2022	Target Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2023	Target Capaian Tahun 2024	Target Capaian Tahun 2025
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	66,84	67,38	69,38	69,80	70,27
2	Persentase Penduduk Miskin	%	10,73	10,67	10,28	8,90 – 9,80	8,65 - 9,55
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,17	4,17	3,89	3,48 – 3,88	3,42 – 3,73
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,70	4,50	4,69	4,70 – 5,12	4,66 – 5,16
5	PDRB Per Kapita (ADHB)	Rp. Juta	13,82	14,20	24,17	25,99	26,40
6	Indeks Gini	Poin	0,378	0,370	0,404	0,387 – 0,400	0,386 – 0,399
7	Penurunan Emisi GRK Kumulatif	Ton CO ₂ Eq	N/A	N/A	N/A	N/A	621.707,06

Sumber: RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 dan BPS Kabupaten Tasikmalaya, 2024

Selain penetapan proyeksi indikator makro, ditetapkan pula indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertujuan untuk memberi panduan dan gambaran dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada akhir tahun perencanaan. Indikator kinerja daerah meliputi 3 (tiga) aspek kinerja yaitu: aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah. Untuk lebih jelasnya sebagai berikut:

- 1. **Aspek kesejahteraan masyarakat** diukur melalui indikator makro yang merupakan indikator gabungan (indikator komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi maupun sosial seperti: Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP), Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Inflasi, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), isipasi Angkatan Kerja, Indeks Gini, Persentase Penduduk Miskin terhadap Total Penduduk, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan lain-lain.

2. **Aspek pelayanan umum** merupakan segala bentuk pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan atau urusan yang telah diserahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, perhubungan dan urusan pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.
3. **Aspek daya saing daerah** merupakan indikator yang mengukur kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Indikator yang diukur antara lain: laju pertumbuhan investasi, pendapatan per kapita, laju pertumbuhan ekspor, laju pertumbuhan PMA, dan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara.

Penetapan indikator kinerja daerah dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah. Penetapan indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya dapat dilihat pada tabel 6.2 di bawah ini.

Tabel 6.2
Target Indikator Kinerja Utama Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023	Target Tahun 2024	Target Tahun 2025
1	Indeks Pendidikan	Poin	60,74	61,62	62,13	62,73
2	Indeks Kesehatan	Poin	76,85	82,88	83	83,58
3	Persentase Pelayanan Kesejahteraan Sosial	%	68,04	68,22	68,61	68,65
4	Persentase Pemajuan Kebudayaan	%	23,68	35,82	39,22	39,32
5	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	86,64	87,47	87,50	87,82
6	Indikator Kabupaten Layak Anak	Skor	499,60 (Menuju Madya)	575 (Menuju Madya)*	595 (Menuju Madya)	615 (Menuju Madya)
7	Nilai LPPD	Skor	3,55 (Sedang)	3,38 (Sedang)*	3,40 (Sedang)	3,42 (Tinggi)
8	Nilai SAKIP	Skor	63,41 (B)	64,20 (B)	64,25 (B)	64,30 (B)
9	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	81,00	81,72	81,75 (Baik)	81,80 (Baik)
10	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Poin	78,019	70,144	79	70,50
11	Indeks Profesionalitas ASN	Poin	55,85	71,32	71,80	72,30
12	Indeks Inovasi Daerah	Skor	50,42 (Inovatif)	43,12 (Inovatif)	51 (inovatif)	52 (Inovatif)
13	PDRB Per Kapita (ADHB)	Rp Juta	22,38	24,17	25,99	26,40
14	Pertumbuhan Realisasi Investasi	%	23,60	1,11	4	5

Sumber: RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 dan BPS Kabupaten Tasikmalaya, 2024

Keterangan: *Data belum rilis

Tabel 6.3

Target Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Tingkat Dampak/Impact Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022-2025

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi dan Target					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Target 2024	Target 2025	
A. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
A.01	Pertumbuhan PDRB	%	4,70	2-3	4,69	4,70 – 5,12	4,66 – 5,16	BPS Kabupaten Tasikmalaya
A.02	Laju inflasi	%	6,65	2-3	2,84	2-3	2-3	BPS Kabupaten Tasikmalaya
A.03	PDRB per kapita	Rp. Juta	13,83	14,50	24,17	25,99	26,40	BPS Kabupaten Tasikmalaya
A.04	Indeks Gini	Poin	0,378	0,370	0,404	0,387 – 0,400	0,386 – 0,399	BPS Kabupaten Tasikmalaya
A.05	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	%	89,27	89,12	89,72	90,20 – 91,20	90,45 – 91,35	BPS Kabupaten Tasikmalaya
A.06	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	%	10,73	10,88	10,28	8,90 – 9,80	8,65 – 9,55	BPS Kabupaten Tasikmalaya
A.07	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	66,84	66,45	69,38	69,80	70,27	BPS Kabupaten Tasikmalaya
A.08	Angka melek huruf	%	99,85*	99,95	99,95*	100	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
A.09	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	7,73	7,54	7,96	7,78	8,08	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
A.10	Angka usia harapan hidup	Tahun	73,64	69,94	73,87	70,14	74.39	Dinas Kesehatan
A.11	Persentase balita gizi buruk	%	0,52	0,7	0,7*	0,65	0,6	Dinas Kesehatan
A.12	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	67,83	75,96	68,37	78,06	80,49	BPS Kabupaten Tasikmalaya
A.13	Tingkat pengangguran terbuka	%	4,17	6-7%	3,89	4,17	3,59	BPS Kabupaten Tasikmalaya
A.14	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	81	80	81,72	81,75	81,80	Sekretatiat Daerah
			Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	
A.15	Persentase PAD terhadap pendapatan	%	9,69	10,8	10,8*	10,91	11,01	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi dan Target					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Target 2024	Target 2025	
A.16	Opini BPK atas Laporan Pengelola Keuangan Daerah		WTP	WTP	WTP*	WTP	WTP	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
A.17	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	81,80	80,50	80,50*	82,3	84,15	Dinas Pertanian Pangan Dan Perikanan
A.18	Penguatan cadangan pangan	Ton	100*	100	100*	100	100	Dinas Pertanian Pangan Dan Perikanan
A.19	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	%	38,01	38,01	37,77	38,28	38,63	Dinas Pertanian Pangan Dan Perikanan
A.20	Produksi sektor pertanian (Tanaman Pangan dan Hortikultura)	Ton	1.187.042*	1.286.438	1.286.438*	1.293.508	1.301.255	Dinas Pertanian Pangan Dan Perikanan
A.21	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	%	0,21	0,19	0,21	0,18	0,17	Badan Pusat Statistik
A.22	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	18,31	17,89	18,46	17,85	17,82	Badan Pusat Statistik
A.23	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	7,76	8,06	7,98	8,21	8,36	Badan Pusat Statistik
A.24	Pertumbuhan Industri	%	1,1	1	1,5	1,1	1,2	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
B. ASPEK DAYA SAING DAERAH								
B.01	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	Rp. Ribu	8.177	8.085	8.562	8.130	8.179	BPS Kabupaten Tasikmalaya
B.02	Rasio Pinjaman terhadap Simpanan di BPR	%	81,54*	81,99	81,99*	84,13	86,52	Sekretariat Daerah
C. ASPEK PELAYANAN UMUM								
Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar								
1	Pendidikan							
C.1.01.01	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,59	12,56	12,63	12,57	12,66	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
C.1.01.02	APK PAUD	%	44,10	79,60	79,60	79,6	79,6	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi dan Target					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Target 2024	Target 2025	
C.1.01.03	APK SD	%	102	100.18	100,25	100.11	100.04	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
C.1.01.04	APM SD	%	97,20	97.51	95,75	99.27	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
C.1.01.05	APK SMP	%	92,70	104.04	100,25	102.69	101.34	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
C.1.01.06	APM SMP	%	80,40	92.43	91,62	93.24	94.05	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
C.1.01.07	Angka Melanjutkan (AM) SD ke SMP	%	100*	100	100*	100	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
C.1.01.08	Persentase PKBM yang menyelenggarakan Pendidikan Kesetaraan	%	58,33*	67,08	67,08*	72,08	77,08	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
C.1.01.09	Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (Literasi) memenuhi kompetisi minimum	%	57,7*	58,7	58,7*	59,2	59,7	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
C.1.01.10	Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetisi minimum	%	26,75*	27,25	27,25*	27,5	27,75	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
C.1.01.11	Rasio Guru terhadap Siswa SD	Perbandinga n	1:18,57*	01:25	01:25*	01:26	01:27	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
C.1.01.12	Rasio Guru terhadap Siswa SMP	Perbandinga n	1:26,75*	01:20	01:20*	01:22	01:23	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
C.1.01.13	Persentase angka putus sekolah jenjang SD	%	0.00005*	0.00004	0.00004*	0.00003	0.00002	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
C.1.01.14	Persentase angka putus sekolah jenjang SMP	%	0.00015*	0.00013	0.00013*	0.00011	0.00009	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
C.1.01.15	Persentase siswa SD berasal dari PAUD	%	68*	70	70*	72	74	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
C.1.01.16	Nilai rata-rata tingkat pencapaian perkembangan anak (5-6 tahun)	Nilai	3.1*	3.25	3.25*	3.5	3.7	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
C.1.01.17	Persentase Lulusan Pendidikan Kesetaraan	Persen	100*	100	100*	100	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
C.1.01.18	Persentase Lulusan Pendidikan Kursus dan Keterampilan	Persen	100*	100	100*	100	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi dan Target					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Target 2024	Target 2025	
C.1.01.19	Persentase Pendidik berkualifikasi minimal S1 bersertifikat pendidik	Persen	55,18*	57,18	57,18*	59,18	61,18	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
C.1.01.20	Persentase Kepala Sekolah bersertifikat kepala sekolah	Persen	95*	98	98*	100	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
C.1.01.21	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, yang mencapai standard kemampuan minimum dalam: (i) membaca	%	99,44*	99,35	99,35*	99,88	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
C.1.01.22	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, yang mencapai standard kemampuan minimum dalam: (ii) Matematika	%	82,12*	82,47	82,47*	82,24	82,3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
C.1.01.23	Proporsi anak-anak dan remaja: (b) tingkat akhir SD/kelas 6 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca	%	100*	100	100*	100	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
C.1.01.24	Proporsi anak-anak dan remaja: (b) tingkat akhir SD/kelas 6 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (ii) Matematika	%	100*	98,37	98,37*	100	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
C.1.01.25	Proporsi anak-anak dan remaja: (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca (Bahasa Indonesia)	%	97,31*	100	100	100	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
C.1.01.26	Proporsi anak-anak dan remaja: (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (ii) Matematika	%	94,2*	98,42	98,42*	99,53	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi dan Target					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Target 2024	Target 2025	
C.1.01.27	Kemampuan Literasi Jenjang SD	%	-	56,98	62,5	62,81	63,11	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
C.1.01.28	Kemampuan Literasi Jenjang SMP	%	-	64,67	67,22	67,75	71,28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
C.1.01.29	Kemampuan Numerasi Jenjang SD	%	-	43,61	53,65	55,02	56,39	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
C.1.01.30	Kemampuan Numerasi Jenjang SMP	%	-	64,05	61,4	66,52	67,14	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
C.1.01.31	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5-6 Jenjang PAUD	%	-	100	83,59	100	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
C.1.01.32	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-15 Jenjang SD/SMP	%	-	100	98,64	100	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
C.1.01.33	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-18 Kesetaraan	%	-	100	14,78	100	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
C.1.01.34	Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B	%	-	56,39	53,25	56,39	56,42	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
C.1.01.35	Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4	%	-	77,24	80,32	81,32	82,22	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
C.1.01.36	Iklim Inklusivitas Jenjang SD	%	-	59,63	59,89	62,73	64,03	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
C.1.01.37	Iklim Inklusivitas Jenjang SMP	%	-	57,42	56,33	60,52	62,26	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
C.1.01.38	Iklim Keamanan Jenjang SD	%	-	74,92	77,66	78,46	80,83	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi dan Target					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Target 2024	Target 2025	
C.1.01.39	Iklim Keamanan Jenjang SMP	%	-	70,9	70,11	72,7	74,37	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
C.1.01.40	Iklim Kebinekaan Jenjang SD	%	-	71,75	74,93	77,84	80,74	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
C.1.01.41	Iklim Kebinakaan Jenjang SMP	%	-	66,9	71,85	73,55	75,24	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Kesehatan							
C.1.02.01	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Orang	7	4	4*	3	3	Dinas Kesehatan
C.1.02.02	Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI) per 100.000 kelahiran Hidup	Orang	158	90	90*	85	80	Dinas Kesehatan
C.1.02.03	Prosentase Keluarga Sehat	%	72,2	73	73*	76	78	Dinas Kesehatan
C.1.02.04	Angka Kelangsungan Hidup Bayi	Orang	6	3	3*	2	2	Dinas Kesehatan
C.1.02.05	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran Hidup	Orang	1	1	1*	1	1	Dinas Kesehatan
C.1.02.06	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran Hidup	Orang	6	3	3*	3	2	Dinas Kesehatan
C.1.02.07	Prosentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar	%	98,99	100	99,04	100	100	Dinas Kesehatan
C.1.02.08	Prosentase Ibu Bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	%	98,25	100	94,40	100	100	Dinas Kesehatan
C.1.02.09	Prosentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	98,24	100	98,30	100	100	Dinas Kesehatan
C.1.02.10	Prosentase Balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	88,98	100	98,29	100	100	Dinas Kesehatan

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi dan Target					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Target 2024	Target 2025	
C.1.02.11	Presentase anak pada pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	90,16	100	90,17	100	100	Dinas Kesehatan
C.1.02.12	Presentase warga negara usia 15 s.d 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	83,19	100	63,23	100	100	Dinas Kesehatan
C.1.02.13	Presentase orang usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	85,10	100	87,40	100	100	Dinas Kesehatan
C.1.02.14	Prevalensi stunting	%	27,2	15,75	20,70	14	12,25	Dinas Kesehatan
C.1.02.15	Presentase Balita Gizi Buruk (BB/TB)	%	0,52	0,7	0,7*	0,65	0,6	Dinas Kesehatan
C.1.02.16	Presentase Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan	%	100	100	100*	100	100	Dinas Kesehatan
C.1.02.17	Prosentase Ibu hamil Kurang Gizi mendapatkan makanan tambahan padat gizi	%	91,4*	88,8	88,8*	89,8	90	Dinas Kesehatan
C.1.02.18	Prosentase Balita Kurang Gizi mendapatkan makanan tambahan padat gizi	%	56,9*	85,5	85,5*	88,5	89,5	Dinas Kesehatan
C.1.02.19	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif	%	51,3*	59,9	59,9*	60,6	61,3	Dinas Kesehatan
C.1.02.20	Jumlah Kader posyandu, KPM, PKK Mampu konseling PMBA	Orang		252	252*	252	252	Dinas Kesehatan
C.1.02.21	Prosentase Ibu Hamil mengkonsumsi Tablet Tambah darah dan suplemen gizi	%	93,6*	80	80*	85	90	Dinas Kesehatan
C.1.02.22	Prosentase Remaja Putri mengkonsumsi Tablet Tambah darah dan suplemen gizi	%	77,3*	64,3	64,3*	64,6	65	Dinas Kesehatan
C.1.02.23	Prosentase Masyarakat konsumsi garam berodium	%	93,6*	100	100*	100	100	Dinas Kesehatan

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi dan Target					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Target 2024	Target 2025	
C.1.02.24	Prosentase Bayi mendapatkan Asi Eksklusif	%	71,58	77,3	77,3*	78,6	80	Dinas Kesehatan
C.1.02.25	Prosentase Konvergensi penanganan stunting	%	100*	100	100*	100	100	Dinas Kesehatan
C.1.02.26	Presentase orang penderita TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	%	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
C.1.02.27	Presentase orang beresiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	%	58,28	100	70	100	100	Dinas Kesehatan
C.1.02.28	Prosentase Penyakit Menular dan Tidak Menular	%	100*	100	100*	100	100	Dinas Kesehatan
C.1.02.29	Presentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan secondary prevention sesuai standar	%	81,37	100	81,79	100	100	Dinas Kesehatan
C.1.02.30	Presentase penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	77,22	100	83,40	100	100	Dinas Kesehatan
C.1.02.31	Presentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan	%	86,20	100	87,23	100	100	Dinas Kesehatan
C.1.02.32	Prosentase Desa Siaga Aktif	%	64,1	70	70*	80	90	Dinas Kesehatan
C.1.02.33	Prosentase kecamatan mempunyai cakupan PHBS Rumah tangga mencapai 50%	%	46,37	57,2	57,2*	57,2	57,2	Dinas Kesehatan
C.1.02.34	Prosentase Desa STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) yang telah mencapai akses 100 %	%	0	100	100*	100	100	Dinas Kesehatan
C.1.02.35	Rasio Puskesmas per satuan penduduk (1 : 30.000)		1/47.047	1/45.077	1/45.077*	1/45.078	1/45.079	Dinas Kesehatan
C.1.02.36	Rasio Puskesmas Pembantu per satuan penduduk (1 : 10.000)	Perbandingan	1/11.911	1/11.780	1/11.780*	1/11.781	1/11.782	Dinas Kesehatan

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi dan Target					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Target 2024	Target 2025	
C.1.02.37	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk (1 : 100.000)	Perbandingan	1/9.409	3.11	3,11*	4.11	5.11	Dinas Kesehatan
C.1.02.38	Rasio Klinik per satuan penduduk	Perbandingan	1/34.850	1/28.604	1/28.604*	1/28.605	1/28.606	Dinas Kesehatan
C.1.02.39	Pembangunan Rumah Sakit Type D/RS Pratama Cikatomas	Gedung	0	1	1	1	1	Dinas Kesehatan
C.1.02.40	Rintisan Pembangunan Rumah Sakit Tipe D / RS Pratama Ciawi, Manonjaya, Karangnunggal	Gedung	3	3	3	3	3	Dinas Kesehatan
C.1.02.41	Cakupan pembiayaan peserta JKN yang dibiayai pemerintah kabupaten Tasikmalaya	%	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
C.1.02.42	Cakupan pembiayaan kesehatan rujukan jamkesmas yang dibiayai pemerintah kabupaten Tasikmalaya	%		60		75	85	Dinas Kesehatan
C.1.02.43	Cakupan pembiayaan jampersal	%		100		100	100	Dinas Kesehatan
C.1.02.44	Rasio Tenaga Medis Persatuan Penduduk	%	0,125	0.09	0.09*	0.09	0.09	Dinas Kesehatan
C.1.02.45	Prosentase Pemenuhan Obat dan Vaksin di Pelayanan Dasar	%	91,70	100	100*	100	100	Dinas Kesehatan
C.1.02.46	Hasil Penilaian SAKIP		B	A	B	A	A	Dinas Kesehatan
C.1.02.47	Opini Audit Akuntan Publik Independent	Opini	WTP	WTP	WTP*	WTP	WTP	Dinas Kesehatan
C.1.02.48	Pemenuhan ketersediaan tenaga kesehatan profesional sesuai standar	%	95*	95	95*	96	97	Dinas Kesehatan
C.1.02.49	Cakupan Mutu Pelayanan	%	90*	94	94*	96	96	Dinas Kesehatan
C.1.02.50	Cakupan Mutu Pelayanan Keperawatan	%	84*	86	86*	88	90	Dinas Kesehatan
C.1.02.51	Cakupan Mutu Penunjang Klinik	%	91*	92	92*	93	94	Dinas Kesehatan
C.1.02.52	Cakupan Mutu Penunjang Non Klinik	%	91*	92	92*	93	94	Dinas Kesehatan

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi dan Target					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Target 2024	Target 2025	
C.1.02.53	Cakupan Alat dan Sarana Prasarana Rumah Sakit	%	82,62	85	85*	88	90	Dinas Kesehatan
C.1.02.54	Cakupan Pendayagunaan Fasilitas Pendukung Pelayanan Rumah Sakit	%	81	83	83*	85	87	Dinas Kesehatan
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
C.1.03.01	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	69,51	69,99	69,99	70,45	70,92	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup
C.1.03.02	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	%	0,542	0,525	0,566	0,54	0,555	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup
C.1.03.03	Persentase Ketersediaan Bangunan Pemerintahan dan Fasilitas Pendukungnya yang Layak Difungsikan	%	51,40	56,27	59,08	61,5	66,73	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup
C.1.03.04	Ketaatan terhadap RTRW	%	22,44	33,38	26,61	37,27	41,16	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup
C.1.03.05	Persentase penduduk berakses air minum	%	65,97	66,42	66,44	66,92	67,42	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup
C.1.03.06	Persentase rumah tinggal berakses sanitasi	%	49,16	49,81	50,43	50,27	50,73	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman							
C.1.04.01	Rasio Rumah Layak Huni	%	0,2535	0,2537	0,2541	0,2542	0,2547	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi dan Target					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Target 2024	Target 2025	
C.1.04.02	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU pada kurun waktu tertentu	%	52,16	52,39	52,18	52,57	52,75	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup
5	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat							
C.1.05.01	Persentase Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%	95,56	100	99,36	100	100	Satuan Polisi Pamong Praja
C.1.05.02	Indeks Risiko Bencana	%	174,11	174,13	159,14	165,43	174,11	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
C.1.05.03	Indeks Kapasitas Daerah (IKD) Kebencanaan	%	0,50	0,64	0,58	0,73	0,84	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6	Sosial							
C.1.06.01	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang diberdayakan	%	100*	100	100*	100	100	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
C.1.06.02	Persentase PPKS yang menerima bantuan sosial	%	0,56*	0,57	0,57*	0,57	0,57	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
C.1.06.03	Persentase PPKS yang tertangani	%	4,13	100	4,21	100	100	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
C.1.06.04	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	%	100	100	100	100	100	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi dan Target					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Target 2024	Target 2025	
C.1.06.05	Persentase masyarakat miskin dan rentan miskin yang memperoleh bantuan sosial	%	57,96	67,41	76,66	67,65	68,3	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
C.1.06.06	Persentase PPKS yang termasuk dalam jenis layanan SPM yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	100*	100	100*	100	100	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
C.1.06.07	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	100	100	100	100	100	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
C.1.06.08	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
C.1.06.09	Persentase PSKS aktif	%	87,25*	91,5	91,5*	92,25	95,00	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
C.1.06.10	Cakupan pengelolaan kawasan makam pahlawan HZ. Mustofa dalam 1 tahun	Tahun	1	1	1	1	1	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
C.1.06.11	Nilai SAKIP Dinas	Poin	68,57*	73,01	73,01*	73,16	73,31	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi dan Target					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Target 2024	Target 2025	
C.1.06.12	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas	%	3,83*	3.83	3.83*	3.83	3.83	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
C.1.06.13	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan	Ruta/KPM	122,973*	125,433	125,433*	127,941	130,5	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
C.1.06.14	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial	%	100	100	100	100	100	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
C.1.06.15	Pendampingan psikososial korban bencana sosial	%	100	100	100	100	100	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
C.1.06.16	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang disabilitas	%	5,94*	5,83	5,83*	5,71	5,6	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2. Urusan Pemerintah Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar								
1	Tenaga Kerja							
C.2.01.01	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan	%	29,99	27,38	31,74	27,52	27,67	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
C.2.01.02	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	%	12,82	4,58	13,67	5,42	6,25	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
C.2.01.03	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	67,83	75,96	68,37	78,06	80,49	Badan Pusat Statistik
C.2.01.04	Tingkat pengangguran terbuka	%	4,17	6-7	3,89	4,17	3,59	Badan Pusat Statistik

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi dan Target					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Target 2024	Target 2025	
C.2.01.05	Rasio penduduk yang bekerja	%	59,75*	59,96	59,96*	60,27	60,87	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
C.2.01.06	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	100	100	100	100	100	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
C.2.01.07	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	%	76*	77	77*	78	79	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
C.2.02.01	Persentase pelaksanaan PUG termasuk PPRG pada Instansi Pemerintah	%	-	11,96	-	12,23	12,45	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
C.2.02.02	Persentase lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang terfasilitasi	%	100	100	100	100	100	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
C.2.02.03	Persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	100	100	100	100	100	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
C.2.02.04	Persentase perempuan yang memperoleh akses dan layanan peningkatan kualitas keluarga	%	-	0,13	-	0,13	0,13	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
C.2.02.05	Persentase lembaga layanan peningkatan kualitas keluarga yang terfasilitasi	%	-	80	-	80	80	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi dan Target					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Target 2024	Target 2025	
C.2.02.06	Persentase ketersediaan data gender dan anak tingkat kabupaten	%	-	0	-	0	100	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
C.2.02.07	Persentase pelembagaan Pemenuhan Hak Anak (PHA) pada lembaga pemerintah dan non pemerintah	%	56,92	66,15	66,15*	66,15	68,72	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
C.2.02.08	Persentase lembaga layanan Pemenuhan Hak Anak yang terfasilitasi	%	65	75	65	75	80	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
C.2.02.09	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Poin	65,40	64,28	64,28*	64,32	64,37	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
C.2.02.10	Skor capaian KLA	Skor	499,60	575	575*	595	615	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3	Pangan							
C.2.03.01	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	81,80	80,5	80,5*	82,3	84,15	Dinas Pertanian Pangan Dan Perikanan
C.2.03.02	Penguatan cadangan pangan	Ton	100*	100	100*	100	100	Dinas Pertanian Pangan Dan Perikanan
C.2.03.03	Meningkatnya konsumsi pangan masyarakat	%	22,78	3,10	3,10*			Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan
4	Pertanahan							
C.2.04.01	Jumlah masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk	Paket	4	1	4	1	1	Sekretariat Daerah

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi dan Target					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Target 2024	Target 2025	
	pembangunan yang terselesaikan							
5	Lingkungan Hidup							
C.2.05.01	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	68,43	64,88	63,73	64,98	67,6	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup
C.2.05.02	Persentase sampah yang dikelola	%	9,05	9,82	9,84	12,57	14,72	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup
6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil							
C.2.06.01	Persentase Rata – Rata Kepemilikan Dokumen Kependudukan	%	87,46	89,8	89,59	93,45	95,85	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
C.2.06.02	Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP-el)	%	99,23*	98,2	98,2*	98,3	98,4	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
C.2.06.03	Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	%	47,59*	75	75*	85	90	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
C.2.06.04	Kepemilikan Akta Kelahiran	%	95,85*	98	98*	98,5	99	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
C.2.06.05	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan Perjanjian Kerjasama	%	30*	55	55*	70	85	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
C.2.07.01	Persentase penyelenggaraan penataan desa mandiri dan maju	%	46,43	29,06	64,95	32,76	34,47	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
C.2.07.02	Persentase peningkatan kerjasama desa	%	0	0,57	0	0,57	0,57	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi dan Target					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Target 2024	Target 2025	
C.2.07.03	Persentase Posyandu Aktif	%	100	98,23	100	98,35	98,42	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							
C.2.08.01	Angka Kelahiran Total (TFR)	%	2,39*	2,38	2,38*	2,37	2,36	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
C.2.08.02	Prosentase Pemakaian Kontrasepsi (CPR)	%	76,01	68,5	68,5*	69	69,5	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
C.2.08.03	Prosentase Kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmeetneed)	%	12,4	12,3	12,3*	12,2	12,1	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
C.2.08.04	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)	Tahun	21	21	21	21	21	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
C.2.08.05	Prosentase pemanfaatan <i>Grand Design</i> Pembangunan Kependudukan (GDPK)	%	100*	100	100*	100	100	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
C.2.08.06	Jumlah Lembaga dan Pendidikan Institusi yang di bina	Lembaga	39*	39	39*	39	39	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
C.2.08.07	Prosentase Ketersediaan Data	%	100	100	100	100	100	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi dan Target					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Target 2024	Target 2025	
								Perempuan dan Perlindungan Anak
C.2.08.08	Jumlah Gedung Balai Penyuluhan KB	Gedung	2*	2	@*	2	2	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
C.2.08.09	Prosentase Pemenuhan BKB Kit/Stunting	%	34	55	55*	66	77	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
9	Perhubungan							
C.2.09.01	Persentase tingkat keselamatan jalan	%	72,45	80,81	80,81	81,2	81,58	Dinas Komunikasi, Informatika dan Perhubungan
C.2.09.02	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan.	%	27,62	30	30,25	33	35	Dinas Komunikasi, Informatika dan Perhubungan
10	Komunikasi dan Informatika							
C.2.10.01	Indeks Domain Tata Kelola SPBE	Poin	1,6	2,3	1,8	2,5	2,7	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
C.2.10.02	Tingkat keamanan informasi pemerintah (Indeks KAMI)	Level	II	II	II	III	III	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
C.2.10.03	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	%	44,35	60	65	70	75	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
11	Koperasi Usaha Kecil, dan Menengah							
C.2.11.01	Volume usaha koperasi	Rp	356.112.848.643	500.534.466.620	362.350.540.276	505.539.811.287	510.595.209.399	Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan
C.2.11.02	Persentase Usaha Mikro	%	99,75	99,77	144,42	99,79	99,8	Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi dan Target					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Target 2024	Target 2025	
C.2.11.03	Jumlah Koperasi yang berkualitas	Koperasi	2*	4	4*	6	8	Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan
C.2.11.04	Jumlah Usaha Mikro	Usaha Mikro	95.970	107,035	154.592	115,598	124,846	Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan
C.2.11.05	Persentase Koperasi Sehat	%	46,15*	49,75	49,75*	51,47	53,14	Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan
C.2.11.06	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	Usaha Mikro	7	11	11*	13	15	Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan
12	Penanaman Modal							
C.2.12.01	Nilai realisasi penanaman modal	Rp (juta)	211.553	155.812	446.296	162.045	170.148	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
C.2.12.02	IKM Pelayanan Perizinan	skor	88,52	86	86,91	86,2	86,3	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
C.2.12.03	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Investor	125*	130	130*	135	142	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
C.2.12.04	Persentase Kenaikan nilai realisasi penanaman modal (%)	%	3	4	4*	4	5	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
C.2.12.05	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/Kota	%	3	4	4*	4	5	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
13	Kepemudaan dan Olah Raga							

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi dan Target					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Target 2024	Target 2025	
C.2.13.01	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	42,51	41	42,39	41,5	42	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
C.2.13.02	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi kemasyarakatan	%	55,63	53	55,63	53,5	54	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
C.2.13.03	Tingkat Prestasi Olahraga	Medali	156	10	130	15 Medali	20 Medali	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
C.2.13.04	Tingkat Partisipasi Masyarakat Berolahraga	%	43,49	36,00	43,49	38,00	40,00	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
C.2.13.05	Persentase wirausaha muda	%	38,91*	20,99	20,99*	21,04	21,09	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
C.2.13.06	Persentase Organisasi Pemuda yang aktif	%	27,03*	24	24*	24,5	25	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
C.2.13.07	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan	%	19,91*	21,15	21,15*	21,2	21,25	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
C.2.13.08	Cakupan Pembinaan Olahraga	%	49,35*	31,57	31,57*	42,1	47,36	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
C.2.13.09	Cakupan Pembinaan Atlet Muda	%	23,60*	32,00	32,00*	36,00	40,00	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
C.2.13.10	Cakupan Pelatih yang Bersertifikat	%	18,07*	23,33	23,33*	28,33	33,33	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
14	Statistik							
C.2.14.01	Persentase ketersediaan data statistik sektoral untuk tiap bidang urusan pemerintahan	%	83,33	88	90	100	100	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
15	Persandian							
C.2.15.01	Cakupan tingkat keamanan informasi	%	30	70	70*	80	90	Dinas Komunikasi, Informatika dan Perhubungan
16	Kebudayaan							
C.2.16.01	Jumlah warisan budaya tak benda yang ditetapkan	Buah	1	2	1	2	3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
C.2.16.02	Jumlah warisan budaya benda yang ditetapkan	Buah	0	2	0	2	3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi dan Target					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Target 2024	Target 2025	
C.2.16.03	Jumlah even kesenian tradisional yang dilenggarakan	Kegiatan	5	5	5	5	5	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
C.2.16.04	Jumlah ritual adat istiadat yang dikelola	Kegiatan	3	3	3	3	3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
C.2.16.05	Jumlah situs/cagar budaya	Cagar Budaya	42	43	42	43	43	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
C.2.16.06	Persentase pelestarian warisan budaya	Persen	23,86	22,68	35,82	24,18	25,68	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
17	Perpustakaan							
C.2.17.01	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Skor	63,83*	64,7	64,7	64,85	64,95	Sekretariat Daerah
C.2.17.02	Indeks pembangunan literasi masyarakat	Poin	18,16*	24	24*	24,25	24,5	Sekretariat Daerah
C.2.17.03	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	Skor	0,392*	0,431	0,431*	0,453	0,475	Sekretariat Daerah
C.2.17.04	Presentase kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	%	2*	0,262	0,262*	0,271	0,284	Sekretariat Daerah
C.2.17.05	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	Skor	0,00058*	0,00089	0,00089*	0,00092	0,00095	Sekretariat Daerah
C.2.17.06	Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	TMB	0*	21 TBM	21 TBM*	21 TBM	21 TBM	Sekretariat Daerah
C.2.17.07	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialihmedia (digitalisasi) / terdaftar yang ada di wilayahnya	Paket	4*	1	1*	1	1	Sekretariat Daerah
C.2.17.08	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	Koleksi	50*	1	1*	1	1	Sekretariat Daerah
18	Kearsipan							
C.2.18.01		Persen	10,17	13,55	13,15	16,94	20,33	Sekretariat Daerah

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi dan Target					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Target 2024	Target 2025	
	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan pengelolaan arsip secara baku		(6/59)	(8/59)	(8/59)	(10/59)	(12/59)	
C.2.18.02	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	%	56,28*	31,78	31,78*	35,97	38,91	Sekretariat Daerah
C.2.18.03	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	53,33*	40	40*	55	60	Sekretariat Daerah
C.2.18.04	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan pengelolaan arsip secara baku	%	52,36*	8/59 (13,55%)	8/59 (13,55%)*	10/59 (16,94%)	12/59 (20,33%)	Sekretariat Daerah
3. Urusan Pemerintahan Pilihan								
1	Kelautan dan Perikanan							
C.3.01.01	Produksi perikanan	Ton	81.534	80.131,06	80.131,06*	83.336,31	87.503,12	Dinas Pertanian Pangan Dan Perikanan
C.3.01.02	Konsumsi ikan	ton	31,5*	32,5	32,5*	33	35,5	Dinas Pertanian Pangan Dan Perikanan
C.3.01.03	Cakupan bina kelompok nelayan	kel	91*	100	100*	105	110	Dinas Pertanian Pangan Dan Perikanan
C.3.01.04	Produksi perikanan kelompok nelayan	ton	1578,99*	1778,8	1778,8*	1813,56	1849,21	Dinas Pertanian Pangan Dan Perikanan
C.3.01.05	Nilai tukar nelayan	indeks	112*	112	112*	112	112	Dinas Pertanian Pangan Dan Perikanan

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi dan Target					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Target 2024	Target 2025	
C.3.01.06	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data : one data KKP)	ton	81.534	81.929,99	81.929,99	85.207,19	89.467,55	Dinas Pertanian Pangan Dan Perikanan
2	Pariwisata							
C.3.02.01	Jumlah PAD Sektor Pariwisata	Rupiah	6.305.650.000	6.494.819.000	6.494.819.000*	6.689.664.000	7.091.043.000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
C.3.02.02	Persentase peningkatan keanekaragaman produk ekonomi kreatif	%	1,26	2,5	2,5*	3,65	4,7	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
C.3.02.03	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	1.492.793*	1,537,577	783.115	1,583,705	1,631,216	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
C.3.02.04	Jumlah Daya Tarik, Destinasi Wisata dan Kawasan Pariwisata Yang Telah Dikembangkan	Unit	8*	8	8*	8	8	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
C.3.02.05	Jumlah Pendapatan Retribusi Sektor Pariwisata	Rupiah	2.149.350*	2.256.817.500	2.256.817.500*	2.369.658.375	2.488.141.294	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
C.3.02.06	Tingkat hunian akomodasi	%	5,32*	9	9*	11	13	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
C.3.02.07	Persentase peningkatan usaha pariwisata yang terdaftar	%	5*	5	5*	6	6	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
C.3.02.08	Persentase Produk/ Karya Ekraf terdaftar HAKI	%	0*	5,36	5,36*	7,14	8,93	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
C.3.02.09	Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang disertifikasi	%	0,21*	1,87	1,87*	2,5	3,12	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
C.3.02.10	Persentase Pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara	%	10	15	15*	15	20	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
C.3.02.11	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	%	5	3	3	3	5	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
3	Pertanian							

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi dan Target					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Target 2024	Target 2025	
C.3.03.01	Persentase izin usaha pertanian	rekomendasi	1*	3	3*	4	5	Dinas Pertanian Pangan Dan Perikanan
C.3.03.02	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	ton	1.231.265*	1.332.090	1.332.090*	1.346.923	1.362.377	Dinas Pertanian Pangan Dan Perikanan
C.3.03.03	Meningkatnya penyuluhan pertanian	%	40,83	54,88	80,32	55,82	56,82	Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan
C.3.03.04	Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan	Ton	935.233*	977.500	977.500*	980.921	984.845	Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan
C.3.03.05	Meningkatnya Produksi Hortikultura	Ton	251.809*	194.032	194.032*	196.050	198.089	Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan
C.3.03.06	Meningkatnya Produksi perkebunan	Ton	44.233*	45.592	45.592*	46.322	47,123	Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan
C.3.03.07	Meningkatnya Produksi peternakan	Ton	90.533*	69.314	69.314*	70.215	71.198	Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan
4	Energi dan Sumber Daya Mineral							
C.3.04.01	Persentase perizinan yang terfasilitasi	%	100	100	100	100	100	Sekretariat Daerah
5	Perdagangan							
C.3.05.01	Pertumbuhan Pelaku Usaha Perdagangan	%	6,02	1	12,8	1	1	Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan
C.3.05.02	PDRB Sektor Perdagangan	Rp juta	7.810.320	7.871.230	8.507.691	8.261.643	8.671.420	BPS
C.3.05.03	Ekspor Bersih Perdagangan	\$	4.540.781,79*	2.821.357,70	2.821.357,70*	2.877.784,85	2.935.340,55	Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan
C.3.05.04	Persentase Kenaikan Ekspor bersih Produk Kabupaten Tasikmalaya	%	2*	2	2*	2	2	Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan
C.3.05.05	Cakupan pelayanan Tera dan tera ulang alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkap lainnya (UTTP)	Unit	10.178*	9.587	9.587*	10.067	10,57	Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan
6	Perindustrian							

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi dan Target					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Target 2024	Target 2025	
C.3.06.01	Pertumbuhan Industri	%	1,1	1	1,5	1,1	1,2	Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan
C.3.06.02	PDRB Sektor Industri	%	3.310.543	3.311.381	3.676.746	3.476.950	3.650.797	Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan
C.3.06.03	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	%	2,58*	3,29	3,29*	3,76	4,23	Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan
C.3.06.04	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Ijin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang Dikeluarkan oleh Instansi Terkait	%	100	100	100	100	100	Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan
7	Transmigrasi							
C.3.07.01	Jumlah transmigran yang telah memiliki sertifikat pelatihan	KK	0	5	5*	5		Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
C.3.07.02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Translok	Paket	0	2	2*		-	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
4. Unsur Penunjang								
1	Sekretariat Daerah							
C.4.01.01	Persentase bahan kebijakan umum lingkup perekonomian dan pembangunan yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	Sekretariat Daerah
C.4.01.02	Level kematangan/ maturitas pengadaan barang dan jasa	Level	6	6	8	7	8	Sekretariat Daerah
C.4.01.03	Persentase bahan kebijakan umum lingkup pemerintahan	%	100	100	100	100	100	Sekretariat Daerah

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi dan Target					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Target 2024	Target 2025	
C.4.01.04	Persentase penyelenggaraan kegiatan keagamaan, sosial dan kemasyarakatan yang dilaksanakan pemerintah daerah	%	100	100	100	100	100	Sekretariat Daerah
C.4.01.05	Persentase regulasi peraturan pusat yang ditindaklanjuti menjadi peraturan perundang-undangan daerah	%	100	100	100	100	100	Sekretariat Daerah
2	Sekretariat DPRD							
C.4.02.01	Persentase fasilitasi dukungan terhadap penyelenggaraan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD	%	100	100	100	100	100	Sekretariat DPRD
5. Unsur Pendukung								
1	Perencanaan							
C.5.01.01	Nilai perencanaan kinerja dalam Evaluasi SAKIP Kabupaten	Point	24,05	24,05	21,80	24,65	24,95	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
2	Kuangan							
C.5.02.01	Rata-rata persentase penetapan APBD yang tepat waktu; laporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	%	100	100	100	100	100	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
C.5.02.02	Persentase Barang Milik Daerah yang telah dilengkapi dengan Dokumen Bukti Kepemilikan	%	80,77	83	83*	86	89	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
C.5.02.03	Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah	%	25,50	5,11	5,11*	5,18	5,24	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
C.5.02.04	Persentase PAD terhadap pendapatan	%	11,57	10,8	10,8*	10,91	11,01	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi dan Target					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Target 2024	Target 2025	
C.5.02.06	Persentase SILPA terhadap APBD	%	6,19*	2,44	2,44*	2,19	1,94	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
C.5.02.07	Penetapan APBD	Tepat Waktu/Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
C.5.02.08	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	%	65,51*	60	60*	61	62	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
C.5.02.09	Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	%	5,81*	4,59	4,59*	4,49	4,39	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
C.5.02.10	Rasio PAD	%	0,95*	1,24	1,24*	1,32	1,41	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
C.5.02.11	Opini Laporan Keuangan	Interpretasi	WTP	WTP	WTP*	WTP	WTP	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
C.5.02.12	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	4,14*	13,54	13,54*	13,44	13,34	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
C.5.02.13	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	12,45*	7,91	7,91*	7,81	7,71	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
C.5.02.14	Manajemen Aset		Ya*	Ya	Ya*	Ya	Ya	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
C.5.02.15	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	%	5,31*	1,67	1,67*	1,52	1,38	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
C.5.02.16	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya ==> pendapatan pemerintah/pdb	%	0,95*	1,24	1,24*	1,32	1,41	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
C.5.02.17	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB ==> pajak daerah/pdb	%	0,19*	0,25	0,25*	0,0027	0,0028	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
3	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan							

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi dan Target					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Target 2024	Target 2025	
C.5.03.01	Indeks Sistem Merit	Poin	309,5*	320	320*	357,5	357,5	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4	Penelitian dan Pengembangan							
C.5.04.01	Indeks Inovasi Daerah	Inovatif	50,42 (Inovatif)	49 (Inovatif)	43,12*	51 (Inovatif)	52 (Inovatif)	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
C.5.04.02	Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan oleh <i>stakeholder</i>	%	100	100	100	100	100	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
6. Unsur Pengawasan								
1	Pengawasan							
C.6.01.01	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan APIP yang selesai ditindaklanjuti	%	88,92	84	89,19	85	86	Inspektorat Daerah
C.6.01.02	Hasil leveling lembaga pengawasan	Level	2	3	3	3	3	Inspektorat Daerah

Sumber: LKPJ berbagai tahun

Keterangan:

(-) : Indikator sudah tidak digunakan lagi pada tahun 2023

(*) : data sementara

PENUTUP

BAB

7

Tasikmalaya
Religius/Islami,
Berdaya Saing
&
Sejahtera

BAB VII

PENUTUP

Tahun 2025 merupakan tahun kelima pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 dengan tema **“Pertumbuhan Ekonomi Melalui Peningkatan Daya Saing dan Inovasi Daerah”**. Perencanaan pembangunan Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2025 menggunakan pendekatan perencanaan berbasis Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS).

Perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 diimplementasikan dengan:

1. Tetap menjaga kesinambungan melalui penyesuaian 9 (sembilan) prioritas pembangunan daerah dengan 4 (empat) tujuan dan 8 (delapan) sasaran pembangunan daerah yang ada di dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026;
2. Memastikan konsistensi perencanaan dan penganggaran prioritas dan sasaran prioritas pembangunan daerah dengan pendekatan penganggaran berbasis program (*money follows program*), serta program prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2025;
3. Kolaborasi antar berbagai sumber pendanaan, antara lain pendanaan kabupaten, APBD Provinsi, APBN, CSR, dan hibah untuk membiayai pelaksanaan pembangunan Kabupaten Tasikmalaya;
4. Melibatkan secara aktif *stakeholder* di luar pemerintahan dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, dengan penerapan konsep spasial di dalam penjabaran prioritas pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya dalam rangka pemulihan ekonomi dan mencapai target sasaran pembangunan guna mewujudkan visi dan misi RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026.

Perwujudan prioritas pembangunan tersebut melalui sejumlah strategi dan arah kebijakan, serta program dan kegiatan. Rencana program dan kegiatan tahun 2025 selain diarahkan untuk mendukung

prioritas pembangunan, juga sebagai bentuk penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kewenangan kabupaten.

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan tahun 2025, terdapat beberapa hal penting yang harus diperhatikan, yaitu:

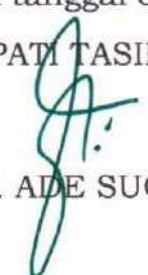
1. Sinergi multipihak dan koordinasi yang efektif, antar pemangku kepentingan yang meliputi pemerintah pusat dan daerah, akademisi, pelaku bisnis, masyarakat, dan media dalam pelaksanaan pembangunan untuk percepatan pembangunan berbagai sektor;
2. Perangkat Daerah menyempurnakan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Bupati tentang RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025;
3. RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan KUA dan PPAS, serta Rancangan APBD Tahun 2025;
4. Perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan pembangunan yang terintegrasi dan terpadu guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program sehingga mempunyai nilai manfaat tinggi bagi masyarakat Kabupaten Tasikmalaya; dan
5. Pelaksanaan pekerjaan dan penyerapan anggaran berdasarkan jadwal yang sudah ditetapkan serta didukung oleh pengendalian dan evaluasi yang cermat dan akurat.

Pada akhirnya, komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam mengawal, melaksanakan, dan mewujudkan pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 ini menjadi sangat penting. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya mengajak semua pemangku kepentingan untuk bersama-sama mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya yang religius/islami, berdaya saing dan sejahtera.

Ditetapkan di Kabupaten Tasikmalaya

Pada tanggal 3 Juli 2024

BUPATI TASIKMALAYA


H. ADE SUGIANTO



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA